KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPDP



TRANSFORMASI KOMODITAS PERKEBUNAN BAGI PERKENOMIAN BANGSA

Transformation of Plantation Commodities for the Nation's Economy

ANNUAL REPORT 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BPDP



Laporan Tahunan
Annual Report
2024



PERISTIWA PENTING

Significant Events

1.1 Peristiwa Penting
Significant Events

Februari

February



1 Februari 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali mengadakan Rapat Kerja Tahun 2024 di Bogor, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya serta merancang strategi menghadapi tahun 2024. Raker kali ini mengangkat tema "Sawit Melayani Lebih Baik," mencerminkan komitmen BPDPKS untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dana kelapa sawit. Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, yang memberikan arahan terkait perlunya riset dan penelitian yang mengaitkan ekonomi makro dan kinerja APBN dengan tugas utama BPDPKS dalam pengelolaan dana industri sawit. Dalam rapat kerja ini, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto, hadir untuk memberikan paparan terkait Belanja Negara, termasuk peraturan terkait Honorarium dan Perjalanan Dinas di lingkup Kementerian Keuangan. Beliau menyoroti bahwa "Kinerja BPDPKS, dengan anggarannya, menjadi penentu kinerja dari Direktorat Perbendaharaan, di mana realisasi di BPDPKS telah mencapai tingkat yang sangat baik dengan penyerapan anggaran nilai di atas 99%."

1 Februari 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali mengadakan Rapat Kerja Tahun 2024 di Bogor, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun sebelumnya serta merancang strategi menghadapi tahun 2024. Raker kali ini mengangkat tema "Sawit Melayani Lebih Baik," mencerminkan komitmen BPDPKS untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dana kelapa sawit. Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, yang memberikan arahan terkait perlunya riset dan penelitian yang mengaitkan ekonomi makro dan kinerja APBN dengan tugas utama BPDPKS dalam pengelolaan dana industri sawit. Dalam rapat kerja ini, Direktur Pelaksanaan Anggaran, Tri Budhianto, hadir untuk memberikan paparan terkait Belanja Negara, termasuk peraturan terkait Honorarium dan Perjalanan Dinas di lingkup Kementerian Keuangan. Beliau menyoroti bahwa "Kinerja BPDPKS, dengan anggarannya, menjadi penentu kinerja dari Direktorat Perbendaharaan, di mana realisasi di BPDPKS telah mencapai tingkat yang sangat baik dengan penyerapan anggaran nilai di atas 99%."

Maret

March



6 Maret 2024, Kegiatan Dhawafest Pesona 2024 diselenggarakan pada tanggal 5-7 Maret 2024 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi membuka pameran yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut. Diselenggarakan rutin setiap tahun, Dhawafest Pesona merupakan salah satu wujud kepedulian Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkeu dalam mendukung program pemerintah membangkitkan kembali para pelaku usaha khususnya UMKM, serta bersinergi untuk kemajuan UMKM semakin berkualitas. Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti ikut mengunjungi booth BPDPKS. Astera memberikan apresiasi kepada BPDPKS selaku BLU dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terus berupaya mewujudkan industri sawit berkelanjutan. Booth BPDPKS juga menampilkan salah satu mitra UKMK Sawit yang memproduksi inovasi batik dengan memanfaatkan lilin batik dari sawit yaitu UKMK Sm-art Batik.

On March 6, 2024, the Dhawafest Pesona 2024 event was held from March 5 to 7, 2024, at the Dhanapala Building, Ministry of Finance. The Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, officially opened the exhibition that lasted for three days. Held annually, Dhawafest Pesona is one of the manifestations of the Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkeu's commitment to supporting government programs aimed at revitalizing business actors, especially MSMEs, and synergizing to advance the quality of MSMEs.On this occasion, the Director General of Treasury, Astera Primanto Bhakti, visited the BPDPKS booth. Astera expressed appreciation to BPDPKS as a Public Service Agency (BLU) under the Directorate General of Treasury for its continuous efforts to realize a sustainable palm oil industry. The BPDPKS booth also featured one of its palm oil MSME partners that produces innovative batik by utilizing palm oil batik wax, namely UKMK Sm-art Batik.



14 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara Pada Kamis, 14 Maret 2024. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia ini menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan petani. Indonesia, dengan lahan kebun kelapa sawit seluas 15,3 juta hektare, 40,5 persen di antaranya dimiliki oleh petani sawit, terus berupaya meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri. Kehadiran pabrik pertama yang memproduksi minyak makan merah diharapkan memberikan nilai tambah signifikan bagi petani sawit.

On March 14, 2024, President Joko Widodo inaugurated the pilot red cooking oil factory in Pagar Merbau, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The inauguration of Indonesia's first red cooking oil factory marks a significant step forward in the national palm oil industry and farmer empowerment.Indonesia, with 15.3 million hectares of palm oil plantations—40.5 percent of which are owned by smallholder farmers—continues to strive to increase the added value of domestic production. The establishment of the first factory producing red cooking oil is expected to provide significant added value for palm oil farmers.

Maret

March



14 Mei 2024, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Didyk Choiroel, melakukan kunjungan kerja ke kantor BPDPKS. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mengenal lebih dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

On May 14, 2024, the Director General of Treasury of the Ministry of Finance, Astera Primanto Bhakti, along with the Secretary of the Directorate General of Treasury, Didyk Choiroel, conducted a working visit to the BPDPKS office. The purpose of this visit was to gain a deeper understanding of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) as a Public Service Agency under the Directorate General of Treasury.

Juli

July

11 Juli 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menampilkan berbagai macam produk UKM sawit dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2024 pada tanggal 10-12 Juli 2024 di Jakarta Convention Center. Kegiatan yang dilakukan di both berupa kampanye positif sawit, penayangan video program Kemitraan UKMK Sawit, display beragam produk turunan sawit serta penayangan video program-program BPDPKS. Produk-produk UKMK sawit yang ditampilkan antara lain rompi anti peluru dari tandan kosong sawit, sabun cuci tangan sawit,minuman tradisional dengan krimer sawit, helm proyek dari sawit, helm sepeda sawit, helm motor dari sawit serta beragam kerajinan berbahan lidi sawit.



Pada kesempatan pameran Booth BPDPKS di kunjungi oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mendapatkan penjelasan tentang produk turunan kelapa sawit yaitu helm sepeda dari tandan kosong kelapa sawit yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia, batik dari malam sawit yang juga telah disosilisasikan kepada UKM dan produk rompi anti peluru dari tandan kosong kelapa sawit. Wapres Terpilih juga turut mengkampanyekan kebaikan sawit dengan maskot sawit baik yakni boneka Sasa.

On July 11, 2024, the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) showcased a variety of palm oil MSME products at the Association of Indonesian Regency Governments (Apkasi) Autonomy Expo 2024, held from July 10 to 12, 2024, at the Jakarta Convention Center. The activities at the booth included a positive palm oil campaign, screening of the Palm Oil MSME Partnership program videos, displays of various palm oil derivative products, and videos of BPDPKS programs.The displayed palm oil MSME products included bulletproof vests made from empty palm oil bunches, palm oil hand soap, traditional drinks with palm oil creamer, construction helmets made from palm oil materials, bicycle helmets made from palm oil, motorcycle helmets made from palm oil, and various crafts made from palm oil fronds.During the exhibition, the BPDPKS booth was visited by the Vice President-Elect, Gibran Rakabuming Raka, who received explanations about palm oil derivative products such as bicycle helmets made from empty palm oil bunches that have obtained the Indonesian National Standard, batik made from palm oil wax which has also been socialized to MSMEs, and bulletproof vests made from empty palm oil bunches. The Vice President-Elect also participated in promoting the benefits of palm oil with the palm oil mascot, Sasa the doll.

Juli

July

11 Juli 2024, Museum Perkebunan Indonesia-1 yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Medan Sumatera Utara kini menghadirkan Ruang ImersifINmusperIN dan telah resmi diluncurkan kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Bapak Eddy Abdurrachman. Dengan diresmikannya ruang ImersifINmusperIN ini sekaligus dilakukan sosialisasi dengan Media dan Masyarakat agar keberadaan ruang ImersfINmusperIN dapat dikenal oleh masyarakat luas. Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Museum Perkebunan Indonesia yang telah menyelesaikan pembangunan ruang imersif untuk edukasi kelapa sawit.



Harapannya pembangunan ruang imersif ini menjadi program edukasi kelapa sawit khususnya kepada masyarakat umum termasuk Generasi Milenial dan Gen-Z yang merupakan generasi produktif yang menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia.

On July 11, 2024, the Indonesian Plantation Museum-1, located on Jalan Brigjen Katamso, Medan, North Sumatra, officially launched the ImersifINmusperIN Room. The launch ceremony was conducted by the President Director of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), Mr. Eddy Abdurrachman, on Thursday, July 11, 2024. Along with the inauguration, a socialization event was held with the media and the public to raise awareness about the ImersifINmusperIN Room among the wider community.BPDPKS President Director Eddy Abdurrachman expressed his highest appreciation to the Indonesian Plantation Museum for completing the construction of the immersive room dedicated to palm oil education.It is hoped that the development of this immersive room will serve as an educational program on palm oil, especially for the general public, including the Millennial and Gen-Z generations, who are productive generations and key to the advancement of the Indonesian nation.



16 Juli 2024, BPDPKS promosikan helm sepeda sawit kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Salah satu produk UKM dari bahan kelapa sawit adalah helm sepeda. Helm sepeda menjadi salah satu bagian penting dalam standar keselamatan olahraga bersepeda. Untuk mempromosikan penggunaan helm sepeda dari tandan kosong kelapa sawit untuk kegiatan olahraga Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BPDPKS, Helmi Muhansyah menyerahkan helm sepeda dari sawit kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo saat melakukan kunjungan ke booth BPDPKS, pada hari terakhir kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Expo 2024 pada tanggal 12 Juli 2024 di Jakarta Convetion Centre.

On July 16, 2024, BPDPKS promoted palm oil bicycle helmets to the Minister of Youth and Sports. One of the MSME products made from palm oil materials is the bicycle helmet. Bicycle helmets are an essential part of safety standards in cycling sports. To promote the use of bicycle helmets made from empty palm oil bunches for sports activities, the Head of the Small and Medium Enterprises and Cooperatives Division at BPDPKS, Helmi Muhansyah, handed over a palm oil bicycle helmet to the Minister of Youth and Sports, Dito Ariotedjo, during his visit to the BPDPKS booth on the last day of the Association of Indonesian Regency Governments (Apkasi) Expo 2024 held on July 12, 2024, at the Jakarta Convention Center.

Agustus

August



20 Juli 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan Sertifikat Penerima Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat kepada 5 Lembaga pekebun kelapa sawit di kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut hadir Bapak Erlangga Hartanto (menko RI) bersama Direktur BPDPKS) menyerahkan Kredit Usaha Rakyar (KUR) dan Penyerahan Corporate Social Reponsibility (CSR). Airlangga Hartato secara simbolis juga menyerahkan dana PSR sebesar Rp11,2 miliar yang didistribusikan kepada 184 pekebun, dengan total areal seluas 373,51 Ha.

On July 20, 2024, the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), together with the Coordinating Ministry for Economic Affairs, awarded Fund Recipient Certificates for the Smallholder Palm Oil Replanting Program to five palm oil farmer groups in Palembang City, South Sumatra Province.The event was attended by Mr. Erlangga Hartanto (Coordinating Minister for Economic Affairs) along with the Director of BPDPKS, who handed over People's Business Credit (KUR) and Corporate Social Responsibility (CSR) funds. Symbolically, Airlangga Hartarto also handed over PSR funds amounting to IDR 11.2 billion, which were distributed to 184 farmers covering a total area of 373.51 hectares.



20 Agustus 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan soft launching Biodiesel B50 di Kalimantan Selatan, dilansir dari pertanian.go.id merupakan sejarah kemandirian energi nasional yang menjadi mimpi besar Indonesia untuk 5 hingga 10 tahun kedepan. Mentan Amran menceritakan bahwa pemerintah telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak tahun 2019 dimana terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100% minyak kelapa sawit (B100).

Mentan yakin prototipe dan uji-uji biodiesel serupa telah banyak dijalankan oleh Kementerian/Lembaga teknis dan Industri biodiesel walaupun masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri.

On August 20, 2024, the Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, conducted the soft launch of Biodiesel B50 in South Kalimantan. According to pertanian.go.id, this marks a historic milestone in Indonesia's national energy independence, a major dream for the country over the next 5 to 10 years.Minister Amran explained that the government began the initiative to utilize palm oil in the biodiesel program since 2019, when a prototype biodiesel made from 100% palm oil (B100) was developed. The Minister is confident that similar biodiesel prototypes and tests have been widely carried out by technical ministries/agencies and the biodiesel industry, although currently still limited to meeting their own consumption needs.

Oktober

October

18 Oktober 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) turut ambil bagian dalam gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Banten pada 9-12 Oktober 2024. Kegiatan TEI dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. TEI sendiri merupakan pameran dagang internasional dari Kementerian Perdagangan yang berfokus pada B2B (business-to-business) dan ajang transaksi di antara para pelaku bisnis. Zulkifli Hasan dan Duta Besar, Wajid Fauzi yang ikut berkunjung di booth BPDPKS. Mendag memberikan apresiasi terhadap produk yang dihasilkan mitra-mitra BPDPKS dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan BPDPKS untuk kegiatan TEI 2024.



On October 18, 2024, the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) participated in the Trade Expo Indonesia (TEI) held at the Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, South Tangerang, Banten, from October 9 to 12, 2024. The event was officially opened by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo.TEI is an international trade exhibition organized by the Ministry of Trade, focusing on business-to-business (B2B) activities and transactions among business actors. Zulkifli Hasan and Ambassador Wajid Fauzi also visited the BPDPKS booth. The Minister of Trade expressed appreciation for the products produced by BPDPKS partners and thanked BPDPKS for its support of the TEI 2024 activities.



1.2 Penghargaan BPDPKS

Awards BPDPKS Received

BPDPKS mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 2024, antara lain:
BPDPKS received several awards in 2024, including:

BPDPKS memperoleh penghargaan Juara Kategori Edukatif APKASI Expo 2024

BPDPKS won the Champion Award in the Educational Category at APKASI Expo 2024.



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapatkan Penghargaan Juara Kategori Edukatif APKASI Expo 2024 dengan tema Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ini diberikan pada penutupan kegiatan Apkasi Otonomi Expo dan Apkasi Procurement Network.

Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah lewat siaran persnya kepada elaeis.co menyampaikan, dalam rangka mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit serta memperkenalkan kepada masyarakat berbagai produk yang dihasilkan dari kelapa sawit dan turunannya.

The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received the Champion Award in the Educational Category at APKASI Expo 2024 with the theme "Enhancing Regional Competitiveness Towards Golden Indonesia 2045." This award was presented during the closing ceremony of the Apkasi Autonomy Expo and Apkasi Procurement Network activities.The Head of the MSME Division at BPDPKS, Helmi Muhansyah, stated in a press release to elaeis.co that this achievement is part of the campaign to promote the benefits of palm oil and to introduce the public to various products made from palm oil and its derivatives.

BPDPKS mendapatkan penghargaan Booth Terbaik Kategori Terfavorit Kegiatan InaRI Expo 2024

BPDPKS received the award for Best Booth in the Favorite Category at the InaRI Expo 2024.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapatkan Penghargaan Booth terbaik Kategori Terfavorit dalam kegiatan Indonesian Research and Inovation (InaRI) Expo 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8-11 Agustus 2024 di Gedung Inovation Convention Center, KST Soekarno BRIN Bogor. Penghargaan diberikan oleh Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kepada BPDPKS yang diwakili oleh Kepala Divisi UKMK BPDPKS Helmi Muhansyah pada puncak penutupan acara pada 11 Agustus 2024.



InaRI Expo 2024 diselenggarakan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) bersamaan dengan hari Kebangkitan Teknologi Nasonal pada 10 Agustus dan dibuka oleh Presiden RI ke 5 yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri. Tema yang diambil adalah Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju.

The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received the Best Booth award in the Favorite Category at the Indonesian Research and Innovation (InaRI) Expo 2024 held from August 8 to 11, 2024, at the Innovation Convention Center building, KST Soekarno, BRIN Bogor. The award was presented by the Head of BRIN, Laksana Tri Handoko, to BPDPKS, represented by the Head of the MSME Division, Helmi Muhansyah, during the closing ceremony on August 11, 2024.InaRI Expo 2024 was organized by the National Research and Innovation Agency (BRIN) coinciding with National Technology Awakening Day on August 10 and was officially opened by the 5th President of Indonesia, who is also the Chairperson of the BRIN Steering Committee, Megawati Soekarnoputri. The theme of the event was "Research and Innovation for an Advanced Indonesia."

BPDPKS mendapatkan penghargaan Best Partner dari BBSPJIKB Kementerian Perindustrian Peringatan Hari Batik Nasional 2024

BPDPKS received the Best Partner award from BBSPJIKB, Ministry of Industry, on the occasion of National Batik Day 2024.



Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapatkan Penghargaan Best Partner dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian dalam kegiatan Puncak Peringatan Hari Batik Nasional 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 di Situs bersejarah candi Prambanan, Yogyakarta. Hari Batik Nasional 2024 diselenggarakan oleh BBSPJIKB, Kementerian Perindustrian mengambil tema Tradisi dan Inovasi dalam Harmoni.

The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received the Best Partner award from the Center for Standardization and Industrial Services for Crafts and Batik (BBSPJIKB), Ministry of Industry, during the National Batik Day 2024 celebration held on October 14, 2024, at the historic Prambanan Temple site, Yogyakarta.The 2024 National Batik Day event was organized by BBSPJIKB, Ministry of Industry, with the theme "Tradition and Innovation in Harmony."

BPDPKS menerima penghargaan sebagai "Lembaga Pendukung Sawit NU" dari Lembaga PBNU

BPDPKS received the award as the "NU Palm Oil Support Institution" from the PBNU Institution.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima penghargaan sebagai "Lembaga Pendukung Sawit NU" dari Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penghargaan ini diberikan dalam acara peluncuran Program "Sawit Goes to Pesantren" yang berlangsung pada 25 Oktober 2024 di Hotel Acacia, Jakarta. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyerahkan penghargaan tersebut kepada BPDPKS yang diwakili oleh Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDPKS menjadi salah satu pemangku kepentingan utama dalam Program "Sawit Goes to Pesantren" yang bertujuan mempromosikan kelapa sawit sebagai alternatif utama untuk ketahanan pangan dan energi.



The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received an award as the "NU Palm Oil Support Institution" from the Agricultural Development Institution of Nahdlatul Ulama Central Board (PBNU). This award was presented during the launch event of the "Sawit Goes to Pesantren" Program held on October 25, 2024, at Hotel Acacia, Jakarta.The Chairman of PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, handed the award to BPDPKS, represented by the Head of the MSME Division at BPDPKS, Helmi Muhansyah. As a Public Service Agency under the Ministry of Finance, BPDPKS is one of the key stakeholders in the "Sawit Goes to Pesantren" Program, which aims to promote palm oil as a primary alternative for food and energy security.

BPDPKS memperoleh penghargaan dari Dekranasda Kota Yogyakarta Lomba Batik Sawit Nasional 2024.

BPDPKS received an award from the Regional National Crafts Council (Dekranasda) of Yogyakarta City at the 2024 National Palm Oil Batik Competition.



Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memperoleh penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta pada puncak kegiatan Lomba Batik Sawit Nasional 2024 yang dilaksanakan pada bulan September 2024, bertempat di Taman Pintar, Yogyakarta.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Harian Dekranasda Kota Yogyakarta, Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H.,M.Si. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Dekranasda Kota Yogyakarta kepada BPDPKS karena telah ikut berperan aktif dalam mendorong perkembangan batik Indonesia melalui berbagai kegiatan dan fasilitasi. BPDPKS telah mendorong tumbuh kembangnya industri batik berbasis kelapa sawit di Indonesia.

The Small and Medium Enterprises and Cooperatives Division (UKMK) of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received an award from the Regional National Crafts Council (Dekranasda) of Yogyakarta City during the peak event of the 2024 National Palm Oil Batik Competition held in September 2024 at Taman Pintar, Yogyakarta.The award was presented directly by the Deputy Chairperson of Dekranasda Yogyakarta City, Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H., M.Si. This recognition was given as an appreciation from Dekranasda Yogyakarta City to BPDPKS for its active role in supporting the development of Indonesian batik through various activities and facilitation. BPDPKS has encouraged the growth of the palm oil-based batik industry in Indonesia.

BPDPKS meraih penghargaan sebagai Tata Pengelola Dana Sawit Berintegritas dalam gelaran Sawit Indonesia Award 2024

BPDPKS received the award for Integrity in Palm Oil Fund Management at the Sawit Indonesia Award 2024.



Majalah Sawit Indonesia akan memberikan 42 penghargaan kepada perusahaan, lembaga, dan tokoh kelapa sawit dalam gelaran Sawit Indonesia Award 2024. Pelaksanaan acara ini akan berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia tersebut juga mengatakan bahwa penghargaan Sawit Indonesia Award didasarkan pada survei pembaca dan rekam jejak kinerja dari masing-masing peraih penghargaan. Selain itu, penilaian ini juga diketuai oleh Sahat Sinaga, praktisi kelapa sawit yang memiliki pengalaman di sektor hulu dan hilir sawit.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meraih penghargaan sebagai Tata Pengelola Dana Sawit Berintegritas, yang diterima langsung oleh Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama BPDPKS.

Sawit Indonesia Magazine will present 42 awards to companies, institutions, and figures in the palm oil sector during the Sawit Indonesia Award 2024 event. The ceremony will be held at the Royal Kuningan Hotel, South Jakarta.The Editor-in-Chief of Sawit Indonesia Magazine also stated that the Sawit Indonesia Award is based on reader surveys and the performance track record of each award recipient. Additionally, the assessment is chaired by Sahat Sinaga, a palm oil practitioner with experience in both upstream and downstream sectors.The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received the award for Integrity in Palm Oil Fund Management, which was accepted directly by Eddy Abdurrachman, President Director of BPDPKS.

1.3 Jejak Langkah

Milestones

2014 2015

Ketergantungan terhadap BBM impor membuat neraca perdagangan migas defisit
Dependence on imported fuel has created a deficit in the oil and gas trade balance

- Januari : Harga CPO menurun secara signifikan akibat kemerosotan harga minyak mentah dan kelebihan pasokan CPO di pasar domestik. Petani sawit terkena dampak penurunan harga CPO. Program biodiesel tidak berjalan.
- Februari : Semua pemangku kepentingan berupaya menjaga stabilitas harga CPO. Kemenko Perekonomian memanggil seluruh pemangku kepentingan di industri Sawit (Kementerian Keuangan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian) dan pelaku industri (pengusaha, perkebunan, biodiesel, otomotif dan petani).
- April : Finalisasi regulasi pembentukan BPDPKS Draft regulasi diuji Pemerintah.
- Mei : Pemerintah menerbitkan BPDPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang
- Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Juni : BPDPKS resmi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) non struktural
- Juli : operasi BPDPKS mulai berjalan
- Agustus : BPDPKS menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan launching biodiesel B-15. BPDPKS menyalurkan dana subsidi untuk pertama kalinya ke Pertamina. Penetapan denda Rp6000/ liter atas dana subsidi yang wajib dicampur. Tender PSO pertama melalui pembiayaan BPDP sebesar 1,8 juta kilo liter. Harga kelapa sawit meningkat.

- January : CPO price decreased significantly due to the slump in crude oil prices and the oversupply of CPO in the domestic market. Palm oil farmers are affected by the decline in CPO price. The biodiesel program is not running.
- February : All stakeholders strive to maintain CPO price stability. The Coordinating Ministry for the Economy calls on all stakeholders in the palm oil industry (Ministry of Finance, Energy and Mineral Resources, Trade, Industry, Agriculture) and industry players (entrepreneurs, plantations, biodiesel, automotive and farmers).
- April : Finalization of regulations for the establishment of BPDPKS. The draft regulation is examined by the Government.
- May : Government issues BPDPKS in the form of Government Regulation (PP) and Presidential Regulation (Perpres). Presidential Regulation No. 24 of 2016 dated March 15, 2016 regarding Amendments to Presidential Regulation No. 61 of 2015 regarding the collection and Use of Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- June : BPDPKS officially becomes a non-structural Public Service Agency (BLU)
- July : BPDPKS starts operating
- August : BPDPKS signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the cooperation in developing sustainable palm oil and launching biodiesel B-15. BPDPKS distributed subsidy funds for the first time to Pertamina. Determination of a fine of Rp6000/liter for subsidy funds that must be mixed. The first PSO tender was through BPDP financing of 1.8 million kilo liters. Palm oil price is rising.

2018

Pelaksanaan implementasi program mandatori biodiesel 20% (B20) pada seluruh sektor
Implementation of mandatory 20% biodiesel (B20) program implementation in all sectors

2019

- Launching Road Test B30
- Launching Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Penyaluran Biodiesel melalui
- Aplikasi Biodiesel.
- Launching Road Test B30
- Launching of Utilization of Biodiesel Distribution Information Technology System through
- Biodiesel Application.

2020

- Penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Bahan Bakar Nabati antara Badan Litbang ESDM, BPDPKS, Pupuk Indonesia, Pertamina dan ITB. Ruang lingkup MoU ini adalah dalam rangka optimalisasi dan pemanfataan hasil penelitian dan pengembangan bahan bakar nabati berupa penelitian, pengembangan pabrik percontohan pabrik bahan bakar diesel biohidrokarbon dan bioavtur.
- Seremoni Penandatanganan 14 perjanjian Penelitian dan Pengembangan dalam kerangka pendanaan dari BPDPKS pada 24 Juni 2020 dengan otal dana yang disetujui sebesar Rp27,5 milliar
- Pelaksanaan seminar daring Pekan Riset Nasional (Perisai) dengan tema " MAHAKARYA INOVASI SAWIT NASIONAL :Fostering Innovation for Oil Palm Sector Resilience Facing COVID-19 Pandemic" pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan narasumber Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PASPI
- Seleksi mahasiswa penerima beasiswa sawit yang dilakukan oleh BPDPKS bekerjasama dengan ALPENSI (Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sawit Indonesia) yang dilakukan pada 22 Juni – 15 September 2020 dan diumumkan pada halaman resmi bpdp.go.id.
- Signing of a Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Research and Development of Biofuels between the ESDM Research and Development Agency, BPDPKS, Pupuk Indonesia, Pertamina and ITB. The scope of this MoU is in the context of optimizing and utilizing the results of research and development of biofuels in the form of research, development of pilot factories for biohydrocarbon diesel fuel plants and bioavtur.
- The signing ceremony of 14 Research and Development agreements within the framework of funding from BPDPKS on June 24, 2020 with a total approved fund of Rp. 27.5 billion
- Implementation of the National Research Week (Shield) online seminar with the theme "NASIONAL PALM INNOVATION MASTERS: Fostering Innovation for Oil Palm Sector Resilience Facing COVID-19 Pandemic" on October 20, 2020 with speakers from the Coordinating Ministry for Economic Affairs and PASPI
- Selection of palm oil scholarship recipients conducted by BPDPKS in collaboration with ALPENSI (Association of Indonesian Palm Oil Education and Training Institutions) which was conducted on June 22 – September 15, 2020 and announced on the official page bpdp.go.id.

2021

Kementerian Pertanian dan BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit telah menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien termasuk melalui pola kemitraan antara perusahaan dan petani kelapa sawit. Salah satu upaya percepatan realisasi PSR ini adalah dengan dilakukannya Penandatanganan Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan, di Gedung Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Selasa (09/03).
Penandatanganan Kerja Sama pelaksanaan PSR antara 6 Perusahaan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan 1 Perusahaan Milik Negara yaitu PTPN VI dengan 18 KUD/Koperasi/Gapoktan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang berasal dari 6 Kabupaten yaitu Kotabaru (Kalsel), Serdang Bedagai (Sumut), Muaro Jambi dan Merangin (Jambi), Kampar dan Indragiri Hulu (Riau), dengan total luas lahan dalam perjanjian PSR ini sebesar 18.821 hektare.
Badan Penggelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia (MBI) mengadakan kegiatan kemitraan penyusunan master plan, road map, dan value chain analisis pengelolaan hasil kebun sawit rakyat swadaya di Kabupaten Pelalawan.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali menyelenggarakan Program Grant Riset Sawit, untuk periode penetapan Tahun 2021. Pada kegiatan ini terdapat 25 Perjanjan Kontrak Kerja sama (PKS) penelitian dan 2 MoU kerja sama untuk 3 penelitian yang ditandatangani.
Total dana yang disetujui untuk 28 penelitian baru ini adalah sekitar Rp42.4 Milyar dengan pendanaan multiyear 1 sampai dengan 3 tahun.
Berdasarkan kesepakatan para pihak dan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),
Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan PT. Dirgantara Indonesia (DI), pada Senin 6 September 2021 telah dilakukan Ground Test Bioavtur J2.4 menggunakan pesawat CN-235 FTB di PT. Dirgantara Indonesia Bandung. Rangkaian pengujian yang dilakukan selama Ground Test antara lain refueling Bioavtur J2.4 di lapangan terbang, yang dilanjutkan dengan Ground Run Pesawat CN-235 FTB.

2021

- The Ministry of Agriculture and BPDPKS with all stakeholders of palm oil industry have arranged a mechanism of people's palm oil replanting which is more effective and efficient including through partnership pattern between company and palm oil farmers. One of the efforts to accelerate this PSR realization is through an Execution of People's Palm Oil Replanting Cooperation by A Partnership, at Graha Sawala Building, the Coordinating Ministry for Economic Affairs, on Tuesday (09/03). The Execution of Cooperation for PSR implementation among 6 Member companies of Joint Venture of Indonesian Palm Oil Association (GAPKI) and 1 State Owned Enterprise namely PTPN VI with 18 KUD/Cooperatives/Farmers' Associations (Gapoktan), members of Indonesian Palm Oil Farmers Association (APAKSINDO) emerged comprised of 6 Regencies namely Kotabaru (South Kalimantan), Serdang Bedagai (North Sumatra). Muaro Jambi and Merangin (Jambi), Kampar and Indragiri Hulu (Riau), with a total area included in this PSR agreement amounting to 18,821 hectares.
- Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) collaborates with Indonesian Bio-hydrocarbon Society (MBI) to conduct partnership activities of arranging master plan, road map, and value chain analysis of management of people's palm oil outputs in Pelalawan Regency.
- Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) held again a Palm Oil Research Grant program for the period of stipulation of 2021. In this activity, 25 Research Cooperation Agreements (PKS) had been made and 2 MoU on cooperation for 3 researches have been signed.
- The total fund agreed for these 28 new researches is IDR42.4 Billion with multiyear funding of 1 to 3 years.
- Based on the agreement of parties and cooperation by Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), Institut Teknologi Bandung (ITB) with PT. Dirgantara Indonesia (DI), on Monday 6 September 2021, Ground Test Bioavtur J2.4 has been conducted, using CN-235 FTB aircraft in PT. Dirgantara Indonesia
- Bandung. The set of tests performed during Ground Test are among others refueling Bioavtur j2.4 test in the airfield, proceeded with Ground Run test using CN-235FTB aircraft.

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaksanakan seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit pada Kamis, (09/09) bertempat di ruang rapat Nusantara I kantor BPDPKS. PKS Sarana Prasarana ini berupa dukungan pendanaan kepada koperasi untuk peningkatan jalan kebun sepanjang 11,7 Km yang melingkupi kebun sawit petani seluas 144,9 Ha di Kabupaten Merangin, Jambi.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerapkan mekanisme baru dalam proses pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
- Hal ini disosialisasikan oleh BPDPKS di sela kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Penyaluran Dana PSR Tahun 2021 Tahap IV untuk wilayah Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada Kamis, (16/09), di Bogor.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB University) meluncurkan Produk Inovasi Rendang
- Seasoning Mix Berbahan Krimer Minyak Sawit pada Sabtu, 4 Desember 2021. Peluncuran yang dilaksanakan di Hotel Salak The Heritage secara hybrid (online dan offline) ini merupakan rangkaian kegiatan pengembangan kemitraan UKMK Sawit.
- Industrial Vegetable Oil (IVO) diperkenalkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan PT. Kemurgi Indonesia melalui pendanaan penelitian oleh BPDPKS. IVO dihasilkan dari pembersihan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) dari zat-zat yang dapat mempengaruhi
- kualitas minyak sawit seperti getah dan logam alkali. IVO dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biohidrokarbon dengan mensyaratkan rendahnya kandungan logam dan alkali logam yang dapat meracuni katalis greenfuel dalam prosesnya.
- Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) yang diketuai oleh Anggit Raksajati, S.T., Ph.D. telah berhasil mendemonstrasikan teknologi pemurnian biogas menjadi biometana untuk BBG via absorpsi CO2 dengan air pada skala kapasitas laju alir biogas 60 m3/jam. Penelitian telah dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 melalui pendanaan penelitian dari BPDPKS, mulai dari desain, instalasi, produksi biomatane dan pengujian pada kendaraan.
- Program beasiswa pendidikan telah dilaksanakan untuk semester 1 dan bulan ke 3 Desember 2021, yang diberikan kepada mahasiswa program pendidikan Beasiswa Angkatan 2021 sebanyak 660 mahasiswa sesuai rekomtek Dirjenbun.Program Pelatihan Pengembangan SDM PKS Tahun 2021 telah dilaksanakan di 3 provinsi yaitu; Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah yang diikuti sebanyak 501 peserta dari 2510 peserta yang direkomendasikan oleh Dirjenbun sesuai jadwal terlampir. Total jumlah pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2021 adalah sebanyak 16 kelas/Angkatan.

- Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) conducted a ceremony of Execution of Cooperation Agreement (PKS) of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure on Thursday, (09/09) located in Nusantara I meeting room in BPDPKS office. This PKS of Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure includes funding support to the cooperatives for the purpose of road improvement along 11.7Km including farmers' palm oil plantation area of 144.9Ha in Merangin regency, Jambi.
- Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) implements a new mechanism in the process of funds disbursement of People's Oil Palm Replanting Program (PSR). This shall be introduced by BPDPKS during the activity of Execution of Cooperation Agreement (PKS) among 3 Funding Parties for PSR 2021 IV Phase for the regions of Aceh, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Bangka Belitung and Central Kalimantan, held on Thursday, (16/09), in Bogor.
- Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) collaborated with Institut Pertanian Bogor (IPB) to launch an Innovation, Mixed Seasoning Rendang
- using Palm Oil Creamer on Saturday, 4 December 2021. This launching was held in Hotel Salak The Heritage in a hybrid way (online and offline). It is a series of activities of partnership development activity of Palm Oil Small and Medium-Size Enterprise and Cooperative (UKMK).
- Industrial Vegetable Oil (IVO) was introduced through a research conducted by Institut Teknologi Bandung (ITB) with PT. Kemurgi Indonesia by research fund by BPDPKS. IVO is produced from crude palm oil cleaning from any substances which may affect the quality of palm oil including the content of metal and alkali
- metals which can toxicate the green fuel catalyst within the process.
- Team of the Institute for Research and Community Services of Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) chaired by Anggit Raksajati, S.T., Ph.D. successfully demonstrated biogas-to-biomethane purification technology for BBG through absorption of CO2 with water at the scale of biogas water current capacity by 60m3/hours. The study has commenced from 2019 to 2021 by research funding by BPDPKS, from design, installation, biomethane production, and test in vehicle.
- The educational scholarship program has been implemented for semester 1 and the 3rd month of December 2021, which was given to students of the 2021 Class of 2021 Scholarship education program as many as 660 students according to the director general's recommendation.The 2021 PKS Hr Development Training Program has been implemented in 3 provinces, namely; Riau, South Sumatra and Central Kalimantan were attended by 501 participants from 2510 participants
- recommended by the Director General of Agriculture according to the attached schedule. The total number of trainings carried out in 2021 is 16 classes/batches.

2022

- BPDPKS menindaklanjuti keputusan Pemerintah untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. BPDPKS memberikan dukungan pendanaan untuk selisih harga Minyak goreng. Pemerintah memastikan agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.
- BPDPKS mengadakan Perjanjian Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi antara BPDPKS dengan BPS yang mengangkat tema “Satu Data, Satu Suara Sawit Indonesia” yang dilaksanakan secara hybrid pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Bapak Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS dengan Bapak Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama BPS.
- Bekerjasama dengan tiga anak perusahaan sawit Sinar Mas Agribusiness and Food. Kamis, 24 Februari 2022 di Kandis Riau, BPDPKS menunjukkan Kemitraan Strategis Perusahaan dan Petani Swadaya dengan total lahan seluas 2.100 hektar untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dalam kesempatan ini Menteri Airlangga selain menyempatkan melakukan penanaman Perdana, Panen Sawit dan pemupukan lahan juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak PSR BPDPKS, Bank Riau Kepri dan Gapoktan Pandan Jaya Riau.
- Pada tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan Kegiatan penanaman perdana PSR di Kabupaten Muara Enim. Turut serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, Ketua PWNU Sumatera Selatan K.H. Amiruddin Nahrawi, Bupati Muara Enim Nasrun Umar, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan para tokoh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman perdana kelapa sawit, dilanjutkan sosialisasi program PSR kepada Gapoktan, petani, masyarakat dan para tokoh masyarakat. Serta penyerahan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada Koperasi Maju Bersama, Gapoktan Sepakat dan Koperasi Serasan Mulya Oleh Direktur Utama BPDPKS yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama 3 Pihak yang diserahkan ke Lembaga Pekebun.

- BPDPKS followed up Government decision to enhance efforts in closing the gap in cooking oil price in order to fulfill households', micro industries', and small industries' needs. This policy was based on the results of evaluation taking into consideration the availability and affordability of cooking oil price for people. BPDKPS provided funding aid for cooking oil price gap. The Government ensured that people can obtain affordable packaged cooking oil price at Rp14,000 per liter. This gap closing effort is not only provided to 1 liter-packaged cooking oil, but also to 2 liter-, 5 liter- and 25 liter-packaged cooking oil.
- BPDKPS entered into Data and Information Exchange Cooperation Agreement between BPDKPS and BPS raising a theme of "One Data, One Indonesian Palm Oil Voice" conducted in hybrid on Tuesday, 25 January 2022, at 10.00 WIB in Borobudur Hotel, Central Jakarta. Whereas the Cooperation Agreement signing was performed between Mister Eddy Abdurrachman, the President Director of BPDKPS, and Mister Atqo Mardiyanto, the Main Secretary of BPS.
- In cooperation with three palm oil subsidiaries of Sinar Mas Agribusiness and Food. On Thursday, 24 February 2022 in Kandis Riau, BPDKPS showed a Strategic Partnership of the Company with Self-Subsistent Farmers with a total land area of 2,100 hectares for People's Palm Oil Replanting Program (PSR). In this occasion, the Minister, Airlangga, besides taking the time to participate in Initial planting, Palm Harvest and land fertilization, also witnessed the signing of the Tripartite PSR Cooperation Agreement of BPDKPS, Bank Riau Kepri and Pandan Jaya Riau Farmers Association.
- On 4 March 2022, PSR initial planting activity has been performed in Muara Enim Regency, attended by the Coordinating Minister of Economy, Airlangga Hartanto, Minister of Industry, Agus Gumiwang Kartasasmita, Deputy Minister of Trade, Jerry Sambuaga, President Director of BPDKPS, Eddy Abdurrachman, Governor of South Sumatera, Herman Deru, General Chairman of PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf, Chairman of South Sumatera PWNU, K.H. Amiruddin Nahrawi, Regent of Muara Enim, Nasrun Umar, Deputy of Food and Agribusiness Coordination of the Coordinating Ministry of Economy, Musdhalifah Machmud, and community figures. The series of events begun with palm oil initial planting, continued with PSR program socialization to Farmers Association, farmers, community and community figures, as well as Handover of People's Palm Oil Replanting Program (PSR) to Maju Bersama Cooperative, Sepakat Farmers Association and Serasan Mulya Cooperative by the President Director of BPDKPS evidenced in a Tripartite Cooperation Agreement handed over to the Farmers Organizations.

- Pemerintah melalui BPDPKS berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS pada Minggu (28/08), diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US$0 untuk semua produk s.d. 31 Oktober 2022, Penambahan Alokasi Biodiesel Tahun 2022, Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (3M), Dukungan Percepatan Peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
- Peneliti dari Politeknik Negeri Media Kreatif, Gema Sukmawati Auryadi telah berhasil menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku tinta. Peneltian ini berjudul "Sintesis dan Aplikasi Green Varnish Berbahan Minyak Sawit Pada Tinta Cetak Offset Lithography". Penelitian ini telah dilakukan sejak tahun 2020 melalui pendaanaan dari BPDPKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinta ini dapat memenuhi nilai standar warna yang ditargetkan dalam SNI ISO Cetak Ofset. Selain itu tinta sawit ini memiliki nilai Volatile Organic Compound (VOC) yang lebih rendah daripada tinta cetak offset konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan.
- BPDPKS menyelenggarakan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Beasiswa Pendidikan, untuk periode penetapan Tahun 2022. Penandatangan perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan 18 Lembaga Penelitian dan Pengembangan yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Tadulako, Universitas Lambung Mangkurat, AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Universitas Syah Kuala, Universitas Airlangga, Universitas Lampung, Institut Teknologi Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Jambi, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Universitas Langlangbuana dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. BPDPKS juga menandatangani perjanjian Kerjasama Dukungan pendanaan beasiswa dengan 7 lembaga penyelenggara beasiswa pendidikan, yaitu AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Politeknik LPP, Politeknik Kampar, Institut Teknologi Sawit Indonesia, ITSB dan INSTIPER. Pada tahun 2022, BPDPKS telah menyetujui sebanyak 46 usulan riset yang akan didanai, ditambah 2 usulan penelitian melalui jalur inisiatif dari Kementerian terkait.
- BPDPKS melakukan penandatangan kerjasama penelitian dengan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung, terkait dengan pelaksanaan penelitian Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit. Seremoni penandatangan perjanjian oleh Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman pada tanggal 21 September 2022 di Bogor. Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan antara BPDPKS dengan LPIK ITB antara lain : Optimasi teknoogi produksi bensin sawit (bensa) dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif; Pengembangan teknologi percontohan Mixed Industri Vegetable Oil (MIVO) dan minyak makan sehat kapasitas 5 ton TBS/jam; Evaluasi Keekonomian dan Model Bisnis Produk Pangan Bernutrisi Tinggi; Pengujian karakteristik dan organoleptik Minyak Makan Sehat dan MIVO. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama waktu 18 bulan yang dilakukan melalui konsorsium peneliti dari LPIK ITB, PT. Kemurgi Indonesia dan Seafast IPB.
- Road Test campuran biodiesel berbasis sawit sebanyak 40% dengan minyak solar atau tren disebut B40 telah dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dengan melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Untuk bahan bakar B0 dan HVO disediakan oleh Pertamina Grup (PT Kilang Pertamina Internasional) dan untuk B100 oleh APROBI. Progres uji layak B40 yakni jarak tempuh per tanggal 22 September 2022 yang terjauh mencapai 26.316 km untuk kategori kendaraan di bawah 3,5 ton dan 15.319 km untuk kategori kendaraan di atas 3,5 ton.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus melakukan berbagai rangkaian uji kelayakan B40 (campuran 40 persen biodiesel pada bahan bakar solar) sebagai bahan baku penggerak mesin diesel. Pada pengujian cold startability pada Road Test B40 di wilayah Perkebunan Tambi di ketinggian 1400 Mdpl, Rabu (26/10) dini hari, turut hadir diantaranya Direktur Bioenergi, Kepala Balai Besar Pengujian Lemigas, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian EBTKE, jajaran Direksi BPDP Sawit, Direksi Pertamina (Persero) dengan Subholding, perwakilan APROBI, Gaikindo serta perwakilan ATPM, dan akademisi.
- Padan Tahun 2022, BPDPKS memberikan dukungan dana (beasiswa) bagi 1.000 mahasiswa yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian Pertanian.
- BPDPKS juga berkontribusi terhadap pengembangan UMKM Sawit di Indonesia pada Tahun 2022, BPDPKS telah menjalankan berbagai program kemitraan UKMK sawit dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, asosiasi petani sawit, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPDPKS juga mendapatkan penghargaan Sawit Indonesia Award 2022 dalam kategori Pemberdayaan UKMK dan Petani Sawit.

- The government, through BPDPKS, is committed to support palm oil plantation sector as one of the national strategic commodities. In BPDPKS Steering Committee meeting on Sunday (28/08), a decision was made that approves five points namely Export Tax Tariff Extension (PE) of $0 USD for all products until 31 October 2022, Biodiesel Allocation Increase for 2022, Red Edbile Oil (3M) Factory Construction, Acceleration Support for Certification Development of Sustainable Palm Oil (ISPO), and People's Palm Oil Replanting Program (PSR) Acceleration.
- A researcher from Politeknik Negeri Media Kreatif, Gema Sukmawati Auryadi, has succeeded in using palm oil as ink raw material. This research is titled "Synthesis and Application of Green Varnish from Palm Oil to Lithographical Offset Printing Ink". This research has been conducted since 2020 with funding from BPDPKS. The research results showed that this ink can fulfill the standard value of color targeted in SNI ISO for Offset Printing. In addition, this palm oil ink has lower Volatile Organic Compound (VOC) value than conventional offset printing ink, hence more friendly to the environment.
- BPDPKS held a Cooperation Agreement Signing for Research and Development Programs (R&D) and Education Scholarship for the determination period of 2022.
- The Cooperation agreement signing for Research and Development was performed with 18 Research and Development Institutes namely, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Tadulako, Universitas Lambung Mangkurat, AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Universitas Syah Kuala, Universitas Airlangga, Universitas Lampung, Institut Teknologi Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Jambi, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Universitas Langlangbuana as well as National Research and Innovation Agency. BPDPKS also signed a Cooperation agreement for scholarship funding aid with 7 educational scholarship organizers namely, AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Politeknik LPP, Politeknik Kampar, Institut Teknologi Sawit Indonesia, ITSB and INSTIPER. In 2022, BPDPKS has approved 46 research proposals to be funded, plus 2 research proposals through initiative lines from related Ministries.
- BPDPKS performed research cooperation agreement signing with Innovation and Entrepreneurship Development Organization (LPIK) of Institut Teknologi Bandung, relating to the research implementation of Further Innovation of Palm Oil Catalyst & Fuel Technology and the Pilot Manufacturing Technology Development of Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) and Healthy Edible Oil from Palm Oil. The agreement signing ceremony was held by the President Director of BPDPKS, Eddy Abdurrachman, on 21 September 2022 in Bogor. The scope of research to be conducted by BPDPKS and LPIK ITB among others: Optimization of palm oil fuel (bensa) production technology and the use of more flexible feed varieties to obtain bensa with a more competitive price; Development of pilot technology of Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) and healthy edible oil with the capacity of 5 tones TBS/hour; Evaluation of High-Nutrients Feed Products Business Economy and Model; Testing of Healthy Edible Oil and MIVO characteristics and organoleptic. These research activities will be conducted for 18 months performed through researchers' consortium from LPIK ITB, PT. Kemurgi Indonesia and Seafast IPB.

2022

- Road Test for mixed biodiesel from 40% palm oil and diesel fuel or trend called as B40 has been conducted by the Natural Oil and Gas Test Center "Lemigas" involving the Survey and Testing Center KEBTKE and National Research and Innovation Agency (BRIN) through funding from Palm Oil Planting Fund Management (BPDPKS). For B0 and HVO fuels, they were provided by Pertamina Group (PT Kilang Pertamina Internasional) and for B100 by APROBI. B40 proper test progress namely mileage per 22 September 2022 reached 26,316 km at the
- farthest for the category of vehicles under 3.5 tones and 15,319 km for the category of vehicles over 3.5 tones. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) together with National Research and Innovation Agency (BRIN) through funding by Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) continuously conducting various testing series for B40 (mixture of 40 percent biodiesel in diesel fuel) as diesel engine driving raw material. In cold startability test on Road Test for B40 in Tambi Plantation at the altitude of 1400 absl, Wednesday (26/10) at dawn, it was attended by the Director of Bioenergy, Head of Lemigas Test Center, Head of EBTKE Survey and Test Center, Directors of Oil Palm BPDP, Directors of Pertamina (Persero) with Subholding, representative of APROBI, Gaikindo and representative of ATPM, as well as academics.
  In 2022, BPDPKS provided fund aid (scholarship) for 1,000 students who have received technical recommendation from the Directorate General of Plantation – Ministry of Agriculture.
  BPDPKS also contributed in Palm Oil SMEs development in Indonesia in 2022, BPDPKS has implemented various SMEs partnership programs in collaboration with universities, palm oil associations, National Innovation Research Agency (BRIN) and members of the House of Representatives (DPR), BPDPKS also received Sawit Indonesia Award 2022 in the category of SMEs and Palm Oil Farmers Empowerment.

2023

- BPDPKS bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI melakukan launching B35 pada tanggal 31 Januari 2023 di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka implementasi Biodiesel B35; Menginformasikan persiapan Badan Usaha Bahan Bakar NabaL (BUBBN) dalam implementasi Biodiesel B35; Menginformasikan kesiapan infrastruktur Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) dalam implementasi Biodiesel B35; Mendapatkan informasi keberterimaan kebijakan mandatori Biodiesel B35 dari
- masyarakat pada umumnya dan terutama dari pengguna biodiesel.
  BPDPKS memperoleh penghargaan sebagai BLU terbaik kategori "Layanan Pengelola Dana" Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum (BLU) "BLU Inklusif Indonesia Optimis", yang dilaksanakan di gedung dhanapala pada
- tanggal 2 Maret 2023 dan kegiatan BLU Fair tanggal 3 Maret 2023 di lapangan banteng.
  BPDPKS menyetujui dukungan pendaanan Kerja sama dengan 13 Lembaga Pendidikan dilakukan multiyear mulai dari Program D1, D2, D3, D4 dan S1 dengan nilai kerja sama mencapai Rp 313,9 Milyar untuk jumlah penerima beasiswa sebanyak 2000 orang. Sedangkan dukungan pendanaan Kerja sama dengan 11 Lembaga
- Pelatihan dilakukan dengan nilai Kerja sama mencapai Rp 46,5 Milyar, untuk jumlah peserta pelatihan sebanyak 3.241 orang.
  BPDPKS menerima penghargaan sebagai tokoh berdedikasi bagi perkembangan petani sawit yang diserahkan
- langsung oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada tanggal 7 Desember 2023 pada Pertemuan Nasional (Penas) Petani Sawit dihadiri ratusan petani dari 22 provinsi sentra sawit se-Indonesia
  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meraih Sawit Indonesia Award 2023 untuk Program Promosi UKMK Sawit yang diselenggarakan oleh Majalah Sawit Indonesia. Penghargaan diberikan secara
- langsung oleh Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis, Dida Gardera kepada Direktur Perencanaan dan Pengelolaan dana/Plt Direktur Kemitraan BPDPKS, Kabul Wijayanto. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Desember 2023 di Hotel Borobudur Jakarta.
  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang terbaik pertama untuk kategori Pemenang Co-Exhibitor Hannover Messe 2023. Hannover Messe 2023 (HM 2023) merupakan pameran teknologi terbesar yang diselenggarakan di
- Hanover, Jerman, diperkirakan dihadiri sekitar 25.000 pengunjung. Partisipasi Indonesia dalam bentuk paviliun nasional yang dibangun diatas lahan seluas 3.000 m2 dan diisi oleh 154 co-exhibitor yang terdiri dari 14 K/L. 8 Asosiasi Industri, 9 Lembaga Pendidikan, 19 Kawasan Industri, 16 BUMN serta 88 Badan Usaha. Kegiatan tersebut dibuka oleh Presedien RI, Joko Widodo.
  Mahasiswa UNNES Ubah Tandan Kosong Kelapa Sawit Menjadi Graphene Oxide - Komponen Baterai Masa Depan Ramah Lingkungan pada Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa Tahun 2023 tanggal 1-2 Maret 2023 di Yogyakarta.

- BPDPKS received the award as the best BLU in the category "Fund Management Services"
  The Ministry of Finance conducted a Coordination Meeting of Public Service Agencies (BLU) "Inclusive Indonesia Optimistic", which was held at the Dhanapala building on March 2, 2023, and the BLU Fair on March 3, 2023, at Banteng Field. The meeting, attended by the Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati, highly appreciated all BLU work units that have worked hard to make various adjustments during the 3 years of the pandemic. During this coordination meeting, BPDPKS received an award as the best BLU in the category "Fund Management Services", attended directly by Mr. Eddy Abdurrachman, the CEO
- of BPDPKS.
  First-place award in the Co-Exhibitor category at Hannover Messe 2023 The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) received an award from the Ministry of Industry as the first winner in the Co-Exhibitor category at Hannover Messe 2023. The award was presented directly by the Minister of Industry, Agus Gumiwang Kartasasmita, to the CEO of BPDPKS, Eddy Abdurrachman, at the "Appreciation for Resilience and Sustainable Industry" event in Jakarta. The first-place award in the Co-Exhibitor category at Hannover Messe 2023 from the Minister of Industry during the appreciation event for Resilience and Sustainable Industry is expected to continue with further successes and achievements. The Palm Oil Council of Indonesia
- (DMSI), supported by BPDPKS, was part of the co-exhibitor at Hannover Messe 2023. Indonesia was the official partner country at Hanover Messe 2023, Germany, held from April 17-21, 2023.
  APKASINDO Award for full contribution to advancing the Indonesian palm oil industry The National Palm Farmers Meeting (Penas) was attended by hundreds of farmers from 22 palm oil central provinces across Indonesia and was officially opened by the Indonesian Minister of Economic Affairs, Airlangga Hartarto, on Thursday (December 7, 2023). The event, organized by APKASINDO (Indonesian Palm Oil Farmers Association), also gave awards to individuals dedicated to the development of palm farmers. The CEO of BPDPKS (Oil Palm Plantation Fund Management Agency), Eddy Abdurrachman, also received an award presented directly by the Indonesian Minister of Economic Affairs, Airlangga Hartarto. After the event, Eddy Abdurrachman stated that independent farmers face many challenges in running their plantations. Some of the common problems faced by
- independent palm oil farmers in Indonesia include supply chain issues from plantations to factories, inadequate infrastructure, low productivity, lack of knowledge and skills for good agricultural practices, limited access to the latest technology in farming practices, and lack of support in the certification process.
  Sawit Indonesia Award 2023 for Palm SME Promotion Program The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) won the Sawit Indonesia Award 2023 for the Palm SME Promotion Program, organized by Sawit Indonesia Magazine. The award was presented directly by the Deputy of the Coordinating Ministry for Economic Affairs in the Food and Agribusiness sector, Dida Gardera, to the Director of Planning and Fund Management/Acting Director of Partnership of BPDPKS, Kabul Wijayanto. The event was held on December 20, 2023, at the Borobudur Hotel, Jakarta. The Chairman of the Sawit Indonesia Award 2023, Qayuum Amri, explained that the recipients of the Sawit Indonesia Award 2023 were judged based on their track record in the mass media, particularly related to activities, policies, and programs carried out.
  The internal assessment of Sawit Indonesia Magazine is based on three aspects: communication, information, and commitment," explained Qayuum. The Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) is a Public Service Agency under the Ministry of Finance that has the task of implementing the Government's policy in the program of sustainable palm development. The Palm SME program is a step by BPDPKS in realizing partnerships with Small and Medium Enterprises and Cooperatives in supporting palm as a strategic national commodity for the welfare of the people of Indonesia.
  Best Booth Award at TEI 2023 in the F&B Category for booths larger than 36M2 BPDPKS received the best booth award at the 38th Trade Expo Indonesia (TEI) 2023, organized by the Ministry of Trade, held from October 18-22, 2023, at the Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, South Tangerang. The award received by BPDPKS was in the F&B category for booths larger than 36 M2. The annual promotional agenda of Trade Expo Indonesia (TEI) 2023 will carry the theme "Sustainable Trade for Global Economic Resilience."
  Best Booth Award at BUNEX 2023 The Ministry of Agriculture organized the Indonesian Plantation Expo (BUNEX), which took place at ICE BSD City, Tangerang, Banten, from September 7 to 9, 2023. BUNEX 2023 is one of the positive steps to introduce and promote plantation products, including derivatives of palm oil. On this occasion, BPDPKS received an award for the best booth at BUNEX 2023.
  Aspekpir Award in the Categories of Empowerment of Palm SMEs and Partnership Empowerment of Farmers BPDPKS swept two awards at the Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Award 2023 for the categories of Partnership and Empowerment of Small, Medium Enterprises and Cooperatives Based on Core Plantation Palm Oil PIR Indonesia and also received an award for the Partnership Category in the Empowerment of Millennial Palm Oil Farmers PIR Indonesia 2023. These awards were given during the 1st National Conference (Munas) of Aspekpir Indonesia 2023 held from November 6 to 7, 2023.

- BPDPKS mengeluarkan Peraturan Direktur Utama tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola industri sawit nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pungutan ekspor, mendukung stabilisasi harga komoditas, serta memperkuat program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Dengan aturan ini, diharapkan kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional semakin optimal.
- BPDPKS menerima penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta pada tanggal 5 September 2024 atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan industri kerajinan berbasis kelapa sawit. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya BPDPKS dalam mendorong pemanfaatan produk turunan sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, BPDPKS berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung UMKM dan industri kreatif berbasis sawit.
- Program Peremajaan Sawit Rakyat telah menjangkau lebih dari 156.000 petani di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Melalui replanting, petani mendapatkan bibit unggul, pendampingan teknis, dan insentif finansial untuk memastikan kelangsungan usaha tani yang lebih baik. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perkebunan rakyat.
  Pada puncak peringatan Hari Batik Nasional 2024, BPDPKS mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian atas inisiatifnya dalam mendorong penggunaan lilin sawit (stearin) sebagai bahan ramah lingkungan untuk pembuatan batik. Penghargaan ini menegaskan peran BPDPKS dalam mendukung industri kreatif nasional sekaligus memperkenalkan inovasi produk sawit yang berkelanjutan. Ke depan, BPDPKS akan terus berkolaborasi dengan pelaku industri batik untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
- PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi melakukan uji coba penggunaan Biodiesel B40 untuk operasional kereta api mulai tanggal 3 Juli 2024, menandai langkah besar dalam penerapan energi terbarukan di sektor transportasi massal. BPDPKS turut mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari program mandatori biodiesel nasional. Penggunaan B40 diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus memperkuat pasar domestik untuk produk biodiesel berbasis sawit.
- BPDPKS meresmikan ruang imersif di Museum Perkebunan Indonesia (MUSPERIN) pada tanggal 11 Juli 2024 sebagai sarana edukasi interaktif tentang sejarah dan perkembangan industri perkebunan, khususnya kelapa sawit. Ruang ini dilengkapi teknologi digital untuk memberikan pengalaman mendalam bagi pengunjung mengenai proses produksi, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan industri sawit. Melalui inisiatif ini, BPDPKS berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sektor perkebunan bagi perekonomian Indonesia.
- Pada tanggal 14 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah (red palm oil) di Sumatera Utara, yang dikembangkan dengan dukungan BPDPKS. Pabrik ini menjadi pionir dalam produksi minyak sawit bernutrisi tinggi untuk kebutuhan pangan lokal. Keberadaan pabrik ini tidak hanya mendorong diversifikasi produk sawit, tetapi juga membantu meningkatkan gizi masyarakat melalui minyak kaya vitamin A dan E. Inisiatif ini sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Indonesia mencapai terobosan besar dengan kemampuan kilang BBM dalam negeri memproduksi avtur (bahan bakar pesawat) dari minyak sawit. Dukungan BPDPKS dalam pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (bio-avtur) ini menandai langkah strategis dalam mengurangi emisi karbon sektor penerbangan. Keberhasilan ini membuka peluang baru bagi industri sawit nasional untuk memasuki pasar global biofuel dan mendukung transisi energi hijau.
- Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No. 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan pada 18 Oktober 2024. Perpres ini mengatur penguatan kelembagaan dan tata kelola dana perkebunan, termasuk alokasi untuk program replanting, penelitian, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan. BPDPKS ditunjuk sebagai salah satu pelaksana utama dalam mendistribusikan dana tersebut guna mendukung petani dan pelaku usaha.
  ·Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan pada 18 Oktober 2024, yang menjadi landasan transformasi kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Perubahan ini memperluas mandat lembaga tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga mencakup komoditas perkebunan strategis lainnya, yaitu kakao dan kelapa.

BPDPKS 2024 Activities and Achievements

BPDPKS Director Regulation on Palm Oil Export Levy
On October 14, 2024, the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) issued a Director Regulation regarding the Procedures for Imposing Export Levies on Palm Oil, Crude Palm Oil (CPO), and its Derivative Products. This regulation aims to strengthen the governance of the national palm oil industry by ensuring transparency and accountability in managing export levies, supporting commodity price stabilization, and reinforcing sustainable palm oil plantation development programs. It is expected that this policy will optimize the palm oil sector's contribution to the national economy.

Award from Dekranasda Yogyakarta for Supporting Palm Oil-Based Craft Industry
On September 5, 2024, BPDPKS received an award from the Regional National Crafts Council (Dekranasda) of Yogyakarta City for its contribution to supporting the development of palm oil-based crafts. This award recognizes BPDPKS's active role in promoting the utilization of palm oil derivatives to enhance added value and improve community welfare. BPDPKS remains committed to innovating in support of MSMEs and the palm oil-based creative industry.

Smallholder Palm Oil Replanting Program Progress
The Smallholder Palm Oil Replanting Program has reached more than 156,000 farmers across Indonesia. This program aims to increase the productivity of smallholder palm oil plantations while supporting environmental sustainability. Through replanting, farmers receive superior seedlings, technical assistance, and financial incentives to ensure better farm sustainability. This initiative aligns with government commitments to strengthen the smallholder plantation sector.

Recognition for Promoting Palm Oil Wax in Batik Industry
During the 2024 National Batik Day celebrations, BPDPKS received an award from the Ministry of Industry for its initiative in promoting the use of palm oil wax (stearin) as an environmentally friendly material for batik production. This award underscores BPDPKS's role in supporting the national creative industry and introducing sustainable palm oil product innovations. BPDPKS will continue collaborating with batik industry players to enhance the competitiveness of local products.

Biodiesel B40 Trial by Indonesian Railways
PT Kereta Api Indonesia (KAI) officially started trial operations using Biodiesel B40 for train operations on July 3, 2024. This marks a significant step in adopting renewable energy in mass transportation. BPDPKS supports this initiative as part of the national mandatory biodiesel program. The use of B40 is expected to reduce carbon emissions and fossil fuel dependency while strengthening the domestic market for palm oil-based biodiesel products.

Inauguration of Immersive Room at Indonesian Plantation Museum
On July 11, 2024, BPDPKS inaugurated an immersive room at the Indonesian Plantation Museum (MUSPERIN) as an interactive educational facility on the history and development of the plantation industry, especially palm oil. Equipped with digital technology, the room offers visitors an in-depth experience of production processes, economic benefits, and industry sustainability. Through this initiative, BPDPKS aims to increase public understanding of the plantation sector's importance to Indonesia's economy.

Inauguration of Red Palm Oil Pilot Plant
On March 14, 2024, President Joko Widodo inaugurated the pilot red palm oil factory in North Sumatra, developed with BPDPKS support. This pioneering plant produces nutrient-rich palm oil for local food needs. Its presence not only diversifies palm oil products but also helps improve public nutrition through oil rich in vitamins A and E, aligning with government efforts to strengthen national food security.

Domestic Production of Sustainable Aviation Fuel (Bio-Avtur)
Indonesia achieved a breakthrough with domestic fuel refineries producing aviation fuel (bio-aviation fuel) from palm oil. BPDPKS supports the development of this sustainable aviation fuel, marking a strategic step to reduce carbon emissions in the aviation sector. This success opens new opportunities for the national palm oil industry to enter the global biofuel market and support the green energy transition.

Presidential Regulation on Plantation Fund Management
On October 18, 2024, President Joko Widodo signed Presidential Regulation No. 132 of 2024 concerning Plantation Fund Management. This regulation strengthens institutional capacity and governance of plantation funds, including allocations for replanting programs, research, and sustainable palm oil industry development. BPDPKS is appointed as a key implementer responsible for distributing these funds to support farmers and industry players.

Transformation of BPDPKS to BPDP
The same regulation also serves as the foundation for transforming the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) into the Plantation Fund Management Agency (BPDP). This expansion broadens the agency's mandate beyond palm oil to include other strategic plantation commodities such as cocoa and coconut.

1.4 KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity



2017



2018

Menguatkan Pondasi Kelembagaan BPDPKS untuk Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

BPDPKS telah memberikan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan mendanai berbagai riset kelapa sawit baik sisi hulu maupun hilir, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem informasi kelapa sawit. Upaya Promosi perkebunan kelapa sawit juga telah dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Titik berat promosi di dalam negeri adalah kampanye positif sawit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk generasi milenial.

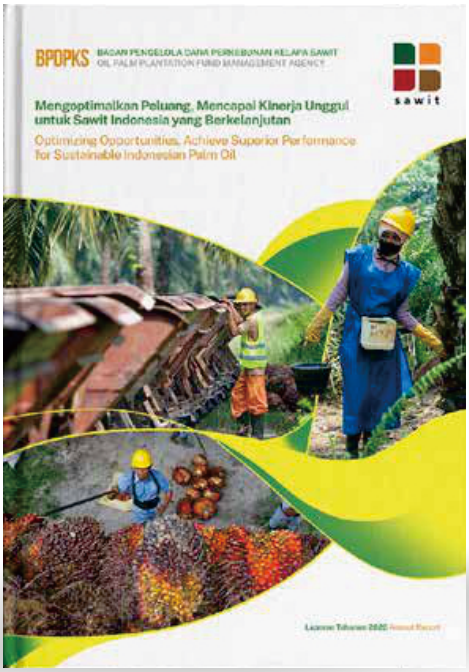
BPDPKS has provided funding for research and development of oil palm plantations by funding various oil palm research both upstream and downstream, development of information technology to support oil palm information systems. Efforts to promote oil palm plantations have also been carried out both domestically and abroad. The emphasis of promotion in the country is a positive campaign for palm oil to increase public awareness, including the millennial generation.

Mengembangkan Infrastruktur BPDPKS, Mendukung Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

BPDPKS bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian juga melakukan penyempurnaan aturan agar penyaluran dana bisa dilakukan dengan lebih cepat tanpa mengurangi akuntabilitas. BPDPKS kian mantap menatap ke depan dan secara dinamis melihat peluang-peluang baru bagi penguatan kinerja dengan mengembangkan infrastruktur BPDPKS, guna mendukung Sawit Indonesia yang berkelanjutan.

BPDPKS together with the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, and the Coordinating Ministry for the Economy are also making improvements to the rules so that the distribution of funds can be carried out more quickly without reducing accountability. BPDPKS is increasingly looking to the future and dynamically sees new opportunities for strengthening performance by developing BPDPKS infrastructure, in order to support sustainable Indonesian Palm Oil.





2019

Efektivitas Operasional untuk Mempercepat Pertumbuhan Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

BPDPKS menerapkan strategi operasional yang efektif guna optimalisasi penghimpunan dana. Selain itu, BPDPKS terus berupaya menjalin Kerjasama strategis dengan berbagai institusi baik bilateral dan multilateral agar komoditas kelapa sawit dan turunannya diakui di dunia internasional telah berjalan sesuai prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan, serta terus mengkampanyekan narasi positif tentang sawit berkelanjutan.

BPDPKS implements an effective operational strategy to optimize fundraising. In addition, BPDPKS continues to seek strategic cooperation with various institutions, both bilateral and multilateral, so that palm oil and its derivatives are recognized internationally as having run according to sustainable business principles, and continue to campaign for a positive narrative about sustainable palm oil.

2020

Mengoptimalkan Peluang, Mencapai Kinerja Unggul untuk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri sawit nasional, hal ini dikarenakan terjadinya resesi dalam perekonomian. Namun di tengah tantangan tersebut, BPDPKS terus berupaya untuk meraih kinerja unggul dengan mengoptimalkan peluang yang ada.

2020 is a year full of challenges for the national palm oil industry, this is due to the recession in the economy. However, in the midst of these challenges, BPDPKS continues to strive to achieve superior performance by optimizing existing opportunities.



2021

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Upaya Menuju Sawit Indonesia yang Berkelanjutan

Development of Palm Oil Plantation Human Resources as An Effort Toward Sustainable Indonesian Palm Oil

Dalam upaya menjaga peran perkebunan kelapa sawit pekebun secara berkesinambungan, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelapa sawit. Kegiatan pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh aspek dalam pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kompetensi, kemandirian, dan daya saing pekebun kelapa sawit, keluarga pekebun, pendamping, penyuluh perkebunan kelapa sawit, aparatur sipil negara serta pihak terkait lainnya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
BPDPKS berperan dalam mendanai kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dan fasilitasi. Sebagai contoh, upaya pengembangan SDM dilakukan melalui pemberian beasiswa kepada pekebun/keluarga pekebun/SDM lainnya yang berkaitan dengan perkelapasawitan yang memiliki prestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
Diharapkan pengembangan SDM ini akan menciptakan insan-insan Perkebunan Kelapa Sawit yang handal yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

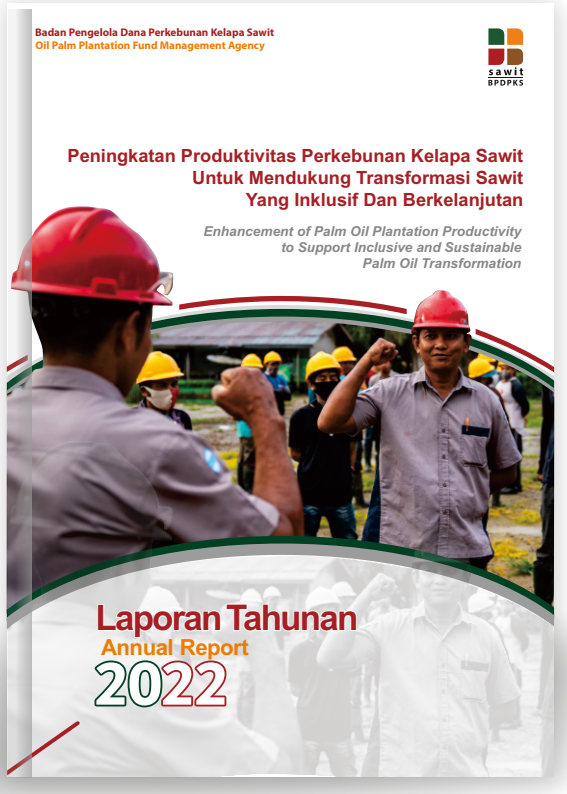
In the endeavour to maintain the role of sustainable farmers' palm oil plantation, one of the efforts carried out by the Government is through Human Resources (HR) development of palm oil plantation. Palm Oil Plantation Human Resources development was performed by integrating all aspects in HR development in the framework of improving knowledge, skill, professionalism, competency, independence, and competitiveness of palm oil farmers, farmers' families, assistants, instructors of palm oil plantation, state civil apparatus, as well as other relevant parties. This activity was also performed in order to enhance technical, managerial, and entrepreneurial abilities.
BPDPKS contributes in funding human resources development activity carried out in the form of education, training, counselling, as well as assistance and facilitation. As an instance, the HR development effort was carried out through scholarship grant to Farmers/farmers' families/other HR relating to palm oil who have achievements and/or are economically incapable.

It is expected that this HR development will generate reliable Palm Oil Plantation Individuals who are capable of improving Indonesian economy through a sustainable palm oil industry.

Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Mendukung Transformasi Sawit Yang Inklusif Dan Berkelanjutan

Enhancement of Palm Oil Plantation Productivity to Support Inclusive and Sustainable Palm Oil Transformation

2022



Selepas pandemi Covid 19 dan perubahan wajah perekonomian dunia yang terdampak perang Ukraina – Rusia, di tahun 2023 kelapa sawit semakin membuktikan perannya dalam pemulihan ekonomi. Salah satu faktor yang menjadi wujud nyata adalah peningkatan kebutuhan akan produk-produk kelapa sawit.

Menghadapi potensi tersebut, kelapa sawit Indonesia perlu berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguat produktivitas sawit. Mengacu pada praktik Pertanian yang baik kelapa sawit dapat terus mendukung reformasi transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas. Serta melalui penerapan ISPO dan Riset pengembangan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan resesi ekonomi serta memperkuat daya saing nasional di pasar global.

Melalui peningkatan produktivitas, seluruh stakeholder akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi peremajaan kebun kelapa sawit dan penguatan sisi suplay benih dan pupuk sawit yang sah untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

After the Covid 19 pandemic and the changing face of the world economy which was affected by the Ukraine – Russia war, in 2023 palm oil is increasingly proving its role in economic recovery. One of the factors that has become a real manifestation is the increasing demand for palm oil products.Facing this potential, Indonesian palm oil needs to make maximum efforts to maintain the sustainability of increasing palm productivity. Referring to the Good Agricultural Practice of oil palm can continue to support economic transformation reforms to increase productivity. Also, through the implementation of ISPO and development research, it is very important to increase the productivity of oil palm plantations so that Indonesia can get out of the economic recession trap and strengthen national competitiveness in the global market.Through increasing productivity, all stakeholders will use all resources to accelerate the rejuvenation of oil palm plantations and strengthen the supply side of legitimate palm seeds and fertilizers to increase productivity. 2023 is the starting point for increasing the productivity of oil palm plantations.

Pemikiran Yang Satu Menuju Perluasan Dampak Kelapa Sawit Melaui Transisi dengan Penguatan Aksi dan Kemitraan

Integrated Mindset toward Widening Palm Oil Impact through transition with Strengthening Action and Partnership

2023



Tahun 2023 telah menjadi tahun yang menandai tonggak sejarah bagi industri kelapa sawit Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kelapa sawit terus menunjukkan perannya sebagai tulang punggung perekonomian negara. Namun, kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam industri ini semakin menguat, mendorong para pemangku kepentingan untuk memperluas dampak positif kelapa sawit melalui transisi yang berkelanjutan.

Melalui pemikiran yang terpadu dan sinergis, BPDPKS memimpin langkah-langkah strategis untuk memperkuat industri kelapa sawit melalui penguatan kasi dan kemitraan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kasi, yaitu pemberdayaan petani kelapa sawit melalui penyediaan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan dukungan finansial. Dengan memberdayakan petani, diharapkan produktivitas dan kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, BPDPKS juga menggalakkan pembentukan kemitraan yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit. Kemitraan ini tidak hanya mencakup hubungan antara produsen dan pemasok, tetapi juga melibatkan pemerintah, lembaga riset, organisasi masyarakat, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, tercipta ekosistem yang berkelanjutan di mana setiap pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama: meningkatkan produktivitas, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui transisi yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, industri kelapa sawit Indonesia semakin memperluas dampak positifnya, tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Tahun 2023 menjadi momentum awal bagi perubahan yang lebih besar menuju industri kelapa sawit yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi semua pihak.

The year 2023 has become a historical milestone for the Indonesian palm oil industry. Amid the increasingly complex global economic dynamics, palm oil continues to demonstrate its role as the backbone of the national economy. However, the awareness of the importance of maintaining sustainability in this industry is growing stronger, prompting stakeholders to expand the positive impact of palm oil through sustainable transitions.

Through integrated and synergistic thinking, BPDPKS leads strategic steps to strengthen the palm oil industry through the enhancement of empowerment and partnerships. One of the main steps is strengthening empowerment, which involves empowering palm oil farmers through access to technology, training, and financial support. By empowering farmers, their productivity and welfare are expected to significantly improve.

Additionally, BPDPKS is also promoting the formation of sustainable partnerships among stakeholders in the palm oil industry. These partnerships not only include relationships between producers and suppliers but also involve the government, research institutions, community organizations, and local communities. Thus, a sustainable ecosystem is created where each party supports one another to achieve common goals: increasing productivity, reducing environmental impacts, and enhancing the welfare of surrounding communities.

Through a transition carried out with full responsibility and commitment, the Indonesian palm oil industry is increasingly expanding its positive impact, not only economically but also socially and environmentally. The year 2023 marks the beginning of greater changes towards an inclusive, sustainable, and positively impactful palm oil industry for all parties involved.

Transformasi untuk mengembangkan komoditas perkebunan yang bermanfaat bagi perkenomian bangsa serta menjawab tantangan kedepan

Transformasi untuk mengembangkan komoditas perkebunan yang bermanfaat bagi perkenomian bangsa serta menjawab tantangan kedepan

2024



Perkebunan telah terbukti memiliki potensi besar sejak dahulu sebagai penyokong devisa negara, dan ekspor komoditas perkebunan juga harus dikelola dengan baik. Namun, tantangan ke depan semakin banyak dan harus dipersiapkan dengan matang, baik dari data eksportir tujuan Uni Eropa maupun Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), yang menjadi prioritas utama.Salah satu hal penting yang perlu diidentifikasi dan diperhatikan adalah posisi masing-masing komoditas, mana yang harus diprioritaskan atau diutamakan. Tidak hanya kelapa sawit, tetapi komoditas seperti kakao dan kelapa juga memerlukan peningkatan produksi agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian bangsa.Kebutuhan untuk mengembangkan komoditas-komoditas tersebut perlu ditangani dengan serius melalui pemetaan yang tepat dan strategi yang terencana. Termasuk di dalamnya pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk komoditas kakao dan kelapa. Selain itu, sangat penting untuk memperhatikan posisi pasar serta keberlanjutan lingkungan dan bisnis. Mengingat, masing-masing komoditas memiliki penanganan dan tantangan yang berbeda dalam pengembangannya, maka perlu ada upaya bersama untuk memperkuat pengembangan sektor perkebunan.BPDPKS, yang telah berusia 10 tahun, terus bertransformasi untuk mencapai cita-cita mulia tersebut. Sebagai pendukung sawit berkelanjutan, kini BPDP juga diharapkan dapat mendorong pengembangan komoditas kakao dan kelapa. Dengan demikian, diharapkan komoditas-komoditas tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara.

The plantation sector has proven to have significant potential since the past as a major contributor to the country's foreign exchange, and the export of plantation commodities must also be managed properly. However, the challenges ahead are increasing, and preparation is necessary, both in terms of exporter data for European Union destinations and the cultivation registration certificate (STDB), which should be prioritized as these are fundamental issues.One important aspect that needs to be identified and addressed is the position of each commodity, and which ones should be prioritized. Not only palm oil, but commodities such as cocoa and coconut also require an increase in production to provide greater benefits for the nation's economy.The need to develop these commodities must be seriously addressed through proper mapping and a well-planned strategy. This includes the management of the Plantation Fund Management Agency (BPDP) for cocoa and coconut commodities. Additionally, it is essential to focus on market positioning as well as environmental and business sustainability. Given that each commodity has different handling and development challenges, there must be joint efforts to strengthen the development of the plantation sector.BPDPKS, now in its 10th year, continues to transform to achieve the noble goals set forth. As a supporter of sustainable palm oil, BPDP is now also expected to promote the development of cocoa and coconut commodities. In doing so, these commodities are expected to bring significant benefits to the nation and the country.

DAFTAR ISI

Pendahuluan
Peristiwa Penting 4
Penghargaan 10
Jejak Langkah 14
Kesinambungan Tema 22
Daftar Isi 28

Laporan Manajemen
Laporan Ketua Dewan Pengawas 32
Laporan Direktur Utama 33

Profil Perusahaan
Riwayat Singkat BPDPKS 37
Tujuan BPDPKS 40
Visi, Misi, dan Budaya BPDPKS 41
Tugas, Fungsi, dan Strategi BPDPKS 42
Logo dan Filosofi 44
Manajemen dan Pejabat BPDPKS 48
Profil Dewan Pengawas 53Profil Direksi 64
Profil Pejabat Non-Struktural BPDPKS 69
Informasi di Website Perusahaan 74

Laporan Kinerja
Kinerja Pengembangan SDM Sawit 77
Kinerja Penelitian dan Pengembangan 80
Kinerja Promosi dan Kemitraan 81
Kinerja Peremajaan Sawit Rakyat 84
Kinerja Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit 85
Kinerja Insentif Biodiesel 88

Tata Kelola
Komitmen Penerapan Tata Kelola BPDPKS 98
Komite Pengarah BPDPKS 100
Dewan Pengawas 104
Komite Audit 119
Direksi 122
Satuan Pemeriksa Internal 127
Audit Eksternal 132
Manajemen Risiko 133
Sistem Pengendalian Internal 141
Kode Etik BPDPKS 144
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) 145

Layanan Pendukung
Strategi Pengembangan SDM 152
Pengelolaan SDM 156
Pengadaan Barang dan Jasa 162
Sistem Manajemen Mutu 164
Teknologi Informasi 166

Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran 176
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 177
Neraca 178
Laporan Operasional 179
Laporan Arus Kas 180
Laporan Perubahan Ekuitas 179
Catatan atas Laporan Keuangan 180



LIST OF CONTENTS

Introduction
Significant Events 4
Awards BPDPKS Received 10
Milestones 14Theme Continuity 22
Table of Contents 28

Management Report
Report from the Chairman of the Supervisory Board 32
Report from the President Director 33

Company Profile
Brief History of BPDPKS 37
Objectives of BPDPKS 40
Vision, Mission, and Culture of BPDPKS 41
Duties, Functions, and Strategy of BPDPKS 42
Logo and Its Philosophy 44
BPDPKS Management and Officials 48
Supervisory Board Profile 52
Board of Directors Profile 64
Non-Structural Officials of BPDPKS 69
Information on the Company Website 74

Performance Report
Performance in Human Resource Development for Palm Oil 77
Research and Development Performance 80
Promotion and Partnership Performance 81
Smallholder Palm Oil Rejuvenation Performance 84
Performance of Infrastructure and Facilities for Palm Oil Plantations 85
Biodiesel Incentive Performance 88

Governance
Commitment to Implementing BPDPKS Governance 99
BPDPKS Steering Committee 101
Supervisory Board 105
Audit Committee 120
Board of Directors 123
Internal Audit Unit 128
External Audit 133
Risk Management 134
Internal Control System 142
BPDPKS Code of Ethics 145
Whistleblowing System 146

Support Services
Human Resource Development Strategy 152
Human Resource Management 156
Procurement of Goods and Services 162
Quality Management System 164
Information Technology 166

Financial Report
Budget Realization Report 174
Report on Changes in Excess Budget Balance 175
Balance Sheet 176
Operational Report 177
Cash Flow Statement 178
Statement of Changes in Equity 179
Notes to the Financial Statements 180



Laporan Manajemen

Steering Committee Report





2.1 Laporan Ketua Dewan Pengawas

Report from the chairman of the supervisory board



Evita H Legowo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Pada Akhir Pada akhir semester kedua tahun 2024, BPDPKS mendapatkan tambahan tugas yang tidak hanya mencakup kelapa sawit tetapi diperluas dengan kelapa dan kakao. Oleh karena itu, Dewan Pengawas BPDPKS melaksanakan pengawasan dengan mempersiapkan penambahan tugas ini.

Dewan Pengawas melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian Semester II tahun 2024 berdasarkan Program Kerja tahun 2024, yang berfokus kepada program Peremajaan Sawit Rakyat, program Sarana Prasarana, dan Pungutan Ekspor yang merupakan sumber dana BLU. Selain itu Dewan Pengawas juga memperhatikan persiapan implementasi B40 yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2025, tentu tanpa mengabaikan program lain seperti, program pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan program kemitraan. Kinerja BPDPKS berdasarkan Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan di tahun 2024 menunjukkan capaian yang positif di mana rata-rata indeks capaian sebesar 125,31%. Tiga belas dari empat belas IKU di tahun 2024 mencapai realisasi di atas target yang ditetapkan. Hanya 1 IKU yang pencapaiannya di bawah target, yaitu IKU Persentase Penyaluran dan Peremajaan Sawit Rakyat. Pendapatan BPDPKS dari Pungutan Ekspor (PE) dan imbal hasil pengelolaan dana pada tahun 2024 turun sebesar 17% dibandingkan tahun 2023, di mana penurunan tersebut disebabkan oleh penerimaan PE yang turun 20%.

Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas juga memberikan rekomendasi dan masukan agar program-program BPDPKS dapat terlaksana sesuai target. Pengawasan ditujukan untuk meningkatkan kinerja BPDPKS dan memantau tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas kepada Pejabat Pengelola agar terus berkomitmen menjalankan pelayanan yang optimal sesuai visi dan misi BPDPKS, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Komite Audit, dan Rapat khusus Dewas dengan Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Dewan Pengawas juga terus mendorong peningkatan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab BPDPKS dalam pengelolaan dana sesuai peraturan yang berlaku.

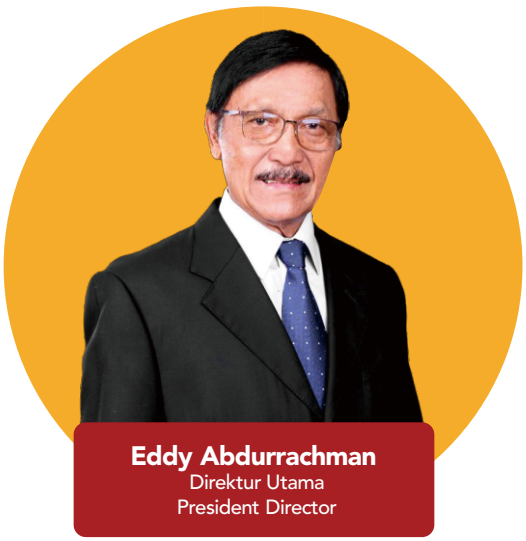
Mulai tahun 2024 Dewan Pengawas juga berusaha untuk memenuhi IKU Dewan Pengawas sesuai Kontrak Kinerja Dewan Pengawas BPDPKS dengan Menteri Keuangan yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2024. Selain itu mulai Semester I tahun 2024 Dewan Pengawas juga melaporkan review atas pelaksanaan Manajemen Risiko BLU. Meskipun demikian Dewan Pengawas, tetap masih memerlukan saran dan informasi terkini dari seluruh pemangku kepentingan perkebunan sawit, kelapa dan kakao, agar pengelolaan dana perkebunan ini bersifat inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, dan dapat menjamin industri perkebunan sawit, kelapa dan kakao yang berkelanjutan.

Berkembangnya perkebunan kelapa sawit, kelapa dan kakao, akan mempengaruhi perekonomian dan penyediaan lapangan kerja, juga penyediaan pangan dan bahan bakar ramah lingkungan perlu dimengerti oleh semua pihak, dalam rangka ketahanan pangan dan energi.

At the end of the second semester of 2024, BPDPKS received additional responsibilities, expanding its mandate beyond palm oil to include coconut and cocoa. In response, the Supervisory Board of BPDPKS conducted oversight and prepared for these added duties.The Supervisory Board performed analysis and evaluation of the achievements in the second semester of 2024 based on the 2024 Work Program, focusing on the Smallholder Palm Oil Replanting Program, Infrastructure Program, and Export Levy which constitute the sources of BLU funds. Additionally, the Board paid attention to preparations for the implementation of B40 biodiesel planned for 2025, without neglecting other programs such as human resource development, research and development, and partnership programs.BPDPKS's overall performance in 2024, based on Key Performance Indicators (KPIs), showed positive results with an average achievement index of 125.31%. Thirteen out of fourteen KPIs exceeded the set targets. Only one KPI, the Percentage of Smallholder Palm Oil Distribution and Replanting, fell below target.BPDPKS revenue from Export Levies and fund management returns in 2024 decreased by 17% compared to 2023, primarily due to a 20% drop in Export Levy receipts.Besides oversight, the Supervisory Board provided recommendations and input to ensure BPDPKS's programs are executed according to targets. The supervision aims to enhance BPDPKS's performance and monitor follow-up on the Board's recommendations to Management Officials, encouraging continued commitment to delivering optimal services aligned with BPDPKS's vision and mission while applying principles of good governance.Through the Audit Committee and special meetings with the Internal Audit Unit (SPI), the Supervisory Board continuously pushes for improved implementation of BPDPKS's functions and responsibilities in fund management in compliance with applicable regulations.Starting in 2024, the Supervisory Board also strives to meet its KPIs as stipulated in the Supervisory Board's Performance Contract with the Minister of Finance, signed on February 29, 2024. From the first semester of 2024, the Board also began reporting reviews on BLU Risk Management implementation.Nevertheless, the Supervisory Board still requires advice and up-to-date information from all stakeholders in the palm oil, coconut, and cocoa plantation sectors to ensure inclusive fund management for all involved parties and guarantee sustainable industries for palm oil, coconut, and cocoa plantations.The development of palm oil, coconut, and cocoa plantations will impact the economy, job creation, and the supply of environmentally friendly food and fuel, which must be understood by all parties as part of efforts towards food and energy security.

2.2 Laporan Direktur Utama

Report from the president director



Eddy Abdurrachman
Direktur Utama
President Director

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDPKS telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015.

Visi BPDPKS adalah menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan komitmen BPDPKS dalam mewujudkan visi tersebut melalui program-program strategis. Kinerja pengelolaan dana pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang positif. Realisasi Pendapatan untuk tahun 2024 adalah Rp28,82 triliun atau mencapai sebesar 101,49% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28,4 triliun. Pendapatan BPDPKS terdiri dari Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan Badan Layanan Umum, Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Lain-lain BLU, dengan alokasi terbesar untuk pembayaran insentif biodiesel dengan realisasi sebesar Rp28,81 triliun untuk volume biodiesel yang dibayarkan sebesar 11,16 JutaKL. Pelaksanaan program mandatory biodiesel yang berkelanjutan dalam upaya mendukung program pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga CPO dan/atau mengurangi terjadinya fluktuasi harga yang tajam sehingga dapat menjamin keberlangsungan industri sawit yang berkelanjutan.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan untuk mendorong peremajaan kebun kelapa sawit guna mendukung keberlangsungan sawit dan industri pendukungnya, penyaluran dana PSR tahun 2024 sebesar Rp10,25 triliun untuk 160.211 pekebun dan luas lahan sebesar 365.552 ha. Realisasi belanja program Sarana dan Prasarana sebesar Rp133,93 miliar, dengan 62 SK Direktur Utama untuk penyaluran SPPKS dalam bentuk barang,

Belanja program pengembangan SDM yang dikelola tahun 2024 sampai dengan Juli sebanyak 12.514 orang yang terdiri dari 6.077 orang untuk pendidikan dan 6.437 peserta pelatihan. Sementara itu, untuk realisasi program penelitian dan pengembangan sebanyak 125 riset dari target 80 riset dengan realisasi belanja sebesar Rp115,5 miliar. Program promosi dan kemitraan dengan realisasi belanja sebesar Rp143,74 miliar dengan jumlah kegiatan sebanyak 219 kegiatan eksternal dan 50 kegiatan internal. Secara keseluruhan, kinerja BPDPKS berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 tetap menunjukkan capaian positif, dengan rata-rata dari hasil pengukuran kinerja mencapai sebesar 112,75%. Sebagian besar IKU menunjukkan pencapaian di atas target, mencerminkan komitmen BPDPKS dalam menjalankan mandat secara profesional dan akuntabel.

The Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) was established based on the Minister of Finance Regulation Number 113/PMK.01/2015 concerning the Organization and Work Procedures of BPDPKS. It is a non-echelon organizational unit within the Ministry of Finance, directly under and responsible to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury. The agency was created to promote sustainable palm oil plantation development through the collection, management, and distribution of palm oil plantation funds as mandated by Law Number 39 of 2014 on Plantations, Government Regulation Number 24 of 2015 on Plantation Fund Collection, and Presidential Regulation Number 61 of 2015, which has been amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 66 of 2018 concerning the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds. To provide operational flexibility, BPDPKS has been designated as a working unit implementing the Public Service Agency Financial Management Pattern based on the Minister of Finance Decree Number 650/KMK.05/2015.BPDPKS's vision is to become a trusted fund management agency in developing sustainable palm oil as a national strategic commodity for the welfare of the Indonesian people. The 2024 performance achievements demonstrate BPDPKS's commitment to realizing this vision through strategic programs. Fund management performance in 2024 showed positive results. Revenue realization for 2024 was IDR 28.82 trillion, reaching 101.49% of the estimated revenue of IDR 28.4 trillion. BPDPKS's income consists of Palm Oil Plantation Fund Revenue, Public Service Agency Banking Service Income, Return of Previous Fiscal Year's Goods Expenditure, and Other Public Service Agency Income, with the largest allocation for biodiesel incentives payment amounting to IDR 28.81 trillion for biodiesel volumes paid totaling 11.16 million KL. The ongoing mandatory biodiesel program supports the government's effort to stabilize CPO prices and reduce sharp price fluctuations, thereby ensuring the sustainability of the palm oil industry.The Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR) aims to encourage the rejuvenation of palm oil plantations to support the sustainability of palm oil and its supporting industries. In 2024, PSR fund disbursement totaled IDR 10.25 trillion for 160,211 farmers covering an area of 365,552 hectares. Realization of the Infrastructure Program expenditure was IDR 133.93 billion, with 62 Decree Letters from the President Director for the distribution of SPPKS in the form of goods.The human resource development program managed in 2024 up to July reached 12,514 people, consisting of 6,077 in education and 6,437 training participants. Meanwhile, the research and development program realized 125 research projects from the target of 80, with expenditures amounting to IDR 115.5 billion. The promotion and partnership program had an expenditure realization of IDR 143.74 billion, with a total of 219 external and 50 internal activities.Overall, BPDPKS's performance based on the 2024 Key Performance Indicators (KPIs) continued to show positive achievements, with an average performance measurement result of 112.75%. Most KPIs exceeded targets, reflecting BPDPKS's commitment to carrying out its mandate professionally and accountably.







Profil BPDPKS

BPDPKS Profile



3.1 Riwayat Singkat BPDPKS
Brief History of BPDPKS

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan unit kerja yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, mengadministrasikan, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal 10 Juni 2015, BPDPKS ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU secara penuh melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.

Oil Palm Plantation Fund Management Agency is a work unit in the form of a Public Service Agency (BLU) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. BPDPKS is responsible for collecting, managing, administering, storing, and distributing funds for palm oil plantations. On June 10, 2015, BPDPKS was designated as a government agency that fully implements the BLU financial pattern through the Decree of the Minister of Finance No. 113/PMK.01/2015 regarding the Determination of BPDPKS at the Ministry of Finance as a Government Agency that Implements the Financial Management of Public Service Agencies in full.

BPDPKS membentuk Komite Pengarah yang terdiri dari 8 (delapan) kementerian yang bertanggung jawab dalam memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas, yang meliputi: 1 (satu) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua) dan 7 (tujuh) Anggota yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) kementerian berbeda antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian perindustrian, Kementerian perdagangan, Kementerian pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Komite Pengarah bertugas menyusun kebijakan berkaitan dengan penghimpunan dan penggunaan Dana, termasuk kebijakan pengelolaan Dana guna mendapatkan nilai tambah yang berkelanjutan serta melakukan monitoring atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan Dana.

BPDPKS formed a Steering Committee consisting of 8 (eight) ministries responsible for providing policy directions for the implementation of tasks that include: 1 (one) Coordinating Ministry for Economic Affairs (Chairman) and 7 (seven) Members divided into 7 (seven) different ministries, among others, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry, the Ministry of Trade, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of State-Owned Enterprises, and the Ministry of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency.

The Steering Committee is tasked with formulating policies relating to the collection, and use of funds, including policies for managing funds in order to obtain sustainable added value and monitoring the implementation of policies for the collection and use of funds.

BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan Komite Pengarah dengan memperhatikan program pemerintah.

BPDPKS memiliki program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang bertujuan mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, pengembangan biodiesel/replanting meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pengembangan industri, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah ekspor, serta mengedukasi dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Landasan hukum pendirian BPDPKS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 jo. PP No. 74 Tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 jo. Perpres 24 Tahun 2016 jo. Perpres 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dana dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU);
8. Peraturan Menteri Keuangan No 113 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
9. PMK No. 136 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan BLU BPDPKS.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)MK No. 650 Tahun 2015 tentang Penetapan BPDPKS sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum

BPDPKS is tasked with implementing the management of the Palm Oil Plantation Fund in accordance with the policies and regulations set by the Steering Committee by taking into account the government programs.

BPDPKS has a sustainable palm oil development program that aims to encourage research and development, business promotion, biodiesel development, replanting, improve facilities and infrastructure for industrial development, increase the number of business partners and the number of exports, as well as educate and improve the quality of community resources concerning palm oil plantations. In accordance with the brief history description, BPDPKS has never changed its name since it was first established until today.

The legal basis for establishing BPDPKS are as follows:

1. Law Number 17 of 2003 dated April 5, 2003 regarding State Finance;
2. Law no. 1 of 2004 dated January 1, 2004 regarding the State Treasury;
3. Law Number 39 of 2014 dated October 17, 2014 regarding Plantations;
4. Government Regulation No. 23 of 2005 jo. PP No. 74 of 2012 dated August 28, 2012 regarding the Financial Management of Public Service Agencies (BLU);
5. Government Regulation No. 24 of 2015 dated May 25, 2015 regarding the Collection of Plantation Funds;
6. Presidential Regulation No. 61 of 2015 dated May 25, 2015 jo. Presidential Decree 24 of 2016 jo. Presidential Decree 66 of 2018 regarding Fundraising and Use of Palm Oil Plantation Funds;
7. Regulation of the Minister of Finance Number 92/PMK.05/2011 regarding Business Plans and Budgets and Budget Implementation for Public Service Agencies (BLU);
8. Regulation of the Minister of Finance No. 113 of 2015 regarding the Organization and Work Procedure of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS);
9. PMK No. 136 of 2019 regarding BPDPKS BLU Service Tariffs.
10. Decree of the Minister of Finance No. 650/KMK.05/2015 regarding the Appointment of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency at the Ministry of Finance as a Government Agency Implementing the Financial Management of the Public Service Agency (BLU) MK No. 650 of 2015 regarding the Determination of BPDPKS as a Public Service Agency (BLU);
11. Regulation of the Director General of Treasury No. PER-20/PB/2012 regarding Technical Guidelines for the Preparation of Business Plans and Budgets for Public Service Agencies;

Identitas BPDPKS
BPDPKS Identity

Nama Perusahaan Name of the Company	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation Fund Management Agency
Nama Singkat Nick Name	:	BPDPKS
Alamat Kantor Address	:	Graha Mandiri Lantai 5 Jl. Imam Bonjol No.61, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Domisili Usaha Business Domicile	:	Jakarta Indonesia
Telepon Phone	:	(021) 3983 2091 – 94
Faksimili Facsimile	:	(021) 3983 2095
E-mail E-mail	:	info@bpdp.or.id pengaduan@bpdp.or.id
Website	:	www.bpdp.or.id
Media Sosial Social Media	:	Twitter : BPDPkelapasawit Instagram : bpdpkelapasawit Tiktok : bpdpsawit Facebook : bpdpsawit youtube : BPDP Sawit
Bidang Usaha Line of Business	:	Menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang bertujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penghimpunan dana bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat dan Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Collecting, administering, managing, storing, and distributing funds aimed at encouraging the development of sustainable oil palm plantations. The collection of funds comes from Palm Oil Plantation Business Actors, Funds from Financing Institutions, Community Funds and other legitimate funds. The funds collected include levies on exports of oil palm plantation commodities and/or their derivatives and fees.
Tanggal Berdiri Date of Establishment	:	10 Juni 2015
NPWP TIN	:	00.020.998.1-071.000
Jumlah Karyawan Total Employees	:	114 Karyawan di tahun 2024 114 Employees in 2024 114 Karyawan di tahun 2023 114 Employees in 2023 120 Karyawan di tahun 2022 120 Employees in 2022
Pemegang Saham Shareholders	:	100% Pemerintah Republik Indonesia 100 % Government of the Republic of Indonesia

Tujuan BPDPKS
Objective of BPDPKS

Sesuai dengan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum, BPDPKS bertugas menghimpun dana dari masyarakat sawit, kemudian menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat sawit dalam bentuk layanan berupa program-program sebagai upaya dalam mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yang meliputi:

In accordance with its function as a Public Service Agency, BPDPKS is tasked with collecting funds from the palm oil community, then redistributing the collected funds to the them in the form of services of programs as an effort to encourage the development of sustainable palm oil plantations, which include:

Tujuan strategis pada RSB 2020-2024 | Strategic objective of 2020-2024 RSB:

01 **Terjaminnya keberlanjutan dana perkebunan kelapa sawit**
Guaranteed sustainability of palm oil plantation fund

02 **Terbentuknya stabilisasi harga CPO**
Stabilized CPO price

03 **Terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi pekebun rakyat**
Improvement of smallholders' welfare

04 **Terciptanya iklim investasi yang positif pada industri sektor hilir**
Creation of positive climate of investment for upstream industry

05 **Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja BPDPKS**
Enhanced stakeholders' trust to OPPFMA's performance

Tujuan utama dibentuknya BPDPKS dalam menghimpun, mengelola, mengadministrasikan, menyimpan, dan menyalurkan dana adalah salah satu upaya dalam rangka pengembangan industri perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dana yang dihimpun oleh BPDPKS bersumber dari Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat, serta sumber Dana lain yang sah. Dana yang dihimpun meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya dan iuran. Selanjutnya dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:

- Pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme kemandirian dan berdaya saing serta untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.
- Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dimaksudkan untuk (1) pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit; (2) kebutuhan pangan; (3) hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit; (5) penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- Promosi Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk meningkatkan (1) citra nilai produk Kelapa Sawit (2) informasi pasar kelapa sawit, (3) memperluas pasar kelapa sawit,(4) meningkatkan investasi perkebunan kelapa sawit dan atau (5) menumbuh kembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan kelapa sawit;
- Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit serta menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
- Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Sarana dan prasarana terdiri atas benih, pupuk, pestisida, alat pasca panen dan pengolahan hasil, jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan, alat transportasi, mesin pertanian, pembentukan infrastruktur pasar dan verifikasi atau penelusuran teknis.

The main purpose of establishing BPDPKS in collecting, managing, administering, storing, and distributing funds is one of the efforts in the context of developing a sustainable palm oil plantation industry. Funds collected by BPDPKS are sourced from Palm Oil Plantation Business Actors, Funding Institution, Community Funds, and other legitimate sources of funds. Funds collected include levies on exports of palm oil plantation commodities and/or their derivatives and fees. Furthermore, the funds raised are used for the following purposes:

- The development of human resources for palm oil plantations is intended to increase knowledge, skills, professionalism, independence, and competitiveness as well as to improve technical, managerial, and entrepreneurial abilities.
- Research and development of palm oil plantations, is intended to (1) fulfill the results of palm oil plantations; (2) food needs; (3) downstreaming the palm oil plantation industry; (5) supply and utilization of biodiesel type biofuel.
- Promotion of Palm Oil Plantation, is intended to improve (1) the image of the value of Palm Oil products (2) information on the palm oil market, (3) expand the palm oil market, (4) increase investment in palm oil plantations and/or (5) develop a marketing center palm oil plantation commodity;
- Palm oil plantation rejuvenation, intended to increase the productivity of palm oil plantations and to maintain the area of palm oil plantations so that they can be utilized optimally; and
- Palm Oil Plantation Facilities and Infrastructure, intended to increase production, productivity, and quality of palm oil plantation products. Facilities and infrastructure consist of seeds, fertilizers, pesticides, post-harvest tools and product processing, garden roads and access roads to public roads and/or to ports, transportation equipment, agricultural machinery, establishment of market infrastructure, and technical verification or investigation.

Visi, Misi, Budaya BPDPKS

Vision, Mission, Culture of BPDPKS

Pengertian visi didefinisikan sebagai suatu gambaran yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Vision is defined as a depiction that states the aspirations or dreams of an organization or company to be achieved in the future, while mission is a general formulation of the efforts that will be carried out to realize the vision.

Visi

Menjadi pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia

Vision

To become a trusted fund manager in developing sustainable palm oil as a national strategic commodity for the welfare of the Indonesian people.

Misi

Menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel.

Adapun misi BPDPKS tersebut diterapkan untuk kepentingan:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Penelitian dan pengembangan;
3. Promosi;
4. Peremajaan;
5. Sarana dan prasarana;
6. Pemenuhan kebutuhan pangan;
7. Hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit;
8. Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Mission

Implement Government policies in sustainable palm oil development programs through the collection, development, and distribution of integrated and effective palm oil funds, in a professional and accountable manner.

The BPDPKS mission is implemented for the benefit of:

1. Human Resource Development;
2. Research and development;
3. Promotion;
4. Rejuvenation;
5. Facilities and infrastructure;
6. Fulfillment of food needs;
7. Downstream palm oil plantation industry;
8. Preparation and utilization of biofuels.

Budaya Kerja BPDPKS

BPDPKS memiliki nilai-nilai inti yang menjadi budaya kerjanya serta selaras dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu:

BPDPKS Work Culture

BPDPKS has core values that become its work culture and are in line with the values of the Ministry of Finance, they are:

Integritas **Integrity**	BPDPKS memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dengan berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral BPDPKS is committed to upholding integrity in carrying out its duties by thinking, speaking, behaving, and acting properly and correctly, and upholding the code of ethics and moral principles.
Profesionalisme **Professionalism**	BPDPKS terus berupaya untuk bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi BPDPKS continues to strive to work thoroughly and accurately on the basis of the best competencies with full responsibility and high commitment
Sinergi **Synergy**	BPDPKS akan senantiasa membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan BPDPKS will always build and ensure productive internal cooperative relationships and harmonious partnerships with stakeholders
Pelayanan **Service**	BPDPKS akan senantiasa berupaya memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan, yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman BPDPKS will continuously strive to provide services that meet stakeholder satisfaction, which are carried out wholeheartedly, transparently, swiftly, accurately, and safely.
Kesempurnaan **Perfection**	BPDPKS senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memberikan dan menjadi yang terbaik BPDPKS continuously makes efforts to improve in all fields to provide and be the best

Tugas, Fungsi dan Strategi BPDPKS

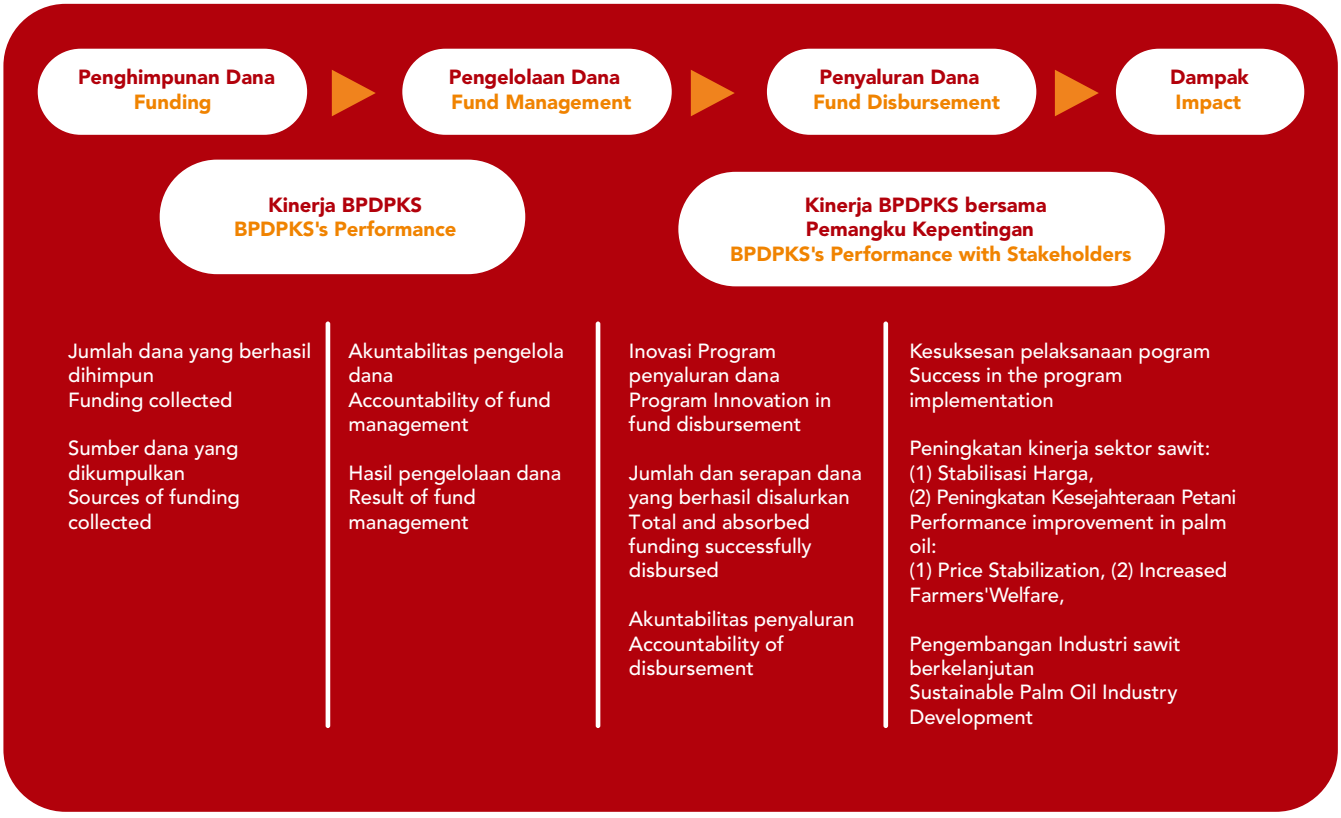
Duties, Functions, and Strategy of BPDPKS

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas BPDPKS adalah mengumpulkan pungutan dan iuran dari Kelapa sawit atau turunannya dan menyalurkannya sesuai fungsi - fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan DPKS untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelapa sawit;
3. Mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit;
4. Meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan kelapa sawit untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
5. Meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dunia.

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 113/PMK.01/2015 regarding the Organization and Work Procedure of Dana Perkebunan Kelapa Sawit Management Agency, the task of BPDPKS is to collect levies and fees from palm oil or its derivatives and distribute them according to the following functions:

1. Managing DPKS to ensure the sustainability of the sustainable palm oil program as a national strategic commodity;
2. Increasing the capacity of human resources in the palm oil sector;
3. Encouraging the development of downstream palm oil industry;
4. Increasing the optimization of the use of palm oil plantation products for industrial raw materials, renewable energy, and exports;
5. Increasing and maintaining the stability of palm oil plantation business income by optimizing prices amidst fluctuations in world palm oil commodity prices.



Strategi BPDPKS

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor industri sawit yang dapat mempengaruhi harga CPO begitu juga berdampak pada tingkat kesejahteraan Petani, BPDPKS telah menyusun beberapa upaya strategis dalam rangka memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, antara lain:

BPDPKS Strategy

In facing various challenges that can affect CPO price as well as impact on the welfare of farmers, BPDPKS has compiled several strategic efforts in order to mend this condition and improve the performance of the Indonesian palm oil sector, including:

Perbaikan Kesejahteraan Petani
Improvement of Smallholders' Welfare

- Program Peremajaan Sawit Rakyat
  small-scale Palm Oil Replanting Program
- Riset Sektor Hulu
  Upstream Research
  Penyempurnaan data sawit Indonesia, peningkatan kualitas benih dan inovasi teknologi perkebunan
  Improving Indonesia's palm oil data, seed quality, and plantation technology innovation
- Sarana dan Prasarana
  Facilities and Infrastructure
  Efisiensi biaya produksi dan transportasi
  Efficiency of production and transportation cost
- Pelatihan Petani dan SDM Industri Sawit
  Small holders and HR Training in the Palm Oil Industry
  Dalam rangka peningkatan produktivitas dan penggunaan teknis perkebunan sawit yang ramah lingkungan
  Enhancing productivity and technical use of environmentally friendly palm oil plantations

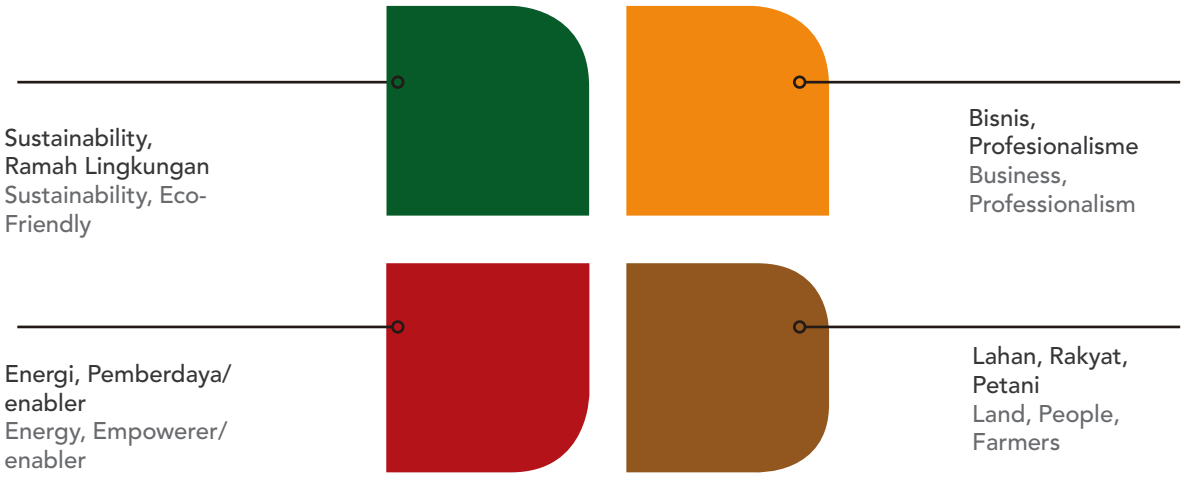
Stabilitasi Harga CPO
CPO Price Stabilization

- Dukungan Pendanaan Biodiesel
  Biodiesel Funding Support
  Dalam rangka meningkatkan daya serap pasar & pengendalian overclock produk sawit
  increasing market obsorption & controlling overstock of palm oil product
- Promosi dan Advokasi Sawit Positif
  Positive Palm Oil Promotion and Advocacy
  Mempertahankan dan memperluas Pasar Domestik dan Luar Negri
  Maintaining and expanding Domestic and International Markets
- Riset Pasar dan Produk
  Market and Product Research
  Dalam rangka menyusun kebijakan terkait penguatan pasar sawit, stabilitas harga dan pengembangan produk turunan dengan nilai tambah tinggi
  Formulating policies related to strengthening the palm oil market, pricestability, and development of derivative product with high added value

Memperkuat Industri Hilir
Strengthening Downstream Industry

- Riset dan Pengembangan Program Konversi Sawit Menjadi Bio Hydrocarbon Fuel
  Research and Development Program for Converting Palm Oil into Bio-Hydrocarbon Fuel
  Dukungan Riset untuk pembuatan katalis, Insentif untuk produsen Bio-Hydrocarbon Fuel
  Research to find catalyst, Incentive for producers of Bio-Hydrocarbon Fuel
- Dukungan Pada Program Hilirisasi lainnya
  Support in Other Downstream Programs
  Dukungan Riset, insentif untuk industri oleokimia
  Research Support, incentive for the Oleochemicals Industry

Logo dan Filosofi
Logo and Its Philosophy



Semua beradadi dasar / latarbelakang warna putih = transparansi, akuntabilitas
Tulisan sawit = dana dan pemberdayaan dari dan untuk sawit

Everything is on the bottom/white background= transparency, accountability
Sawit writing = funds and empowerment from and for palm oil

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/ 2015, BPDPKS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut, struktur organisasi BPDPKS terdiri dari:

1. Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
3. Direktorat Penghimpunan Dana;
4. Direktorat Penyaluran Dana;
5. Direktorat Kemitraan;
6. Satuan Pemeriksa Internal; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

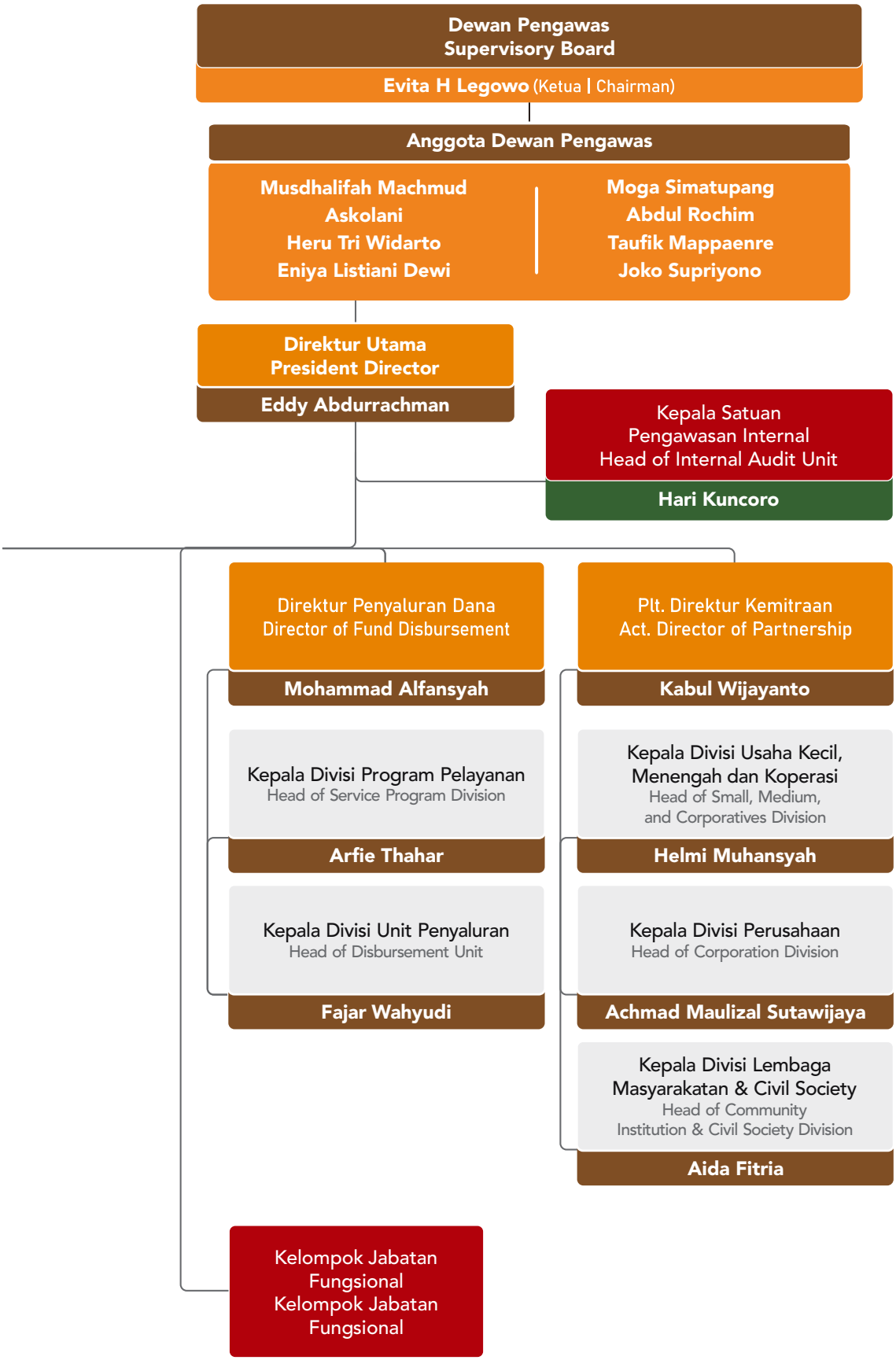
Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 113/PMK.01/2015, BPDPKS is under and accountable to the Minister of Finance through the Directorate General of Treasury. According to the Minister of Finance Regulation, the organizational structure of BPDPKS consists of:

1. Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management;
2. Directorate of Planning and Fund Management;
3. Directorate of Fund Collecting;
4. Directorate of Disbursement of Funds;
5. Directorate of Partnership;
6. Internal Audit Unit; and
7. Functional Position Group.



- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.53/KMK.01.2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum BPDPKS dan No.54/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan pada Badan Layanan Umum BPDPKS, efektif tanggal 2 Maret 2020, Eddy Abdurrachman dan Zaid Burhan Ibrahim masing-masing menggantikan Dono Boestami dan Catur Ariyanto Widodo.
  Based on Minister of Finance Decree No.53/KMK.01/2020 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the BPDPKS Public Service Agency, effective 2 March 2020, Eddy Abdurrachman and Zaid Burham Ibrahim replaced Dono Boestami and Catur Ariyanto Widodo respectively

- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum BPDPKS Evita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhana, Abdul Rochim dan Taufik Mappaenre masing-masing menggantikan Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono dan Loso Judijanto
  Based on Minister of Finance Decree No.499/KMK.05/2020 dated 4 November 2020 on the Establishment of a Supervisory Board at BPDPKS Public Service Agency, vita H Legowo, Dadan Kusdiana, Indrasari Wisnu Wardhana, Abdul Rochim and Taufik Mappaenre respectively replaced Rusman Heriawan, Djoko Siswanto, Kasan Muhri, Achmad Sigit Dwiwahjono and Loso Judijan


Dewan Pengawas
Supervisory Board
Evita H Legowo (Ketua | Chairman)
Anggota Dewan Pengawas
Musdhalifah Machmud
Askolani
Heru Tri Widarto
Eniya Listiani Dewi
Moga Simatupang
Abdul Rochim
Taufik Mappaenre
Joko Supriyono
Direktur Utama
President Director
Eddy Abdurrachman
Kepala Satuan
Pengawasan Internal
Head of Internal Audit Unit
Hari Kuncoro
Direktur Penyaluran Dana
Director of Fund Disbursement
Mohammad Alfansyah
Plt. Direktur Kemitraan
Act. Director of Partnership
Kabul Wijayanto
Kepala Divisi Program Pelayanan
Head of Service Program Division
Arfie Thahar
Kepala Divisi Unit Penyaluran
Head of Disbursement Unit
Fajar Wahyudi
Kepala Divisi Usaha Kecil,
Menengah dan Koperasi
Head of Small, Medium,
and Corporatives Division
Helmi Muhansyah
Kepala Divisi Perusahaan
Head of Corporation Division
Achmad Maulizal Sutawijaya
Kepala Divisi Lembaga
Masyarakatan & Civil Society
Head of Community
Institution & Civil Society Division
Aida Fitria
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kelompok Jabatan
Fungsional

Manajemendan Pejabat BPDPKS
BPDPKS Management and Officials

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Pengawas
Composition and Term of Office of Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Establishment	Tahun Pengagkatan Years of Establishment
Evita H Legowo	Ketua Dewan Pengawas Supervisory Board Chairman	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020	2020
Musdhalifah Machmud	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KM K.05/2020 tanggal 4 November 2020 Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020	2020
Askolani	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor58/KMK.05/2023 tanggal 22 Februari 2023. Decree of the Minister of Finance No. 58/KMK.05/2023 dated Februari22, 2023.	2023
Heru Tri Widarto	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 Tanggal 05 Juni 2024. Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated June 5, 2024.	2024
Eniya Listiani Dewi	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 05 Juni 2024. Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated June 5, 2024.	2024
Moga Simatupang	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 05 Juni 2024. Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated June 5, 2024	2024
Abdul Rochim	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020	2020
Taufik Mappaenre	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020	2020
Joko Supriyono	Anggota Dewan Pengawas Supervisory Board Member	Keputusan Menteri Keuangan Nomor499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020	2020

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi
Composition and Term of Office of the Board of Directors

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Establishment	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Eddy Abdurrachman	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020 Decree of the Minister of Finance No. 53/KMK.01/2020 dated March 2, 2020	Maret 2020 – Sekarang March 2020 - present
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management	Zaid Burhan Ibrahim	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020 Decree of the Minister of Finance No. 53/KMK.01/2020 dated March 2, 2020	Maret 2020 – Sekarang March 2020 - present
Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Director of Planning and Fund Management	Kabul Wijayanto	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Decree of the Minister of Finance No. 739/KMK.05/2019 dated September 19, 2019	Oktober 2019 – Sekarang October 2019 - present
Plt. Direktur Kemitraan Act. Director of Partnership	Kabul Wijayanto	Surat Perintah Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PRIN-2/DPKS/2022 tanggal 14 Januari 2022 Order of the President Director of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency Number- dated January 14, 2022	Januari 2022 -Sekarang January 2022 - present
Direktur Penyaluran Dana Director of Fund Disbursement	Mohammad Alfansyah	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 354/KMK.01/2024 tanggal 9 September 2024 Decree of the Minister of Finance No.354/KMK.01/2024 dated	September 2024– Sekarang March 2020 - present
Direktur Penghimpunan Dana Director of Fund Collection	Normansyah Hidayat Syahruddin	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 354/KMK.01/2024 tanggal 9 September 2024 Decree of the Minister of Finance No. 354/KMK.01/2024 dated September 9, 2024	September 2024 – Sekarang March 2020 - present
	Sunari	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tanggal 19 September 2019 Decree of the Minister of Finance No. 739/KMK.05/2019 dated September 19, 2019 September 9, 2024	Oktober 2019 – September 2024 October 2019 – Seotember 2024

Pejabat Non-Struktural BPDPKS

BPDPKS Non-Structural Officer

Pejabat Non-Struktural BPDPKS per 31 Desember 2023

BPDPKS Non-Structural Officer as of December 31, 2023

	Nama Name	Jabatan Position	Periode masa jabatan Term of Office
SPI	Hari Kuncoro	Kepala Satuan Pengawasan Internal Head of Internal Control Unit	2019 - Sekarang 2019 - present
DIREKTORAT 1	Adi Sucipto	Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia Head of General and Human Resources Division	2022– Sekarang 2022 - present
	Barry Dharmawan	Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Head of Compliance and Risk Management Division	2024 – Sekarang 2024 - present
	Hesti Pratiwi	Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi Head of Budget and Accounting Division	2023- Sekarang 2023 - present
DIREKTORAT 2	Heri Praptomo	Kepala Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan Head of Replanting, Reforestation and Plantation Promotion Division	2023 - Sekarang 2023 - present
	Triana Meinarsih	Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Head of Human Resources Education, Research and Development, and Development of Facilities and Infrastructure Division	2019 - Sekarang 2019 - present
	Nugroho Adi Wibowo	Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel Head of Biodiesel Development Division	2020 – Sekarang 2020 - present
DIREKTORAT 3	Iskandar	Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan iuran Produk Turunan Head of Division of Fund and Expense for Derivative Product Collection Division	2024 – Sekarang 2024 - present
	Ahmad Munir	Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan iuran CPO Head of CPO Fees and Fees Collection Division	2022 - Sekarang 2022 - present
DIREKTORAT 4	Arfie Thahar	Kepala Divisi Program Pelayanan Head of Service Program Division	2019 - Sekarang 2019 – present
	Fajar Wahyudi	Kepala Divisi Unit Penyaluran Head of Distribution Unit	2017 - Sekarang 2017 - present
DIREKTORAT 5	Helmi Muhansyah	Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Head of Small, Medium Enterprises and Cooperatives Division	2018 – Sekarang 2018 - present
	Achmad Maulizal Sutawijaya	Kepala Divisi Perusahaan Head of Corporation Division	2018 – Sekarang 2018 - present
	Aida Fitria	Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan &Civil Society Head of Community Institution & Civil Society Division	2022 – Sekarang 2022 - present

Profil Dewan Pengawas





Supervisory Board Profile



Evita H Legowo

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Warga negara Indonesia, Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPDPKS sejak 4 November 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.0S/2020 Tanggal 4 November 2020

Indonesian citizen,
Has served as Chairman of the BPDPKS Supervisory Board since November 4, 2020, based on the Decree of the Minister of Finance Number 499/KMK.0S/2020 dated November 4, 2020

Pendidikan
Beliau meraih gelar S1 Sarjana Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1974. Memperoleh gelar Doktor di Bidang Ilmu Teknik di Technical University of Clausthal, Jerman pada tahun 1991.

Perjalanan Karir
Pernah menjabat sebagai Kepala Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS" (2002 – 2006); Staff Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bidang SDM dan Teknologi (2006-2008); Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2008 – 2012; Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) (2010 – 2013); Mempunyai banyak pengalaman untuk Kerja sama International di bidang energi Sejak 2002 – 2012; Supervisory Board of Indonesian Petroleum Association (2016 – 2019).

Education
He earned a Bachelor's degree in Chemistry at the Bandung Institute of Technology (ITB) in 1974. He obtained a Doctorate in Engineering at the Technical University of Clausthal, Germany in 1991.

Career
Previously served as Head of Research and Development Center for Oil and Gas Technology "LEMIGAS" (2002 – 2006); Expert Staff of the Minister of Energy and Mineral Resources, Human Resources and Technology (2006-2008); Director General of Oil and Gas 2008 – 2012; Member of the Board of Commissioners of PT Pertamina (Persero) (2010 – 2013); Has a lot of experience for International Cooperation in the energy sector Since 2002 – 2012; Supervisory Board of Indonesian Petroleum Association (2016 – 2019).



Musdhalifah Machmud

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 6 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:454/ KMK.05/ 2018 Tanggal 6 Juni 2018.

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since June 6, 2018 based on the Decree of the Minister of Finance Number: 454/ KMK.05/2018 dated June 6, 2018.

Pendidikan

Beliau meraih gelar S1 Manajemen Hutan di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1987, menyelesaikan pendidikan Diploma of Monitoring Indonesian Environment di International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) di Enschede, Netherland pada 1992, dan melanjutkan pendidikan Magister Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2003 dan meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2020.

Education

He earned a Bachelor's degree in Forest Management at the Bogor Agricultural University (IPB) in 1987, completed his Diploma of Monitoring Indonesian Environment at the International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC) in Enschede, Netherland in 1992, and continued his Masters in Development Studies at the Institute Technology Bandung (ITB) in 2003 and earned a Doctorate in Business Management from the Bogor Agricultural Institute in 2020.

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan SDA Kehutanan (2003-2006); Plt. Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kelautan (2006-2007); Plt. Asisten Deputi Urusan Perkebunan dan Hortikultura (2007-2009); Asisten Deputi Urusan Perkebunan dan Hortikultura (2009-2015); dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis (2015-Sekarang).

Career

In the course of his career, he served as Head of Forestry Natural Resources Utilization Division (2003-2006); Acting Assistant Deputy for Agriculture and Maritime Affairs (2006-2007); Acting Assistant Deputy for Plantations and Horticulture (2007-2009); Assistant Deputy for Plantation and Horticulture Affairs (2009-2015); and Deputy for Food and Agribusiness Coordination (2015-Present).



Eniya Listiani Dewi

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 5 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 216/KMK.05/2024 Tanggal 5 Juni 2024.

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since June 5, 2024 based on the Decree of the Minister of Finance Number: 216/KMK.05/20243 dated Juni 5, 2024.

Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Jepara, Jawa Tengah. Gelar Sarjana Sains (S.Si.) dalam bidang Biologi dengan peminatan Entomologi diperoleh dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Selanjutnya, beliau melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang Biologi, juga dengan fokus pada Entomologi, dari Universiteit Leiden, Belanda.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1999, dan sejak itu telah mengemban berbagai tugas penting di sektor pertanian, khususnya dalam pengelolaan subsektor perkebunan. Karier beliau dimulai dari jabatan fungsional sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Ahli Pertama dan Ahli Muda, sebelum kemudian dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Perkebunan dan Kepala Seksi Dampak Perubahan Iklim. Selanjutnya, beliau menduduki beberapa posisi strategis di tingkat eselon III, seperti Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim, Kepala Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT, serta Kepala Subdirektorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran. Beliau juga memimpin Subdirektorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar sebelum diangkat sebagai Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar pada tahun 2020. Kariernya terus menanjak ketika dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian secara definitif menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan sejak 2022. Kini, beliau mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan dan berperan penting dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang perkebunan.

Education

He completed his primary and secondary education in Jepara, Central Java. He earned a Bachelor of Science (S.Si.) degree in Biology with a specialization in Entomology from the Bandung Institute of Technology (ITB). He then pursued graduate studies and obtained a Master of Science (M.Sc.) degree in Biology, also focusing on Entomology, from Leiden University, the Netherlands.

Career

He began his career as a Civil Servant in 1999 and has since held various important roles in the agricultural sector, particularly in plantation subsector management. His career started with functional positions as a First and Junior Expert Plant Pest Controller (POPT), before being entrusted as Head of Plantation Resource Conservation Section and Head of Climate Change Impact Section.He then held several strategic echelon III positions, including Head of Subdirectorate for Identification and Control of Seasonal Crop Pests, Head of Subdirectorate for Pest Control Data and Institutional Affairs, and Head of Subdirectorate for Business Disturbance, Climate Change Impact, and Fire Prevention. He also led the Subdirectorate for Annual and Refreshing Crop Seeds before being appointed Director of Annual and Refreshing Crops in 2020.His career advanced further when he was appointed Acting Secretary of the Directorate General of Plantations, then definitively served as Secretary of the Directorate General of Plantations since 2022. Currently, he holds the position of Acting Director General of Plantations and plays a key role in formulating and implementing national policies in the plantation sector.



Askolani

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 22 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:58/ KMK.05/ 2023 Tanggal 22 Februari 2023.

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since February 22, 2023 based on the Decree of the Minister of Finance Number: 58/ KMK.05/2023 dated February 22, 2023.

Pendidikan

Alumnus Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1990 dan penyandang gelar Master of Arts (M.A.) jurusan Economic dari University of Colorado – Amerika Serikat pada tahun 1999, dilahirkan di Palembang – Sumatera Selatan, 11 Juni 1966.

Education

An alumnus of Universitas Sriwijaya in South Sumatra, majoring in Economics and Development Studies in 1990, and holder of a Master of Arts (M.A.) degree in Economics from the University of Colorado, USA, in 1999. He was born in Palembang, South Sumatra, on June 11, 1966.

Perjalanan Karir

Sebelum menduduki jabatan sekarang, pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Anggaran terhitung tanggal 27 November 2013 yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
Sepanjang karier kedinasan, Beliau telah memperoleh beberapa penghargaan diantaranya penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbesar kedua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Pada tahun 2021, Beliau berhasil meraih meraih top 3 eselon I pada Pengukuran Tingkat Kematangan Implementasi The New Thinking of Working (NTOW). Atas pengabdian Beliau hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX tahun.

Career

Before his current position, he held the role of Director General of Budget starting November 27, 2013, responsible for formulating and implementing policies and technical standardization in budgeting. Throughout his service career, he has received several awards, including the second-largest gratification reporter award by the Corruption Eradication Commission in 2015. In 2021, he achieved the top 3 of echelon I in the Measurement of the Maturity Level of Implementing The New Thinking of Working (NTOW). For his service, the President of the Republic of Indonesia awarded him the Satyalancana Karya Satya for thirty years of service.



Moga Simatupang

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 5 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 216/KMK.05/2024 Tanggal 5 Juni 2024.

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since June 5, 2024 based on the Decree of the Minister of Finance Number: 216/KMK.05/20243 dated Juni 5, 2024.

Pendidikan

Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen Perekonomian Negara pada STIA - LAN.

Perjalanan Karir

Mengawali penugasan luar negeri, pada tahun 2009 hingga 2012 beliau menjabat sebagai Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Jerman, Kementerian Perdagangan. Setelah menyelesaikan masa tugas tersebut, beliau kembali ke tanah air dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 hingga 2014.Selanjutnya, beliau ditugaskan sebagai Atase Perdagangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Perancis dari tahun 2014 hingga 2018. Sekembalinya ke Indonesia, beliau menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan dan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dari tahun 2018 hingga 2021.Pada tahun 2021 hingga 2022, beliau menjabat sebagai Direktur Impor pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Kemudian, pada tahun 2022, beliau menduduki beberapa jabatan strategis secara berurutan, yaitu sebagai Direktur Tertib Niaga di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan dilanjutkan sebagai Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar.Memasuki tahun 2023, beliau dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan, sebuah jabatan yang diemban hingga saat ini.

Education

He earned a Bachelor's degree in State Economic Management from STIA - LAN.

Career

He began his overseas assignment from 2009 to 2012 as Head of the Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) in Germany, Ministry of Trade. After completing this assignment, he returned to Indonesia and was appointed Head of Finance Section at the Secretariat of the Directorate General of Negotiations and International Trade, Ministry of Trade from 2013 to 2014.Subsequently, he served as Trade Attaché at the Embassy of the Republic of Indonesia in France from 2014 to 2018. Upon returning to Indonesia, he was appointed Secretary of the Directorate General of Negotiations and International Trade, Ministry of Trade from 2018 to 2021.From 2021 to 2022, he served as Director of Import at the Directorate General of Foreign Trade. Then, in 2022, he held several strategic positions sequentially: Director of Trade Compliance at the Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance, followed by Expert Staff for Market Security.In 2023, he was entrusted with the role of Director General of Consumer Protection and Trade Compliance at the Ministry of Trade, a position he holds to this day.



Heru Tri Widarto

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 5 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 216/KMK.05/2024 Tanggal 5 Juni 2024.

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since June 5, 2024 based on the Decree of the Minister of Finance Number: 216/KMK.05/20243 dated Juni 5, 2024.

Pendidikan

Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jepara, Jawa Tengah. Gelar Sarjana Sains (S.Si.) diraih dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan peminatan Biologi, khususnya di bidang Entomologi. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang Biologi (Entomologi) dari Universiteit Leiden, Belanda.

Education

He completed his primary and secondary education in Jepara, Central Java. He earned a Bachelor of Science (S.Si.) degree from the Bandung Institute of Technology (ITB), majoring in Biology with a focus on Entomology. He then pursued graduate studies and obtained a Master of Science (M.Sc.) degree in Biology (Entomology) from Leiden University, the Netherlands.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1999 dan menapaki berbagai jabatan teknis dan struktural di lingkungan Kementerian Pertanian, khususnya di Direktorat Jenderal Perkebunan.Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai POPT Ahli Pertama dan Ahli Muda, lalu dipercaya memimpin berbagai Subdirektorat strategis, seperti Identifikasi dan Pengendalian OPT, Data dan Kelembagaan, serta Dampak Perubahan Iklim. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan kemudian diangkat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.Saat ini, beliau mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Karier panjang beliau mencerminkan dedikasi yang tinggi dalam membangun sektor perkebunan nasional.

Career

He began his career as a Civil Servant in 1999 and has held various technical and structural positions within the Ministry of Agriculture, particularly in the Directorate General of Plantations. Throughout his career, he served as a First and Junior Expert in Plant Pest Control Officers (POPT), and was entrusted to lead several strategic subdirectorates, including Pest Identification and Control, Data and Institutional Affairs, and Climate Change Impact.He also served as Director of Perennial and Refreshing Crops and was later appointed Secretary of the Directorate General of Plantations. Currently, he holds the position of Acting Director General of Plantations at the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia.His long career reflects a strong dedication to developing the national plantation sector.



Abdul Rochim

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 4 November 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.0S/2020 Tanggal 4 November 2020

Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since November 4, 2020, based on the Decree of the Minister of Finance Number 499/KMK.0S/2020 dated November 4, 2020

Pendidikan
Memperoleh gelar Sarjana Teknik di Universitas Indonesia pada tahun 1998 dan Gelar Magister Sains dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada tahun 2000

Perjalanan Karir
Pernah menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Industri Agro (2010-2014), Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (2014-2017), Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar (2017-2019)

Education
Obtained a Bachelor of Engineering degree at the University of Indonesia in 1998 and a Master of Science degree from the Faculty of Administrative Sciences, University of Indonesia in 2000

Career
Previously served as Secretary of the Directorate General of Agro Industry (2010-2014), Director of Food, Marine Products and Fisheries Industry (2014-2017), Director of Beverage Industry, Tobacco Products and Fresheners (2017-2019)



Taufik Mappaenre

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 4 November 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.0S/2020 Tanggal 4 November 2020
Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since November 4, 2020, based on the Decree of the Minister of Finance Number 499/KMK.0S/2020 dated November 4, 2020

Pendidikan

Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trisakti, Indonesia, LL.M dari Harvard Law School, Amerika Serikat dan Juridical Doctor dari Leiden University, Belanda.

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan penting, baik di pemerintahan maupun swasta. Beliau pernah bekerja sebagai staf pemasaran pada PT Coca Cola Indonesia; Kepala Bagian pada Biro Hukum dan Perundang-undangan, Setkab/Setneg; Kepala Divisi Hukum AMI dan Deputi Ketua pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Konsultan Hukum Senior pada Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi RI; Wakil Ketua pada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Kementerian Perdagangan RI; Tenaga Ahli Bidang Hukum pada Menteri Perumahan Rakyat RI; Staf Khusus Bidang Hukum dan Legislasi pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI; Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Pemerintah pada Menteri Perindustrian RI; Penasehat Senior pada Kantor Konsultan Hukum AZP; Partner pada MRP Law Office (2013 – sekarang); Pendiri dan Managing Partner pada TMP Legal Consultant (2016 – sekarang); Pendiri MyKonsul Marketplace Platform (2018 – sekarang); dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI (2018 – sekarang)

Education

He holds a law degree from Trisakti University, Indonesia, an LL.M from Harvard Law School, United States and a Juridical Doctor from Leiden University, the Netherlands.

Career

In the course of his career, he was trusted to occupy various important positions, both in government and private. He has worked as a marketing staff at PT Coca Cola Indonesia; Head of Section at the Bureau of Law and Legislation, Regency/Setneg Secretariat; Head of AMI's Legal Division and Deputy Chairperson of the National Bank Restructuring Agency; Senior Legal Consultant at the Secretariat of the National Team for Increasing Exports and Increasing Investment of the Republic of Indonesia; Deputy Chairperson of the Indonesian Trade Security Committee, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia; Legal Expert at the Minister of Public Housing of the Republic of Indonesia; Special Staff for Law and Legislation at the Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia; Expert in Law and Government Policy at the Minister of Industry of the Republic of Indonesia; Senior Advisor at AZP Legal Consulting Firm; Partner in MRP Law Office (2013 – present); Founder and Managing Partner at TMP Legal Consultant (2016 – present); Founder of MyKonsul Marketplace Platform (2018 – present); and the Assistant Team for the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia (2018 – present)



Joko Supriyono

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Warga negara Indonesia,
Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPDPKS sejak 26 Juni 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 714/ KMK.05/ 2015 Tanggal 26 Juni 2015.
Indonesian citizen,
Has served as a Member of the BPDPKS Supervisory Board since 26 June 2015, based on the Decree of the Minister of Finance Number 714/KMK.05/2015 dated 26 June 2015.

Pendidikan

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun (1986).

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Asisten Afdeling di PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Tenaga Instruktur Di PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994. Selama kurun waktu tahun 1995 sampai sekarang menduduki beberapa jabatan di PT Astra Agro Lestari Tbk sebagai Departemen Head-Human Resources (1995 -1999), Division Head - Human Resources (2000 - 2002), Area Director - Riau Region (2002 - 2005), Deputy Director - Operation (2005 - 2007), Director - Human Resources (2007 - 2009), Director- Env & Social Responsibility (2009 - 2011), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Director of Sumatera Operation (2011 - 2015), Director in charge of Sustainability and Public Relation, President Commissioner of Sumatera Operation (2015 - sekarang). Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan di organisasi profesi antara lain: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau sebagai Ketua (2003 -2006), Anggota Komite GAPKI Pusat (2008 -2009), Sekretaris Jenderal GAPKI Pusat (2009 -2015), Ketua Umum GAPKI Pusat (2015 - sekarang), Ketua Bidang Infrastruktur dan Lahan di Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (2012 - 2015).

Education

He earned a Bachelor's degree from the Faculty of Agriculture, Gadjah Mada University, Yogyakarta in (1986).

Career

In the course of his career, he served as Assistant Afdeling at PT Perkebunan II, Medan (1986 - 1994), Instructor at PT Wahana Kendali Mutu, Jakarta (1986-1994. During the period 1995 until now, he has held several positions at PT Astra Agro Lestari Tbk as Department Head-Human Resources (1995 -1999), Division Head - Human Resources (2000 - 2002), Area Director - Riau Region (2002 - 2005), Deputy Director - Operation (2005 - 2007), Director - Human Resources (2007 - 2009), Director-Env & Social Responsibility (2009 - 2011), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Director of Sumatra Operations (2011 - 2015), Director in charge of Sustainability and Public Relations, President Commissioner of Sumatra Operation (2015 - present) In addition, he has also held various positions in professional organizations including: Association of Indonesian Palm Oil Entrepreneurs (GAPKI) Riau Branch as Chairman (2003 -2006), Member of the Committee for GAPKI P usat (2008 -2009), Secretary General of Central GAPKI (2009 -2015), General Chairperson of Central GAPKI (2015 - present), Head of Infrastructure and Land at the Indonesian Palm Oil Council (DMSI) (2012 - 2015).





Profil Direksi
Board of Directors





Eddy Abdurrachman

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 September 1952, saat ini berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, born in Jakarta, on September 17, 1952, currently domiciled in Jakarta..

Menjabat sebagai Direktur Utama BPDPKS, sejak Maret 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor53/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020

Pendidikan

Beliau Meraih gelar Sarjana bidang Ilmu Keuangan dari Institut Ilmu Keuangan, Jakarta pada tahun 1979 dan Lulus Kursus Reguler Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) KRA XXX11 pada tahun 1999.

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau berpengalaman memimpin sejumlah instansi pemerintahan, antara lain sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI pada periode 2002-2006, Sebelumnya, beliau menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, Departemen Keuangan pada 2006-2008 dan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008-2014.

Served as the President Director of BPDPKS, since March 2020 based on the Decree of the Minister of Finance Number 53/KMK.01/2020 dated March 2, 2020

Education

He earned a Bachelor's degree in Finance from the Financial Science Institute, Jakarta in 1979 and graduated from the KRA XXX11 National Resilience Regular Program (Lemhanas) in 1999.

Career

In the course of his career, he has experience in leading a number of government agencies, including as Director General of Customs and Excise, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the period 2002-2006. Previously, he served as Expert Staff to the Minister of Finance in the Field of International Financial Economic Relations, Ministry of Finance in 2006-2008 and as Secretary to the Coordinating Minister for Economic Affairs in 2008-2014.



Zaid Burhan Ibrahim

Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 1 Maret 1972, saat ini berdomisili di Palembang Sumatera Selatan

Indonesian citizen, born in Tanjung Karang, on March 1, 1972, currently domiciled in Palembang, South Sumatra

Menjabat sebagai Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS, sejak Maret 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.01/2020 tanggal 2 Maret 2020

Served as Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management of BPDPKS, since March 2020 based on the Decree of the Minister of Finance Number 54/KMK.01/2020 dated March 2, 2020

Pendidikan

Beliau Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 1996, dan melanjutkan pendidikan strata 2 di Institut Teknologi Bandung hingga menyandang gelar Master of Regional Planning pada tahun 2006.

Education

He earned a Bachelor's degree in Economics at the University of Lampung, Bandar Lampung in 1996. , and continued his undergraduate education at the Bandung Institute of Technology until he obtained a Master of Regional Planning in 2006.

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau memulai karier di Kementerian Keuangan hingga menduduki berbagai jabatan. Antara lain sebagai Kepala KPPN Tipe A1 Medan periode November 2011 s.d. Mei 2013, Kepala KPPN Jakarta IV Periode Juni 2013 s.d. Mei 2017, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh periode Juli 2017 s.d. Februari 2020, Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Periode Maret 2020 - Sekarang.

Career

In the course of his career, he started his career at the Ministry of Finance until he held various positions. Among others, as Head of KPPN Type A1 Medan for the period November 2011 s.d. May 2013, Head of KPPN Jakarta IV Period June 2013 s.d. May 2017, Head of Regional Office of the Directorate General of Treasury of Aceh Province for the period July 2017 s.d. February 2020, Director of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management Period March 2020 - present.



Kabul Wijayanto

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana
Planning and Fund Management Director

Plt. Direktur Kemitraan
Acting Partnership Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Demak, Jawa Tengah, pada tanggal 25 Maret 1971, saat ini berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, born in Demak, Central Java, on March 25, 1971, currently domiciled in Jakarta.

Menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, sejak November 2019. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.0S/2019 tanggal 19 September 2019.

Served as Director of Planning and Fund Management of BPDPKS, since November 2019. based on the Decree of the Minister of Finance Number 739/KMK.0S/2019 dated September 19, 2019.

Pendidikan

Beliau Meraih gelar S1 di Universitas Diponegoro jurusan Administrasi Negara (1995). Selanjutnya meraih gelar Pascasarjana Bidang Manajemen Keuangan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2012).

Education

He holds a bachelor's degree at Diponegoro University majoring in State Administration (1995). Subsequently, he obtained a Postgraduate degree in Financial Management at the Veterans National Development University, Jakarta (2012).

Perjalanan Karir

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah pada Direktorat Sistem Manajemen investasi, Kementerian Keuangan.

Career

In the course of his career, he has served as Head of the Investment Sub-Directorate of Regional Government/ Regional Owned Enterprises at the Directorate of Investment Management Systems, Ministry of Finance.



Normansyah Hidayat Syahruddin

Direktur Penghimpunan Dana
Fund Collecting Director

Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor Jawa Barat, pada tanggal 15 September 1976, saat ini berdomisili di Bekasi

Indonesian citizen, born in Bogor, West Java, on September 15, 1976, currently domiciled in Bekasi.

Pendidikan

Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia, dan kemudian melanjutkan studi teknik mesin di Politeknik Universitas Indonesia. Gelar sarjana dan magister di bidang Manajemen Industri diperoleh dari University of New South Wales, Australia. Tidak berhenti di sana, beliau kemudian meraih gelar doktor (Ph.D.) di bidang Manajemen Industri dari University of Bergamo, Italia. Latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik dan manajemen ini membentuk fondasi kokoh bagi kontribusinya di sektor pertanian, khususnya dalam pemasaran hasil perkebunan.

Education

Beliau menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Indonesia, dan kemudian melanjutkan studi teknik mesin di Politeknik Universitas Indonesia. Gelar sarjana dan magister di bidang Manajemen Industri diperoleh dari University of New South Wales, Australia. Tidak berhenti di sana, beliau kemudian meraih gelar doktor (Ph.D.) di bidang Manajemen Industri dari University of Bergamo, Italia. Latar belakang pendidikan yang kuat di bidang teknik dan manajemen ini membentuk fondasi kokoh bagi kontribusinya di sektor pertanian, khususnya dalam pemasaran hasil perkebunan.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karier sebagai Aparatur Sipil Negara pada tahun 2003 dan telah berpengalaman di berbagai posisi strategis dalam lingkup Kementerian Pertanian. Jabatan awal yang diemban antara lain sebagai Kepala Seksi Analisa Ekspor, Kepala Subbagian Program, hingga menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Internasional. Beliau kemudian dipercaya menjadi Kasubdit Pemasaran Hasil Perkebunan pada tahun 2019 dan selanjutnya menjabat sebagai Koordinator Substansi Pemasaran Hasil Perkebunan sejak tahun 2020. Di luar jabatan struktural, beliau juga aktif mewakili Indonesia dalam forum-forum internasional seperti FAO, ICCO, ICO, dan ITRC, serta pernah menjadi pembicara di berbagai konferensi nasional dan internasional. Dengan kombinasi keilmuan dan pengalaman global, beliau kini menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Career

He began his career as a Civil Servant in 2003 and has held various strategic positions within the Ministry of Agriculture. His initial roles included Head of Export Analysis Section, Head of Program Subdivision, and later Head of International Marketing Section. In 2019, he was appointed as Deputy Director of Plantation Product Marketing and has served as Coordinator of Plantation Product Marketing Substance since 2020.Beyond structural roles, he has actively represented Indonesia in international forums such as the FAO, ICCO, ICO, and ITRC, and has been a speaker at various national and international conferences. Combining academic knowledge and global experience, he currently serves as the President Director of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS).



Mohammad Alfansyah

Direktorat Penyaluran Dana

Directorate of Fund Distribution

Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 19 Agustus 1977, saat ini berdomisili di Palembang Sumatera Selatan

Indonesian citizen, born in Tanjung Karang, on August19, 1977, currently domiciled in Banyuwangi, East Java.

Pendidikan

Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya dengan meraih gelar Magister Hukum bidang Tata Negara dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Sebelumnya, beliau telah menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dengan konsentrasi yang sama di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang mendukung keahlian dan kompetensinya di bidang hukum dan pengelolaan sumber daya.

Education

He completed his formal education by earning a Master of Law degree in Constitutional Law from the University of Indonesia in 2015. Prior to that, he obtained a Bachelor of Law degree with the same concentration from Gadjah Mada University in 2001. In addition to formal education, he actively participates in various trainings and certifications, both domestically and internationally, which support his expertise and competence in law and resource management.

Perjalanan Karir

Beliau memulai karir profesionalnya di bidang hukum dan peraturan di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sepanjang karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Analis Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan Koordinator Penelaahan Hukum, serta Kepala Bagian Hukum Migas. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Penyaluran Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), membawa pengalaman luas di bidang hukum migas dan regulasi yang mendalam untuk mendukung pengelolaan dana kelapa sawit secara profesional.

Career

He began his professional career in law and regulation in the energy and mineral resources sector, particularly at the Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM). Throughout his career, he has served as a Mid-Level Legal Analyst for Legislation, Coordinator of Legal Review, and Head of the Oil and Gas Legal Division. Currently, he serves as Director of Fund Distribution at the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), bringing extensive experience in oil and gas law and deep regulatory knowledge to support professional management of palm oil funds.

Profil Pejabat Non-Struktural BPDPKS

BPDPKS Non-Structural Official Profile

SPI



Hari Kuncoro

Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Control Unit

Beliau lahir di Cilacap, pada tanggal 29 Mei 1973, meraih gelar Magister Keuangan di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal sejak Agustus 2019 – sekarang.

He was born in Cilacap, on May 29, 1973, earned a Masters in Finance at Jenderal Soedirman University in 2005. He currently serves as Head of the Internal Control Unit since August 2019 – now.

DIREKTORAT 1



Adi Sucipto

Kepala Divisi Umum & SDM
Head of General & Human Resource Division

Beliau lahir di Singaraja, pada tanggal 27 Februari 1971. Beliau meraih gelar Magister Manajement di STIE IPWIJA pada tahun 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia periode Januari 2022 - Sekarang.

He was born in Singaraja, on February 27, 1971. He earned his Master of Management degree at STIE IPWIJA in 2009. He presently serves as Head of General and Human Resources Division for the period of January 2022 - present.



Barry Dharmawan

Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Head of Compliance & Risk Management Division

Beliau lahir di Metro, pada tanggal 15 Januari 1985. Beliau meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kepala Divisi Kepatunan dan manajemen risiko Periode 2024 - Sekarang.

Born in Metro on January 15, 1985, she obtained a Master's degree in Economy from the University of Indonesia. Currently, she serves as the Head of Compliance & Risk ,amagement Division, a position she has held since 2024.



Hesti Pratiwi

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi
Head of Budget and Accounting Division

Beliau lahir di Semarang, pada tanggal 12 Februari 1983. Beliau meraih gelar Magister Accounting and Finance di University of Adelaide. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi Periode 2023 - Sekarang.

Born in Semarang on February 12, 1983, she obtained a Master's degree in Accounting and Finance from the University of Adelaide. Currently, she serves as the Head of the Budget and Accounting Division, a position she has held since 2023.



Triana Meinarsih

Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Head of HR Education, Research and Development, and Development of Facilities and InfrastructureDivision

Beliau lahir di Pati, pada tanggal 25 Mei 1977. Beliau meraih gelar Magister Akuntansi (2013) dan gelar Akuntan (2015) di di Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan SDM, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana periode 2019 - sekarang

She was born in Pati, on May 25, 1977. She earned her Master in Accounting (2013) and an Accountant (2015) at Universitas Trisakti, Jakarta. She presently serves as Head of Human Resources Education, R&D, and Development of Facilities and Infrastructure Division for the period of 2019 – present.

DIREKTORAT 2



Heri Praptomo

Kepala Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan
Head of Replanting, Reforestation and Plantation Promotion Division

Beliau lahir di Kutai, pada tanggal 18 November 1983. Beliau meraih gelar Magister Administrasi Publik di Flinders Universitas Australia. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Kepala Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan Periode 2023 - Sekarang.

He was born in Kutai on November 18, 1983, and earned a Master's degree in Public Administration from Flinders University in Australia. He is presently the Head of the Division of Replanting, Reforestation, and Plantation Promotion, a role he has occupied since 2023.



Nugroho Adi Wibowo

Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel
Head of Biodiesel Development Division

Beliau lahir di Tegal, pada tanggal 30 September 1975. Beliau meraih gelar Magister Hukum di Universitas Gajah Mada pada tahun 2010. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel periode 2020 - sekarang.

He was born in Tegal, on September 30, 1975. He earned his Master of Laws degree at Universitas Gajah Mada in 2010. He presently serves as Head of the Biodiesel Development Division for the period 2020 - present.

DIREKTORAT 3



Iskandar

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan
Head of Division of Fund and Expense for Derivative Product Collection

Beliau lahir di Pontianak, pada tanggal 1 Februari 1983. Beliau meraih gelar Doctor Management and Commerce di Flinders University of Tasmania. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan Periode 2024 - Sekarang.

He was born in Pontianak on November 18, 1983, and earned a Doctor in Management and Commerce University of Tasmania. He is presently the Head of Division of Fund and Expense for Derivative Product Collection, a role he has occupied since 2024.

DIREKTORAT 3



Ahmad Munir

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran
Head of CPO Fee Collection and Contribution Division

Beliau lahir di Pemalang, pada tanggal 27 Januari 1973. Beliau meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Khairun Ternate Jurusan Keuangan pada tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan iuran CPO periode Januari 2022-sekarang.

He was born in Pemalang, on January 27, 1973. He earned his Master of Management degree at the University Khairun Ternate of Finance in 2016. He presently serves as Head of CPO Fee Collection and Contribution for the period of January 2022 - present.

DIREKTORAT 4



Arfie Thahar

Kepala Divisi Program Pelayanan
Head of Service Program Division

Beliau lahir di Bukittinggi, pada tanggal 6 September 1974. Beliau meraih gelar Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Program Pelayanan periode 2019 – Sekarang.

He was born in Bukittinggi, on September 6, 1974. He earned his Master of Agribusiness Management degree at Institut Pertanian Bogor in 2004. He presently serves as Head of the Service Program Division for the period of 2019 – present.



Fajar Wahyudi

Kepala Divisi Unit Penyaluran
Head of Distribution Unit Division

Beliau lahir di Bandung, pada tanggal 8 Januari 1967. Beliau meraih gelar Magister Adminstrasi Bisnis di Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1992. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Unit Penyaluran periode 2017 – Sekarang.

He was born in Bandung, on January 8, 1967. He earned his Master of Business Administration degree at Institut Manajemen Prasetya Mulya in 1992. He presently serves as Head of the Distribution Unit Division for the period of 2017 – present.



Helmi Muhansyah

Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
Head of Small, Medium Enterprises and Cooperatives Division

Beliau lahir di Ponorogo, pada tanggal 27 Maret 1979. Beliau meraih gelar Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi periode 2018 – Sekarang.

He was born in Ponorogo, on March 27, 1979. He earned his Master of Business Administration degree Institut Teknologi Bandung in 2015. He presently serves as Head of the Division of Small, Medium and Cooperatives for the period of 2018 – Present.



Achmad Maulizal Sutawijaya

Kepala Divisi Perusahaan
Head of Corporate Division

Beliau lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 1977. Beliau meraih gelar S2 Komunikasi di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Perusahaan periode 2018 - sekarang.

He was born in Jakarta, on March 21, 1977. He earned his Master of Communication degree at Universitas Indonesia in 2009. He presently serves as Head of Corporate Division for the period of 2018 - present.



Aida Fitria

Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan & Civil Society
Head of Community Institution & Civil Society Division

Beliau lahir di Medan, pada tanggal 27 September 1976. Beliau meraih gelar Master Bisnis di Universitas Sidney Autralia pada tahun 2007. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan & Civil Society periode Januari 2022 – sekarang.

She was born in Medan on September 27, 1976. She earned her Master of Business degree at the University Sydney Of Australia in 2007. She presently serves as Head of Community Institution & Civil Society Division for the period of Januari 2022 – present.

Informasi Pada Website Perusahaan

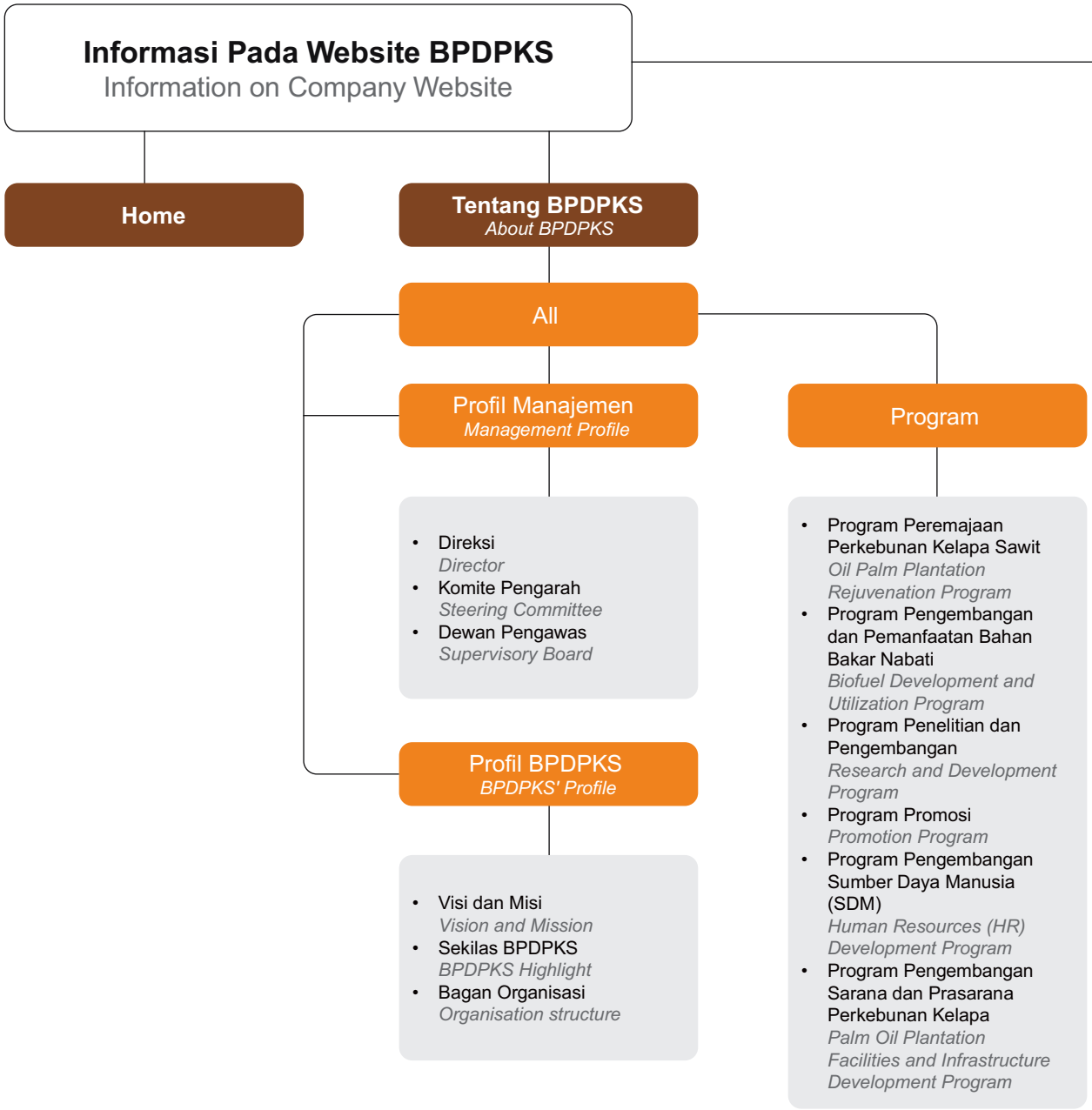
Information on Company Website

Website

BPDPKS menyediakan website yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh stakeholder yang beralamat di www.bpdp.or.id Keberadaan website tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang dilakukan BPDPKS, agar seluruh stakeholder dapat memperoleh berbagai informasi terkait dengan BPDPKS.

Website

BPDPKS provides a website that can be easily accessed by all stakeholders with the address at www.bpdp.or.id The presence of this website is part of the information disclosure carried out by BPDPKS, so that all stakeholders can acquire various information related to **BPDPKS.**



Media Sosial

Selain memiliki website, BPDPKS juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Adapun akun resmi Perusahaan di media sosial yaitu:

Social Media

In addition to having a website, BPDPKS also uses social media as a means of communicating with all stakeholders. The Company's official accounts on social media are:

bpdpsawit | BPDPkelapasawit | bpdpkelapasawit | BPDP Sawit

Publikasi *Publication*

- Media Rilis | *Media Release*
- Infografis | *Infographics*
- Kegiatan | *Activity*
- Video | *Videos*

Berita *News*

Pengumuman *Announcement*

- Riset | *Research*
- Pengadaan | *Procurement*
- Beasiswa | *Scholarship*
- Umum | *General*

Tentang Sawit *About Palm Oil*

- Energi | *Energy*
- Kesehatan dan nutrisi | *Health and nutrition*
- Sawit berkelanjutan | *Sustainable palm oil*

Statistik *Statistics*

Dukungan Dana Riset *Research Fund Support*

- Bidang Bioenergi | *Bioenergy Sector*
- Bidang Biomaterial dan Oleochemical | *Biomaterials and Oleochemical Sector*
- Bidang Pangan dan Kesehatan | *Food and Health Sector*
- Bidang Pascapanen dan Pengolahan | *Postharvest and Processing Sector*
- Bidang Budidaya | *Cultivation Sector*
- Bidang Lingkungan | *Environment Sector*
- Bidang Sosial-Ekonomi, Bisnis, Pasar, ICT | *Socio-Economic, Business, Market, ICT*

Regulasi *Regulation*

Laporan Kinerja

Performance Report





4.1 Kinerja Pengembangan SDM Sawit

Pengelolaan program pengembangan SDM Sawit dihitung berdasarkan jumlah paket kegiatan pengembangan SDM Sawit yang dikelola pada tahun 2024. kegiatan meliputi pendidikan (beasiswa), pelatihan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi. Total jumlah peserta program pengembangan SDM PKS yang dikelola tahun 2024 adalah 12.514 orang dari target 10.000 orang, sehingga realisasi Capaian kinerja pengembangan SDM sawit jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit pada tahun 2024 adalah mencapai 120%.

Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit tahun 2024 sebanyak 12.514 orang dengan rincian:
a. Beasiswa sebanyak 6.077.
b. Pelatihan Sebanyak 6.437.

Adapun capaian program pengembangan SDM PKS 2016 s.d 2024 sebagai berikut:
a.Beasiswa : 9.265 mahasiswa.
b.Pelatihan : 21.366 orang/peserta.

4.1 Human Resource Development Performance in the Palm Oil Sector

The implementation of the Oil Palm Human Resource Development Program in 2024 is measured based on the number of HR development activity packages managed. These activities include education (scholarships), training, extension services, mentoring, and facilitation. The total number of participants in the oil palm HR development program managed in 2024 reached 12,514 people, exceeding the target of 10,000 people, resulting in a 120% performance achievement for the number of participants in the 2024 oil palm HR development program.

The 12,514 participants in the 2024 oil palm HR development program consist of:
a. Scholarships: 6,077 students
b. Training: 6,437 participants

The cumulative achievement of the Oil Palm HR Development Program from 2016 to 2024 is as follows:
a. Scholarships: 9,265 students
b. Training: 21,366 participants

Tabel 4.1 Rincian Jumlah Penerima Program Pendidikan SDMPKS
Table 4.1 Number of the SDMPKS Education Program Recipients

Lembaga Pendidikan Education Institution	Prog	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Yang dikelola 2024 Managed in 2024
Poltek	D2							30	30	**30**	**90**	**86**
LPP	D3	30	90	90	120	100	100	120	120	**120**	**890**	**314**
Yogyakarta	D4				30	25	25	30	120	**210**	**440**	**536**
AKPY	D1	200	200	200	300	250	250	310	440	**570**	**2720**	**992**
Poltek CWE	D1	100	100	100							**300**	**0**
	D3			90	120	90	90	90	180	**240**	**900**	**596**
	D4				30	30	30	30	90	**90**	**300**	**267**
Poltek	D2							30	30	**30**	**90**	**86**
Kampar	D3				90	75	80	90	150	**210**	**695**	**518**
	D4									**30**	**30**	**30**
ITSI	D4				60	60	60	60	120	**120**	**480**	**402**
	S1							120	150	**150**	**420**	**409**
ITSB	D3					25	25	30	-	**30**	**110**	**73**
INSTIPER	S1							60	120	**120**	**300**	**294**
Univ Prima	S1								30	**90**	**120**	**119**
Sekolah Vokasi - IPB	D4								60		**60**	**59**
ATI	D3								120	**150**	**270**	**270**
Padang	D4								30	**30**	**60**	**58**
PTKI Medan	D3								90	**90**	**180**	**176**
Polbantan Medan	D4								60	**60**	**120**	**112**
IT2PI Pelalawan	S1								30	**90**	**120**	**119**
Poltek Aceh	D3								30	**90**	**120**	**117**
Jumlah Total		**330**	**390**	**480**	**750**	**655**	**660**	**1000**	**2000**	**2550**	**8815**	**5633**

Sedangkan rincian pelatihan, sebagai berikut:
Details of the training programs are as follows:

Lembaga Pelatihan Training Institution	2021	2022	2023	2024	Total
PT. LPP Agro Nusantara	501	523	876	1339	3239
PT. Global Scholarship Service (IPBTraining)		365	417	868	1650
Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY)		384	623	996	2003
PT. Best Planter Indonesia		122	282	578	982
PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya		238	67	219	524
Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi		120	296	402	818
Balai Pelatihan Pertanian Jambi		257	221	431	909
PT. Citra Widya Education			106	229	335
PT. Forestcitra Sejahtera (Mutu Institute)			176	345	521
PT. Iskol Agridaya Internasional			88	221	309
PT. Daya Guna Lestari			89	180	269
PT. Riset Perkebunan Nusantara				247	247
PT. Koompasia Enviro Institute				85	85
Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY)				229	229
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang				68	68
Lembaga Lain-Lain					9178
Jumlah Total	**501**	**2009**	**3241**	**6437**	**21366**

Pelaksanaan Pelatihan pada tahun 2024 bekerjasama dengan 15 Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan jumlah peserta 6.347 orang, dan telah dilaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama dengan 23 lembaga penyelenggara pendidikan dengan jumlah peserta 3.000 orang.

The implementation of training programs in 2024 was carried out in collaboration with 15 training institutions, involving a total of 6,347 participants. In addition, cooperation agreements have been signed with 23 educational institutions for the implementation of scholarship programs, involving 3,000 participants.

4.2 Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan merupakan pengelolaan dana yang disalurkan dalam bentuk program penelitian dan pengembangan s perkebunan kelapa sawit secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2015. Jumlah riset yang dikelola dihitung berdasarkan jumlah kegiatan riset yang dibiayai pada tahun 2024, untuk periode pembayaran tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024. Tujuan dari kinerja penelitian dan pengembangan adalah mendukung penelitian dan pengembangan perkebunan sawit serta industri pendukungnya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Realisasi jumlah riset yang dikelola sebanyak 125 riset dari target 80 riset, sehingga realisasi capaian sebesar 140%, dengan konversi capaian menjadi 120%.

Capaian program dukungan dana riset sejak tahun 2015 s.d 2024:

a. Kontrak / Perjanjian Kerja Sama: 397.
b. Keterlibatan Lembaga Litbang: 96 Lembaga litbang, Peneliti: 1,489 orang, Mahasiswa: 383 orang.
c. Output : Publikasi Ilmiah: 243, Paten: 50, Buku: 7.

Strategi pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan :

a. Melalui Call for Proposal GRS K24 telah dilaksanakan sosialisasi secara online dan offline sehingga terdapat sebanyak 785 proposal yang masuk, 680 lolos seleksi administrasi, 73 proposal yang lolos seleksi Substansi dan 52 proposal lolos seleksi presentasi.
b. Telah diumumkan PENG-3/DPKS/2024 perihal Daftar Penerima Grant Riset Sawit 2024 sebanyak 52 Penelitian serta ditetapkan Keputusan Direktur Utama KEP-231/DPKS/2024 perihal Penerima Grant Riset Sawit 2024 dan ditandatangani perjanjian kerja samanya pada tanggal 19 November 2024.
c. Telah ditandatangani 69 perjanjian Kerjasama baru (tahun 2024) dengan Lembaga penelitan BRIN, Lemigas, PT RPN, APPERTANI, KSO SCIxAPPERTANI, dan 48 GRS K24.

4.2 Research and Development Performance

The sustainable management of oil palm research and development is the administration of funds allocated through targeted and timely R&D programs in accordance with Presidential Regulation No. 61 of 2015. The number of research projects managed is calculated based on the number of research activities funded in 2024, for the disbursement period from January 1 to December 31, 2024. The objective of research and development performance is to support integrated and sustainable oil palm plantation research as well as its supporting industries. In 2024, a total of 125 research projects were managed from a target of 80, resulting in a 140% realization rate, which is converted into a performance score of 120%.

Achievements of the Research Funding Support Program (2015–2024):

Number of Contracts/Partnership Agreements: 397
Involvement of R&D Institutions: 96 institutions

Researchers: 1,489 individuals - Students: 383 individuals

Research Outputs:Scientific Publications: 243 - Patents: 50 - Books: 7

Research and Development Performance Strategy:

Through the GRS K24 Call for Proposal, outreach was conducted both online and offline, resulting in:
785 proposals submitted
680 passed administrative selection
73 passed substantive selection
52 passed presentation selection
Based on this, Announcement PENG-3/DPKS/2024 listed 52 research projects as recipients of the 2024 Palm Oil Research Grant, and the decision was formalized through Director's Decree KEP-231/DPKS/2024. Cooperation agreements were signed on November 19, 2024.In addition, 69 new cooperation agreements were signed in 2024 with institutions such as BRIN, Lemigas, PT RPN, APPERTANI, KSO SCIxAPPERTANI, and 48 GRS K24 recipients.

4.3 Kinerja Promosi dan Kemitraan

Persentase efektivitas program promosi dan kemitraan dengan variable pengukuran:

a. Jumlah kegitan yang dilaksanakan dalam rangka promosi dan kemitraan baik yang berasal dari inisiatif Internal maupun Eksternal;
b. Tingkat sentiment positif positif pemberitaan di media massa nasional baik cetak maupun online terhadap sawit Indonesia. Tipe media yang diukur adalah media cetak dan media online.

Target jumlah kegiatan promosi dan kemitraan tahun 2024 adalah 20 kegiatan internal dan 65 kegiatan inisiatif eksternal. Adapun capaian persentase jumlah kegiatan yang dikelola periode tahun 2024 sebesar 150%. Target persentase persepsi positif media tahun 2024 adalah 74,49%. Adapun capaian periode s.d. Desember tahun 2023 sebesar 75,93% dengan rincian sebagai berikut:

4.3 Promotion and Partnership Performance

The effectiveness of the promotion and partnership program is measured using the following variables:

a. The number of activities carried out for promotion and partnership, both from internal initiatives and external proposals.
b. The level of positive media sentiment in national print and online media regarding Indonesian palm oil. The media types measured include print and online media.

The target number of promotion and partnership activities for 2024 is 20 internal activities and 65 external initiative activities. The total percentage of activities managed throughout the 2024 period reached 150% of the target.The target for positive media perception in 2024 is 74.49%. As of December 2023, the recorded achievement was 75.93%, with the following breakdown:

Tabel 4.3 Target Persentase Persepsi Positif Media Tahun 2024

Table 4.3 Target Percentage of Positive Media Perception in 2024

No	Bulan	% Sentimen Positif Media Massa
1	Januari	72,65
2	Februari	67,84
3	Maret	75,84
4	April	72,10
5	Mei	71,18
6	Juni	72,41
7	Juli	74,45
8	Agustus	76,35
9	September	75,91
10	Oktober	76,07
11	November	79,10
12	Desember	79,92
Rata-rata Sentimen Positif		**78,36**

No	Month	Sentimen Positif Media Public
1	January	76,69
2	February	74,28
3	March	78,88
4	April	72,65
5	May	78,14
6	June	80,43
7	July	87,77
8	August	78,09
9	September	69,89
10	October	80,69
11	November	73,55
12	December	73,57
Average of Positive Media Perception		**77,95**

Beberapa tindakan yang dilakukan guna ketercapaian kinerja promosi dan kemitraan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Media Monitoring.
2. Pengelolaan Konten Website dan Media Sosial BPDPKS.
3. Publikasi kegiatan BPDPKS di media massa.
4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan promosi dan kemitraan inisiatif internal.
5. Tindak lanjut kegiatan usulan dari stakeholder sawit.
6. Placement berita postif sawit secara rutin di media massa nasional dan media daerah.

Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru
Penyampaian informasi ke stakeholder dan masyarakat tentang fakta objektif kelapa sawit dan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam mendukung pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan citra nilai produk sawit serta sebagai sarana branding BPDPKS. Kegiatan komunikasi dilakukan secara tepat sasaran dan menggunakan media komunikasi yang efisien dan efektif mencapai sasaran dan tujuan. selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf c bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS digunakan untuk kepentingan promosi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan promosi harus sesuai dengan strategi pengembangan perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan para pekebun dan pelaku usaha perkebunan dan industri sawit. Untuk itu, kegiatan promosi perlu dilakukan dengan menjalin kemitraan/hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Sawit, Perusahaan, Petani, UKM, Koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemitraan tersebut juga akan memperluas capaian sasaran dari kegiatan promosi sawit.
Definisi kinerja ini untuk mengukur capaian kegiatan promosi, misi dagang, negosiasi bilateral, dan negosiasi forum multilateral yang didukung atau diikuti oleh BPDPKS yang menghasilkan komitmen perdagangan atau pengurangan hambatan regulasi terkait produk kelapa sawit dan turunannya di negara-negara yang bukan merupakan negara tujuan ekspor utama produk kelapa sawit Indonesia. Bentuk komitmen dapat berupa Nota Kesepahaman (MoU, MoC, MoA), Perjanjian Bilateral maupun Multilateral, maupun Transaksi yang dilakukan secara Business to Business, Business to Government, dan/atau Government to Government. Termasuk dalam kategori perluasan ekspor adalah pengenalan/penjualan jenis produk turunan sawit ke suatu negara yang bukan merupakan jenis produk ekspor utama komoditas sawit di negara tersebut.

Actions taken to achieve promotion and partnership performance include:

1. Implementation of Media Monitoring.
2. Management of Website Content and Social Media for BPDPKS.
3. Publication of BPDPKS activities in the media.
4. Preparation and implementation of plans for promotion and partnership internal initiatives.
5. Follow-up on activity proposals from palm oil stakeholders.
6. Regular placement of positive palm oil news in national and regional media.

The percentage of completion of cooperation in the expansion of new palm oil export markets involves disseminating information to stakeholders and the public about the objective facts of palm oil and the programs of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency to support the achievement of sustainable palm oil, thereby enhancing the product's image value and serving as a branding tool for BPDPKS. Communication activities are targeted and use efficient and effective communication media to achieve goals and objectives. This is in accordance with Presidential Regulation No. 61 of 2015, Article 11, paragraph 1, letter c, which states that funds collected by BPDPKS are used for palm oil plantation promotion. Promotion activities must align with the government's palm oil plantation development strategy and meet the needs of farmers and business actors in the plantation and palm oil industries. Therefore, promotional activities should be conducted by establishing institutional relationships/partnerships with Ministries/Agencies, Community Organizations, Palm Oil Associations, Companies, Farmers, SMEs, Cooperatives, and other legal entities. These partnerships will also expand the reach of palm oil promotion activities.
This performance measures the achievement of promotional activities, trade missions, bilateral negotiations, and multilateral forum negotiations supported or participated in by BPDPKS that result in trade commitments or the reduction of regulatory barriers related to palm oil products and derivatives in non-primary export target countries. Commitments may take the form of Memorandums of Understanding (MoU, MoC, MoA), Bilateral or Multilateral Agreements, or Business to Business, Business to Government, or Government to Government transactions. Included in the export expansion category is the introduction/sale of derivative palm oil products to a country that is not a primary export product of palm oil commodities in that country.

Realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2024 sebanyak 9 kegiatan yaitu:

a. Dukungan Pendanaan Partisipasi Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2024 di Pakistan.
b. Dukungan Pendanaan Kegiatan International Business Solutions Expo (IBSE) 2024 special tema Menggali Peluang Transformasi UKMK Sawit Menuju Pasar Global di Yogyakarta pada 21 s.d. 24 April 2024 kerja sama Junior Chamber International (JCII) Indonesia.
c. Dukungan Pendanaan Kegiatan Misi Dagang ke Chile, 7 -12 Mei 2024.
d. Dukungan Pendanaan Kegiatan Business Matching Misi Dagang APKASINDO Promosi Produk Kelapa Sawit di
e. Belanda pada tanggal 26-30 Mei 2024.
f. Dukungan Pendanaan Partisipasi The Annual Amsterdam Declarations Partnership (ADP) Multistakeholder di Madrid, Spain dan Dialogue Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP) di Berlin, Jerman, 27 Mei - 2 Juni 2024.
g. Dukungan Pendanaan pada Indonesia Festival: Celebrating Prosperous Indonesia-Pakistan Relations di Karachi, Pakistan pada tanggal 28 – 30 Juni 2024.
h. Dukungan Pendanaan pada Kegiatan The 15th China International Cereals & Oils Industry Summit di Nanjing pada 9 – 12 Juli 2024.
I. Dukungan Pendanaan pada China ASEAN Expo (CAEXPO) pada 24 – 28 September 2024. (MOU Signing)
j. Dukungan Pendanaan pada Trade Expo Indonesia pada 9 – 12 Oktober 2024. (MOU Signing)

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan KBRI terkait informasi pasar sawit..
2. Dukungan Pendanaan kegiatan promosi sawit di luar negeri.
3. Dukungan pendanaan kegiatan promosi sawit bertaraf internasional di dalam negeri.

Actions achieved by December 2024 include 9 activities:

a. Funding support for participation in the Pakistan Edible Oil Conference (PEOC) 2024 in Pakistan.
b. Funding support for the International Business Solutions Expo (IBSE) 2024 with the special theme “Exploring Opportunities for Transforming Oil Palm MSMEs into the Global Market”, held in Yogyakarta from April 21 to 24, 2024, in collaboration with Junior Chamber International (JCII) Indonesia.
c. Funding support for the Trade Mission to Chile, held from May 7 to 12, 2024.
d. Funding support for Business Matching activities under the APKASINDO Trade Mission for Palm Oil Product
e. Promotion in the Netherlands, from May 26 to 30, 2024.
f. Funding support for participation in The Annual Amsterdam Declarations Partnership (ADP) Multistakeholder
g. Meeting in Madrid, Spain, and the Dialogue Forum for Sustainable Palm Oil (FONAP) in Berlin, Germany, from May 27 to June 2, 2024.
h. Funding support for participation in the Indonesia Festival: Celebrating Prosperous Indonesia-Pakistan Relations in
I. Karachi, Pakistan, from June 28 to 30, 2024.
j. Funding support for The 15th China International Cereals & Oils Industry Summit in Nanjing, from July 9 to 12, 2024.
k. Funding support for participation in the China ASEAN Expo (CAEXPO) from September 24 to 28, 2024 (MOU Signing).
l. Funding support for participation in the Trade Expo Indonesia from October 9 to 12, 2024 (MOU Signing).

Actions Undertaken:

1. Coordination with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Trade, and Indonesian Embassies (KBRI) regarding
2. palm oil market intelligence.Funding support for international palm oil promotional activities abroad.Funding
3. support for international-standard palm oil promotional events held domestically.

4.4 Kinerja Peremajaan Sawit Rakyat

Adapun tujuan dari kinerja peremajaan sawit rakyat adalah untuk mendorong peremajaan kebun kelapa sawit guna mendukung keberlangsungan sawit dan industri pendukungnya di masa datang. Ketercapaian kinerja penyaluran dana PSR tahun 2024 yaitu sebesar 81,85% dari target 100% dengan penjelasan bahwa penyaluran Dana PSR tahun 2024 adalah senilai 10,25 triliun untuk 160.211 pekebun dan luasan 365.552 ha. Pada tahun 2024 telah diterima total 321 rekomtek dan telah tersalur sebanyak 263 rekomtek dengan luasan 38.244 ha.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk PSR jalur kemitraan yaitu:

1. Masih dilakukan adjustment peraturan terkait penyaluran dana PSR 60 Juta.
2. Akan dilakukan perubahan terhadap Permentan 3 Tahun 2022 untuk mempercepat pengusulan Program-program BPDPKS.
3. PSR jalur Kemitraan belum memberikan kontribusi yang besar, pada tahun 2023 disalurkan 4.928 Ha atau sekitar 9,3% dari total luas penyaluran dalam satu tahun. Di tahun 2024 presentasenya meningkat menjadi 11%.

4.4 Palm Oil Rejuvenation Performance

The objective of the smallholder oil palm replanting program (PSR) is to promote the rejuvenation of oil palm plantations to ensure the long-term sustainability of the palm oil sector and its supporting industries.In 2024, the fund disbursement performance of the PSR program reached 81.85% of the target (100%). The total PSR fund disbursed in 2024 amounted to IDR 10.25 trillion, benefiting 160,211 smallholders and covering an area of 365,552 hectares.As of 2024, a total of 321 technical recommendations (rekomtek) have been received, of which 263 rekomtek have been disbursed, covering an area of 38,244 hectares.

Several aspects that require attention for the PSR partnership pathway include:

1. Regulatory adjustments are still being made regarding the disbursement of the IDR 60 million PSR funding.
2. A revision of Minister of Agriculture Regulation No. 3 of 2022 is planned to accelerate the proposal process for BPDPKS programs.
3. The PSR partnership scheme has not yet made a significant contribution; in 2023, it covered 4,928 hectares, or approximately 9.3% of the total area disbursed in that year. In 2024, this percentage increased to 11%.



4.5 Kinerja Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit

Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dihitung jumlah rekomtek Sarpras yang dikelola pada tahun 2024. Tujuan kinerja ini untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Capaian persentase kinerja penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit adalah 100% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

4.5 Performance of Infrastructure and Facilities for Palm Oil Plantations

The percentage of fund disbursement for oil palm plantation infrastructure and facilities (Sarpras) is calculated based on the number of Sarpras technical recommendations (rekomtek) managed in 2024. The objective of this performance indicator is to provide infrastructure and facility support for oil palm plantations in an effort to improve production, productivity, and the quality of palm oil outputs.The fund disbursement performance for oil palm plantation infrastructure and facilities in 2024 reached 100%, achieving the full target of 100%, with the following breakdown:

Tabel 4.4 Jumlah Rekomtek Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana

No	Nomor Proposal	Kode Permohonan	Nama Lembaga Tani	Provinsi	Tanggal Transaksi	Debit	Keterangan
1	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.18	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	7/2/2024	Rp 3,200,000	Divisi 1 : Umum
2	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.18	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	7/2/2024	Rp 129,273,353	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
3	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.13	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 3,000,000	Divisi 1 : Umum
4	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.13	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 142,484,816	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
5	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.14	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 68,689,050	Divisi 7 : Struktur
6	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.15	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 130,379,388	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
7	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.15	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 31,084,000	Divisi 7 : Struktur
8	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.19	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	7/3/2024	Rp 44,216,550	Divisi 7 : Struktur
9	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.21	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	7/29/2024	Rp 54,946,200	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
10	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.21	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	7/29/2024	Rp 24,800,000	Divisi 7 : Struktur
11	PROSP220822002	SARPRAS.24.PROSP220822002.17	Kt Sinar Mandiri	Jambi	7/15/2024	Rp 1,386,399,200	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
12	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.11	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 24,894,000	Divisi 1 : Umum
13	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.11	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 463,159,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
14	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.11	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 9,041,000	Divisi 7 : Struktur
15	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.05	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/2/2024	Rp 98,500,418	Divisi 2 : Drainase
16	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.05	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/2/2024	Rp 170,246,250	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
17	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.05	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/7/2024	Rp 112,530,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
18	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.12	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 2,501,800	Divisi 1 : Umum
19	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.12	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 31,845,160	Divisi 2 : Drainase
20	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.12	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	7/26/2024	Rp 216,219,670	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
21	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.07	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/5/2024	Rp 2,346,273	Divisi 2 : Drainase
22	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.07	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/5/2024	Rp 120,346,612	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
23	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.07	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	8/5/2024	Rp 12,152,746	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
24	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.25	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	8/21/2024	Rp 4,250,000	Divisi 1 : Umum
25	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.25	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	8/21/2024	Rp 180,140,665	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
26	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.25	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	8/21/2024	Rp 3,454,400	Divisi 7 : Struktur
27	PROSP221214001	SARPRAS.24.PROSP221214001.27	Kelompok Tani Caryata Jaya	Sulawesi Selatan	8/27/2024	Rp 5,554,397	Divisi 7 : Struktur
28	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.04	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 21,770,000	Divisi 2 : Drainase
29	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.04	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 581,148,600	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
30	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.04	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 227,140,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
31	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.04	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 260,501,500	Divisi 7 : Struktur
32	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.05	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 236,163,800	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
33	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.05	Kt Tunas Muda Harapan	Jambi	9/10/2024	Rp 100,311,819	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
34	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.37	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	9/20/2024	Rp 9,237,000	Divisi 2 : Drainase
35	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.37	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	9/20/2024	Rp 296,528,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
36	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.37	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	9/20/2024	Rp 15,967,000	Divisi 7 : Struktur
37	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.38	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	9/20/2024	Rp 78,671,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
38	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.02	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	9/23/2024	Rp 30,000,000	Divisi 1 : Umum
39	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.02	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	9/23/2024	Rp 128,384,640	Divisi 7 : Struktur
40	PROSP221019002	SARPRAS.24.PROSP221019002.19	Koperasi Unit Desa (Kud) Makarti Tama	Sumatera Barat	9/20/2024	Rp 1,830,000	Divisi 1 : Umum
41	PROSP221019002	SARPRAS.24.PROSP221019002.19	Koperasi Unit Desa (Kud) Makarti Tama	Sumatera Barat	9/20/2024	Rp 371,719,994	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
42	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.40	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	9/24/2024	Rp 145,013,000	Divisi 7 : Struktur
43	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.41	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	10/4/2024	Rp 1,750,000	Divisi 2 : Drainase
44	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.41	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	10/4/2024	Rp 5,372,300	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik

No	Nomor Proposal	Kode Permohonan	Nama Lembaga Tani	Provinsi	Tanggal Transaksi	Debit	Keterangan
45	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.41	Gapoktan Tani Mulya	Jambi	10/4/2024	Rp 73,800,700	Divisi 7 : Struktur
46	PROSP221014005	SARPRAS.24.PROSP221014005.10	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	Aceh	10/11/2024	Rp 378,240,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
47	PROSP221014005	SARPRAS.24.PROSP221014005.11	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	Aceh	10/11/2024	Rp 891,000	Divisi 2 : Drainase
48	PROSP221014005	SARPRAS.24.PROSP221014005.11	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	Aceh	10/11/2024	Rp 2,491,400	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
49	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.23	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	10/9/2024	Rp 6,950,000	Divisi 1 : Umum
50	PROSP221215001	SARPRAS.24.PROSP221215001.23	Kelompok Tani Laimbo Permai	Sulawesi Selatan	10/9/2024	Rp 118,480,841	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
51	PROSP221014005	SARPRAS.24.PROSP221014005.12	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	Aceh	10/21/2024	Rp 51,116,463	Divisi 2 : Drainase
52	PROSP221014005	SARPRAS.24.PROSP221014005.12	Kelompok Tani Seupakat Makmue Beusare	Aceh	10/21/2024	Rp 362,332,413	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
53	PROSP221101002	SARPRAS.24.PROSP221101002.49	Kelompok Tani Sungai Kinandi	Sumatera Barat	10/14/2024	Rp 86,531,942	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
54	PROSP221101002	SARPRAS.24.PROSP221101002.50	Kelompok Tani Sungai Kinandi	Sumatera Barat	11/1/2024	Rp 47,115,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
55	PROSP221101002	SARPRAS.24.PROSP221101002.51	Kelompok Tani Sungai Kinandi	Sumatera Barat	11/1/2024	Rp 35,918,000	Divisi 2 : Drainase
56	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.07	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	10/17/2024	Rp 7,800,000	Divisi 1 : Umum
57	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.07	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	10/17/2024	Rp 21,840,000	Divisi 2 : Drainase
58	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.07	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	10/17/2024	Rp 21,780,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
59	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.07	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	10/17/2024	Rp 59,940,000	Divisi 7 : Struktur
60	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.05	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/22/2024	Rp 19,590,000	Divisi 1 : Umum
61	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.05	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/22/2024	Rp 1,669,800	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
62	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.05	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/22/2024	Rp 25,015,000	Divisi 7 : Struktur
63	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.07	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/22/2024	Rp 46,700,000	Divisi 1 : Umum
64	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.07	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/22/2024	Rp 135,990,500	Divisi 7 : Struktur
65	PROSP221006004	SARPRAS.24.PROSP221006004.14	Meriah Sejahtera Bersama	Aceh	10/17/2024	Rp 167,186,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
66	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.08	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/28/2024	Rp 2,000,000	Divisi 1 : Umum
67	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.08	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	10/28/2024	Rp 37,735,100	Divisi 7 : Struktur
68	PROSP221102002	SARPRAS.24.PROSP221102002.17	KELOMPOK TANI HUDEP BAROE	Aceh	10/23/2024	Rp 20,989,800	Divisi 1 : Umum
69	PROSP221102002	SARPRAS.24.PROSP221102002.17	KELOMPOK TANI HUDEP BAROE	Aceh	10/23/2024	Rp 160,800,000	Divisi 2 : Drainase
70	PROSP221102002	SARPRAS.24.PROSP221102002.17	KELOMPOK TANI HUDEP BAROE	Aceh	10/23/2024	Rp 371,617,200	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
71	PROSP221102002	SARPRAS.24.PROSP221102002.17	KELOMPOK TANI HUDEP BAROE	Aceh	10/23/2024	Rp 505,829,150	Divisi 7 : Struktur
72	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.10	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	11/11/2024	Rp 5,053,850	Divisi 2 : Drainase
73	PROSP220923002	SARPRAS.24.PROSP220923002.10	Kelompok Tani Cahaya Tani	Banten	11/11/2024	Rp 284,394,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
74	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.04	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/12/2024	Rp 16,310,000	Divisi 1 : Umum
75	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.04	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/12/2024	Rp 12,091,400	Divisi 2 : Drainase
76	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.04	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/12/2024	Rp 182,517,400	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
77	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.04	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/12/2024	Rp 150,604,800	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Rutin
78	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.09	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	11/7/2024	Rp 17,424,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
79	PROSP221124002	SARPRAS.24.PROSP221124002.09	KT Tunas Muda Harapan	Jambi	11/7/2024	Rp 75,888,000	Divisi 7 : Struktur
80	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.10	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Jambi	11/15/2024	Rp 158,028,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
81	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.14	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/21/2024	Rp 325,320,000	Divisi 2 : Drainase
82	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.14	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/21/2024	Rp 386,040,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
83	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.14	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/21/2024	Rp 45,240,000	Divisi 7 : Struktur
84	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.07	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/12/2024	Rp 2,205,943,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
85	PROSP240118002	SARPRAS.24.PROSP240118002.05	Kelompok Tani Mitra Mandiri	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 1,675,000	Divisi 1 : Umum
86	PROSP240118002	SARPRAS.24.PROSP240118002.05	Kelompok Tani Mitra Mandiri	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 912,420,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
87	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.15	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/19/2024	Rp 7,220,075	Divisi 1 : Umum
88	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.15	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/21/2024	Rp 1,044,604,086	Divisi 2 : Drainase
89	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.15	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/20/2024	Rp 1,020,815,202	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
90	PROSP221102001	SARPRAS.24.PROSP221102001.15	GAPOKTAN MAJU BERSAMA	Aceh	11/21/2024	Rp 13,835,660	Divisi 7 : Struktur

No	Nomor Proposal	Kode Permohonan	Nama Lembaga Tani	Provinsi	Tanggal Transaksi	Debit	Keterangan
91	PROSP240118002	SARPRAS.24.PROSP240118002.07	Kelompok Tani Mitra Mandiri	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 5,000,000	Divisi 1 : Umum
92	PROSP240118002	SARPRAS.24.PROSP240118002.07	Kelompok Tani Mitra Mandiri	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 1,194,290,562	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
93	PROSP221216003	SARPRAS.24.PROSP221216003.03	KELOMPOK TANI BUNGA TANI	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 6,705,000	Divisi 1 : Umum
94	PROSP221216003	SARPRAS.24.PROSP221216003.03	KELOMPOK TANI BUNGA TANI	Sulawesi Selatan	11/18/2024	Rp 900,181,836	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
95	PROSP221216003	SARPRAS.24.PROSP221216003.04	KELOMPOK TANI BUNGA TANI	Sulawesi Selatan	11/26/2024	Rp 16,500,000	Divisi 1 : Umum
96	PROSP221216003	SARPRAS.24.PROSP221216003.04	KELOMPOK TANI BUNGA TANI	Sulawesi Selatan	11/26/2024	Rp 427,638,150	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
97	PROSP220818002	SARPRAS.24.PROSP220818002.08	Koperasi Produsen Kuala Panga Neisero	Aceh	11/22/2024	Rp 12,240,000	Divisi 1 : Umum
98	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.12	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	11/21/2024	Rp 24,600,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
99	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.12	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	11/21/2024	Rp 3,288,200	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
100	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.12	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	11/21/2024	Rp 117,005,900	Divisi 7 : Struktur
101	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.12	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	11/21/2024	Rp 12,030,000	Divisi 9 : Pekerjaan Harian
102	PROSP221018002	SARPRAS.24.PROSP221018002.43	GAPOKTAN TANI MULYA	Jambi	11/21/2024	Rp 313,174,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
103	PROSP221205006	SARPRAS.24.PROSP221205006.13	KOPERASI PRODUSEN SEUMOT JAYA MANDIRI	Aceh	12/10/2024	Rp 54,696,713	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
104	PROSP221205006	SARPRAS.24.PROSP221205006.14	KOPERASI PRODUSEN SEUMOT JAYA MANDIRI	Aceh	12/10/2024	Rp 304,193,287	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
105	PROSP220822002	SARPRAS.24.PROSP220822002.18	KT SINAR MANDIRI	Jambi	12/2/2024	Rp 15,000,000	Divisi 1 : Umum
106	PROSP220822002	SARPRAS.24.PROSP220822002.18	KT SINAR MANDIRI	Jambi	12/2/2024	Rp 1,500,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
107	PROSP220822002	SARPRAS.24.PROSP220822002.18	KT SINAR MANDIRI	Jambi	12/2/2024	Rp 715,375,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
108	PROSP230616002	SARPRAS.24.PROSP230616002.03	KELOMPOK TANI BERSAMA KITA BISA	Kalimantan Barat	12/16/2024	Rp 9,000,000	Divisi 1 : Umum
109	PROSP230616002	SARPRAS.24.PROSP230616002.03	KELOMPOK TANI BERSAMA KITA BISA	Kalimantan Barat	12/16/2024	Rp 34,264,000	Divisi 2 : Drainase
110	PROSP230616002	SARPRAS.24.PROSP230616002.03	KELOMPOK TANI BERSAMA KITA BISA	Kalimantan Barat	12/16/2024	Rp 1,306,545,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
111	PROSP230616002	SARPRAS.24.PROSP230616002.03	KELOMPOK TANI BERSAMA KITA BISA	Kalimantan Barat	12/16/2024	Rp 9,220,000	Divisi 7 : Struktur
112	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.15	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	12/13/2024	Rp 18,780,000	Divisi 1 : Umum
113	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.15	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	12/13/2024	Rp 6,040,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
114	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.15	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	12/13/2024	Rp 114,760,000	Divisi 7 : Struktur
115	PROSP221101005	SARPRAS.24.PROSP221101005.15	Koperasi Produsen Koptan Sinar Belaban	Kalimantan Barat	12/13/2024	Rp 6,040,000	Divisi 9 : Pekerjaan Harian
116	PROSP230206001	SARPRAS.24.PROSP230206001.11	KELOMPOK TANI ANUGRAH 2	Bengkulu	12/16/2024	Rp 380,000	Divisi 2 : Drainase
117	PROSP230206001	SARPRAS.24.PROSP230206001.11	KELOMPOK TANI ANUGRAH 2	Bengkulu	12/16/2024	Rp 46,980,000	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah & Geosintetik
118	PROSP230206001	SARPRAS.24.PROSP230206001.11	KELOMPOK TANI ANUGRAH 2	Bengkulu	12/16/2024	Rp 92,965,000	Divisi 5 : Pekerjaan Perkerasan, Berbutir & Perkerasan
119	PROSP230206001	SARPRAS.24.PROSP230206001.11	KELOMPOK TANI ANUGRAH 2	Bengkulu	12/16/2024	Rp 19,320,000	Divisi 7 : Struktur

Catatan penting dalam kinerja program sarana dan prasarana adalah:

1. Telah dilakukan penyaluran dana swakelola Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit untuk tahun 2024
2. Tersendatnya penyaluran Dana Sarpras dalam bentuk barang.
3. Terdapat 1 rekomendasi teknis Sarpras berupa Unit Pengolahan Hasil Menjadi Minyak Mentah, Minyak Merah, atau Minyak Goreng yang telah diterbitkan SK Direktur Utama dengan nomor KEP- 41/DPKS/2024.
4. Nilai rekomendasi teknis SPPKS yang telah diterbitkan SK Direktur Utama untuk penyaluran sarpras dalam bentuk uang sebesar Rp 171.051.003.883,- (berdasarkan RAB rekomtek).
5. Nilai realisasi hingga 03 Desember 2024 sebesar Rp. 63.536.417.940 Dengan nilai pengembalian Rp. 929.497.994.
6. Telah diterbitkan 62 SK Direktur Utama untuk penyaluran SPPKS dalam bentuk barang. Terdapat 1 rekomendasi teknis yang telah disetujui untuk diterbitkan SK Direktur Utama berupa Unit Pengolahan Hasil Menjadi Minyak Mentah, Minyak Merah, atau Minyak Goreng.

Important Notes on the Performance of the Infrastructure Program:

1. The distribution of self-managed funds for Palm Oil Plantation Infrastructure for 2024 has been carried
2. out.There have been delays in the distribution of Infrastructure Funds in the form of goods.One technical
3. recommendation for infrastructure has been issued as a decree by the President Director, Number KEP-41/DPKS/2024, concerning a Processing Unit for producing Crude Palm Oil, Red Palm Oil, or Cooking Oil.The
4. value of the technical recommendation for SPPKS (Smallholder Palm Oil Revitalization Program) that has been issued by the President Director's decree for the disbursement of infrastructure funds in cash is IDR
5. 171,051,003,883 (based on the technical recommendation budget plan).The realized amount as of December 3, 2024, is IDR 63,536,417,940 with a return amount of IDR 929,497,994.A total of 62 decrees from the
6. President Director have been issued for the disbursement of SPPKS funds in the form of goods.One approved technical recommendation has been granted a decree from the President Director concerning a Processing Unit for producing Crude Palm Oil, Red Palm Oil, or Cooking Oil.

4.6 Kinerja Insentif Biodisel

Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan adalah upaya BPDPKS mendukung program pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga CPO dan/atau mengurangi terjadinya fluktuasi harga yang tajam sehingga dapat menjamin keberlangsungan industri sawit yang berkelanjutan. Definisi kinerja ini adalah jumlah volume biodiesel yang dibiayai dengan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun anggaran 2024. Target untuk tahun 2024 adalah sebanyak 11.300.000 kilo liter. Adapun tujuan kinerja ini adalah memberikan insentif biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) guna mendukung program penggunaan bahan bakar biodiesel secara luas di masyarakat.

Capaian kinerja insentif biodiesel sebesar 12.26 jt kL dari target 11.18 jt kL sehingga persentase capaian sebesar 128%, penjelasan capaian sebagai berikut:

a. Volume penyaluran Biodiesel s.d 31 Desember 2024 sebesar 13.024.073 KL ~ 13,02 Jt KL berdasarkan aplikasi https://program-biodiesel.bpdp.or.id/.
b. Jumlah pembayaran dana pembiayaan biodiesel s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp28,81 Triliun untuk volume biodiesel yang dibayarkan sebesar 11,16 JutaKL.
c. Berdasarkan Rekonsiliasi Data Penyaluran Biodiesel pada tanggal 16 Desember 2024 di Bogor, jumlah volume penyaluran Biodiesel untuk periode November 2024 sebesar 1.141.173 KL.
d. Rekonsiliasi Penyaluran BBN titik serah Floating Storage (FS) Balikpapan untuk Periode September-Oktober 2024 dilakukan pada tanggal 2 Desember 2024, Jumlah volume penyaluran Biodiesel titik serah FS Balikpapan untuk periode September 2024 sebesar 139.242.973 Liter dengan biaya FS sebesar Rp76,80/liter, dan untuk periode Oktober 2024 sebesar 125.800.391 Liter dengan biaya FS sebesar Rp85,01/liter.
e. Selisih HIP biodiesel dan HIP Solar bulan Desember 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp5.667,39 (diluar OA dan PPN) dibandingkan dengan bulan November 2024 sebesar Rp5.000,81 (diluar OA dan PPN). Hal ini disebakan HIP Biodiesel naik sebesar Rp666/liter dibulan Desember 2024, sedangkan HIP Solar mengalami kenaikan di bulan Desember sebesar Rp339/liter.
f. Rapat Tim Evaluasi Mandatori Biodiesel yang dilaksanakan tanggal 26 Desember 2024 menyampaikan Alokasi volume penyaluran biodiesel B40 tahun 2025 sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 akan membagi alokasi menjadi PSO dan Non-PSO sesuai volume yang digunakan dalam asumsi APBN 2025. Untuk PSO meliputi pelaksanaan mandatori B40 serta pembayaran dana insentif biodiesel dan untuk Non PSO hanya untuk pelaksanaan mandatori B40 sehingga Verifikasi yang akan dilakukan Kementerian ESDM terkait penyaluran biodiesel di titik serah BU BBM.

4.6 Biodiesel incentive performance

The implementation of the sustainable biodiesel mandatory program is BPDPKS's effort to support the government's policy in stabilizing CPO prices and/or reducing sharp price fluctuations, thereby ensuring the sustainability of the palm oil industry. This performance indicator is defined by the volume of biodiesel funded by the Palm Oil Plantation Fund during the 2024 fiscal year. The target for 2024 is 11,300,000 kiloliters.The objective of this program is to provide biodiesel incentives to Biofuel Business Entities (BUBBN) in order to support the widespread use of biodiesel as an alternative fuel across society.The performance realization for biodiesel incentives reached 12.26 million kiloliters, exceeding the target of 11.18 million kiloliters, resulting in a performance achievement of 128%, with the following explanation:

a. The volume of biodiesel distributed as of December 31, 2024, reached 13,024,073 kiloliters (~13.02 million kL) based on the official application https://program-biodiesel.bpdp.or.id/.
b. The total biodiesel funding paid as of December 31, 2024, amounted to IDR 28.81 trillion for a paid volume of 11.16 million kL.
c. Based on the Biodiesel Distribution Data Reconciliation conducted on December 16, 2024, in Bogor, the biodiesel volume distributed for November 2024 was 1,141,173 kiloliters.
d. Biofuel (BBN) distribution reconciliation at the Floating Storage (FS) delivery point in Balikpapan for the September–October 2024 period was conducted on December 2, 2024.September 2024: 139,242,973 liters at a floating storage fee of IDR 76.80/literOctober 2024: 125,800,391 liters at a floating storage fee of IDR 85.01/litere.
e. The difference between the Biodiesel Market Price Index (HIP) and the Diesel HIP in December 2024 increased again to IDR 5,667.39/liter (excluding OA and VAT), compared to IDR 5,000.81/liter in November 2024. This increase was due to a rise of IDR 666/liter in Biodiesel HIP, while Diesel HIP increased by IDR 339/liter.
f. In the Biodiesel Mandate Evaluation Team Meeting held on December 26, 2024, it was conveyed that the 2025 B40 biodiesel distribution volume allocation under Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources No. 341.K/EK.01/MEM.E/2024 will be divided into PSO (Public Service Obligation) and Non-PSO.PSO: covers the implementation of the B40 mandate and the disbursement of biodiesel incentive funds.Non-PSO: applies only to the B40 mandate implementation.The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will verify biodiesel distribution at the fuel business entity (BU BBM) delivery points.

Tabel 4.5 Rincian realisasi penyaluran biodiesel
Table 4.5 Details of Biodiesel Distribution Realization

Tahun 2024 Year 2024	Volume Realisasi Penyaluran Biodiesel* (Kilo Liter) Realization Volume of Biodiesel Distribution* (Kiloliters)	Volume yang Dibayarkan (Kilo Liter)** Volume Paid (Kiloliters)**	Pembayaran selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar (Rupiah) Payment of Difference between HIP Biodiesel and HIP Solar (Rupiah)
Januari	1.102.228	29.587	10.789.631.067
Februari	1.055.444	480.846	433.721.692.070
Maret	997.284	733.123	949.930.564.238
April	999.842	1.033.104	1.916.349.698.600
Mei	1.065.172	1.145.940	2.284.996.632.703
Juni	986.271	1.124.869	2.435.021.574.639
Juli	1.199.383	715.920	1.953.391.268.653
Agustus	1.087.769	1.542.809	4.364.611.808.002
September	1.110.932	924.310	2.682.108.825.250
Oktober	1.208.450	1.248.384	3.784.339.897.562
November	1.141.173	1.370.801	4.483.125.345.058
Desember	1.070.125	808.234	3.512.450.840.969
Total	**13.024.073**	**11.157.927**	**28.810.837.778.811**

Hal yang perlu terus dilakukan agar IKU ini teracapai adalah Memantau terus selisih kurang HIP Minyak Solar dengan HIP Biodiesel, dan berkoordinasi dengan Dit PPD, Dit KUKMR, Dit PPD terkait kecukupan dana pembiayaan selisih kurang HIP Minyak Solar dengan HIP Biodiesel dan melakukan rekonsiliasai data penyaluran biodiesel dengan Ditjen EBTKE, BUBBN, BUBBM dan PT Surveyor Indonesia.

To ensure the achievement of this Key Performance Indicator (KPI), it is necessary to continuously monitor the gap between the Market Price Index (HIP) of Diesel Oil and the HIP of Biodiesel, and to coordinate with the Directorate of Planning and Fund Disbursement (Dit PPD), the Directorate of Micro, Small, and Medium Enterprises (Dit KUKMR), and related units regarding the availability of funds to cover the gap between HIP Diesel and HIP Biodiesel. Additionally, it is essential to reconcile biodiesel distribution data with the Directorate General of New, Renewable Energy and Energy Conservation (EBTKE), Biofuel Business Entities (BUBBN), Fuel Business Entities (BUBBM), and PT Surveyor Indonesia.



Penerapan Manajemen Risiko BPDPKS

BPDPKS telah mengimplementasikan Penerapan manajemen risiko melalui kegiatan pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Budaya sadar risiko dikembangkan dengan berpedoman pada nilai-nilai BPDPKS dengan memberikan pemahaman bahwa pengelolaan risiko menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Disamping itu, sebagai upaya dalam mencapai visi, misi, dan sasaran bisnis Badan Layanan Umum, Divisi Manajemen Risiko BPDPKS menyusun profil risiko, melakukan monitoring dan mitigasi risiko.

Profil Risiko

Penyusunan profil risiko BPDPKS didasarkan pada sasaran, faktor internal dan eksternal. Dalam penyusunan profil risiko tersebut, BPDPKS telah melaksanakan risk assessment di semua proses bisnis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan level risiko menjadi beberapa tingkatan, yaitu: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi.

Implementation of BPDPKS Risk Management

BPDPKS has implemented risk management through the development of a risk-aware culture, the establishment of a risk management structure, and the implementation of the risk management process. A risk-aware culture is developed based on BPDPKS values by providing an understanding that risk management is part of every decision-making process at all levels of the organization.

In addition, as an effort to achieve the vision, mission, and business goals of the Public Service Agency, the Risk Management Division of BPDPKS prepares a risk profile, and conducts risk monitoring and mitigation.

Risk Profile

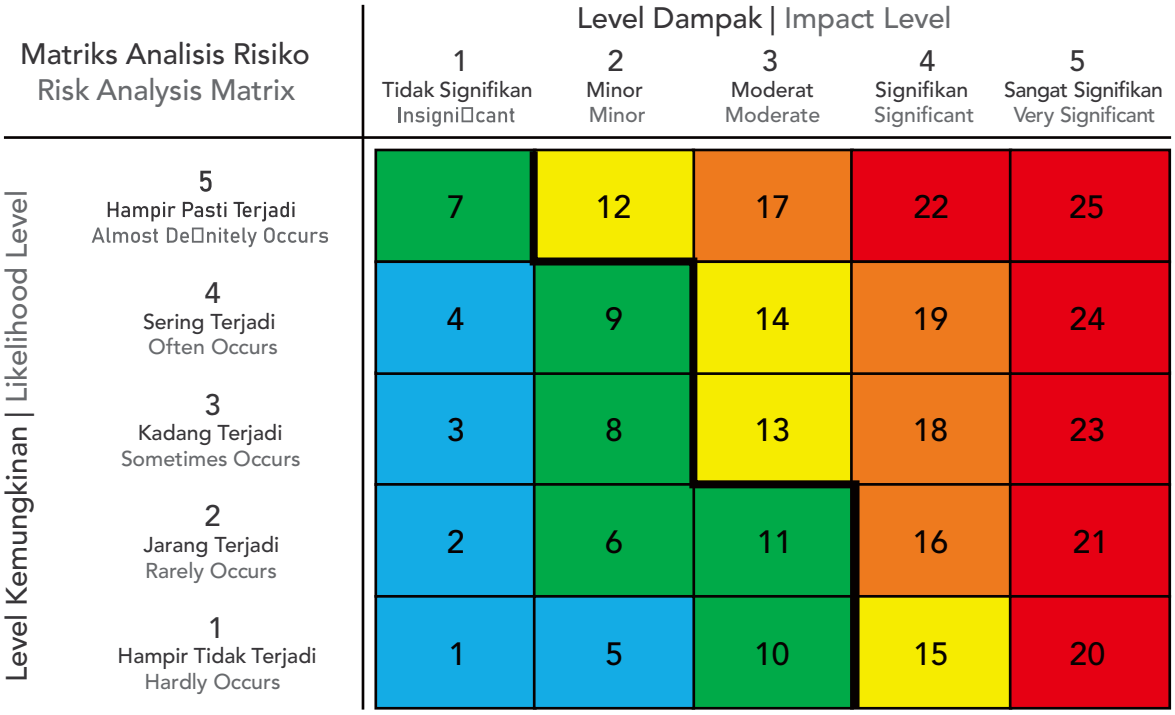
The preparation of BPDPKS risk profile is based on targets, and internal and external factors. In preparing the risk profile, BPDPKS has carried out risk assessments in all business processes to further analyze potential risks and classify risk levels into several levels of: Very Low, Low, Medium, High, and Very High.

Tingkatan | Level	Level Risiko | Risk Level	Besaran Risiko | Risk	Warna | Colour
5	Sangat Tinggi | Very High	20–25	
4	Tinggi | High	16–19	
3	Sedang | Moderate	12–15	
2	Rendah | Low	6–11	
1	Sangat Rendah | Very Low	1–5	

Sepanjang tahun 2024, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS berfokus pada pengelolaan kualitas perbaikan dan mitigasi dari profil risiko tahun 2023 yang yang berpotensi menimbulkan risiko-risiko yang dapat merugikan BPDPKS baik di bidang Keuangan, kepatuhan, Kebijakan, Fraud, Operasional dan Reputasi. Jenis risiko (Profil Risiko) yang dihadapi BPDPKS adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the Compliance and Risk Management Division of BPDPKS focused on managing the quality of improvement and mitigation of the risk profile in 2023 that could potentially pose risks that could harm BPDPKS in the areas of Finance, Compliance, Policy, Fraud, Operations, and Reputation. The Risk Profile faced by BPDPKS are as follows:

Peta Risiko Berdasarkan Klasifikasi Risiko
Risk Map by Risk Classification



RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK	Berkaitan kondisi fiskal pemerintah pusat meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan serta berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya. Related to the central government's fiscal conditions include the macroeconomic framework, budgeting, taxation, customs, treasury, and financial supervision as well as with regard to state assets which include State Property (BMN), separated state assets, government investment, and other state assets.
RISIKO KEBIJAKAN POLICY RISK	Berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi. Related to the formulation and determination of internal and external policies of the organization.
RISIKO REPUTASI REPUTATION RISK	Berkaitan dengan persepsi negatif atau menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi Related to the negative perceptions or reduced levels of external stakeholder trust towards the organization
RISIKO FRAUD FRAUD RISK	Berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih. Related to the acts that contain elements of intentional, benefiting oneself or others, fraud, concealment or embezzlement, and abuse of trust with the aim of obtaining illegal profits which can be in the form of money, goods/property, services, and not paying for services, by one or more individuals.
RISIKO LEGAL LEGAL RISK	Berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lain kepada organisasi/ jabatan. Related to the lawsuits and other legal remedies against organizations/positions.
RISIKO KEPATUHAN COMPLIANCE RISK	Berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku. Related to the non-compliance with organizations or external parties with laws and regulations, international agreements, or other applicable provisions.
RISIKO OPERASIONAL OPERATIONAL RISK	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu Related to the malfunctioning risks of the organization's business processes, information systems, or individual work safety

Selain menyusun peta risiko berdasarkan kategori risiko, BPDPKS juga telah menyusun peta risiko berdasarkan pada sasaran program/kegiatan selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

In addition to compiling a risk map based on risk categories, BPDPKS has also compiled a risk map based on program/activity targets during 2024, which are as follows:

Daftar Risiko BPDPKS Tahun 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko	
				Awal Periode	Akhir Periode
1.	Pengelolaan dana kelapa sawit yang berkelanjutan	1.1	Tingkat harga CPO berada di bawah harga produksi	15	11
2.	Birokrasi yang *agile*, efektif, efisien, dan akuntabel	2.1	Terdapat layanan BPDPKS yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan	14	12
3.	Penghimpunan dana kelapa sawit yang optimal	3.1	Penyampaian konfirmasi kurang bayar pungutan tidak tepat waktu	18	11
4.	Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif	4.1	Adanya kampanye negatif sawit secara masif di media nasional	22	9
		4.2	Produk sawit dan turunannya tidak dapat dipasarkan di negara tujuan ekspor baru	10	10
5.	Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan	5.1	Adanya temuan BPK terkait penggunaan dana swakelola peremajaan	22	15
		5.2	Terlambatnya penanganan pekerjaaan swakelola dan tindaklanjut rekomendasi teknis dari ditjenbun	19	11
		5.3	Rekomendasi teknis sarana prasarana yang diterima tidak dapat diproses	25	15
6.	Imbal hasil pengembangan dana yang optimal	6.1	Potensi penurunan nilai Instrumen Investasi Obligasi	14	11
7.	Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan	7.1	Dana Sawit tidak mencukupi untuk membayar insentif Biodiesel	15	10
8.	Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan	8.1	Rendahnya jumlah usulan penelitian yang di-rekomendasikan oleh komite litbang BPDPKS	13	11
9.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	9.1	Terdapat rekomendasi temuan BPK APIP yang tidak tuntas ditindaklanjuti BPDPKS	14	14
		9.2	Terdapat rekomendasi monev Pembina Teknis dan Pembina Keuangan yang tidak tuntas ditindaklanjuti	11	11
10.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	10.1	Keterlambatan penyampaian Laporan *Strategy Focused Organization* (SFO)	10	10
		10.2	Keterlambatan penyampaian Laporan Manajemen Risiko	10	10
		10.3	Terjadi potensi harga barang dan jasa lebih tinggi dari harga wajar	16	11
		10.4	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	15	11
		10.5	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	10	11
11.	Penguatan fungsi TIK yang Kolaboratif	11.1	Pengintegrasian data pada BPDPKS tidak berjalan	10	10
12.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	12.1	Tidak tercapainya target capaian output Tahun 2023	16	15

BPDPKS Risk List 2024

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Akhir Periode
1.	Sustainable palm oil fund	1.1 CPO price level falls below production cost	15	11
2.	Agile, effective, efficient, and accountable bureaucracy	2.1 BPDPKS services implemented not in accordance with regulations	14	12
3.	Optimal palm oil fund collection	3.1 Delay in submitting confirmation of levy underpayment	18	11
4.	Effective public communication and partnerships	4.1 Massive negative palm oil campaigns in national media	22	9
		4.2 Palm oil products and derivatives cannot be marketed in new export destination countries	10	10
5.	Sustainable palm oil plantation development	5.1 Findings from BPK related to use of self-management funds for rejuvenation	22	15
		5.2 Delay in handling self-management work and follow-up on technical recommendations from Directorate General of Estate Crops	19	11
		5.3 Technical recommendations on infrastructure received cannot be processed	25	15
6.	Optimal return on fund development	6.1 Potential decline in value of investment instruments (bonds)	14	11
7.	Sustainable mandatory biodiesel program implementation	7.1 Palm Oil Fund insufficient to pay Biodiesel incentives	15	10
8.	Sustainable palm oil research and development management	8.1 Low number of research proposals recommended by BPDPKS R&D committee	13	11
9.	Transparent and accountable state financial accountability	9.1 BPK APIP audit recommendations not fully followed up by BPDPKS	14	14
		9.2 Technical and Financial Supervisors' monitoring and evaluation recommendations not fully followed	11	11
10.	Strengthening governance and work culture of Ministry of Finance as one in a collaborative ecosystem	10.1 Delay in submitting Strategy Focused Organization (SFO) report	10	10
		10.2 Delay in submitting Risk Management report	10	10
		10.3 Potential prices of goods and services higher than fair value	16	11
		10.4 Verified cases of bribery, illegal levies (extortion), corruption detected by Internal Compliance Unit (UKI), Inspectorate General, and/or Law Enforcement	15	11
		10.5 Low employee loyalty to the organization	10	11
11.	Strengthening collaborative IT functions	11.1 Data integration in BPDPKS not running	10	10
12.	Strengthening optimal financial and state asset management	12.1 Failure to achieve output targets for 2023	16	15





Tata Kelola

Combined Governance



Tata Kelola BPDPKS
BPDPKS Governance

BPDPKS senantiasa menerapkan good governance dalam seluruh kegiatan usahanya, karena melalui penerapan good governance mampu memberikan capaian perusahaan yang lebih baik.
BPDPKS always implements good governance in all its business activities, because through the implementation of good governance it is able to provide better company achievements.

Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance (CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

BPDPKS merupakan sebuah instansi pemerintah yang sepenuhnya menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/2015 mengenai penetapan BPDPKS pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang secara sepenuhnya menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

BPDPKS meyakini bahwa penerapan good governance (GG) yang sistematis dan konsisten merupakan syarat mutlak terbentuknya usaha yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, implementasi good governance yang baik pada BPDPKS diharapkan mampu mendorong pengembangan bisnis, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Corporate Governance (CG) is a system designed to direct the management of a company in a professional manner based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality.

BPDPKS is a government agency that fully implements the financial pattern of the Public Service Agency (BLU) based on the Decree of the Minister of Finance No. 650/KMK.01/2015 regarding the determination of BPDPKS at the Ministry of Finance as a Government Agency that fully implements the Financial Management of the Public Service Agency (PK-BLU).

BPDPKS believes that the systematic and consistent implementation of good governance (GG) is an absolute requirement for the establishment of a sustainable business. In the long term, the implementation of good governance at BPDPKS is expected to encourage business development, increase accountability, and create value for shareholders without neglecting the interests of other stakeholders



5.1 Komitmen Penerapan Tata Kelola BPDPKS
Commitmenttothe ImplementionBPDPKS Governance

BPDPKS terus berusaha mengembangkan praktik good governance sebagai wujud komitmen untuk terus berinovasi sebagai upaya penyempurnaan implementasi good governance di lingkup organisasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri BPDPKS dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan yang datang, serta mempertahankan eksistensi BPDPKS dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif di masa mendatang.

Penerapan prinsip-prinsip good governancedi BPDPKS tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan operasional bisnis sehari-hari BPDPKS sebagai bentuk komitmen kami terhadap tata kelola perusahaan yang baik. BPDPKS menyusun kebijakan standar good governance yaitu diantaranya adalah Code of Conduct sesuai dengan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-628/DPKS/2019 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (Code of Conduct pada BPDPKS yang secara resmi mulai diberlakukan pada akhir tahun anggaran 2019. BPDPKS juga terus berusaha dalam melakukan berbagai pengembangan serta penyempurnaan atas kelengkapan prosedur dan kebijakan di seluruh lini organisasi BPDPKS. Sehingga strategi BPDPKS dalam mewujudkan visi dan misi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

BPDPKS continues to strive to develop good governance practices as a form of commitment to remain innovating as an effort to improve the implementation of good governance within the organization. This can increase the confidence of BPDPKS in facing all obstacles and challenges that come, as well as maintain the existence of BPDPKS in facing the increasingly competitive business rivalry in the future.

The implementation of good governance principles in BPDPKS is refrected in the compliance with good governance principles in carrying out its daily business operations as a form of our commitment to good corporate governance. BPDPKS compiles good governance standard policies, which include the Code of Conduct in accordance with the President Director's Decree No. KEP-628/DPKS/2019 regarding the Code of Conduct at BPDPKS which officially came into force at the end of the 2019 fiscal year. BPDPKS also continue to strive to carry out various developments and improvements to the completeness of procedures and policies in all lines of its organization. So that the BPDPKS strategy in realizing the vision and mission can run effectively and eficiently.

Prinsip Tata Kelola BPDPKS

Secara keseluruhan, mekanisme penerapan tata kelola BPDPKS telah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu:

BPDPKS Governance Principles

Overall, BPDPKS governance implementation mechanism has been based on the basic principles of governance, they are:

Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material yang relevan bagi BPDPKS kepada stakeholder. Transparency in carrying out the decision-making process and presenting material information relevant for BPDPKS to stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	BPDPKS menjamin adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban insan BPDPKS yang memungkinkan pengelolaan BPDPKS terlaksana secara efektif. BPDPKS guarantees the clarity of functions, implementation, and accountability of BPDPKS personnel which enables the management to be carried out effectively.
Pertanggungjawaban Responsibility	Prinsip pertanggungjawaban merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola BPDPKS serta etika bisnis yang sehat dalam pengelolaan BPDPKS. The principle of responsibility is compliance with applicable laws and regulations and the principles of BPDPKS governance as well as sound business ethics in the management of BPDPKS.
Independensi Independency	Prinsip independensi merupakan pengelolaan BPDPKS secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of independence is managing BPDPKS self-sufficiently without conflict of interest and influence/pressure from any party that does not fit with the applicable laws and regulations.
Kewajaran & Kesetaraan Fairness & Equality	BPDPKS selalu memastikan serta menjamin keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPDPKS always ensures and guarantees justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations.

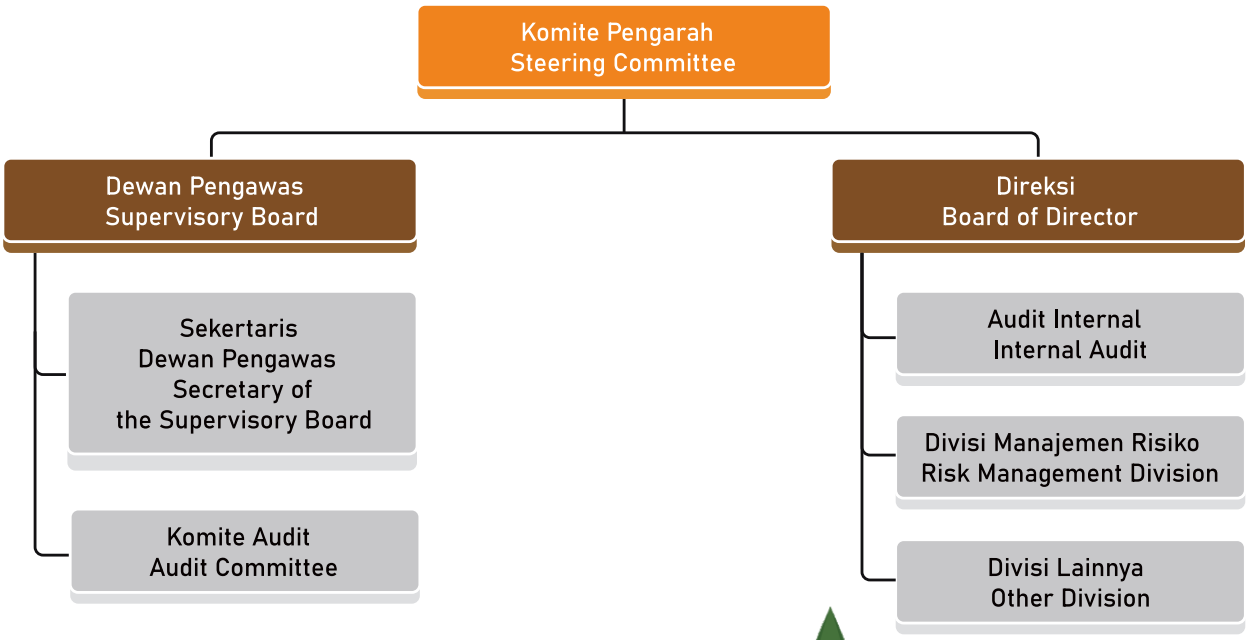
Struktur Tata Kelola BPDPKS

Badan tata kelola BPDPKS dirancang untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola dapat berfungsi secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk menciptakan mekanisme kontrol check and balance yang baik. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, telah dibentuk suatu komite yang terdiri dari Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas. Sementara itu, lembaga pendukung dewan termasuk Divisi pengawasan audit internal, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Lainnya.

BPDPKS Governance Structure

The BPDPKS governance board is designed to ensure that the implementation of governance principles can function effectively with clear roles and responsibilities to create a good check and balance control mechanism. In order to assist the implementation of the Supervisory Board duties, a committee has been formed consisting of the Audit Committee and the Secretary of the Supervisory Board. Meanwhile, the board's supporting institutions include the Internal Audit Supervision Division, Risk Management Division, and Other Divisions.

Struktur Tata Kelola BPDPKS
BPDPKS Governance Structure





5.2 Komite Pengarah BPDPKS

Merupakan komite yang memiliki peran untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas BPDPKS termasuk penentu penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Komite Pengarah BPDPKS ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

BPDPKS Steering Committee

Is a committee that has a role to provide policy direction for the implementation of BPDPKS duties including determining the use of palm oil plantation funds. The BPDPKS Steering Committee is stipulated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 regarding the Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 regarding the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengarah beranggotakan delapan kementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Perekonomian sebagai koordinator Komite Pengarah. Kemudian 7 (tujuh) kementerian lainnya menjadi anggota dari komite pengarah, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian BUMN dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional.

The Steering Committee consists of eight ministries, led by the Coordinating Ministry for the Economy as the coordinator of the Steering Committee. Then, the 7 (seven) other ministries became members of the steering committee, including: Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Ministry of Industry, Ministry of Trade, Ministry of Energy and Mineral Resources, and Ministry of BUMN and Ministry of National Development Planning/Head of National Development Agency.

Tugas dan Kewajiban Komite Pengarah Dana Perkebunan

Komite Pengarah BPDPKS memiliki dua tugas utama, yaitu 1) memberikan arahan kebijakan yang meliputi tujuan, visi, misi dan kebijakan penggunaan Dana Kelapa Sawit Perusahaan, khususnya dalam penetapan rancangan kebijakan untuk pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan; 2) Memiliki wewenang dalam menunjuk dan mengangkat Dewan Pengawas dan Direktur Eksekutif.

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugas Komite Pengarah Dana Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio; dan

Duties and Obligations of Plantation Fund Steering Committee

The BPDPKS Steering Committee has two main duties, they are: 1) providing policy directions covering the objectives, vision, mission and policies for the use of the Company's Palm Oil Fund, particularly in determining the draft policy for sustainable development and management of palm oil; 2) Has the authority to appoint and assign the Supervisory Board and Executive Director.

Meanwhile, based on the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 66 of 2018 regarding the Second Amendment to Presidential Regulation No. 61 of 2015 regarding the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds, the duties of Dana Perkebunan Steering Committee are as follows:

1. Develop policies in the collection and use of funds, includingassetallocationpoliciesbasedonaportfolio approach; and

2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan alokasi aset yang berdasarkan pendekatan portofolio.

Setiap komite pengarah berperan dalam merumuskan kebijakan terkait dana pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Peran masing-masing kementerian dalam komite pengarah dijelaskan dalam tabel berikut:

2. Supervise the implementation of policies in the collection and use of funds, including asset allocation policies based on a portfolio approach.

Each steering committee plays a role in formulating policies related to palm oil plantation management funds. The role of each ministry in the Steering Committee is described in the following table:

Komite Pengarah BPDPKS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Keuangan	Menetapkan tarif pungutan, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas. Establish the levy rates, establish the appointment and dismissal of the Supervisory Board.
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Pertanian	Menetapkan peta jalan (road map) untuk kegiatan peremajaan, menetapkan pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit yang bersumber dari dana sawit, memberikan rekomendasi teknis dalam proses penyaluran dana sawit untuk kegiatan peremajaan. Establish a road map for rejuvenation activities, establish guidelines for rejuvenation of palm oil plants that sourced from palm oil funds, provide technical recommendations in the process of distributing palm oil funds for rejuvenation activities.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Koordinator Perekonomian	Koordinator Komite Pengarah. Steering Committee Coordinator.
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Perindustrian	Menetapkan komoditas turunan perkebunan kelapa sawit yang dikenakan pungutan ekspor. Establish the derivative commodities of palm oil plantations which are subject to export levies.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Perdagangan	Berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana terkait dengan penunjukan surveyor. Coordinate with the Fund Management Agency related to the appointment of surveyors.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Melakukan verifikasi terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk mendapatkan dana bagi kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Selain itu mengumpulkan laporan terkait kegiatan produksi dan distribusi (domestik maupun ekspor) jenis biodiesel oleh Badan Usaha Bahan Bakar nabati jenis biodiesel. Verify Biodiesel-Type Biofuel Business Entities to obtain funds to supply and utilize biodiesel-type biofuels. In addition, it collects reports related to the production and distribution activities (domestic and export) of biodiesel by Biodiesel-Type Biofuel Business Entities.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Melakukan pembinaan terhadap perusahaan BUMN dan merancang proses bisnis dalam program dana sawit. Provide guidance to state-owned companies and design business processes in the palm oil fund program.
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA	Kementerian PPN/ Bappenas	Menyusun rencana pembangunan nasional dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya; dan mengarahkan kebijakan program pemanfaatan dana sawit ke arah yang sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. Prepare national development plans and draft state budgets for revenues and expenditures and evaluate their implementation; and directing program policies for the use of palm oil funds in a direction that is in accordance with national development policies.

Fungsi Komite Pengarah

Komite Pengarah Dana Perkebunan memiliki fungsi:

1. Mengarahkan strategi kebijakan umum pengelolaan DPKS oleh BPDPKS;
2. Menetapkan perencanaan jangka panjang serta tujuan BPDPKS;
3. Menetapkan kebijakan umum pengembangan dan penyaluran DPKS;
4. Menyetujui rencana umum target pemungutan biaya, penyaluran dana dan cadangan BPDPKS;
5. Menetapkan proporsi alokasi DPKS terkait dana pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dan pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, dan hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit; dan
6. Mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan BPDPKS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS yang selanjutnya disebut Sekretariat Komite Pengarah;
2. Melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
3. Menunjuk narasumber utama (prominent) yang berasal dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan kelapa sawit, dan eksportir atas komoditas perkebunan kelapa sawit dan/atau turunannya.

Rapat Komite Pengarah

Rapat Komite Pengarah diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, namun juga dapat dilaksanakan pada rapat yang membahas isu-isu penting tertentu. Pertemuan Komite Pengarah merupakan rapat tingkat tinggi (high level meeting) yang hanya dihadiri oleh pimpinan tertinggi masing-masing kementerian/ lembaga yang menjadi ketua dan anggota Komite Pengarah.

Sekretariat Komite Pengarah dan Perkebunan

Sekretaris Komite Pengarah Dana Perkebunan diemban oleh Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat Komite Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);

Steering Committee Functions

Dana Perkebunan Steering Committee has the following functions:

1. Directing the general policy strategy of DPKS management by BPDPKS;
2. Establishing long-term plan and objectives of BPDPKS;
3. Establishing general policies for the development and distribution of DPKS;
4. Approving the general plan for the target for collection of costs, distribution of funds and reserves of BPDPKS;
5. Determining the proportion of DPKS allocations related to human resource development funds for Palm Oil Plantations, research and development of Palm Oil Plantations, promotion of Palm Oil Plantations, rejuvenation of Palm Oil Plantations, facilities and infrastructure of Palm Oil Plantations, and fulfillment of results of Palm Oil Plantations for food needs, and downstream of the Palm Oil Plantation industry; and
6. Evaluating the performance of BPDPKS's goals.

In carrying out its duties, the Steering Committee may do the following:

1. Establish the Steering Committee Secretariat of BPDPKS, hereinafter referred to as the the Steering Committee Secretariat;
2. Involving ministries, institutions, regional governments, and other parties deemed necessary; and
3. Appoint prominent sources who come from palm oil plantation business players, industrial business players that produce palm oil plantation products, and exporters of palm oil plantation commodities and/or their derivatives.

Steering Committee Meeting

Steering Committee meetings are held twice a year, but can also be held at meetings that discuss certain important issues. The Steering Committee meeting is a high-level meeting, which is only attended by the highest leadership of each ministry/institution who is the chairman and member of the Steering Committee.

Secretariat of Steering Committee and Plantation

The Secretary of Dana Perkebunan Steering Committee is carried out by the Deputy for Food and Agriculture Coordination of the Coordinating Ministry for Economic Affairs. The Steering Committee Secretariat has the following duties:

1. Provide technical and administrative support for the implementation of BPDPKS Steering Committee duties;

2. Membantu Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam melakukan pengawasan dan penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
3. Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan diseminasi terhadap pelaksanaan kegiatan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); dan
4. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite Pengarah dan/atau anggota Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komite Pengarah dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan serta pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya Sekretariat Komite Pengarah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komite Pengarah BPDPKS secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Assist BPDPKS Steering Committee in supervising and utilizing BPDPKS Fund;

3. Provide technical support for the dissemination implementation of BPDPKS Steering Committee activities; and

4. Carry out other related tasks assigned by the Chairman of BPDPKS Steering Committee and/or members of the Steering Committee.

In carrying out its duties, the Steering Committee Secretariat may involve Ministries/Non-Ministerial Government Agencies, Regional Governments, Stakeholders and other parties deemed necessary. Furthermore, the Steering Committee Secretariat reports the results of its duties implementation to the Chairman of BPDPKS Steering Committee periodically or at any time if necessary.



5.3 Dewan Pengawas
Supervisory Board

Dewan Pengawas BPDPKS merupakan badan yang bertugas dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi BPDPKS dalam pengelolaan seluruh kegiatan usaha BPDPKS. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Komite Pengarah atas pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat tersebut secara kolektif maupun kolegial.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi BPDPKS.

Masa Jabatan Dewan Pengawas maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komite Pengarah untuk memberhentikan para Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu.

a. Adapun untuk masa jabatan anggota Dewan Pengawas dapat berakhir apabila masa jabatan berakhir;
b. Meninggal dunia; Mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; Diganti sebelum masa jabatan berakhir, baik diberhentikan menurut keputusan Komite Pengarah maupun diusulkan penggantiannya oleh Kementerian/Lembaga asal; dan
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dewan Pengawas berpedoman Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 2020-2025.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas berwenang untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
b. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
d. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
e. Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, dan/ atau anggota Sekretariat Dewan Pengawas;
g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;

BPDPKS Supervisory Board is the board that is in charge of supervising and providing advice to BPDPKS Directors in managing all BPDPKS business activities. The Supervisory Board is responsible to the Steering Committee for the implementation of its supervisory and advisory duties collectively and collegially.

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of the Supervisory Board is carried out through a Decree of the Minister of Finance, and the appointment of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of the BPDPKS Board of Directors.

Term of Office of Supervisory Board is 5 (years) maximum and may be extended for the next 5 years without prejudice to the rights of Steering Committee to dismiss Members of the Supervisory Board at any time.

a. And for term of office of the Supervisory Board members, it may terminate in case of the termination of term of office;
b. Death; Resignation and approved retirement; Replacement prior to the termination of term of office, whether being dismissed based on the decision of Steering Committee or any replacement proposed by the Ministries/Origin Institutions; and
c. No longer in compliance with applicable provisions of laws.

Guidelines and Code of Conduct

In carrying out its main duties and functions, the Supervisory Board is guided by the Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020 regarding the establishment of the Supervisory Board at the Public Service Agency of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit for the period of 2020-2025.

Duties and Responsibilities

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 202/PMK.05/2022 regarding performance of duties and obligations of the relevant Supervisory Board to:

a. Collect any information on BLU thoroughly, timely, and measurably;
b. Receive periodic reports of BLU management at least including financial statement and performance report;
c. Receive a report of monitoring/inspection results provided by SPI, Government internal auditor, external auditor, and BLU administrator;
d. Comprehend policies and actions implemented by Management Officials for the implementation of BLU activities;
e. Obtain verification and/or data from Management Officials and/or any Officials with respect to policies and performance of BLU activities;
f. Appoint and dismiss Secretary of the Supervisory Board, Audit Committee, and/or members of the Supervisory Board Secretariat;
f. Provide consent for the appointment of the head of SPI;

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, serta Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi BPDPKS.

Masa Jabatan Dewan Pengawas maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk masa tugas 5 (lima) tahun berikutnya dengan tidak mengurangi hak Komite Pengarah untuk memberhentikan para Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu.

a. Adapun untuk masa jabatan anggota Dewan Pengawas dapat berakhir apabila masa jabatan berakhir;
b. Meninggal dunia; Mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; Diganti sebelum masa jabatan berakhir, baik diberhentikan menurut keputusan Komite Pengarah maupun diusulkan penggantiannya oleh Kementerian/Lembaga asal; dan
   Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dewan Pengawas berpedoman Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020 mengenai pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 2020-2025.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas berwenang untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
b. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
   Mendapatkan laporan hasil
c. pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
   Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola dalam pelaksanaan
d. kegiatan BLU;
   Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
e. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit, dan/ atau anggota Sekretariat Dewan Pengawas;
f. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;

Appointment and Dismissal

The appointment and dismissal of the Supervisory Board is carried out through a Decree of the Minister of Finance, and the appointment of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of the BPDPKS Board of Directors.

Term of Office of Supervisory Board is 5 (years) maximum and may be extended for the next 5 years without prejudice to the rights of Steering Committee to dismiss Members of the Supervisory Board at any time.

a. And for term of office of the Supervisory Board members, it may terminate in case of the termination of term of office;
b. Death; Resignation and approved retirement; Replacement prior to the termination of term of office, whether being dismissed based on the decision of Steering Committee or any replacement proposed by the Ministries/Origin Institutions; and
   No longer in compliance with applicable provisions of laws.

Guidelines and Code of Conduct

In carrying out its main duties and functions, the Supervisory Board is guided by the Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020 regarding the establishment of the Supervisory Board at the Public Service Agency of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit for the period of 2020-2025.

Duties and Responsibilities

Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 202/PMK.05/2022 regarding performance of duties and obligations of the relevant Supervisory Board to:

a. Collect any information on BLU thoroughly, timely, and measurably;
b. Receive periodic reports of BLU management at least including financial statement and performance report;
c. Receive a report of monitoring/inspection results provided by SPI, Government internal auditor, external auditor, and BLU administrator;
d. Comprehend policies and actions implemented by Management Officials for the implementation of BLU activities;
e. Obtain verification and/or data from Management Officials and/or any Officials with respect to policies and performance of BLU activities;
f. Appoint and dismiss Secretary of the Supervisory Board, Audit Committee, and/or members of the Supervisory Board Secretariat;
g. Provide consent for the appointment of the head of SPI;

h. Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
I. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
j. Meminta Pejabat Pengelola untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
k. Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
l. Menunjuk kantor akuntan publik; dan
m. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan periodik dan laporan khusus yang dibuat secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali, laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Dewan Pengawas

Kewajiban Dewan Pengawas BPDPKS adalah:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum (BLU);
2. Melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU;
3. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberi pendapat dan saran kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU; dan
4. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola BLU.

Tata Kelola dan Akuntabilitas

Dewan Pengawas sesuai dengan tugas yang diamanahkan telah melaksanakan tugas pengawasan melalui mekanisme sebagai berikut:

h. Bring Management Officials to the Supervisory Board meeting;
I. Communicate directly with SPI;
j. Notify the Supervisory Board to bring professionals to the Supervisory Board meeting;
k. Request special audit to the Government internal supervisory apparatus and report it to the Ministers/Head of Agencies and the Minister of Finance;
l. Appoint the office of accountant public; and
m. Carry out any other authorities under the provisions of laws and regulations.

The Supervisory Board shall report the performance of its duties to the Ministers/Head of Institutions, the Minister of Finance, and Director General of Treasury. The Supervisory Board Report is composed of periodic report and special report provided periodically once every 6 (six) months, from time to time in case of any symptoms of BLU performance degradation and/or any deviation from the provisions of laws and regulations.

Obligations of the Supervisory Board

The obligations of BPDPKS Supervisory Board are:
1. Provide opinions and suggestions to the Minister of Industry and the Minister of Finance regarding the Strategic Business Plan and Budget proposed by the Managing Officer of the Public Service Agency (BLU);
2. Report to the Minister of Industry and the Minister of Finance if there are symptoms of declining BLU performance;
3. Following the development of BLU activities, providing opinions and suggestions to the Minister of Industry and the Minister of Finance regarding any issues deemed important for the management of BLU; and
4. Provide input, suggestions, or responses to the BLU performance financial report to the BLU Management Officer.

Governance and Accountability

The Supervisory Board pursuant to its duties entrusted has carried out its supervisory duties by the following mechanisms:

1. Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas bersama Pejabat Pengelola dilaksanakan paling sedikit satu kali setiap bulan. Rapat Dewan Pengawas selama tahun 2024 dilaksanakan secara fisik di kantor BPDPKS di Gedung Graha Mandiri Lt.5 Jakarta Pusat. Dalam Rapat Dewan Pengawas dibahas hal- hal sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan bulanan Direksi,
2. Tindak lanjut Pengawasan, dan
3. Permasalahan lain yang perlu diselesaikan bersama.

Ringkasan pembahasan rapat Dewan Pengawas bersama Pejabat Pengelola BPDPKS selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian tentang dampak perubahan Pungutan Ekspor (PE) dan BK terhadap kinerja ekspor CPO dan produk turunannya, terutama terkait dengan willingness impor negara-negara tertentu.
2. Terkait dengan rencana pemerintah untuk mengubah kebijakan tarif pungutan ekspor (spesific) menjadi ad valorem, perlu dilakukan kajian tentang dampak perubahan PE terhadap kinerja BPDPKS.
3. Perlu dilakukan diskusi dengan industri stakeholders sawit sebelum memutuskan Fokus topik Grant Riset Sawit (GRS) untuk tahun yang akan datang. Komite riset perlu mendorong riset-riset yang dilakukan oleh lembaga riset bekerjasama dengan industri. Perlu disusun mekanisme di mana pengusul menyampaikan proposal riset Bersama dengan industri yang membutuhkan. 4.!
4. Komite Riset perlu melakukan updating road map riset sawit 2016-2030, minimal 5 tahun sekali. Setiap tahun perlu dilakukan proses reviu internal road map riset menangkap isu-isu mutakhir.
5. Hasil-hasil riset didorong untuk dapat dimanfaatkan oleh industri, pemerintah, dan petani. Hasil-hasil riset yang sudah tersusun dalam e-book (di Website BPDPKS.or.id), perlu disosialisasikan dengan lebih masif kepada semua stakeholdres.
6. Perlu dibahas kembali mekanisme pelaksanaan program PSR melalui jalur Kemitraan agar dapat berkontribusi lebih besar pada peningkatan capaian program PSR.

1. Annual Meeting of The Supervisory Board

The Supervisory Board meetings with Management Officials are held at least once a month. During 2024, the Supervisory Board meetings were conducted physically at the BPDPKS office in Graha Mandiri Building, 5th Floor, Central Jakarta. The following matters were discussed during the Supervisory Board meetings:

1. Monthly progress reports from the Board of Directors,
2. Follow-up on supervisory actions, and
3. Other issues that need to be resolved collaboratively.

Summary of discussions from the Supervisory Board meetings with BPDPKS Management Officials during 2024 are as follows:

1. A study is needed on the impact of changes in Export Levies (PE) and BK on the export performance of CPO and its derivative products, especially concerning the willingness to import from certain countries.Regarding the
2. government's plan to change the export levy policy from a specific tariff to an ad valorem system, a study should be conducted on the impact of PE changes on BPDPKS's performance.Discussions with palm oil industry
3. stakeholders are necessary before deciding the focus topics for the Palm Oil Research Grant (GRS) for the coming year. The Research Committee should encourage research conducted by research institutions in collaboration with the industry. A mechanism should be established where applicants submit research proposals jointly with the industry that requires them.The Research Committee needs to
4. update the palm oil research roadmap for 2016-2030 at least every five years. An internal review process of the roadmap should be conducted annually to capture current issues.Research
5. results should be promoted for use by industry, government, and farmers. The research findings compiled in an e-book (available on the BPDPKS website) need to be more widely disseminated to all stakeholders.The implementation mechanism of the Smallholder Palm Oil Replanting Program
6. (PSR) through partnership channels should be revisited to contribute more significantly to increasing PSR program achievements.

7. Tindak lanjut untuk mempercepat pelaksanaan program PSR, antara lain:
   a. Penyederhanaan prosedur pengusulan PSR dan revisi Permentan 03/2022 jo 19/2023, dalam rangka mengintegrasikan program PSR dan Sarpras. Penyelesaian Permentan dan Perdirjen yang baru ditargetkan pada akhir April 2024.
   b. Pembentukan Satuan Tugas Sawit Rakyat oleh Presiden pada tanggal 14 April 2023 (Keppres No. 9/2023), antara lain, terdiri dari perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, KLHK, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, dan Kementan.
   c. Sosialisasi dan pengawalan/pendampingan oleh surveyor.
8. Perlu dilakukan Kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi proses bisnis Program Sarana Prasarana agar mekanisme pengadaan dan penyaluran sarpras dalam bentuk barang dapat dilaksanakan secara lebih cepat.
9. Peningkatan dana bantuan PSR dari Rp.30 Jt/Ha menjadi Rp.60 Jt/Ha diberlakukan sejak 1 September didasarkan pada tanggal penerbitan SK Direktur Utama BPDPKS. Mekanisme penyaluran dana bantuan PSR dilakukan secara bertahap. Pada tahap I akan disalurkan sebesar Rp.30 Juta/Ha, sampai dengan Po. Selanjutnya, dana PSR diberikan sesuai dengan perkembangan kegiatan fisik di lapangan.
10. Pendefinisian semua produk yang terkena tarif PE dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan peta hilirisasi CPO dan produk turunannya, untuk mencegah kesalahan penetapan tarif PE turunan CPO.
11. Penetapan tarif PE oleh Komite Pengarah perlu didasarkan pada hasil kajian Lembaga riset, sesuai dengan rekomendasi BPK. Perubahan struktur tarif layanan/pungutan ekspor (PE) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang tarif layanan BPDPKS yang mulai diberlakukan pada tanggal 22 September 2024. Tarif layanan berubah dari Specific menjadi Ad valorem serta perubahan tarif PE tertinggi dari sekitar 11%, menjadi hanya 7,5%.
12. Hasil rapat koordinasi terbatas Anggota Komite Pengarah dengan Bapak Presiden pada tanggal 10 Juli 2024 memutuskan bahwa BPDPKS diberikan tambahan tugas menangani komoditi perkebunan lain, yaitu kelapa dan kakao. Untuk kelapa akan dikenakan pungutan ekspor atau tarif impor, sedangkan bea keluar (BK) kakao akan dikonversi menjadi pungutan ekspor (PE). Untuk itu akan dirumuskan regulasinya dan nama
13. BPDPKS akan diubah menjadi BPDP.
    Perlu disampaikan perkembangan revisi roadmap riset kepada Dewan Pengawas, serta kesesuaian pelaksanaan riset dengan roadmap riset.

7. Follow-up actions to accelerate the implementation of the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR) include:
   a. Simplification of the PSR proposal procedure and revision of Minister of Agriculture Regulations No. 03/2022 jo 19/2023, aimed at integrating the PSR and Infrastructure Programs. The completion of the new Ministerial and Directorate General regulations is targeted by the end of April 2024.Establishment
   b. of the Smallholder Palm Oil Task Force by the President on April 14, 2023 (Presidential Decree No. 9/2023), which includes representatives from the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, Ministry of Environment and Forestry,
   c. Ministry of Finance, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, and Ministry of Agriculture.Socialization and supervision/assistance by surveyors.
8. A study is needed to produce recommendations for the business process of the Infrastructure Program to accelerate the procurement and distribution mechanisms for infrastructure goods.
   The increase in PSR assistance funds from IDR 30
9. million per hectare to IDR 60 million per hectare has been effective since September 1, based on the issuance date of the BPDPKS President Director's decree. The disbursement of PSR assistance funds is carried out gradually. In Phase I, IDR 30 million per hectare will be disbursed until PO (Purchase Order). Subsequently, PSR funds will be distributed according to the progress of physical activities in the field.Definition of all products subject to Export Levy
10. (PE) tariffs and submission to the Minister of Finance, accompanied by a downstream map of CPO and its derivative products, to prevent incorrect determination of PE tariffs on CPO derivatives.
11. The determination of PE tariffs by the Steering Committee must be based on research studies from research institutions, following the recommendations of the Audit Board (BPK). The structure of service/export levy tariffs changed based on Minister of Finance Regulation No. 62 of 2024 concerning BPDPKS service tariffs, effective September 22, 2024. The service tariff changed from Specific to Ad Valorem, and the highest PE tariff was reduced from approximately 11% to only 7.5%.
12. A limited coordination meeting of Steering Committee members with the President on July 10, 2024, decided that BPDPKS would be assigned additional tasks to handle other plantation commodities, namely coconut and cocoa. Coconut will be subject to export levy or import tariff, while cocoa export duties (BK) will be converted into export levies (PE). Regulations will be formulated accordingly, and the name BPDPKS will be changed to BPDP.
13. Progress on the revision of the research roadmap needs to be reported to the Supervisory Board, along with the conformity of research implementation with the roadmap.

14. Lima kinerja BPDPKS yang mempunyai level risiko terbesar adalah:

    a. Rendahnya tingkat penerbitan rekomendasi teknis peremajaan;
    b. Rekomendasi teknis sarpras yang diterima BPDPKS lambat direalisasikan;
    c. Tidak tercapainya nilai komponen pada indikator kualitas pelaksanaan anggaran;
    d. Terlambatnya penyampaian dan tindak lanjut rekomendasi teknis pengembangan SDMPKS dari Ditjenbun, Kementerian Pertanian;
    e. Sedikitnya usulan penelitian yang direkomendasikan oleh komite litbang BPDPKS;

15. Kendala kegiatan Sarpras adalah:

    a. Pengurusan surat telaah status lahan dari BPKHTL dan BPN memerlukan waktu yang cukup lama.
    b. Masih banyak kelembagaan pekebun yang tidak memiliki database anggotanya, sehingga memerlukan waktu saat menginput data ke aplikasi.
    c. Banyak lahan yang kondisi sebenarnya sudah tidak sesuai dengan bentuk pada legalitasnya.
    d. Petugas pendamping belum berfungsi dan berperan dengan baik.
    e. Petugas kabupaten belum cukup cepat merespon usulan dari pekebun/kelompok pekebun.
    f. Biaya pembuatan RAB/SID untuk sarpras pembuatan/peningkatan jalan masih dibebankan kepada pengusul sehingga kualitas RAB/SID kurang memadai.
    g. Masih terdapat ketentuan-ketentuan dalam Permentan 131, yang menghambat pelaksanaan Kegiatan sarpras.

16. BPDPKS membuat aplikasi on-line yang mengintegrasikan program PSR dengan program Sarpras, sehingga pekebun penerima PSR akan mendapatkan bantuan pupuk (sarana produksi) secara otomatis melalui program sarpras. Penyaluran SPPKS dalam bentuk barang berdasarkan permintaan dari Lembaga Pekebun dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa sebagaimana ketentuan dalam PMK-49/PMK.05/2018.
17. Ditjenbun perlu menyelesaian permasalahan ketidaksesuaian pembangunan fisik kebun PSR yang diperoleh dari hasil verifikasi PSR yang dilakukan oleh Surveyor. Berdasarkan hasil sampling pelaksanaan verifikasi Surveyor terdapat 30 permasalahan dalam pelaksanaan program PSR.
18. Penerapan aplikasi Program Grant Riset Sawit sesuai dengan rekomendasi dari BPK.

14. The five BPDPKS performance indicators with the highest risk levels are:

    a. Low issuance rate of technical recommendations for replanting;Slow realization of infrastructure
    b. technical recommendations received by BPDPKS;Failure to achieve target values on the
    c. budget implementation quality indicator;Delays in submission and follow-up of technical
    d. recommendations for Human Resource Development Program for Palm Oil Smallholders (SDMPKS) from the Directorate General of
    e. Plantations, Ministry of Agriculture;Few research proposals recommended by the BPDPKS research and development committee.

15. The challenges of the Infrastructure (Sarpras) activities are:

    a. The process of obtaining land status review letters from BPKHTL and BPN takes a considerable amount of time.
    b. Many farmer institutions do not have member databases, causing delays when inputting data into applications.
    There are many lands where the actual
    c. condition no longer matches the legal documentation.
    d. Extension officers have not functioned or played their roles effectively.
    e. Regency officers have been slow to respond to proposals from farmers or farmer groups.
    The costs of preparing budget plans (RAB/SID)
    f. for infrastructure such as road construction or improvement are still borne by the applicants, resulting in substandard quality of RAB/SID.
    Some provisions in Minister of Agriculture
    g. Regulation No. 131 still hinder the implementation of infrastructure activities.

16. BPDPKS has developed an online application that integrates the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR) with the Infrastructure Program (Sarpras), so that PSR recipient farmers automatically receive fertilizer assistance (production facilities) through the infrastructure program. The distribution of SPPKS in the form of goods is based on requests from Farmer Institutions and is carried out gradually in accordance with government regulations related to goods/services procurement as stipulated in PMK-49/PMK.05/2018.
17. The Directorate General of Plantations (Ditjenbun) needs to resolve issues of physical plantation development inconsistencies found during PSR verification conducted by surveyors. Based on sampling from the verification process, 30 issues were identified in the PSR program implementation.
18. The implementation of the Palm Oil Research Grant Program application is carried out following recommendations from the Audit Board (BPK).

19. Opsi-opsi agar pelaksanaan program insentif biodiesel dapat berkelanjutan, yaitu:

    a. Pungutan ekspor kembali kepada regulasi sebelumnya (sebelum September 2024, potensi peningkatan pendapatan);
    b. Penyesuaian volume biodiesel yang disalurkan oleh BPDP;
    c. Kemungkinan pinjaman/bantuan Dana dari APBN;
    d. Meningkatkan harga di tingkat konsumen, subsidi biodiesel dibatasi nilai per liternya (dicapped Rp/liter).

20. Mitigasi harus dilakukan agar tercapai penurunan besaran risiko untuk program yang mempunyai risiko sangat tinggi, yaitu rendahnya tingkat penerbitan rekomendasi teknis peremajaan dan rekomendasi teknis sarpras yang diterima BPDPKS lambat direalisasikan.
21. Pelaksanaan program Biodiesel (B40) dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Menteri ESDM telah menandatangani keputusan tentang alokasi B40 sebesar 15,62 juta kiloliter (KL). Dari total alokasi biodiesel pada tahun 2025, sebesar 7,55 juta KL diperuntukkan bagi kewajiban pelayanan publik (PSO) yang didanai oleh BPDP. Sisa alokasinya (non PSO) akan dijual dengan harga pasar dan alokasinya ditetapkan sebesar 8,07 juta KL.
22. Disetujui bahwa restrukturisasi BPDPKS, sesuai dengan tugas BPDPKS yang baru karena adanya penambahan komoditi kakao dan kelapa, dimasukkan dalam revisi Perpres dan akan dijadikan dasar penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Pendapatan dari semua komoditi akan digabung dan digunakan untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan (kelapa sawit, kelapa, dan kakao). Usulan organisasi (5 Direktorat dan 21 Divisi) diajukan lebih dahulu kepada Komite Pengarah, kemudian kepada Kementerian Keuangan. Perlu ditambahkan pada revisi Perpres, klausul yang memungkinkan Direktur Utama mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas BPDPKS.

19. Options to ensure the sustainability of the biodiesel incentive program implementation include:

    a. Reverting the export levy to the previous regulation (before September 2024) with the potential to increase revenue;
    b. Adjusting the volume of biodiesel distributed by BPDP;
    c. Possibility of loans or funding assistance from the State Budget (APBN);
    d. Increasing consumer-level prices, with biodiesel subsidies capped at a fixed amount per liter (Rp/liter).

20. Mitigation measures must be implemented to reduce the high risks in programs with very high risk levels, specifically the low issuance rate of technical replanting recommendations and the slow realization of infrastructure technical recommendations received by BPDPKS.
21. The Biodiesel (B40) program will begin on January 1, 2025. The Minister of Energy and Mineral Resources has signed a decree allocating 15.62 million kiloliters (KL) of B40 biodiesel. Of this total allocation for 2025, 7.55 million KL is designated for public service obligations (PSO) funded by BPDP. The remaining allocation (non-PSO) will be sold at market prices, amounting to 8.07 million KL.
22. It has been agreed that the restructuring of BPDPKS, in line with its expanded duties due to the addition of cocoa and coconut commodities, will be included in the revision of the Presidential Regulation (Perpres) and will serve as the basis for the collection and use of funds for palm oil, coconut, and cocoa plantations. Revenue from all commodities will be combined and used for the development of strategic plantation commodities (palm oil, coconut, and cocoa).An organizational proposal (5 Directorates and 21 Divisions) has been submitted first to the Steering Committee, then to the Ministry of Finance. The Perpres revision should also include a clause granting the President Director the authority to recruit necessary personnel to ensure smooth BPDPKS operations.

2. Rapat Internal Dewan Pengawas

Rapat internal Dewan Pengawas dilaksanakan sebelum Rapat Dewan Pengawas Bersama Pejabat Pengelola. Rapat internal dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan mengacu pada Program Kerja Dewan Pengawas Tahun 2024 yang telah menetapkan fokus diskusi setiap bulan dengan agenda utamanya, yaitu PSR, insentif biodiesel, audit dan evaluasi pelaksanaan misi BPDPKS. Rapat internal ini dilengkapi dengan ringkasan yang disusun dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas setiap tanggal 10 oleh Sekretariat Dewan Pengawas. Selama periode Januari Desember 2024, Dewan Pengawas mengadakan rapat internal sebanyak 12 kali.

3. Rapat Dewan Pengawas Bersama SPI

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 pasal 218 huruf i, Dewan Pengawas berkomunikasi secara langsung dengan Satuan Pemeriksa Internal BLU. Pada Tahun 2024, telah dilaksanakan rapat Dewan Pengawas bersama Satuan Pemeriksa Internal sebanyak 4 (empat) kali, dengan hasil pembahasan, antara lain, sebagai berikut:

1. Struktur Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BPDPKS
   a. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) BPDPKS terdiri dari Kepala SPI dan 2 (dua) orang staf SPI.
   b. SPI menghadapi kekurangan SDM sebanyak 3-5 orang sehingga penyelesaian temuan-temuan Audit berjalan lambat. Rekrutmen pegawai BPDPKS terkendala oleh regulasi yang berlaku di Ditjen Perbendaharaan. Agar dapat melaksanakan tugas pemeriksa internal dengan baik, perlu diupayakan penambahan pegawai dari K/L terkait untuk ditugaskan di BPDPKS.

2. Mekanisme Kerja
   a. Dalam melaksanakan audit, minimal Tim Audit terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan beberapa staf, sehingga dalam melaksanakan audit, SPI dibantu oleh staf dari Direktorat lain yang tidak terkait dengan objek audit. Mekanisme ini dilakukan juga dalam tugas pendampingan on site audit oleh Eksternal Auditor.
   b. Perlu ada rekrutmen staf yang akan menjadi mitra SPI di masing-masing Direktorat atau tim adhoc yang dapat mewakili lintas Direktorat, serta memahami bisnis proses di masing-masing Direktorat di BPDPKS.

2. Internal Annual Meeting of the Supervisory Board

Internal meetings of the Supervisory Board are held before the joint meetings with Management Officials. These internal meetings are conducted regularly every month and refer to the 2024 Work Program of the Supervisory Board, which sets the monthly discussion focus with main agendas including the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR), biodiesel incentives, and audit and evaluation of BPDPKS mission implementation.Each internal meeting is documented with a summary prepared and reported to the Supervisory Board on the 10th of each month by the Supervisory Board Secretariat. During the period from January to December 2024, the Supervisory Board held 12 internal meetings.

3. Supervisory Board Meeting with the Internal Audit Unit (SPI)

According to the provisions of Minister of Finance Regulation Number 129 of 2020, Article 218 letter i, the Supervisory Board communicates directly with the Internal Audit Unit (SPI) of the Public Service Agency (BLU). In 2024, the Supervisory Board held meetings with the Internal Audit Unit four (4) times, with discussion results including, among others, the following:

1. Structure of the Internal Audit Unit (SPI) at BPDPKS
   a. The Internal Audit Unit (SPI) at BPDPKS consists of a Head of SPI and 2 (two) SPI staff members.
   b. SPI is facing a shortage of 3 to 5 personnel, causing delays in the resolution of audit findings. Recruitment of BPDPKS employees is constrained by regulations in the Directorate General of Treasury. To effectively carry out internal audit duties, it is necessary to seek additional staff from related ministries/agencies (K/L) to be assigned to BPDPKS.

2. Work Mechanism
   a. In conducting audits, the Audit Team consists of at least a Technical Controller, Team Leader, and several staff members. To carry out audits, the Internal Audit Unit (SPI) is assisted by staff from other Directorates that are not related to the audit object. This mechanism is also applied during on-site audit assistance by External Auditors.
   b. There is a need to recruit staff who will serve as SPI partners in each Directorate or form adhoc teams representing multiple Directorates, who understand the business processes in each Directorate within BPDPKS.

3. SPI masih pada tingkat melakukan kegiatan assurance dalam bentuk audit, penilaian pengendalian internal, dan penilaian risiko (Audit Internal). Ruang lingkup Satuan Pemeriksa Internal meliputi:

   a. Melakukan kegiatan assurance dalam bentuk audit, penilaian pengendalian internal, dan penilaian risiko (Audit Internal);
   b. Memberikan asistensi dan konsultansi kepada Strategic Business Partner terkait tata kelola yang baik (good governance);
   c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
   d. Memberikan rekomendasi sanksi terkait hasil temuan pemeriksaan (pendampingan BPK terkait dengan audit).

4. Dalam melaksanakan tugasnya Fungsi Internal Audit BPDPKS secara periodik dan berkelanjutan SPI melaksanakan koordinasi dengan Internal Audit, Eksternal Audit, dan Regulator yaitu:

   a. Koordinasi dengan BPK RI
      Koordinasi dengan BPK dilaksanakan terkait dengan: (a) pemaparan dan pelaksanaan dalam rangka pemeriksaan Tahunan atau PDTT; (b) Pembahasan tindaklanjut atas rekomendasi audit termasuk dengan instansi terkait secara reguler semesteran.
   b. Koordinasi dengan Itjen
      Koordinasi dengan Itjen dilaksanakan secara intensif, terkait: a. Koordinasi pelaporan kegiatan assurance dan pendampingan eksternal Auditor; b. Koordinasi terkait Year End Audit Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan; c. Koordinasi tindak lanjut rekomendasi Audit Itjen (menggunakan aplikasi) dan Rekomendasi Audit BPK-BPKP.
   c. Koordinasi dengan BPKP
      Koordinasi dengan BPKP dilaksanakan terkait: (a) pemaparan dan pelaksanaan dalam rangka PDTT; (b) Pembahasan tindaklanjut atas rekomendasi audit termasuk dengan instansi terkait, maupun tugas lainnya atas instruksi (contoh perhitungan terkait insentif minyak goreng).
   d. Koordinasi dengan Regulator terkait: a) pelaksanaan Monev Tahunan; b) tindaklanjut rekomendasi menggunakan aplikasi atau pertemuan; dan c) pembahasan isu atau regulasi.
   e. Fungsi Internal Audit di dalam menjalankan tugasnya juga berperan dalam memberikan jasa konsultasi (consulting) secara formal dan informal kepada Manajemen, berupa pemberian masukan, saran dan pertimbangan terkait aspek Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) dalam permasalahan daily operasional.
   f. Koordinasi dengan Komite Audit
      SPI melaksanakan rapat dengan Komite Audit setiap bulan dengan membahas isu strategis terkait pemeriksaan, monev, pengawasan, dan tindak lanjutnya sesuai dengan rencana aksi yang disepakati. Selain itu, rapat Komite Audit juga membahas posisi keuangan BPDPKS sesuai dengan Laporan Keuangan dan capaian kinerja dari divisi Unit Penyaluran (pembiayaan biodiesel), divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO (pembiayaan Peremajaan Sawit Rakyat), dan Divisi Anggaran dan Akuntansi. Di luar peserta tetap dari tiga divisi tersebut juga dibahas isu tematik sesuai kebutuhan, umumnya yang sedang menjadi isu pemeriksaan oleh pihak pemeriksa eksternal.

3. The Internal Audit Unit (SPI) is currently focused on assurance activities such as audits, internal control assessments, and risk evaluations (Internal Audit). The scope of the Internal Audit Unit includes:

   a. Conduct assurance activities in the form of audits, internal control assessments, and risk evaluations (Internal Audit);
   b. Provide assistance and consultancy to Strategic Business Partners related to good governance;
   c. Monitor the follow-up on Audit Reports (LHP);
   d. Provide recommendations for sanctions related to audit findings (assistance to the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding audits).

4. In carrying out its duties, the Internal Audit function of BPDPKS periodically and continuously coordinates with Internal Audit, External Audit, and Regulators, namely:

   Coordination with BPK is carried out concerning:
   (a) presentation and implementation related to Annual Audits or PDTT (Special Audits);(
   b) regular semi-annual discussions on follow-up actions regarding audit recommendations, including with relevant agencies.
   Coordination with the Inspectorate General (Itjen)Intensive coordination with Itjen is conducted related to:
   (a) coordination of reporting assurance activities and assistance to External Auditors;
   (b) coordination related to the Year-End Audit of the Annual Consolidated Financial Statements;
   (c) coordination on follow-up of Inspectorate General audit recommendations (using applications) and audit recommendations from BPK and BPKP (Government Internal Supervisory Apparatus).
   Coordination with the Government Internal Supervisory Apparatus (BPKP)Coordination with BPKP is conducted concerning:
   (a) presentation and implementation related to PDTT;
   (b) discussions on follow-up actions to audit recommendations, including with related agencies, as well as other tasks under instruction (for example, calculations related to cooking oil incentives).
   Coordination with RegulatorsRelated to:
   (a) implementation of the Annual Monitoring and Evaluation (Monev);
   (b) follow-up on recommendations using applications or meetings;
   (c) discussions on issues or regulations.The Internal Audit function also provides formal and informal consulting services to Management, offering input, advice, and considerations related to Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) aspects in daily operational matters.
   Coordination with the Audit CommitteeSPI holds monthly meetings with the Audit Committee to discuss strategic issues related to audits, monitoring and evaluation, supervision, and follow-up according to the agreed action plan. Additionally, Audit Committee meetings review BPDPKS's financial position based on Financial Statements and performance achievements from the Distribution Unit division (biodiesel financing), Fee and CPO Levy Collection division (Smallholder Palm Oil Replanting financing), and Budget and Accounting division. Apart from regular participants from these three divisions, thematic issues are also discussed as needed, generally those currently under examination by external auditors.

5. SPI memerlukan juru bicara dari BPDPKS yang dapat menjelaskan perubahan regulasi kepada regulator/auditor.
6. Masuknya Itjen ke BPDPKS tidak sebagai pemeriksa tetapi sebagai risk manajemen, diharapkan tidak terjadi lagi temuan ganda dan rekomendasi ganda. Dalam pelaksanaannya, SPI akan mendapat instruksi langsung untuk melaksanakan rekomendasi temuan.
7. Untuk mencapai tata kelola yang baik, maka pelaksanaan program-program yang menjadi misi BPDPKS perlu didukung oleh regulasi yang tepat, aplikasi yang komprehensif, dan data yang akurat. Penetapan KAP telah dilakukan berdasarkan Keputusan
8. Dirut Nomor KEP-351/DPKS/2024 tanggal 30 September 2024. Perlu dipertimbangkan agar penetapan KAP tidak dilakukan pada tanggal 30 September, karena ruang lingkup pekerjaan KAP termasuk semua transaksi pada tahun berjalan. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar KAP ditunjuk untuk periode lebih dari 1 Tahun, misal 4-5 Tahun.
9. SPI sedang menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2025. SPI merencanakan akan melakukan audit Tahun 2025 atas Pungutan Ekspor, SPPKS, dan Kemitraan. Dewas dapat mengusulkan objek lain berdasarkan pertimbangan risiko.
10. Persiapan Audit LK 2024 oleh BPK, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Manajemen adalah:

    a. Pertanggung jawaban Pengelolaan Uang Muka terkendala oleh masalah dokumentasi dan pengenaan pajak.
    b. Pungutan Ekspor terkait penyajian kurang dan lebih bayar serta tindak lanjutnya, SLA belum dilakukan dengan tertib.
    c. Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit/PPKS, pengembalian dana atas pekebun yang mengundurkan diri, dana yang tidak habis setelah periode PKS, dan dana yang harus dikembalikan (baik pokok maupun bunganya) jika dalam satu tahun tidak terealisasi.
    d. Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit/SPPKS terkait dokumentasi pertanggungjawaban penggunaan dana.
    e. Pemutakhiran informasi pada aplikasi Riset terutama saldo dana BPDPKS di Lembaga riset yang belum digunakan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penggunaan dana riset yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
    f. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS), terjadi keterlambatan pembayaran biaya hidup karena masalah nomor rekening sehingga uang yang ditransfer oleh BPDPKS tidak dapat masuk ke rekening penerima beasiswa.
    g. Piutang pungutan ekspor, harus dihitung juga tingkat penyisihannya.
    h. Perlu penertiban pajak, biaya administrasi dan biaya lain terkait Dana swakelola untuk PPKS, SPPKS, Riset, dan Pengembangan SDM.

11. Dewas mengusulkan agar pada Tahun 2025 SPI melakukan audit terhadap pemanfaatan dana swakelola PSR.
12. Dewas mengusulkan SPI melakukan asesmen terhadap usulan struktur organisasi dengan adanya penambahan 2 (dua) komoditi kakao dan kelapa, serta merekomendasikan alternatif struktur organisasi.

The Internal Audit Unit (SPI) requires a spokesperson from BPDPKS who can explain regulatory changes to regulators and auditors.The entry of the Inspectorate General (Itjen) into BPDPKS is not as an auditor but as risk management, and it is hoped that there will no longer be duplicate findings and recommendations. In its implementation, SPI will receive direct instructions to carry out recommendations from findings.To achieve good governance, the implementation of programs that are BPDPKS's mission must be supported by appropriate regulations, comprehensive applications, and accurate data.The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) has been made based on the President Director's Decree Number KEP-351/DPKS/2024 dated September 30, 2024. It should be considered that appointing KAP on September 30 is not ideal because the scope of KAP's work includes all transactions in the current year. Additionally, consideration should be given to appointing KAP for a period longer than one year, for example 4-5 years.SPI is preparing the 2025 Annual Audit Work Program. SPI plans to audit Export Levies, SPPKS, and Partnerships in 2025. The Supervisory Board (Dewas) can propose other audit objects based on risk considerations.Regarding the preparation of the 2024 Financial Statement Audit by BPK, some matters that management needs to pay attention to are:

a. Accountability for Advance Fund Management is hindered by documentation issues and tax imposition.
b. Export Levies related to the presentation of underpayments and overpayments, as well as their follow-ups, have not been properly managed
c. according to Service Level Agreements (SLA).
   In the Palm Oil Plantation Replanting Program (PPKS), issues arise regarding fund returns from farmers who resign, unused funds after the PKS period, and funds (both principal and interest) that must be returned if not realized within one year.
d. Infrastructure Program (SPPKS) faces challenges with documentation accountability for fund usage.
   Updating information in the Research application,
e. particularly the balance of BPDPKS funds at research institutions that remain unused, is necessary to prevent misuse of research funds.
   The Palm Oil Plantation Human Resource Development Program (SDM PKS) experienced
f. delays in living cost payments due to bank account number issues, causing funds transferred by BPDPKS to not reach scholarship recipients.
   Export levy receivables must also include calculations of allowance for doubtful accounts.
   There is a need for tax regulation compliance and
g. control over administrative fees and other costs related to self-managed funds for PPKS, SPPKS,
h. Research, and Human Resource Development.

The Supervisory Board (Dewas) proposes that in 2025, the Internal Audit Unit (SPI) conduct an audit on the utilization of self-managed funds for the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR).
Dewas also proposes that SPI conduct an assessment of the proposed organizational structure following the addition of two commodities, cocoa and coconut, and recommend alternative organizational structures.

4. Rapat Dewan Pengawas Bersama Komite Riset

Dewan Pengawas juga mengadakan rapat untuk memfasilitasi, mendorong pencapaian program, keberlanjutan dana dan kemajuan BPDPKS. Pada Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024 telah dilakukan rapat Dewan Pengawas dengan Komite Riset untuk membahas program riset. Berdasarkan hasil diskusi pembahasan perkembangan pelaksanaan program riset sawit, rapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan Riset Sawit dengan Road Map Riset Sawit 2016-2030
   a. Komite Riset perlu melakukan penyesuaian terhadap Road Map Riset Sawit 2016-2030, walaupun setiap tahun dilakukan proses reviu internal Road Map Riset Sawit menangkap isu-isu mutakhir.
   b. Dewan Pengawas meminta adanya update Road Map Litbang/Riset setidaknya 5 tahun satu kali.
2. Riset sawit top down sesuai road map riset agar dilakukan di antaranya dengan:
   a. Bidang-bidang dan topik-topik riset yang tercantum dalam road map riset tetapi belum dilaksanakan, dapat ditawarkan kepada lembaga-lembaga riset sebagai topik prioritas melalui mekanisme top down.
   b. Riset sawit top down merupakan terjemahan dari road map dan sesuai dengan kebutuhan industri kelapa sawit nasional.
   c. Riset sawit top down dapat berupa riset inisiatif yang diperlukan untuk menangani isu global (EUDR, due diligence/uji tuntas dll) dan nasional, serta digunakan untuk melawan isu negatif.
3. Hasil analisis dan evaluasi dampak litbang terhadap Sawit berkelanjutan perlu disosialisasikan secara lebih masif agar teknologi dan/atau kebijakan yang dihasilkan mampu mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang bermanfaat.
4. Hasil-hasil riset ini didorong untuk dapat dimanfaatkan baik oleh industri, pemerintah maupun oleh petani, dan sudah tersusun e-book Hasil Riset dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, kecuali tahun 2017 yang tidak ada karena terjadi penurunan alokasi dana untuk program Riset. E-book ini dapat diakses oleh umum (di Website BPDPKS.or.id).

4. Supervisory Board Meeting with the Research Committee

The Supervisory Board also holds meetings to facilitate and encourage program achievement, fund sustainability, and the progress of BPDPKS. On February 22, 2024, the Supervisory Board held a meeting with the Research Committee to discuss research programs. Based on the discussion of the progress in implementing the palm oil research program, the meeting concluded the following points:

1. Alignment of Palm Oil Research Implementation with the 2016-2030 Palm Oil Research Roadmap
   a. The Research Committee needs to make adjustments to the 2016-2030 Palm Oil Research Roadmap, even though an internal review process is conducted annually to capture current issues.
   b. The Supervisory Board requests an update of the Research and Development (R&D) Roadmap at least once every five years.
2. Top-down palm oil research according to the research roadmap should be carried out, among others, by:
   a. Research fields and topics listed in the research roadmap but not yet implemented can be offered to research institutions as priority topics through a top-down mechanism.
   b. Top-down palm oil research is a translation of the roadmap aligned with the needs of the national palm oil industry.
   c. Top-down palm oil research can include initiative research necessary to address global issues (such as EUDR, due diligence, etc.) and national concerns, as well as to counter negative issues.
3. The analysis and evaluation results of research and development impacts on sustainable palm oil need to be widely disseminated so that the technologies and/or policies produced can realize a beneficial national palm oil industry.
4. These research results are encouraged to be utilized by industry, government, and farmers. An e-book compiling research results from 2015 to 2023—except for 2017 due to funding reductions—is available and accessible to the public on the BPDPKS website (BPDPKS.or.id).

5. Mekanisme pemilihan judul penelitian dengan menjaring kebutuhan industri dan penciptaan permintaan/pasar baru atas minyak kelapa sawit/produk sawit lain melalui:

    a. Diskusi dengan stakeholders sawit sebelum memutuskan Fokus topik Grant Riset Sawit (GRS) untuk tahun yang akan datang.
    b. Komite riset agar menjaring riset-riset yang dibutuhkan oleh industri yang dilaksanakan melalui mekanisme komunikasi dengan seluruh pelaku industri sawit dan calon pengusul proposal.

6. Mekanisme Pemasaran/sewa alat hasil. Perlu dibuat beberapa ketentuan bahwa hasil riset harus mempunyai Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) antara 5-6, untuk memudahkan koordinasi dengan industri. Untuk pembagian Hak Cipta atau paten, berdasarkan peraturan di Kementerian Keuangan yang berlaku saat ini BPDPKS tidak dapat menerima/mendapatkan bagian dari pemegang lisensi alat yang dihasilkan dari riset yang dibiayai oleh BPDPKS.
7. Riset dengan topik sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan perlu dilakukan dengan tujuan untuk melawan kampanye negatif. Hal ini karena hasil riset dapat menunjukkan aspek berkelanjutan industri dan peningkatan kesejahteraan petani sawit. Riset terkait lingkungan sosial perlu diupayakan agar dapat menunjukkan tingkat efisiensi manajemen petani dalam kaitannya dengan budidaya tanaman sawit.

5. The mechanism for selecting research titles by gathering industry needs and creating new demand/markets for palm oil and other palm oil products through:

    a. Discussions with palm oil stakeholders before deciding the focus topics for the Palm Oil Research Grant (GRS) for the upcoming year.
    b. The Research Committee should gather research needs from the industry through communication mechanisms involving all palm oil industry players and prospective proposal submitters.

6. Certain provisions need to be established stating that research results must have a Technology Readiness Level (TRL) between 5 and 6 to facilitate coordination with the industry. Regarding copyright or patent sharing, based on the current Ministry of Finance regulations, BPDPKS cannot receive or obtain a share from license holders of tools developed from research funded by BPDPKS.
7. Research on Social, Economic, and Environmental Impacts:Such research needs to be conducted to counter negative campaigns, as research results can demonstrate the sustainability aspects of the industry and the improvement of palm oil farmers' welfare. Research related to the socio-environment should aim to show the efficiency level of farmer management in relation to palm oil cultivation.

Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas independen merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya dan/atau dengan Komite Pengarah atau hubungan lainnya dengan BPDPKS yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Keberadaan Dewan Pengawas independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan berbagai stakeholder.
Pada praktiknya BPDPKS telah memiliki Dewan Pengawas independen yang dijabat oleh Sdr. Evita H. Legowo; Sdr. Taufik Mappaenre; dan Sdr. Joko Supriyono, sehingga Jumlah Pengawas independen BPDPKS adalah sebanyak 3 (tiga) orang dari total jumlah Dewan Pengawas sebanyak 9 orang atau sebesar 33% dari jumlah Dewan Pengawas.

Independent Supervisory Board

An independent Supervisory Board member is one who has no financial, managerial, shareholding, or familial relationship with other Supervisory Board members and/or with the Steering Committee or any other relationship with BPDPKS that could affect their ability to act independently. The presence of independent Supervisory Board members is intended to create a more objective and independent climate, as well as to maintain fairness and provide balance among the interests of various stakeholders.In practice, BPDPKS has independent Supervisory Board members, namely Mr./Ms. Evita H. Legowo, Mr. Taufik Mappaenre, and Mr. Joko Supriyono. Thus, the number of independent supervisors at BPDPKS is three (3) out of a total of nine Supervisory Board members, representing 33% of the total Supervisory Board.

Kriteria Dewan Pengawas Independen

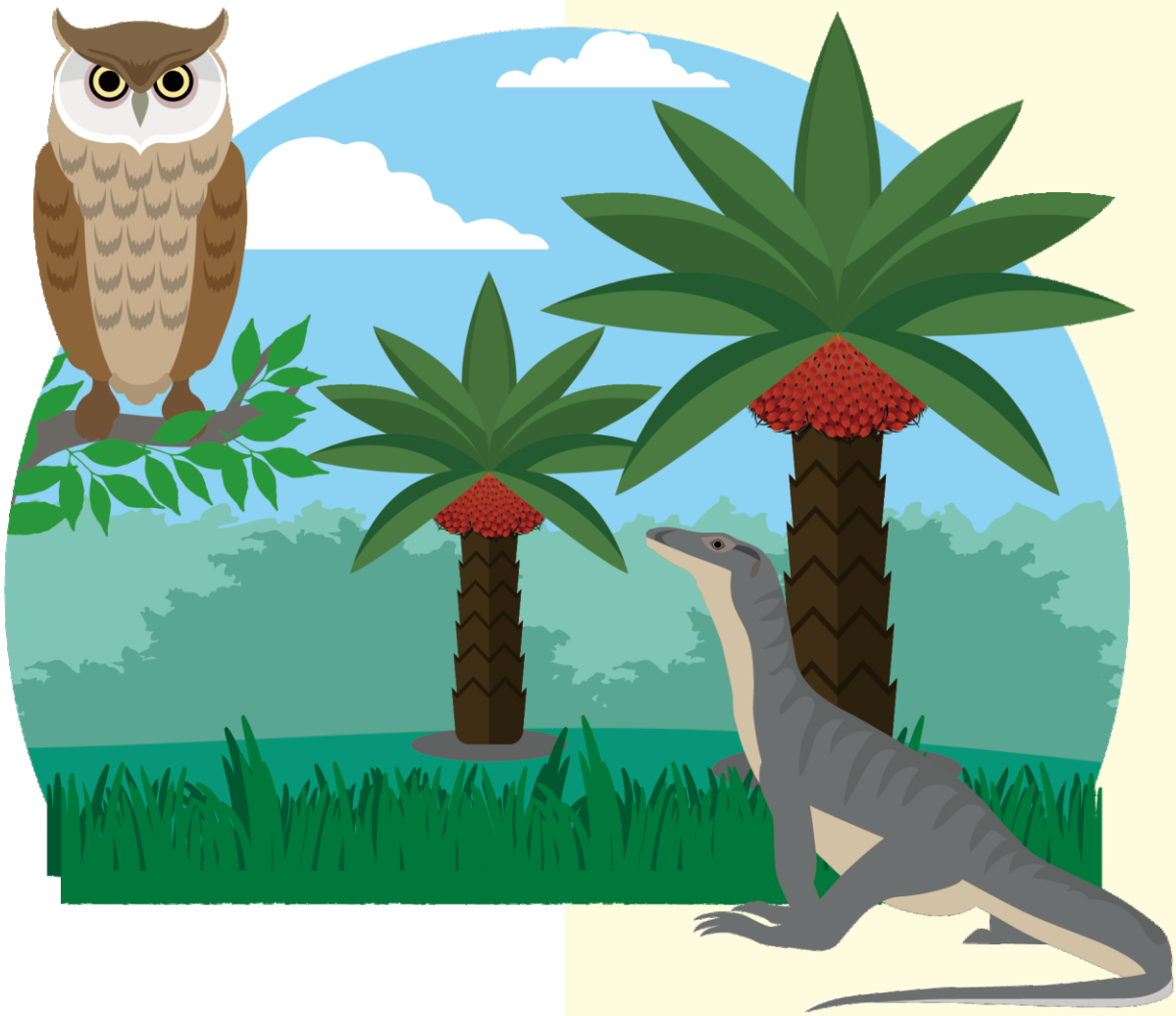
Kriteria Dewan Pengawas independen sebagai berikut:

1. Bukan Anggota Manajemen BPDPKS;
2. Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;
3. Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi BPDPKS atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Pengawas;
4. Bukan pemasok atau pelanggan utama dari BPDPKS atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama.
5. Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan BPDPKS atau perusahaan afiliasi.

Criteria of Independent Supervisory Board

Criteria of Independent Supervisory Board are as follows:

1. Not BPDPKS Management Members;
2. Free from business relationship and any other relationship which may affect resolution adoption;
3. Not main adviser or professional consultant promising to BPDPKS or affiliated company, or any employee with direct interaction with service providers at least 3 (three) years prior serving as the Supervisory Board member;
4. Not supplier or main customer of BPDPKS or affiliated company or employee from/or those who have direct or indirect contact with supplier or main customer.
5. Having no agreement relationship with BPDPKS or any affiliated company.



Organ Pendukung Dewan Pengawas
Supervisory Board Secretary

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh organ pendukung, yaitu: Sekretaris Dewan Pengawas dan, Komite Audit, yang diuraikan sebagai berikut:

Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan administrasi serta sebagai penghubung bagi Dewan Pengawas, baik dengan pihak-pihak terkait di lingkungan BPDPKS maupun di luar BPDPKS.

Sekretariat Dewan Pengawas periode 1 November 2023 s.d. saat ini sebagai berikut:

1. Reni Kustiari : Sekretaris Dewan Pengawas/Ketua Sekretariat
2. Nency Febrina : Anggota Sekretariat (Kemenko Perekonomian)
3. Susanto : Anggota Sekretariat (Kementerian Pertanian)

Sekretaris Dewan Pengawas BPDPKS dijabat oleh Reni Kustiari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-22/DPKS/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas. Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

In carrying out its duties, the Supervisory Board is assisted by supporting organs, namely: the Secretary of the Supervisory Board and the Audit Committee, which are described as follows:

Supervisory Board Secretary

The Supervisory Board Secretary is a governance organ that is responsible for carrying out administrative activities as well as a liaison for the Supervisory Board, both with related parties within and outside the BPDPKS.

The composition of the Board of Supervisors' Secretariat in November 1 2023 until now is as follows:

1. Reni Kustiari: Secretary of the Supervisory Board/Chair of the Secretariat.
2. Nency Febrina: Member of the Secretariat (Ministry of Economic Coordination).
3. Susanto: Member of the Secretariat (Ministry of Agriculture).

The Supervisory Board Secretary is held by Reni Kustiari in accordance with the Decree of the President Director No. KEP-22/DPKS/2015 dated December 30, 2015 regarding the Establishment of the Secretariat of the Supervisory Board. The appointment of the Supervisory Board Secretary has been approved by the Supervisory Board.

Profil Ketua Sekretariat Dewan Pengawas

Profile of the Chairperson of the Supervisory Board Secretariat



Reni Kustiari
Sekretaris Dewan Pengawas | Supervisory Board Secretary

Warga Negara Indonesia. Beliau lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 1958. Saat ini berusia 62 tahun
Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sejak Desember 2015. Beliau meraih gelar Bachelor in Agricultural Statistics, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1979 - 1982, gelar Master of Agricultural Economics, University of Missouri, USA pada tahun 1992 - 1994, serta gelar Doctor of Philosophy in Agricultural Economics, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2001 – 2007.
Indonesian citizens. She was born in Bengkulu on October 18, 1958. She is currently 62 years old. She has served as Supervisory Board Secretary since December 2015. She holds a Bachelor's degree in Agricultural Statistics from Institut Pertanian Bogor in 1979 - 1982, a Master's degree in Agricultural Economics from University of Missouri, USA in 1992 - 1994, and a Doctor of Philosophy in Agricultural Economics Statistics from Institut Pertanian Bogor in 2001 – 2007.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan seluruh data dan informasi terkait dengan Dewan Pengawas;
2. Menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting tentang Rapat Dewan Pengawas kepada Direksi BPDPKS;
3. Memberikan dukungan kepada Dewan Pengawas guna memperlancar tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
4. Sebagai penghubung antara Dewan Pengawas dengan Direksi.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Selama Tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan Dewan Pengawas dan membuat laporan perjalanan Dewan Pengawas
2. Mengikuti kegiatan BPDPKS;
3. Membuat undangan dan risalah rapat internal Dewan Pengawas dan rapat gabungan Dewan Pengawas-Direksi (rutin dan non rutin);
4. Membuat bahan bulanan untuk Dewan Pengawas tentang program BPDPKS (SDM, Kemitraan, PSR, dan Sarana Prasarana), Analisis Data IRAI, data harga referensi untuk cpo dan harga fame, dan harga MOPS solar;
5. Melaksanakan pekerjaan lainnya yang terkait dengan Dewan Pengawas.

Duties and Responsibilities

1. Administering and documenting all data and information related to the Supervisory Board;
2. Provide and convey important information regarding Supervisory Board Meeting to BPDPKS Board of Directors;
3. Provide support to the Supervisory Board in order to facilitate their duties; and
4. As a liaison between the Supervisory Board and the Board of Directors.

Duties Implementation of the Supervisory Board Secretary

Throughout 2024, the Board of Commissioners Secretary has carried out assorted activities as follows:

1. Participate in the activities of the Supervisory Board and make its travel report;
2. Participate in BPDPKS activities;
3. Make invitations and minutes of internal meetings of the Supervisory Board and joint meetings of the Supervisory Board – Board of Directors (routine and non-routine);
4. Prepare monthly materials for the Supervisory Board regarding the BPDPKS program (HR, Partnership, PSR, and Infrastructure), IRAI Data Analysis, reference price data for CPO and fame prices, and MOPS diesel price;
5. Conduct other work related to the Supervisory Board.



5.4 Komite Audit

Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan, memberikan opini profesional dan independen kepada Dewan Pengawas mengenai laporan atau hal-hal lain yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dasar Hukum Pembentukan

Dalam menunjang pelaksanaan BPDPKS telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPDPKS NO.KEP-08/DPKS/2016 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS.

Komposisi Anggota

Pada Tahun 2024, jumlah dan komposisi Komite Audit BPDPKS mengalami perubahan dengan adanya pergantian anggota Dewan Pengawas. Jumlah Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite Audit dan 2 (satu) anggota Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Audit Committee

The purpose of establishing the Audit Committee is to assist the Supervisory Board in carrying out its supervisory duties, to provide professional and independent opinions regarding reports or other matters submitted by the Board of Directors to the Supervisory Board, as well as monitoring the follow-up to the results of (external/internal) audits in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

Legal Basis of Establishment

In supporting the implementation of BPDPKS, an Audit Committee has been established in charge of assisting the Supervisory Board based on the Decree of the President Director of BPDPKS No.KEP-08/DPKS/2016 regarding the Establishment of an Audit Committee at BPDPKS.

Member Composition

In 2023, the number and composition of the BPDPKS Audit Committee have changed due to the replacement of Board of Supervisors members. The Audit Committee consists of 3 (three) individuals, comprising 1 (one) Chairperson of the Audit Committee and 2 (two) members of the Audit Committee, arranged as follows:

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile



Taufik Mappaenre

Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Beliau menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak 4 November 2020 berdasarkan KMK Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020 tanggal 4 November 2020. Profil lengkap beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Pengawas, Laporan Tahunan ini.

He has served as the Chairperson of the Audit Committee since November 4, 2020, based on the Minister of Finance Decree Number 499/KMK.05/2020 dated November 4, 2020. His full profile can be found in the Board of Supervisors Profile in this Annual Report.

Profil Komite Audit
Audit Committee Profile



Lupi Hartono
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 23 November 2021
Memiliki latar belakang pendidikan jenjang Strata 1 di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan Magister Manajemen di bidang Manajemen Keuangan.
Berpengalaman di bidang audit mulai dari anggota tim, ketua tim, Pengendali Teknis, hingga Pengawas Mutu Audit. Pengalaman menjadi pimpinan unit, yaitu sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Bontang, Purwakarta dan Belawan.
Pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penerimaan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi dan mengetuai Tim Trannsformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga memiliki pengalaman yang mendalam terkait perencanaan, moniting dan evaluation penerimaan, kebijakan organisasi, dan perencanaan strategis.
Beliau juga pernah menduduki Jabatan Atase Keuangan di KBRI Singapura.

He has served as a member of the Audit Committee since November 23, 2021. He holds a Bachelor's degree in Economics and Development Studies and a Master's degree in Management, specializing in Financial Management.He has extensive experience in the field of auditing, starting as a team member, team leader, Technical Controller, and Quality Assurance Supervisor. His leadership experience includes serving as the Head of the Customs and Excise Supervision and Service Office in Bontang, Purwakarta, and Belawan.He has also held positions such as Head of the Revenue Sub-Directorate, Head of the Strategic Planning and Transformation Management Sub-Directorate, and led the Transformation Team of the Directorate General of Customs and Excise. This has provided him with in-depth experience in planning, monitoring, and evaluating revenue, organizational policies, and strategic planning.Additionally, he has served as the Financial Attaché at the Indonesian Embassy in Singapore.



Ronny Rusli
Anggota Komite Audit | Member of the Audit Committee

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 4 November 2020 berdasarkan KMK Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2020.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Kenan-Flagler Business School, the UNC at Chapel Hill, USA tahun 2000.

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai China Strategy Leader – Animal Nutrition Cargill Inc., MN, USA periode 2010 – 2011, sebagai VP Downstream Business Development Sinar Mas Group periode 2011 – 2015, sebagai CEO Biodiesel and Energy Sinar Mas Group periode periode 2015 – Juni 2016, dan sebagai Direktur Corporate Affairs Office Sinar Mas Group periode 2016 – Sekarang.

He serves as a Member of the Audit Committee since November 4, 2020 based on the KMK Decree of the Minister of Finance No. 499/KMK.05/2020.

He obtained his Bachelor of Economics degree from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia in 1994 and a Master of Business Administration from Kenan-Flagler Business School, the UNC at Chapel Hill, USA in 2000.

In the course of his career, he served as China Strategy Leader – Animal Nutrition Cargill Inc., MN, USA for the period of 2010 – 2011, as VP Downstream Business Development for the Sinar Mas Group for the period of 2011 – 2015, as CEO of Biodiesel and Energy for the Sinar Mas Group for the period of 2015 – June 2016, and as Director of Corporate Affairs Office of the Sinar Mas Group for the period of 2016 – Present.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP- 154/DPKS/2019 Tanggal 15 April 2019. Cakupan dari keputusan Direktur Utama tersebut terdiri dari penetapan Susunan Komite Audit Tahun 2019, Tugas dan tanggung jawab sebagai Komite Audit, Fungsi Komite Audit dan Honorarium bagi Komite Audit.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pengangkatan anggota Komite Audit diputuskan melalui Keputusan Direktur Utama BPDPKS NO.KEP-154/DPKS/2019 tentang Pembentukan Komite Audit pada BPDPKS tanggal 15 April Tahun 2019. Anggota Komite Audit dapat berhenti atau diberhentikan meskipun jabatannya belum berakhir, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit BPDPKS sesuai dengan arahan Dewan Pengawas dan Keputusan Direktur Utama adalah bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaanya kepada Dewan Pengawas BPDPKS. Sejalan dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No.KEP- 08/DPKS/2016, fungsi Komite Audit BPDPKS adalah:

1. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola kepada Dewan Pengawas
2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan pengendalian internal BPDPKS
3. Melakukan tugas lain yang ditetapkan Dewan Pengawas

Selain itu, Komite Audit juga senantiasa bertugas melakukan pengawasan pekerjaan Auditor Independen, memantau kepatuhan BPDPKS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pengelolaan risiko BPDPKS.

Guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, Komite Audit memiliki kewenangan untuk mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, data keuangan, aset serta sumber daya BPDPKS lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BPDPKS yang diakses untuk keperluan tugas tersebut.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan GCG, Komite Audit bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, seluruh anggota Komite Audit BPDPKS bersifat independen dan tidak memiliki rangkap jabatan di dalam dan di luar BPDPKS yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen.

Audit Committee Work Guidelines

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decision of BPDPKS President Director No. KEP-154/DPKS/2019 dated April 15, 2019. The scope of this decision consists of determining the composition of the 2019 Audit Committee, duties and responsibilities as a Committee Audit, Audit Committee Functions, and Honorarium for the Audit Committee.

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The appointment of Audit Committee members was decided through the Decision of BPDPKS President Director No. KEP-154/DPKS/2019 regarding the Establishment of the Audit Committee at BPDPKS on April 15, 2019. Members of the Audit Committee may resign or be dismissed even though their position has not ended, if the person concerned resign and/or passed awat.

Duties and Responsibilities

The BPDPKS Audit Committee in accordance with the direction of the Supervisory Board and the Decree of the President Director is responsible and reports the results of its work to BPDPKS Supervisory Board. In line with the Decree of BPDPKS President Director No. KEP- 08/DPKS/2016, the functions of BPDPKS Audit Committee are:

1. Reviewing the reports submitted by the Managing Officer to the Supervisory Board
2. Supervising the implementation of BPDPKS internal control
3. Performing other duties as determined by the Supervisory Board

In addition, the Audit Committee is also regularly in charged with supervising the work of the Independent Auditor, monitoring BPDPKS compliance with applicable laws and regulations, and monitoring BPDPKS risk management.

In order to carry out its duties and responsibilities optimally, the Audit Committee has the authority to access records or information about employees, financial data, assets and other BPDPKS resources related to the implementation of their duties. The Audit Committee is required to maintain the confidentiality of BPDPKS documents, data, and information accessed for the purpose of this task.

Audit Committee Independence

Pursuant to regulation on GCG performance, Audit Committee shall be independent and free from any conflict of interest so as to objectively render opinion on any issues to be solved. Therefore, all members of BPDPKS Audit Committee shall be independent without any double position whether inside or outside of BPDPKS which may affect its capacity to act independently.

5.5 Direksi
Board of Directors

BPDPKS memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktorat Penghimpunan Dana, Direktorat Penyaluran Dana, dan Direktorat Kemitraan. Direksi BPDPKS memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar dan Pedoman Kerja Direksi BPDPKS.

Komposisi dan Masa Jabatan
Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Direksi BPDPKS

Pengangkatan dan Pemberhentian

Sesuai dengan Anggaran Dasar BPDPKS, pengangkatan calon Direksi wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam hal memahami masalah manajemen yang berkaitan dengan fungsi salah satu manajemen, mempunyai pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan serta memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Komite Pengarah melalui proses transparan (Pemegang Saham BPDPKS). Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan Komite Pengarah dan penealonan tersebut mengikat bagi Komite Pengarah.

Pemberhentian anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi induk Badan melalui Komite Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite Pengarah dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu- waktu dengan menyebutkan alasannya. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan;
2. Masa jabatan anggota Pejabat Pengelola ditetapkan lima tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
3. Anggota Pejabat Pengelola sewaktu-waktu dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan;
4. Anggota Pejabat Pengelola dapat mengundurkan diri dari jabatan direksi dengan mengirimkan surat pengunduran diri. Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengunduran diri tersebut, jika tidak ada jawaban dari Kementerian Keuangan, berarti persetujuan diri tersebut disetujui.

BPDPKS has the task of carrying out the management of the Palm Oil Plantation Fund. BPDPKS is led by the President Director who oversees the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management, Directorate of Fund Planning and Management, Directorate of Fundraising, Directorate of Fund Distribution, and Directorate of Partnerships. The Board of Directors of BPDPKS has the authority and responsibility based on the Articles of Association and Work Guidelines for the Board of Directors of BPDPKS.

Composition and Term of Office
The following is the composition and term of office of BPDPKS Board of Directors

Appointment and Dismissal

In accordance with BPDPKS Articles of Association, the appointment of candidates for the Board of Directors must meet the fit and proper requirements in terms of understanding the management issues related to the function of one of the managements, having adequate knowledge in the Company's business field, and having adequate integrity, competence, and reputation.

The appointment and dismissal of the Board of Directors is carried out by the Steering Committee through a transparent process (BPDPKS Shareholders). Members of the Board of Directors are appointed from the candidates proposed by the Steering Committee and the nomination is binding for the Steering Committee.

Dismissal of members of the Board of Directors is entirely the authority of the Board of Directors of the holding company through the Steering Committee in accordance with the provisions of the legislation.

The Steering Committee may dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons. The appointment and dismissal of the Managing Officer is as follows:

1. The Managing Officer is appointed and dismissed by the Minister of Finance;
2. The term of office of members of the Managing Officer is set for five years and after that they can be reappointed for one more term of office;
3. Members of the Managing Officer may be dismissed at any time before the end of their term of office;
4. Members of the Managing Officer may resign from the position of the Board of Directors by sending a letter of resignation. Within 30 days from the date of resignation, if there is no response from the Ministry of Finance, it means that the resignation has been approved.

Pedoman dan Tata Tertib

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015.

Guidelines and Code of Conduct

The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities refers to the Copy of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 regarding the Organization and Work Procedures of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency dated June 11, 2015.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Duties and Responsibilities of the Board of Directors based on the Copy of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 regarding the Organization and Work Procedure of the Fund Management Agency for Palm Oil Plantation dated June 11, 2015 are as follows:

Direktur Utama President Director	Melaksanakan dan memastikan pengelolaan Dana Kelapa telah sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implement and ensure the management of Dana Sawit is in accordance with the policies of the Minister of Finance and based on the provisions of the legislation.
Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Fund Collection	Direktorat Penghimpunan Dana bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana penggalangan dana peremajaan sawit, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan kelapa sawit dan pengembangan fasilitas perkebunan kelapa sawit, minyak dan infrastruktur yang berasal dari pengumpulan kelapa sawit, organisasi bisnis dan bentuk penghimpunan dana lainnya. The Directorate of Fund Collection is responsible for coordinating the preparation of fund collection plans for palm oil rejuvenation, research and development, promotion of palm oil plantations and development of palm oil plantation facilities, oil and infrastructure derived from palm oil collections, business organizations, and other forms of fund collection.
Direktorat Perencanaan Dan Pengelolaan Dana Directorate of Fun Planning and Management	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana bertanggung jawab dalam perencanaan kebijakan, perencanaan strategi bisnis, perencanaan alokasi dana, pengembangan dan pengelolaan alokasi dana dalam instrumen investasi. The Directorate of Fund Planning and Management is responsible for policy planning, business strategy planning, fund allocation planning, development and management of fund allocation in investment instruments.
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan Dan Manajemen Risiko Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management	Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (settlement), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. The Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management coordinates the preparation of strategic plans and annual budget business plans, work plans and work unit budgets, budget management, accounting and reporting, settlement of transactions, human resource management, general affairs, management organizational risk, and compliance with statutory provisions.
Direktorat Penyaluran Dana Directorate of Fund Disbursement	Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana. The Directorate of Funds Disbursement has the task of coordinating the preparation of the Fund distribution plan, verification and assessment of proposals for the development of palm oil commodities and the distribution of Funds for financing development, monitoring and evaluation of the implementation of Fund distribution, as well as performing custodial functions over Funds including recording, monitoring, and reporting on fund deposits.
Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership	Direktorat Kemitraan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi perusahaan, Lembaga Kemasyarakatan, dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. The Directorate of Partnerships is responsible for the preparation of partnership management plans with Small and Medium Enterprises and corporate cooperatives, Social Institutions, and civil society for sustainable palm oil development.

Pembagian Tugas Direksi

Direksi BPDPKS bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPDPKS untuk kepentingan dan tujuan BPDPKS. Direksi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas pengelolaan BPDPKS sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BPDPKS. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut merupakan tugas khusus masing masing Anggota Direksi BPDPKS:

Division of Duties of the Board of Directors

BPDPKS Board of Directors is fully responsible for the management of BPDPKS for the interests and objectives of BPDPKS. The Board of Directors is responsible to the Minister of Finance as a manifestation of the accountability of BPDPKS management in accordance with the principles of BPDPKS governance. In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors has clear duties and responsibilities in accordance with their respective functions. The following are the specific duties of each Member of the Board of Directors of BPDPKS:

Pembagian Tugas Direksi
Division of the Board of Directors Duties

Jabatan Position	Ruang Lingkup Tugas Job Description
Direktur Utama President Director	1. Penyusunan rencana strategis bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja; 2. Penghimpunan Dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan dana; 3. Pengelolaan dana yang meliputi penempatan/investasi dana; 4. Perencanaan dan penyaluran dana ; 5. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan penyelesaian transaksi (settlement,) serta pelaporan; 6. Pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS. 1. Preparation of strategic business plans, Business Plans and Budgets, as well as Work Plans and Budgets of the Work Units; 2. Fund collection including plans and strategies for collecting fees and developing funds; 3. Fund management which includes fund placement/investment; 4. Fund Planning and distribution; 5. Preparation and implementation of the budget, accounting, and settlement of transactions, as well as reporting; 6. Internal control and implementation of risk management with the principle of prudence on the implementation of BPDPKS duties.
Direktorat Penghimpunan Dana Directorate of Fund Collection	1. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; 2. Pelaksanaan penghimpunan biaya dan iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya; 3. Pelaksanaan penghimpunan dana lainnya; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit; 5. Pelaporan realisasi penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. 1. Preparation of materials and coordination for the drafting of a plan to raise funds for palm oil plantation activities; 2. Implementation of fee collection and contributions for palm oil plantation business actors and their derivatives; 3. Implementation of other fund collection; 4. Implementation of monitoring and evaluation of the implementation of fundraising for oil palm plantation activities; 5. Reporting on the realization of fund collection for palm oil plantation activities.
Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana Directorate of Fun Planning and Management	1. Perumusan Kebijakan rencana usaha berupa rencana strategis bisnis; 2. Penyiapan bahan penyusunan alokasi dan rencana bisnis tahunan sebagai bahan penyusunan RBA tahunan; 3. Pengembangan rencana pengalokasian dana; 4. Pengembangan dan penempatan dana yang dikelola dan pendapatan pada instrumen investasi; 5. Pengelolaan kerjasama pengelolaan dana; 6. Penyusunan rencana penyaluran dana terkait biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana; 7. Pengelolaan riset, data, dan informasi. 1. Formulation of business plan policies in the form of business strategic plans; 2. Preparation of materials for the drafting of annual business plans and allocations as materials for the preparation of the annual RBA; 3. Development of a fund allocation plan; 4. Development and placement of managed funds and income in investment instruments; 5. Management of fund management cooperation; 6. Formulation of plan for fund disbursement related to biodiesel, rejuvenation, human resource development for palm oil, research and development, promotion, facilities and infrastructure; 7. Management of research, data, and information.
Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management	1. Penyusunan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan, rencana kerja dan anggaran; 2. Pengelolaan Anggaran dan Keuangan; 3. Penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi 4. Pelaksanaan settlement; 5. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia; 6. Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan; 7. Pengelolaan risiko dan kepatuhan internal. 1. Preparation of strategic plan, annual business plan and budget (RBA), work plan and budget; 2. Budget and Financial Management; 3. Preparation of accounting systems and manuals, financial and performance reports, and accounting for each transaction 4. Implementation of settlements; 5. Planning, development and management of human resources; 6. Implementation of general and household affairs; 7. Risk management and internal compliance.

Jabatan Position	Ruang Lingkup Tugas Job Description
Direktorat Penyaluran Dana Directorate of Fund Disbursement	1. Penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; 2. Pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan kelapa sawit dan penyaluran untuk kegiatan pengembangan kelapa sawit; 3. Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana kegiatan biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; 5. Pelaporan realisasi penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. 1. Preparation of materials and coordination for the arrangement of disbursement plan for sustainable oil palm development; 2. Verification and evaluation on oil palm activity proposal and disbursement for oil palm improvement activities; 3. Implementation of fund disbursement activity for biodiesel activity, replanting, improvement of human resources, research and development, promotion, facilities and infrastructure; 4. Implementation of monitoring and evaluation on fund disbursement for sustainable oil palm development; 5. Reporting of realized fund disbursement for sustainable oil palm development
Direktorat Kemitraan Directorate of Partnership	1. Penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana kemitraan; 2. Pelaksanaan identifikasi kemitraan kegiatan pengembangan kelapa sawit; 3. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Perusahaan, Lembaga, Kemasyarakatan, dan civil society; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kemitraan kelapa sawit berkelanjutan; 5. Pelaporan realisasi kemitraan kelapa sawit berkelanjutan. 1. Preparation of materials and coordination for the arrangement of partnership plan; 2. Identification of partnership for oil palm development activity; 3. Implementation of partnership activity with Cooperative and Small and Medium Enterprises, Company, Public Agency, and civil society; 4. Implementation of monitoring and evaluation on sustainable oil palm partnership; 5. Reporting of sustainable oil palm partnership realization.

Independensi Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya baik secara individual maupun kolegial. Selama tahun 2024 seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang pelaksanaan Good Governance. Pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direktur dan diperbaharui setiap awal tahun sebagai pernyataan bahwa anggota Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha BPDPKS.

Independence of the Board of Directors

In carrying out their function and duties, each member of the Board of Directors acts independently, both individually and collectively. Throughout 2024, all members of the Board of Directors do not hold concurrent positions which are prohibited by the applicable laws and regulations regarding the implementation of Good Governance. The Statement of not having conflict of interest signed at the beginning of appointment as Director and updated at the beginning of each year as a statement that neither the members of the Board of Directors nor their families have share ownership nor are managers in the Company, or business activities that are directly or indirectly related to the BPDPKS line of business.



5.6 Satuan Pemeriksa Internal
Internal Audit Unit (IAU)

Satuan Pemeriksa Internal (SPI) merupakan organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk menjamin independensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit, Satuan Pemeriksa Internal berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama. Seorang Kepala Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BPDPKS membentuk Fungsi Pemeriksaan Internal yang dijalankan oleh Satuan Pemeriksa Internal. Pembentukan Fungsi Pemeriksaan Internal ini merupakan sebuah upaya BPDPKS dalam mewujudkan tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan BLU. Pembentukan SPI BPDPKS berdasarkan PMK No.113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDPKS.

Sejak bulan Juli 2016, SPI mulai melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Direksi dan Dewan Pengawas sebagai upaya dalam meuwjudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dilaksanakan dengan melalui pengawasan, penilaian Sistem Pengendalian Internal, dan pemeriksaan obyektif serta independen, dengan menerapkan etika profesi di setiap tugas yang dilaksanakan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SPI

Saat ini Kepala SPI BPDKS dijabat oleh Sdr. Hari Kuncoro menggantikan Sdri. Triana Meinarsih berdasarkan Surat Keputusan Direksi Direktur Utama Nomor Kep-272/DPKS/2019 tentang Mutasi Pegawai Tingkat Jabatan Kepala Divisi di Lingkungan BPDPKS Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.
Direktur Utama memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala SPI berdasarkan mekanisme internal BPDPKS dengan pertimbangan Dewan Pengawas. Pengangkatan Kepala SPI BPDPKS dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, aspek interitas dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan PMK NO.200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum (BLU).

Internal Audit Unit (IAU) is a supporting organ duly established by the Board of Directors to ensure the independence and prevent intervention of activities or audit work unit, an Internal Audit Unit (IAU) is directly managed by the President Director. A Head of Internal Audit Unit shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
BPDPKS established an Internal Audit Function managed by the Internal Audit Unit. This establishment of Internal Audit Function is an effort of BPDPKS to realize the governance of Public Service Agency (BLU) of which financial management shall be accountable and transparent. IAU establishment of BPDPKS shall be under the Regulation of the Minister of Finance (PMK) No.113/PMK.01/2015 regarding Organization and Governance of BPDPKS.

Since July 2016, IAU has started to carry out its duties and functions to assist the Board of Directors and the Supervisory Board as an effort to realize Good Governance. This is carried out through supervision, assessment of the internal control system, and objective and independent examination, by applying professional ethics in every task carried out.

Head of IAU Appointment and Dismissal

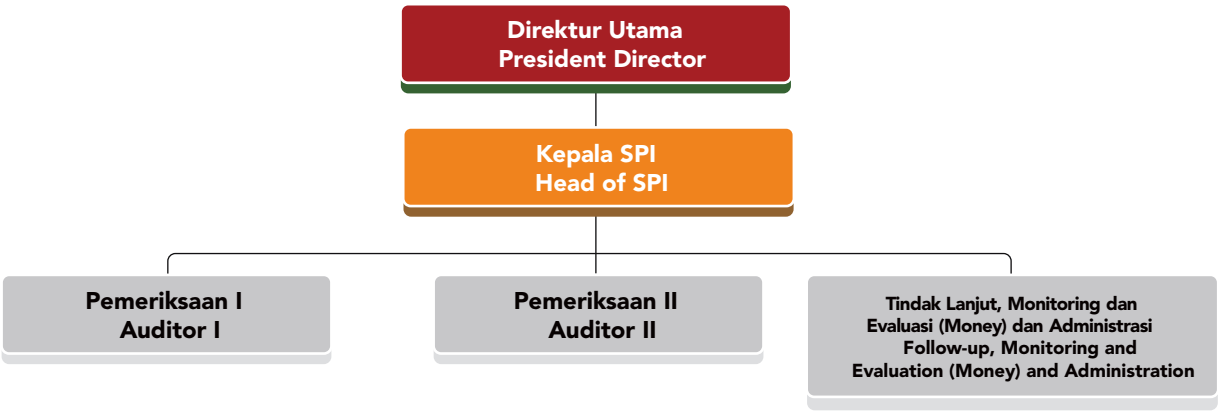
Currently, the position of Head of BPDPKS IAU is served by Mr. Hari Kuncoro substituting Mrs. Triana Meinarsih under the Decision of the Board of Directors Number Kep-272/DPKS/2019 concerning Officials Transfer at the Level of Head of Division in BPDPKS in 2019 dated 23 July 2019.
President Director is authorized to appoint and dismiss the Head of IAU in accordance with the internal mechanism of BPDPKS under the consideration of the Supervisory Board, Appointment of the Head of BPDPKS IAU shall be performed by taking into account several prominent aspects, among others: education qualification, work experience, integrity aspect and already in compliance with the requirements of PMK NO.200/PMK.05/2017 regarding BLU Internal Control System.

Struktur dan Kedudukan SPI BPDPKS

Pembentukan organisasi SPI BPDPKS adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Struktur dan kedudukan SPI berada di bawah Direktur Utama sesuai dengan Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-66/DPKS/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Penyesuaian Struktur Jabatan dan Uraian Tugas Kepala SPI BPDPKS.

Structure and Position of BPDPKS IAU

The establishment of the BPDPKS IAU organization is based on the Regulation of the Minister of Finance. The structure and position of IAU is under the President Director in accordance with the Decree of the President Director of BPDPKS No. KEP-66/DPKS/2016 dated December 26, 2016 regarding Adjustment of Position Structure and Job Description of the Head of BPDPKS IAU.



Kedudukan SPI:

1. SPI merupakan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama BPDPKS;
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
3. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BPDPKS;
4. Kepala SPI akan menjadi Mitra Kerja Manajemen yang Independen dan Profesional;
5. Personil SPI tidak diperbolehkan merangkap tugas ataupun bekerja yang ada pada Direktorat teknis di dalam BPDPKS;
6. Direktur Utama memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya Independensi SPI dan wajib menjaga serta mengevaluasi kualitas fungsi SPI.

IAU Position:

1. IAU is an organization stipulated based on the Regulation of the Minister of Finance and is positioned directly under the President Director of BPDPKS;
2. IAU is led by a Head who is directly responsible to the President Director;
3. The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the BPDPKS Supervisory Board;
4. The Head of IAU will become an Independent and Professional Management Partner;
5. IAU personnel are not allowed to hold concurrent duties or work at the technical Directorate within BPDPKS;
6. The President Director provides full support for the implementation of the Independence of IAU and is obliged to maintain and evaluate the quality of the IAU function.

Profil Kepala Satuan Pemeriksa Internal BPDPKS

Profile of the Head of the Internal Audit Unit of BPDPKS



Hari Kuncoro
Kepala SPI | Chief Audit Executive

Warga negara Indonesia, berdomisili di Depok, Jawa Barat. Beliau lahir di Cilacap tanggal 25 Mei 1977 dan berusia 43 tahun. Beliau menjabat sebagai Kepala SPI sejak 23 Juli 2019 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-272/DPKS/2019.

Beliau lulusan D IV Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) tahun 2005 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst, Financial Risk Management, Certified Risk Management Professional (CRMP), dan Project Financial Model (PFM).

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Internal Auditor di Sempati Air Cabang Medan, sebagai Auditor di Kanaka Puradireja Jakarta tahun 2000, sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT Kertas Leces tahun 2011-2012, sebagai Sekretaris Komite Audit di PT Kertas Leces tahun 2012-2013, sebagai Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi tahun 2015-sekarang, dan sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS tahun 2015 – 2019. Sebelum bekerja di BPDPKS (2015 - 2019), beliau masih aktif di Lingkungan Kementerian Keuangan menjabat sebagai Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi (2015-sekarang), Kepala Divisi Keuangan dan Umum.

Indonesian citizen, domiciled in Depok, West Java. He was born in Cilacap on May 25, 1977 and is 43 years old. He has served as Head of IAU since July 23, 2019 with the Decree of the Board of Directors No. Kep-272/DPKS/2019. He graduated from DIV Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) in 2005 and earned a Master's degree in Management from Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. In addition, he is also certified as Chartered Financial Analyst, Financial Risk Management, Certified Risk Management Professional (CRMP), and Project Financial Model (PFM).

In the course of his career, he served as Internal Auditor at Sempati Air Medan Branch, as Auditor at Kanaka Puradireja Jakarta in 2000, as Secretary to the Board of Commissioners at PT Kertas Leces in 2011-2012, as Secretary to the Audit Committee at PT Kertas Leces in 2012-2013 , as Head of Budget and Accounting Division 2015-present, and as Head of Finance and Accounting Division of the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance and Risk Management BPDPKS 2015 – 2019. Prior to working at BPDPKS (2015 - 2019), he was still active in the Ministry Finance serves as Head of Budget and Accounting Division (2015-present), Head of Finance and General Division.

Komposisi Personil dan Pendidikan SPI

Berdasarkan Struktur dan Kedudukan SPI, terdapat 3 (tiga) tenaga Auditor Internal BPDPKS yang terdiri dari 1 (satu) orang yang menjabat sebagai Kepala SPI dan 3 (tiga) orang sisanya menjabat sebagai Auditor/ Pemeriksa.

IAU Personnel and Education Composition

Based on the structure and position of IAU, there are 3 (three) Internal Auditors of BPDPKS consisting of 1 (one) person serving as Head of IAU and the remaining 3 (tree) serving as Auditor/Examiner.

Komposisi Personil dan Pendidikan SPI
IAU Personnel and Education Composition

Komposisi Personil dan Pendidikan SPI						
Jabatan	Jumlah Auditor	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor				
		Nama	Tingkat	Bidang Studi	Lembaga	Tahun
Kepala SPI	1	Hari Kuncoro	**D-IV** **S2**	Akuntansi Manajemen	STAN Unsoed	2000 2005
Staff	1	Zulkifly	**S1**	Akuntansi	UT	2012
Staff	1	Muhamad Rahmat	**S1**	Akuntansi	STAN	2021
Staff	1	Sarah Isnania Cendana	**S1**	Agribisnis	UIN Jakarta	2009

Pedoman Kerja SPI

Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) merupakan Pedoman Kerja SPI yang sah dan ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2018, berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Utama dan Dewan Pengawas. Berdasarkan Internal Audit Charter, SPI memiliki tanggung jawab dalam mengatur visi, misi, struktur dan kedudukan SPI, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal.

Di samping mengacu pada Piagam Audit Internal, SPI juga mengacu pada beberapa kebijakan yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 200/ PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum; dan
3. Audit Program, beserta manual-manual pemeriksaan antara lain:
   - Pedoman Audit Kinerja;
   - Pedoman Audit Laporan Keuangan;
   - Pedoman Umum SPI;
   - Pedoman Teknis SPI;
   - Kode Etik yang dikeluarkan IIA Global.

IAU Work Guidelines

The Internal Audit Charter is a valid IAU Work Guidelines and was stipulated on July 15, 2018, based on the Joint Decree of the President Director and the Supervisory Board. Based on the Internal Audit Charter, the Internal Audit Unit is responsible for managing the vision, mission, structure and position of the Internal Audit Unit, as well as aspects related to the implementation of Internal Audit.

In addition to referring to the Internal Audit Charter, IAU also refers to several policies, they are:

1. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 113/PMK.01/2015 regarding the Organization and Work Procedure of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency;
2. dan Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 200/PMK.05/2017 regarding the Internal Control System of Public Service Agencies; and
3. Audit Program, along with examination manuals, among others:
   - Performance Audit Guidelines;
   - Financial Statements Audit Guidelines;
   - IAU General Guidelines;
   - IAU Technical Guidelines;
   - Code of Ethics issued by IIA Global.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Internal Audit Charter, tugas dan tanggung jawab SPI sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
3. Membuat/mengembangkan Program Kerja Audit Tahunan {PKAT) dengan menggunakan metode risk based audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama BPDPKS untuk mendapatkan pengesahan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
6. Membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan BLU dan Dewan Pengawas;
7. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan khusus apabila diperlukan;
9. Melaksanakan reviu laporan keuangan;
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
11. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
12. Melaksanakan pemeriksaan/pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan berdasarkan permintaan dari Direksi BPDPKS/aparat pemeriksa intern pemerintah,

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of IAU in accordance with the Internal Audit Charter are as follows:

1. Develop and implement an internal control plan;
2. Examining and evaluating the implementation of the internal control system and risk management system;
3. Create/develop the Annual Audit Work Program (PKAT) using the risk-based audit method and submit it to the President Director of BPDPKS for approval;
4. Conduct inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
5. Provide suggestions for improvement and objective information on the activities supervised at all levels of management;
6. Make a report on the results of internal supervision and submit the report to the BLU leadership and the Supervisory Board;
7. Provide recommendations for improvement of governance processes and efforts to achieve BLU business strategies;
8. Monitor, analyze, and report on the implementation of follow-up on supervision recommendations by IAU, special supervisory apparatus if necessary;
9. Carry out a review of financial statements;
10. Carry out special inspections if necessary;
11. Carry out other tasks based on assignments in accordance with the provisions of the legislation; and
12. Carry out unscheduled and/or confidential inspections/supervisions based on requests from the BPDPKS Directors/government internal audit officers,

Tanggung Jawab SPI

1. Membantu Direktur Utama dalam memenuhi tanggung jawab kepengurusan BPDPKS dengan melakukan pengawasan/audit terhadap program kepatuhan, operasional, dan kegiatan yang menjadi tugas pokok BPDPKS;
2. Memantau kinerja seluruh kegiatan unit kerja BPDPKS secara terintegrasi dalam hal kepatuhan, kelengkapan dan penggunaan serta pengendalian administrasi, akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran perbaikan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran BPDPKS yang telah ditetapkan. ditetapkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja sesuai dengan keputusan Panitia Pengarah, RBA, dan DIPA BPDPKS;
3. Membantu Direksi dan Dewan Pengawas dalam mewujudkan Tata Kelola yang Baik, melalui penilaian yang obyektif dan independen terhadap Sistem Pengendalian Intern, pengawasan, dan pemeriksaan, dengan menerapkan etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Memberikan peringatan dini kepada Direksi dan Dewan Pengawas atas terjadinya risiko/kegiatan usaha yang mungkin timbul dan memberikan usulan alternatif peningkatan efisiensi dengan tujuan menjaga kinerja BPDPKS;
5. Mendorong Direktorat Teknis di BPDPKS untuk terus meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern agar pelaksanaan berjalan efektif guna mencapai visi, misi BPDPKS dapat terwujud dengan tetap memperhatikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko yang Baik;
6. Memberikan laporan hasil pemeriksaan serta laporan evaluasi yang disesuaikan dengan kecukupan sumber daya manusia di unit kerja SPI;
7. Memberikan evaluasi, analisis perbaikan proses manajemen operasional dan program kerja di BPDPKS;
8. Memantau pelaksanaan dan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Internal/Eksternal berdasarkan action plan yang telah disepakati.

IAU Responsibilities

1. Assist the President Director in fulfilling BPDPKS management responsibilities by conducting supervision/audit of compliance, operations, and activity programs which are the main tasks of BPDPKS;
2. Monitor the performance of all BPDPKS work unit activities in an integrated manner on compliance, completeness and use and control of administration, accounting, finance and other controls as well as provide suggestions for improvement that lead to the achievement of BPDPKS goals and objectives that have been determined and are the responsibility of each work unit in accordance with the decision of the Steering Committee, RBA, and DIPA BPDPKS;
3. Assisting the Board of Directors and the Supervisory Board in realizing Good Governance, through an objective and independent assessment of the Internal Control System, supervision, and examination, by applying professional ethics in the performance of their duties;
4. Provide early warning signal to the Board of Directors and Supervisory Board on the occurrence of business risks/activities that may arise and provide alternative proposals for improving efficiency with the aim of maintaining the performance of BPDPKS;
5. Encouraging the Technical Directorate at BPDPKS to continue to improve the implementation of internal control so that implementation runs effectively in order to achieve the vision, mission of BPDPKS can be realized while still paying attention to Good Governance and Risk Management;
6. Provide reports on the results of the inspection as well as evaluation reports that are adjusted to the adequacy of human resources in the IAU work unit;
7. Provide evaluation, analysis of improvements to operational management processes and work programs at BPDPKS;
8. Monitor the implementation and completion of follow-up on the Internal/External Auditor's Inspection Report (LHP) based on the agreed action plan.

Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka Pengembangan Kompetensi SPI senantiasa melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan melalui program sertifikasi nasional dan internasional, keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional maupun pelatihan rutin internal. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen SPI dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai Audit Internal. Sepanjang tahun 2024, SPI telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan antara lain sebagai berikut:

Competency Development

In order to develop the competencies of the Internal Audit Unit (SPI), continuous training and education are carried out through national and international certification programs, participation in national/international seminars, and regular internal training. These various activities are undertaken as a manifestation of SPI's commitment to developing and enhancing the competencies and knowledge of internal audit staff. Throughout the year 2024, SPI has participated in various training activities, including the following:

No	Nama Sertifikasi
1	Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar
2	Qualified Risk Management Officer (QRMO)
3	Konferensi Auditor Internal (KAI)
4	Qualified Government Internal Auditor (QGIA)
5	Audit Kecurangan (Fraud Audit) dan Asesmen Certified Chief Internal Audit (CCIA)
6	Basic Financial Accounting (BFA) Course

5.7 Audit Eksternal
External Auditor

Pelaksanaan Audit eksternal merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan organisasi. Audit eksternal dilaksanakan untuk menjamin independensi hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap tingkat pejabat Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Auditor eksternal (independen) ditunjuk secara rutin oleh BPDPKS untuk melakukan audit terkait operasional dan laporan keuangan BPDPKS yang bertujuan untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai ketaatan, kewajaran, dan kesesuaian laporan keuangan BPDPKS dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The implementation of an external audit is a form of independent supervision function on the Organization's financial aspects. An external audit is carried out to ensure the independence of the examination results, the appointed external auditor must not have conflict of interest with any level of organization's Company.

Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 regarding Public Accountant Services, in article 3 paragraph 1 it is stated that the provision of general audit services on the financial statements of an entity is carried out by 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years and by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

An external (independent) auditor is appointed regularly by BPDPKS to conduct audits related to the operations and financial statements of BPDPKS with the aim of providing an independent and objective opinion regarding the compliance, fairness, and conformity of BPDPKS financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

SPI BPDPKS melakukan pendampingan, pengawasan, dan tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi dari yang diberikan oleh KAP, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan audit berjalan dengan lancar dan tidak menemui hambatan yang berarti, seluruh temuan nantinya akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ditetapkan. Selain itu Direksi juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal secara berkala, supaya pelaksanaan audit dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta apabila terjadi kendala dalam obyek pemeriksaan dapat segera diberikan solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan monitoring tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait serta memberikan laporan atas pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Pengawas secara berkala.

Effectiveness of External Audit Implementation

The BPDPKS IAU provides assistance, supervision, and follow-up on the findings or recommendations provided by the KAP, which aims to ensure that the audit runs smoothly and does not encounter significant obstacles, all findings will be followed up according to the stipulated authority. In addition, the Board of Directors also coordinates and communicates with external auditors on a regular basis, so that the audit can run effectively and efficiently, and if there are problems with the object of the examination, a solution can be immediately given to overcome any existing problems. The Board of Directors also actively monitors follow-up on the findings of the external audit in every coordination meeting between the Board of Directors and related work units, as well as provides reports on the implementation of follow-up actions to the Supervisory Board on a regular basis.

5.8 Manajemen Risiko
Risk Management

BPDPKS merupakan salah satu instansi yang memiliki risiko tinggi, karena dalam kegiatannya melibatkan pengelolaan dana dalam beragam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, BPDPKS berupaya melakukan pengelolaan risiko secara konsisten dan terstruktur guna meminimalisir risiko dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan.

BPDPKS is one of the institutions that has a high risk, due in its activities involves managing funds in various forms of financing. Therefore, BPDPKS seeks to carry out risk management in a consistent and structured manner in order to minimize risk and create value for stakeholders.

Sistem Manajemen Risiko

BPDPKS menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang telah disesuaikan dengan framework ISO 31000:2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Direktur 32 Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-252/PB/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Risiko Organisasi Di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif yang luas, mudah dipahami, terukur serta mampu meningkatkan integrasi dan koordinasi antar unit kerja di BPDPKS. Penerapan Sistem Manajemen Risiko di BPDPKS terdiri dari tahapan-tahapan pengelolaan risiko yang terstruktur dan sistematis. Fungsi Manajemen Risiko BPDPKS dijalankan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDPKS yang dipimpin oleh Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Risk Management System

BPDPKS shall implement Risk Management System already adjusted to ISO 31000:2018 framework under the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.01/2021 regarding Risk Management of Financial Management, Decree of the Minister of Finance Number 105/KMK.01/2022 on Guidelines of Risk Management of State Financial Management and Decree of the Director 32 General of Treasury Number KEP-252/PB/2022 regarding Guidelines of Risk Management of State Financial Management for Organizational Risk in the domain of Director General of Treasury, to generate risk management practices with broad, clear, measurable perspectives which may improve the integrity and coordination among work units of BPDPKS. Implementation of Risk Management System in BPDPKS is composed of structured and systematic stages of risk management. Function of BPDPKS shall be served by the Division of Compliance and Risk Management of BPDPKS chaired by the Head of Division of Compliance & Risk Management.

Komitmen Penerapan Manajemen Risiko BPDPKS

Sebagai wujud komitmen Penerapan Manajemen Risiko BPDPKS dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen risiko, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di seluruh unit kerja BPDPKS sebagaimana dalam Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-1/DPKS/2024 tentang Struktur Manajemen Risiko Pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024.

BPDPKS Risk Management Implementation Commitment

As a manifestation of its commitment to Risk Management Implementation, BPDPKS carries out its risk management based on the principles of risk management, detailing the main duties and responsibilities for risk management across all BPDPKS work units, as outlined in the President Director's Decree Number KEP-1/DPKS/2024 concerning the Risk Management Structure at the Palm Oil Plantation Fund Management Agency for the year 2024.

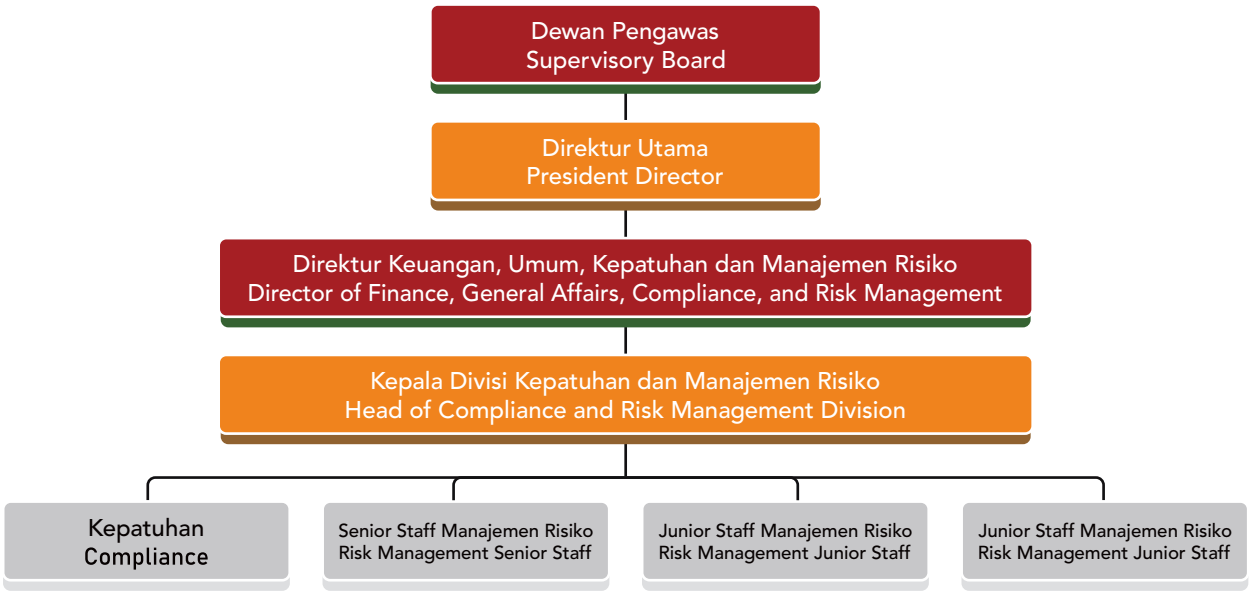
Pihak/Pengelola Parties/Managers	Pokok dan Tanggung Jawab Utama Main Principal and Responsibilities
Direktur Utama (selaku Manajer Risiko) President Director (as Risk Manager)	a. Menetapkan profil dan rencana mitigasi risiko; b. Melaksanakan pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal; dan c. Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan sistem Manajemen Risiko a. Determining risk profile and mitigation plan; b. Implementing Risk Management process monitoring and reporting the result to the Director General of Treasury c.q. Secretary of Directorate General; and c. Carrying out evaluation on implementation effectivity of Risk Management system.
Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko (selaku Koordinator Risiko) Director of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management (as Risk Coordinator)	a. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi Risiko; b. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Manajer Risiko yang bersangkutan; c. Memfasilitasi dan mengoordinasikan proses Manajemen Risiko; dan d. Menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan Risiko; e. Verifikasi dan pengiriman laporan Manajemen Risiko pada Sistem Aplikasi Manajemen Risiko kepada Manajer Risiko. a. Preparing the concept of risk profile and mitigation plan; b. Compiling Risk Management report and delivering it to relevant Risk Management; c. Facilitating and coordinating Risk Management process; and d. Providing education and/or socialization to leverage Risk management comprehension; e. Verification and submission of the Risk Management report in the Risk Management Application System to the
Direksi (selaku Anggota Koordinator Risiko) The Board of Directors (as Risk Coordinator Members)	a. Memberikan usulan atas profil Risiko dan rencana mitigasi Risiko kepada Koordinator Risiko; dan b. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Manajer Risiko sesuai lingkup tugas dan fungsinya melalui Koordinator Risiko a. Providing a recommendation on Risk profile and Risk mitigation plan to the Risk Coordinator; and b. Preparing Risk Management report and delivering it to the Risk Manager based on duties and function scope by Risk Coordinator
Kepala Divisi (selaku Administrator Risiko) Head of Division (as Risk Administrator)	a. Membantu Koordinator Risiko dalam penyusunan konsep profil dan rencana mitigasi; b. Membantu Koordinator Risiko dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Manajer Risiko; c. Membantu Koordinator Risiko dalam memfasilitasi dan mengoordinasi proses manajemen risiko; d. Menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko; dan e. Membantu Koordinator Risiko dalam memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko. f. Memantau perekaman dan pengiriman laporan Manajemen Risiko pada Sistem Aplikasi Manajemen Risiko. a. Assisting Risk Coordinator in preparing the concept of profile and mitigation plan; b. Assisting Risk Coordinator in preparing Risk Management report and submitting it to the Risk Manager; c. Assisting Risk Coordinator in facilitating and coordinating risk management process; d. Managing Risk Management Process document; and e. Assisting Risk Coordinator in providing education and socialization program to leverage employees' comprehension and awareness in Risk management. f. Monitor the recording and submission of Risk Management reports in the Risk Management Application System.
Staf Divisi (selaku Staf Administrator Risiko) Division Staff (as Risk Administrator Staff)	a. Membantu Administrator Risiko dalam penyusunan konsep profil dan rencana mitigasi; b. Membantu Administrator Risiko dalam penyusunan laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Manajer Risiko; c. Membantu Administrator Risiko dalam memfasilitasi dan mengoordinasi proses manajemen risiko; d. Menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko; dan e. Membantu Administrator Risiko dalam memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko. f. Memantau perekaman dan pengiriman laporan Manajemen Risiko pada Sistem Aplikasi Manajemen Risiko. a. Assisting Risk Coordinator in preparing the concept of profile and mitigation plan; b. Assisting Risk Coordinator in preparing Risk Management report and submitting it to the Risk Manager; c. Assisting Risk Coordinator in facilitating and coordinating risk management process; d. Managing Risk Management Process document; and e. Assisting Risk Coordinator in providing education and socialization program to leverage employees' comprehension and awareness in Risk management. f. Monitor the recording and submission of Risk Management reports in the Risk Management Application System.
Divisi Manajemen Risiko (selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko) Division of Risk Management (Risk Management Compliance Unit)	a. Melaksanakan pemantauan atas kepatuhan penyusunan profil risiko dan rencana mitigasi risiko; b. Melaksanakan pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan rencana mitigasi risiko; dan c. Memantau tindak lanjut hasil review dan/atau audit manajemen risiko. d. Memberikan masukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada setiap proses Manajemen Risiko; dan e. Memantau tindak lanjut hasil reviu/ audit Manajemen Risiko melalui evaluasi bukti pendukung atau penggalian informasi dari UPR. a. Monitoring the compliance of arrangement of risk profile and risk mitigation plan; b. Monitoring compliance of implementation of risk mitigation plan; and c. Monitoring a follow-up of the results of risk management review and/or audit. d. Provide input and solutions for issues arising in each Risk Management process; and e. Monitor follow-up actions on the results of risk management reviews/audits through evaluation of supporting evidence or information gathering from UPR (Unit Pengelola Risiko/Risk Management Unit).Kalau kamu mau, saya bisa buat versi yang lebih ringkas atau lebih formal juga.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-1/DPKS/2024 tentang Struktur Manajemen Risiko Pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024, BPDPKS telah membentuk Struktur Manajemen Risiko, sebagai upaya penerapan Manajemen Risiko secara efektif dan terintegrasi, Struktur Manajemen Risiko BPDPKS adalah sebagai berikut:

Organizational Structure of Risk Management

Based on the President Director's Decree Number KEP-1/DPKS/2024 concerning the Risk Management Structure at the Palm Oil Plantation Fund Management Agency for the year 2024, BPDPKS has established a Risk Management Structure as an effort to implement Risk Management effectively and in an integrated manner. The Risk Management Structure of BPDPKS is as follows:



Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Pengawas serta dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis BPDPKS.
Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko BPDPKS saat ini dijabat oleh Sdr. Barry Dharmawan dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 373/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada BLU BPDPKS.

Appointment and Dismissal

The Head of the Compliance & Risk Management Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Supervisors, taking into account educational qualifications, work experience, and qualifications in accordance with BPDPKS business needs.The current Head of the Compliance & Risk Management Division at BPDPKS is Mr. Barry Dharmawan, based on the Minister of Finance Decree Number 373/KMK.01/2018 regarding Appointment to Position at BLU BPDPKS.

Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Head of Compliance & Risk Management Division



Barry Dharmawan

Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Head of Compliance & Risk Management Division

Lahir di Lampung, tanggal 15 Januari 1985. Lulusan Diploma IV Keuangan Spesialisasi Bea & Cukai Dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006) dan Master of Applied Economics dari University of Adelaide (2014).
Sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko di BPDPKS, beliau pernah menjabat berbagai jabatan diantaranya adalah Kepala Seksi Pengelolaan Risiko, Sub Direktorat Penganggaran, , Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022), Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis, Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2019). Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Bagian Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2017) dan berbagai jabatan lainnya.

Born in Lampung on January 15, 1985. He graduated with a Diploma IV in Finance, specializing in Customs and Excise, from the State College of Accountancy (2006) and holds a Master of Applied Economics from the University of Adelaide (2014).Before serving as the Head of the Compliance & Risk Management Division at BPDPKS, he held various positions, including Head of Risk Management Section, Sub-Directorate of Budgeting, Performance Management and Investment Risk, Directorate of Investment Management Systems, Directorate General of Treasury (2022); Head of Business Process Supervision Section, Supervision Division of KPPN and Internal Compliance, Regional Office of Directorate General of Treasury, Riau Islands Province, Directorate General of Treasury (2019); Head of Personnel Subdivision, General Affairs Section, Regional Office of Directorate General of Treasury, Aceh Province, Directorate General of Treasury (2017); and several other positions.

Komposisi dan Informasi Riwayat Pendidikan

Jumlah Pegawai Divisi Manajemen Risiko per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 3 (Tiga) orang, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

Composition and Education History Information

The number of Risk Management Division employees as of December 31, 2024 was three people, with the following educational history:

Komposisi dan Informasi Riwayat Pendidikan
Composition and Education History Information

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Amount	Tingkat Level	Bidang Studi Field of Study	Lembaga Institution	Tahun Year
Barry Dharmawan	Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Head of Compliance and Risk Management Division	1	S2	Ekonomi | Economic	Universitas Indonesia	2015
			S1	Ekonomi | Economic	Adelaide University	2014
			D-IV	Akuntansi | Accounting	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	2006
Riyo Pramato	Junior Staff Manajemen Risiko Junior Risk Management Staff	1	S1	Hukum | Law	Universitas Andalas	2018
Mina Hidayah	Junior Staff Manajemen Risiko Junior Risk Management Staff	1	S2	Ilmu Ekonomi | Economic	Universitas Gadjah Mada	2015
			S1	Ekonomi Pembangunan Management Economic	Universitas Syiah Kuala	2012

Sertifikasi profesi manajemen risiko
Risk Management Professional Certification

No	**Nama Sertifikasi** Certification Name	**Penyelenggara Sertifikasi** Certification Provider	**Nama Pemegang Sertifikasi** Name of Certification Holder
1	Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)	Barry Dharmawan
2	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)	Mina Hidayah Riyo Pramato
3	Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	Mina Hidayah



Laporan Pemantauan Risiko

Setiap risiko yang telah analisis dan dipetakan akan dirancang upaya penyelesaiaan (mitigasi) risiko, sebagai bentuk penanganan terhadap potensi risiko yang muncul dalam proses bisnis dikemudian hari. Berdasarkan pengelompokkan dan peta risiko di atas, BPDPKS melakukan mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan kerugian yang dapat mengganggu kinerja BPDPKS.

Dalam rangka memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko, dilakukan pemantauan Risiko terhadap seluruh tahapan Proses. Pemantauan melibatkan seluruh unit internal yang dilaksanakan secara berkala dalam bentuk Rapat UPR secara periodik paling sedikit setiap triwulan dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO) atau forum lainnya, dipimpin oleh Pimpinan UPR dan dihadiri oleh seluruh pejabat satu level di bawah Pimpinan UPR.

Laporan pemantauan dituangkan dalam bentuk laporan Pemantauan secara kuartalan yang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran Risiko dan Level Risiko, yang ditentukan berdasarkan Level Kemungkinan dan Level Dampak Risiko sesuai analisis sampai dengan periode pemantauan, dengan mempertimbangkan kejadian kerugian yang telah terjadi (loss event), mitigasi Risiko yang telah dilaksanakan, dan pengendalian internal.
b. Status IRU, yang ditentukan dengan membandingkan realisasi IRU dengan ambang batas IRU pada periode pemantauan.
c. Proyeksi Besaran Risiko, merupakan perkiraan perubahan besaran Risiko kualitatif berdasarkan status IRU, yang terdiri dari tiga kategori, yaitu: Tetap apabila status IRU waspada, Naik apabila status IRU awas, dan Turun apabila status IRU aman. Selain berdasarkan status IRU, proyeksi Besaran Risiko juga dapat mempertimbangkan perkembangan mitigasi Risiko dan informasi lainnya yang mendukung proyeksi tersebut. Jika status IRU waspada atau awas, efektivitas mitigasi Risiko yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi kembali.
d. Pelaksanaan rencana mitigasi Risiko yang ditetapkan pada awal tahun dan target output yang direncanakan.

Risk Monitoring Report

Every risk that has been analyzed and mapped will have mitigation efforts designed as a form of handling potential risks that may arise in future business processes. Based on the grouping and risk map above, BPDPKS carries out mitigation aimed at reducing the impact and losses that could disrupt BPDPKS's performance.

To ensure that the implementation of Risk Management is effective according to the plan and provides feedback for the refinement of the Risk Management process, risk monitoring is conducted on all Process stages. Monitoring involves all internal units and is carried out regularly in the form of Organizational Performance Dialogue (DKO) meetings or other forums, chaired by the UPR Leader and attended by all officials one level below the UPR Leader. The monitoring report is compiled in the form of a quarterly Monitoring Report, carried out with considerations including:

a. Risk Magnitude and Risk Level, determined based on the Likelihood Level and Impact Level of Risk according to the analysis up to the monitoring period, considering loss events, implemented Risk Mitigation, and internal controls.
b. IRU Status, determined by comparing the IRU realization with the IRU threshold during the monitoring period.
c. Risk Magnitude Projection, an estimate of the qualitative change in Risk Magnitude based on IRU status, consisting of three categories: Static if IRU status is alert, Increase if IRU status is warning, and Decrease if IRU status is safe. Besides based on IRU status, Risk Magnitude Projection may also consider the development of Risk Mitigation and other supporting information. If IRU status is alert or warning, the effectiveness of implemented Risk Mitigation needs to be re-evaluated.
d. Implementation of the Risk Mitigation Plan established at the beginning of the year and planned output targets.

Penilaian Atas Kinerja Bidang Risiko

Sebagaimana diamanahkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 105/KMK.01/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-252/PB/2022 bahwa Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Penilaian dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, Unit Eselon II, dan unit Eselon III. Penilaian ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan/ atau pihak lain yang memiliki kompetensi penilaian TKPMR. Adapun landasan teknis penilaian TKPMR mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal nomor PER-14/IJ/2022 dengan menentukan ruang lingkup periode penilaian TKPMR di tiap komponen yaitu komponen perencanaan, komponen kapabilitas dan komponen hasil.

Penilaian Mandiri atas TKPMR di lingkup BPDPKS dilaksanakan oleh UKI Eselon I atau Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (UKMR) di lingkup DJPb. Penilaian dilaksanakan dengan tujuan menilai kualitas kematangan penerapan manajemen risiko BPDPKS dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di BPDPKS. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian TKPMR BPDPKS Nomor LAP-23/PB.1/2024 tanggal 11 Oktober 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan atas penerapan manajemen risiko pada UPR BPDPKS berada pada Level 4 (dari 5 level) atau tingkatan "Risk Managed", dengan nilai tertimbang 4,30. Nilai tersebut dapat diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi telah mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik dan telah menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

Selanjutnya, Tim Inspektorat Jenderal melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian TKPMR pada BPDPKS. Penjaminan kualitas atas hasil penilaian TKPMR dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian TKPMR yang dilakukan oleh UKI Eselon I telah berpedoman pada Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan tentang Penilaian TKPMR pada Kementerian Keuangan. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian TKPMR BPDPKS Nomor LAP-129/IJ.4/2024 tanggal 24 Desember 2024, telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Itjen dengan simpulan pelaksanaan penjaminan kualitas adalah menerima sebagian hasil penilaian dengan koreksi nilai menjadi sebesar 4,12 atau berada di level 4 atau tingkatan "Risk Managed".

Performance Assessment of the Risk Management Area

As mandated in the Minister of Finance Decree Number KMK 105/KMK.01/2022 and the Director General of Treasury Decree Number KEP-252/PB/2022, the Assessment of the Maturity Level of Risk Management Implementation (TKPMR) aims to evaluate the quality of risk management implementation. The assessment is conducted at all levels of risk management implementation units, namely Ministries, Echelon I Units, Echelon II Units, and Echelon III Units. This assessment is carried out by the Inspectorate General and/or other parties competent in TKPMR assessment. The technical basis for the TKPMR assessment refers to the Inspector General Regulation Number PER-14/IJ/2022, which defines the scope and period of the TKPMR assessment for each component, namely the planning component, capability component, and results component.The Self-Assessment of TKPMR within BPDPKS is conducted by the Echelon I Compliance Unit or the Secretariat of the Directorate General of Treasury as the Risk Management Compliance Unit (UKMR) within DJPb. The assessment aims to evaluate the maturity quality of risk management implementation at BPDPKS and provide improvement recommendations to enhance the quality of risk management implementation at BPDPKS. Based on the TKPMR Assessment Report of BPDPKS Number LAP-23/PB.1/2024 dated October 11, 2024, it can be concluded that the maturity level of risk management implementation at the BPDPKS Risk Management Unit (UPR) is at Level 4 (out of 5 levels) or the "Risk Managed" stage, with a weighted score of 4.30. This score indicates that the organization has well implemented risk management and that it has become an integral part of the organization's business processes.Furthermore, the Inspectorate General Team conducted quality assurance on the TKPMR assessment results at BPDPKS. The quality assurance aims to ensure that the TKPMR assessment process carried out by the Echelon I Compliance Unit follows the Inspector General Regulation of the Ministry of Finance concerning TKPMR assessment within the Ministry of Finance. Based on the Quality Assurance Report on the TKPMR Assessment Results of BPDPKS Number LAP-129/IJ.4/2024 dated December 24, 2024, quality assurance was performed by the Inspectorate General, concluding that the quality assurance implementation accepted part of the assessment results with a corrected score of 4.12, which remains at level 4 or the "Risk Managed" stage.

Adapun hasil penilaian TKPMR dimaksud, terlampir sebagai berikut:

The results of the aforementioned TKPMR assessment are attached as follows:

KOMPONEN/AREA	BOBOT	SKOR PM	SKOR PK
PERENCANAAN	**30,00%**	**4,81**	**4,17**
KUALITAS PERENCANAAN	30,00%	4,81	4,17
KAPABILITAS	**50,00%**	**3,42**	**3,42**
KEPEMIMPINAN	15,00%	4,00	3,80
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	7,50%	4,00	4,00
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,00	3,00
KEMITRAAN	2,50%	2,00	2,00
PROSES MANAJEMEN RISIKO	20,00%	4,10	4,30
HASIL	**20,00%**	**4,75**	**4,75**
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	12,50%	4,50	**4,50**
OUTCOMES	7,50%	5,00	**5,00**
TOTAL (NILAI TKPMR)	**100,00%**	**4,30**	**4,12**

Keterangan:
PM = Penilaian Mandiri (oleh UKI I)
PK = Penjaminan Kualitas (oleh Itjen)



5.9 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang berhubungan pada suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Hal ini untuk memberikan motivasi dan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan sistem pengendalian internal BPDPKS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif menjadi salah satu komponen penting dalam manajemen BPDPKS serta menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu menjaga aset BPDPKS, meningkatkan kepatuhan BPDPKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang terpercaya, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati- hatian. Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan BPDPKS terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Satuan Pemeriksa Internal terus berusaha untuk memastikan bahwa keputusan, kebijakan dan seluruh aktivitas bisnis dilakukan BPDPKS telah sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Internal Control System is a process related to an action that is carried out continuously in the long term by the management and all employees. This is to provide motivation and confidence in the achievement of organizational goals through effective and efficient activities, reliability of financial reporting, safeguarding Company assets, and compliance with laws and regulations. The implementation of the BPDPKS internal control system is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 200/PMK.05/2017 regarding the Internal Control System for Public Service Agencies.

An effective Internal Control System is one of the important components in the management of BPDPKS as well as a guide for all healthy and safe company operations. An effective Internal Control System can help safeguard BPDPKS assets, improve BPDPKS compliance with applicable laws and regulations, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, and reduce the risk of losses, irregularities and prudential aspects. As an effort to improve BPDPKS compliance with applicable laws and regulations, the Internal Audit Unit continues to strive to ensure that decisions, policies and all business activities carried out by BPDPKS are in accordance with applicable laws and regulations.

Kerangka Kerja

Direksi BPDPKS menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan prosedur dan dan kebijakan secara konsisten, baik terkait dengan kegiatan usaha, manajemen risiko perusahaan, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas, perencanaan strategis yang akurat, serta kebijakan akuntansi yang memadai. Sedangkan Dewan Pengawas mengawasi kewajaran dan transparansi penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, BPDPKS memiliki Fungsi Internal Audit sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian Internal Audit secara keseluruhan. Konsep Sistem Pengendalian Internal sejalan dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dimana di dalamnya terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

Work Outline

BPDPKS's Board of Directors implements an internal control system through consistent application of procedures and policies, both related to business activities, corporate risk management, clear division of tasks and delegation of authority, accurate strategic planning, and adequate accounting policies. Meanwhile, the Supervisory Board oversees the fairness and transparency of the preparation of financial reports and risk management by taking into account the precautionary principle assisted by the Audit Committee.

In line with the implementation of an effective Internal Control System, BPDPKS has an Internal Audit Function as an integral part of the overall Internal Audit control. The concept of the Internal Control System is in line with the Internal Control System framework from the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) which consists of five main elements that are interrelated with each other, they are:

Sistem informasi dan Komunikasi

Sistem informasi merupakan proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui:

- Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- Pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.

Pemantauan Pengendalian

Pemantauan pengendalian dilakukan melalui proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU BPDPKS termasuk fungsi pengawasan intern, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pengendalian Lingkungan

Lingkungan pengendalian diciptakan dengan disiplin dan terstruktur melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Identifikasi dan Analisis Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk menjelaskan dan menentukan segala risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi BPDPKS. Risiko-risiko tersebut meliputi kejadian, penyebab, maupun dampak risiko. Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, setelah mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab Tata Kelola BPDPKS bagian Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan ini.

Information System and Communication

The information system is the process of presenting information regarding operational, financial activities, and compliance with laws and regulations, through:

- Provision and utilization of various forms and means of communication; and
- Development, management, expansion, and continuous updating of information systems.

Monitoring Control

Monitoring control is conducted through an assessment process of the internal control system quality at each level and unit within the organizational structure of BPDPKS BLU including the internal control function, so that it can be carried out optimally.

Environmental Control

Environmental control is created in a disciplined and structured manner through:

- Enforcement of integrity and ethical values:
- Commitment to human resource competence;
- Conducive leadership;
- Establishment of an filling to needs organizational structure;
- Appropriate delegation of authority and responsibility; and
- Formulation and implementation of sound policies on human resource development.

Risk Identification and Analysis

Risk identification aims to explain and determine all risks that may affect the achievement of BPDPKS organizational goals. These risks include events, causes, and impacts of risks. Risk analysis aims to determine the amount of risk and the level of risk. Risk analysis is conducted by determining the level of possibility, and level of impact of the occurrence of risk based on risk criteria, after considering the reliability of the existing control system. A more complete elaboration can be seen in the BPDPKS Governance Chapter of the Risk Management section of this Annual Report.

Aktivitas Pengendalian

Dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pengendalian, dilakukan tindakan-tindakan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BLU BPDPKS pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLU BPDPKS, melalui:

- Reviu kinerja BLU BPDPKS;
- Pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia;
- Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- Pengendalian fisik atas asset;
- Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

- Pemisahan fungsi;
- Otorisasi atas transaksi;
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern dan transaksi.

Activities Control

In order of implementing activities control, actions are taken in a process of controlling BPDPKS BLU activities at every level and unit within the BPDPKS BLU organizational structure, through:

- Performance review of BPDPKS BLU;
- Control over the recruitment and development of human resources;
- Control over the management of information systems;
- Physical control over assets;
- Establishment and review of performance indicators and measures;
- Separation of functions;
- Authorization of transactions;
- Accurate and timely recording of transactions and events;
- Restrictions on access to resources and their records;

- Accountability for resources and records;

- Good documentation of the Internal Control System and transactions.

Pemberlakuan Kode Etik

BPDPKS menerapkan etika bisnis dan etika kerja di dalam setiap kegiatan usahanya, dimana etika bisnis menjadi acuan bagi BPDPKS dalam melaksanakan segala kegiatan usaha termasuk interaksi dengan stakeholder. Sedangkan etika kerja adalah sistem yang menjadi pedoman bagi setiap pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya termasuk etika hubungan antar Pegawai dan BPDPKS.

Setiap tahun, BPDPKS senantiasa membangun budaya kepatuhan terhadap Kode Etik yang berlaku di seluruh lini organisasi. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi Nilai-Nilai Budaya BPDPKS pada Pegawai BPDPKS melalui acara-acara besar BPDPKS seperti Employee Gathering yang secara rutin dilakukan oleh BPDPKS dalam rangka membangun menambah semangat dan kekompakan dalam bekerja.

Enforcement of the Code of Ethics

BPDPKS enforces business ethics and work ethics in every business activity, where business ethics becomes a reference for BPDPKS in carrying out all business activities including interactions with stakeholders. Meanwhile, work ethics is a system that serves as a guide for every employee and leader in carrying out their duties and obligations, including the ethics of relations between employees and BPDPKS.

Each year, BPDPKS always builds a culture of compliance with the Code of Ethics that applies to all ranks of the organization. This is completed through the socialization of BPDPKS Cultural Values to BPDPKS Employees through big BPDPKS events such as Employee Gatherings which are routinely carried out by BPDPKS in order to increase enthusiasm and cohesiveness at work.

Upaya Penegakan Kode Etik

Pedoman kode etik BPDPKS sebagai acuan perilaku bagi seluruh pegawai. Oleh karena itu, BPDPKS berupaya melakukan penegakan kode etik guna menciptakan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya, BPDPKS menganut pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Measures to Enforce the Code of Ethics

BPDPKS code of ethics guidelines as a behavioral reference for all employees. Therefore, BPDPKS seeks to enforce the code of ethics in order to create employee discipline in carrying out its main duties and functions, BPDPKS adheres to the guidelines set by the Government, which is Government Regulation No. 53 of 2010 regarding Civil Servant Discipline.

5.10 Kode Etik BPDPKS

BPDPKS Code of Ethics

Kode Etik berperan sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan etika bisnis dan kerja antar elemen di BPDPKS. Hal tersebut khususnya terkait hubungan yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan BPDPKS.

Dalam penerapannya, BPDPKS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai induk organisasi BPDPKS. Di samping itu, terdapat beberapa aspek yang disesuaikan, mengingat pegawai BPDPKS tidak hanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, melainkan juga banyak berasal dari profesional non Pegawai Negeri Sipil.

BPDPKS telah menerbitkan pedoman kode etik berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. KEP-628/DPKS/2019 tentang Kode Etik Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah disahkan dan mulai diterapkan pada akhir tahun 2019. Kode Etik tersebut mengarahkan pegawai dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan BPDPKS. Pegawai dapat dikenakan sanksi moral apabila melanggar kode etik yang telah berlaku.

Terkait Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal BPDPKS mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pokok Muatan Kode Etik

Isi pokok Kode Etik meliputi Etika Kerja dan Etika Bisnis yang merupakan tanggung jawab seluruh lini manajemen BPDPKS mencakup pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Komite di bawah Dewan Pengawas untuk berperilaku sesuai dengan budaya BPDPKS.

Nilai-Nilai Budaya BPDPKS

Nilai-nilai budaya BPDPKS merupakan landasan atas penyusunan Kode Etik BPDPKS, dimana nilai-nilai tersebut sebagai pedoman seluruh anggota BPDPKS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai- nilai dan budaya BPDPKS terdiri dari "integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan". Penjelasan yang lebih lengkap mengenai Nilai-Nilai dan Budaya BPDPKS telah diuraikan pada Bab Profil BPDPKS bagian Nilai-Nilai dan Budaya BPDPKS.

The Code of Ethics acts as a code of conduct that regulates the relationship between business and work ethics between elements in BPDPKS. This is especially related to relationships based on professionalism which are expected to continue provide added value to BPDPKS management process.

In its application, BPDPKS is guided by the Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.01/2018 regarding the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants within the Ministry of Finance as the parent organization of BPDPKS. In addition, there are several aspects that are adjusted, seeing that BPDPKS employees do not only originated from Civil Servants (PNS), but also many originate from professionals.

BPDPKS has issued a code of ethics guidelines based on the President Director's Decree No. KEP-628/DPKS/2019 regarding the Code of Conduct at Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit which has been ratified and began to be implemented at the end of the 2019. Code of Ethics It directs employees to behave and behave within the BPDPKS environment. Employees can be subject to moral sanctions if they violate the applicable code of ethics.

BPDPKS has issued a code of ethics guidelines based on the President Director's Decree No. KEP-628/DPKS/2019 regarding the Code of Conduct at BPDPKS which has been ratified and began to be implemented at the end of the 2019. Code of Ethics It directs employees to behave and behave within the BPDPKS environment. Employees can be subject to moral sanctions if they violate the applicable code of ethics.

Main Contents of the Code of Ethics

The main contents of the Code of Ethics include Work Ethics and Business Ethics which are the responsibility of all ranks of BPDPKS management including employees, Board of Directors, Supervisory Board, and Committees under the Supervisory Board to behave in accordance with BPDPKS culture.

BPDPKS Cultural Values

BPDPKS cultural values are the basis for the preparation of BPDPKS Code of Ethics, where these values serve as guidelines for all BPDPKS members in carrying out their duties and responsibilities. BPDPKS values and culture consist of "Integrity, Professionalism, Synergy, Service and Perfection". A more complete explanation of BPDPKS Values and Culture has been described in the BPDPKS Profile Chapter of BPDPKS Values and Culture section.

5.11 Whistleblowing System

Whistleblowing System

BPDPKS berkomitmen dalam penerapan best practice good governance guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemangku kepentingan serta risiko adanya pelanggaran peraturan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, BPDPKS telah menerapkan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) yang berfungsi sebagai media penyampaian pelanggaran (pengaduan) yang terjadi dan diketahui baik oleh stakeholders, karyawan, maupun pimpinan. Saat ini aplikasi WBS BPDPKS masih mengacu pada WBS Kementerian Keuangan.

WBS Kementerian Keuangan merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi individu yang memiliki informasi dan ingin melaporkan segala sesuatu tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penerapan WBS

Prosedur penyampaian laporan pelanggaran yang diterima akan diteruskan kepada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan/atau Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) yang merupakan pihak eksternal BPDPKS. Seluruh organ BPDPKS, yaitu Dewan Pengawas, Direksi,dan seluruh elemen maupun pegawai BPDPKS hingga pemangku kepentingan lainnya dapat melaporkan atas terjadinya tindak pelanggaran. Sedangkan pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran adalah Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Jenis pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan melalui mekanisme WBS berkaitan dengan dugaan korupsi, pencurian, kecurangan (fraud), praktik suap, gratifikasi, pembocoran rahasia BPDPKS, pelanggaran etika, pemerasan, penggelapan aset, penipuan, benturan kepentingan, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, tindakan yang melanggar hukum dan kebijakan prosedur perilaku melawan hukum, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BPDPKS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPDPKS.

BPDPKS is committed to implementing best practice good governance to ensure the protection of stakeholders' rights and the risk of violating regulations by certain parties. Therefore, BPDPKS has implemented a Whistleblowing System (WBS) application that functions as a medium for submitting violations (complaints) that occur and are known to stakeholders, employees, and leaders. Currently, the BPDPKS WBS application still refers to the Ministry of Finance's WBS.

Ministry of Finance's WBS is an application provided by the Ministry of Finance for individuals who have information and wish to report any violations that occur within the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

WBS Implementation

The procedure for submitting reports is, the violations received will be forwarded to the Compliance and Risk Management Division and/or the Inspectorate for Investigation (IBL) which is an external party to BPDPKS. All BPDPKS organs, namely the Supervisory Board, Board of Directors, and all elements and employees of BPDPKS to other stakeholders can report violations. Meanwhile, parties that can be reported as perpetrators of violations are the Supervisory Board, the Board of Directors, and all employees.

Types of Violations That Can Be Reported

Types of violations that can be submitted through the WBS mechanism relate to allegations of corruption, theft, fraud, bribery, gratification, leaking of BPDPKS secrets, ethical violations, extortion, embezzlement of assets, scam, conflicts of interest, unethical/ inappropriate acts, unlawful acts and unlawful conduct procedure policies, anonymous and independent which is used to optimize the participation of BPDPKS Personnel and other parties in disclosing violations that occur within the BPDPKS environment.

Media Komunikasi dan Penyampaian Laporan Pelanggaran

BPDPKS memiliki 3 (Tiga) media komunikasi sebagai sistem saluran WBS dalam penyampaian Laporan pelanggaran atau pengaduan dari stakeholders, yaitu:

Communication Media and Submission of Violation Reports

BPDPKS has 3 (tree) communication media as the WBS channel system in submitting violation reports or complaints from stakeholders, they are:

haicall

Call Center
Call Center

14090
https://hai.kemenkeu.go.id/

SIPANDU

https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/sipandu/

Surat
Letter

Gedung Graha
Mandiri Lt. 5
Jalan Imam Bonjol
No. 61 Menteng
10310

Perlindungan Bagi Pelapor

BPDPKS menempatkan mekanisme tindak lanjut atas setiap pengaduan atau penyingkapan pelanggaran dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah, serta profesionalisme. Sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan pelapor, BPDPKS mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK nomor 205/PMK.09/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan yang memperhatikan berbagai aspek penting guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pelapor dalam menyampaikan informasi, antara lain:

a. tingkat ancaman yang membahayakan Pelapor dan upaya nyata Tindakan Balasan;
b. Pelaporan Pelanggaran disampaikan melalui Saluran Pelaporan dan/atau disampaikan langsung kepada Pengelola;
c. rekam jejak Pelanggaran yang pemah dilakukan;
d. tingkat keandalan informasi yang disampaikan dalam mendukung proses pembuktian Pelanggaran;
e. tidak menjadi bagian dari Pelanggaran yang dilaporkan; dan
f. Pelapor tidak kehilangan hak perlindungan.

Protection for Whistleblowers

BPDPKS places the follow-up mechanism for every complaint or disclosure of violations by prioritizing the principles of confidentiality, presumption of innocence, and professionalism. As a commitment to protecting whistleblowers, BPDPKS refers to the regulations established by the Minister of Finance through PMK Number 205/PMK.09/2022 Year 2022 concerning the Management of Violation Reporting and Whistleblower Protection within the Ministry of Finance. This regulation considers various important aspects to ensure the safety and comfort of whistleblowers in providing information, including:

a. a. The level of threat endangering the whistleblower and concrete efforts to counteract retaliation;
b. Violation reports submitted through reporting channels and/or directly to the management;
c. The record of violations previously committed;
d. The reliability level of the information provided to support the evidence process of the violation;
e. The whistleblower is not part of the reported violation; and
f. The whistleblower does not lose the right to protection.

Pihak Pengelola Pengaduan

BPDPKS menempatkan mekanisme tindak lanjut atas setiap pengaduan atau penyingkapan pelanggaran dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah, serta profesionalisme. Sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan pelapor, BPDPKS telah menetapkan Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-28/DPKS/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing) dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai pedoman bagi BPDPKS dalam menindaklajuti dan mengelola setiap laporan yang masuk dengan memperhatikan memperhatikan berbagai aspek penting guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pelapor dalam menyampaikan informasi.

Complaint Management Division

BPDPKS has established a follow-up mechanism for every complaint or disclosure of violations by prioritizing the principles of confidentiality, the presumption of innocence, and professionalism. As a manifestation of its commitment to protecting whistleblowers, BPDPKS has issued Standard Operating Procedure Number SOP-28/DPKS/2020 dated June 10, 2020, regarding the Handling of Complaints (Whistleblowing) and Public Complaints within the Palm Oil Plantation Fund Management Agency. This SOP serves as a guideline for BPDPKS in following up and managing every incoming report while taking into account various important aspects to ensure the safety and comfort of whistleblowers in providing information.

Sosialisasi WBS

BPDPKS secara aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Whistleblowing System (WBS) serta sara pengaduan lainnya kepada pihak internal maupun eksternal sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pelaporan pelanggaran. Kegiatan ini bertujuan mendorong seluruh karyawan serta pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

Sosialisasi WBS kepada pihak internal dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kode etik pada tanggal 31 Juli 2024. Sementara itu, sosialisasi kepada pihak eksternal dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan Dinas Luar (DL) di masing-masing unit kerja, termasuk saat rapat koordinasi yang membahas berbagai program strategis seperti biodiesel, pungutan ekspor kelapa sawit, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia sawit, serta kegiatan terkait lainnya.

WBS Socialization

BPDPKS actively conducts socialization activities related to the Whistleblowing System (WBS) and other complaint channels for both internal and external parties as part of efforts to increase understanding and awareness of the importance of reporting violations. These activities aim to encourage all employees and other stakeholders to actively participate in reporting any form of violation, thereby minimizing the potential for violations in the future.The WBS socialization for internal parties was conducted alongside the code of ethics socialization on July 31, 2024. Meanwhile, socialization for external parties is carried out periodically through field activities (Dinas Luar) in each work unit, including during coordination meetings discussing various strategic programs such as biodiesel, palm oil export levies, smallholder palm oil rejuvenation, palm oil human resource development, and other related activities.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Whistleblowing System

BPDPKS secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan WBS di lingkungan organisasi.

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai pembina Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS. Hasil dari kegiatan ini kemudian disusun dalam bentuk laporan resmi yang disampaikan kepada Direksi BPDPKS, dengan harapan dapat mendorong peningkatan implementasi WBS secara berkelanjutan.

Monitoring and Evaluation of Whistleblowing System Implementation

BPDPKS routinely conducts monitoring and evaluation of the Whistleblowing System (WBS) at least once a year. This activity aims to ensure the effectiveness of WBS implementation within the organization.The monitoring and evaluation process is carried out by the Directorate General of Treasury (DJPB) headquarters office as the supervisor of the Public Service Agency (BLU) BPDPKS. The results of this activity are then compiled into an official report submitted to the BPDPKS Board of Directors, with the hope of encouraging continuous improvement in the implementation of the WBS.

Akses Informasi dan Data BPDPKS

Access BPDPKS information and data

BPDPKS merupakan unit organisasi non eselon berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, sehingga untuk segala bentuk Kebijakan mengenai keterbukaan informasi BPDPKS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan informasi Publik oleh Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tanggal 6 September 2019.

Sebagai bentuk perwujudan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, BPDPKS membuka akses informasi bagi para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Salah satu akses informasi BPDPKS adalah melalui situs web resmi yang dapat diakses di https://www.bpdp.or.id dalam dua bahasa yaitu, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BPDPKS senantiasa menyediakan informasi dan data yang terintegrasi , tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pengelolaan media informasi BPDPKS. Kebijakan tersebut dibentuk guna melindungi keamanan informasi serta memastikan informasi yang diberikan BPDPKS kepada pihak-pihak yang berkepentingan telah transparan, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPDPKS is a non-echelon organizational unit in the form of a Public Service Agency (BLU) that is responsible to the Minister of Finance, so that all forms of policies regarding information disclosure are guided by the Regulation of the Minister of Finance No. 129/PMK.01/2019 regarding Guidelines for Public Information Services by the Ministry of Finance's Management and Documentation Officer and the Ministry of Finance's Information and Documentation Management Officials Official dated September 6, 2019.

As an embodiment of the principle of transparency and compliance with laws and regulations related to information disclosure, BPDPKS opens access to information for stakeholders and the general public. One way to access BPDPKS information is through the official website which can be accessed through https://www.bpdp.or.id in two languages, Indonesian and English.

BPDPKS always provides integrated, timely, and targeted information and data in accordance with BPDPKS information media management policy. This policy was established to protect information security and ensure that the information provided by BPDPKS to interested parties is transparent, fair, and trustworthy in accordance with applicable regulations.

Media Informasi Dan Komunikasi

Akses informasi BPDPKS dapat dilakukan melalui media sebagai berikut :

Website BPDPKS https://www.bpdp.or.id
Disajikan dalam bahasa indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:

- Tentang BPDPKS dengan konten Profil Manajemen, Profil BPDPKS dan Program
- Publikasi dengan konten Media Rilis, Infografis, Kegiatan yang dilengkapi dengan Video
- Berita dengan konten berita seputar kegiatan BPDPKS
- Pengumuman dengan konten pengumuman Pengadaan, Hasil Pengadaan, Prospek Perusahaan, Info Lowongan Kerja dan berita lainnya.
- Tentang Sawit dengan konten Energi, Kesehatan dan Nutrisi serta Sawit Berkelanjutan
- Statistik
- Riset dengan konten tentang Riset Bidang Bioenergi, Biomaterial, Pangan dan Kesehatan, pasca Panen Pengolahan, Budidaya Lahan Tanah Bibit, Lingkungan serta Daftar Riset, Jurnal Riset dan Bidang Sosek/ Bisnis/Pasar/IT
- Regulasi Sawit.

Information and Communication Media

Access to BPDPKS information can be done through the following media:

Website BPDPKS https://www.bpdp.or.id
Presented in Indonesian and English and convey information about:

- About BPDPKS with contents of Management Profile, BPDPKS Profile and Program
- Publications with contents of Media Release, Infographics, Activities equipped with Videos
- News with content of BPDPKS activities
- Announcements with contents of Procurement announcements, Procurement Results, Company Prospects, Job Vacancies Info, and other news
- About Palm Oil with contents of Energy, Health and Nutrition, as well as Sustainable Palm Oil
- Statistics
- Research with contents of Research in the Fields of Bioenergy, Biomaterials, Food and Health, Post-Harvest Processing, Cultivation of Land for Soil Seeds, Environment and Research Lists, Research Journals and Social Affairs/Business/Market/IT Sector
- Palm Oil Regulations

Surat Edaran

BPDPKS menggunakan surat edaran sebagai salah satu media komunikasi yang digunakan dalam rangka menyampaikan keputusan, peraturan, pemberitahuan dan lain-lain.

Circular Letter

BPDPKS uses Circular Letter as one of the communication media used in order to convey decisions, regulations, notifications and others.

Forum Komunikasi Internal

BPDPKS menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi pegawai dengan manajemen yaitu sharing knowledge, siraman rohani, family gathering/ team building yang dilaksanakan setiap tahun dll.

Internal Communication Forum

BPDPKS provides a means of communication that becomes a medium of discussion for employees and management, including sharing knowledge, spiritual teachings, family gathering/ team building which is held every year, etc.

Laporan Tahunan

BPDPKS menyediakan sarana informasi melalui laporan tahunan yang menggambarkan kinerja BPDPKS. Laporan ini disusun setiap tahun dan disampaikan kepada seluruh stakeholders BPDPKS.

Annual Report

BPDPKS provides a means of information through Annual Report that describes the performance of BPDPKS. This report is prepared annually and submitted to all BPDPKS stakeholders.

Media Sosial

BPDPKS juga menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi. Saat ini BPDPKS memiliki 4 (empat) akun media sosial antara lain:

Social Media

BPDPKS also uses social media as a communication channel to convey information. Currently BPDPKS has 4 (four) social media accounts, including:

bpdpsawit

bpdpkelapasawit

BPDPkelapasawit

BLU BPDPsawit

bpdpsawit





Layanan Pendukung

Support services



6.1 Strategi Pengembangan SDM

Pengembangan Sumber Daya Manusia akan memberi manfaat kepada organisasi dan para pegawai itu sendiri. Instansi akan memperoleh manfaat berupa peningkatan kinerja, produktifitas, stabilitas dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah sedangkan untuk pegawai memperoleh manfaat meningkatkan kompetensi, potensi dan intelektual. Pengembangan SDM dapat agar para kemampuan pegawai dapat meningkat dalam rangka pemenuhan kinerja yang sesuai visi dan misi BPDPKS.

Langkah-langkah Peningkatan kinerja

A. Analisis STEP pada bpdpks

Dalam mencapai kinerja organisasi yang telah ditetapkan BPDPKS telah melakukan analisis terhadap faktor lingkungan eksternal yang meliputi:

a. Sosial Kultural
Faktor sosial meliputi semua faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dari stakeholder dan mempengaruhi ukuran pelayanan yang akan di berikan oleh BPDPKS
Contoh : beranekaragamnya budaya, kondisi lingkungan sosial serta tingkat pendidikan stakeholder BPDPKS.
b. Teknologi
Faktor teknologi meliputi semua hal yang dapat membantu dalam menghadapi tantangan dan mendukung efisiensi proses bisnis BPDPKS
Contoh : penggunaan teknologi yang sudah usang dalam perkebunan kelapa sawit, perubahan dalam ilmu pengetahuan dalam pengelolaan kepala sawit yang kecil dan teknologo komunikasi yang belum terintegrasi teknologi komunikasi antara pemangku kepentingan, pekebun dan BPDPKS.
c. Environment
Faktor lingkungan dapat digunakan ketika melakukan perencanaan strategis atau mencoba mempengaruhi keputusan stakeholder seperti faktor lokasi geografis.
Contoh: luasnya perkebunan kelapa sawit dari seluruh pulan Sumatera dan Kalimantan, beberapa provinsi di Sulawesi dan papua dan sedikit lahan di Provinsi Banten, sedangkan lokasi BPDPKS hanya berada di Ibukota Provinsi DKI Jakarta.
d. Politik
Faktor politik meliputi hukum yang berlaku, kebijakan pemerintah, dan aturan formal atau informal di lingkungan perusahaan Contoh : BPDPKS yang mempunya 8 komite pengarah sehingga masing-masing dari komrah tersebut mempunya aturan yang berbeda serta aturan-aturan yang sangat sering berubah dikarenakan dinamika politik.

6.1 Human Resource Development Strategy

Human Resource Development Benefits Human Resource Development will benefit both the organization and the employees themselves. The agency will gain benefits in the form of improved performance, productivity, stability, and flexibility to adapt to an ever-changing environment. Meanwhile, employees will benefit from enhanced competencies, potential, and intellect. Human Resource Development can be implemented so that employees' abilities can improve in order to fulfill performance that aligns with the vision and mission of BPDPKS

Performance Improvement Strategy Steps

A. STEP Analysis at BPDPKS

To achieve the established organizational performance, BPDPKS has conducted an analysis of external environmental factors including:

a. Socio-Cultural:
This includes all factors that can affect the needs of stakeholders and the size of services provided by BPDPKS. For example, the diversity of cultures, social environmental conditions, and the education level of BPDPKS stakeholders.
b. Technology:
This encompasses all aspects that can help in facing challenges and supporting the efficiency of BPDPKS's business processes. For example, the use of outdated technology in palm oil plantations, changes in scientific knowledge in small palm oil management, and communication technology not yet integrated among stakeholders, planters, and BPDPKS.
c. Environment:
Environmental factors are considered in strategic planning or when attempting to influence stakeholder decisions such as geographic location factors. For example, the extensive palm oil plantations across the islands of Sumatra and Kalimantan, several provinces in Sulawesi and Papua, and limited land in Banten Province, while BPDPKS is located only in the provincial capital, Jakarta.
d. Politics:
Political factors include applicable laws, government policies, and formal or informal rules within the company environment. For example, BPDPKS has 8 steering committees, each with different rules and regulations that frequently change due to political dynamics.

B. Analisis ekternal (Opportunitiest dan THREADS)

Berdasarkan analisis eksternal STEP tersebut maka terdapat Opportunitiest dan threads sebagai berikut:

a. Perubahan teknologi terintegrasi pada setiap layanan BPDPKS
b. Pembangunan single data base perkebunan kelapa sawit
c. Pelaksanaan Kemenkeu satu pada provinsi yang terdapat kelapa sawit
d. Pelaksanaan proses bisnis dengan perangkat teknologi informasi
e. Bergabunganya BPDPKS dengan Hai DJPb sehingga informasi layanan kepada stakeholder semakin luas dan terfokus
f. Pelaksanaan Zona Integritas pada BPDPKS
g. Pengutan peran BPDPKS terhadap tugas-tugas kelapa sawti yang berkelanjutan dari hulu sampai dengan hilir

Threads (Ancaman)

a. Seringnya peraturan yang berubah sehingga perlunya penyesuaian proses bisnis pada BPDPKS
b. SOTK BPDPKS yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi real pada BPDPKS
c. Pelaksanaan Flexible Working Space yang tidak responsive
d. Tingginya kebutuhan dana sehingga perlunya revisi (tidak tepatnnya antara perencanaan dengan realisasi)
e. Rendahnya komitmen mitra kerja dan pemangku kepentingan
f. Kurangnya informasi tugas dan fungsi BPDPKS

C. Analisis internal BPDPKS

BPDPKS telah melakukan analisis Internal dengan menggunakan Kerangka VRIO (Values, Rarity, Imitability dan Organization), dengan menganalisa sumber daya internal dari BPDPKS dan kemampuan untuk mengetahui apakah BPDPKS perusahaan dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dalam analisa VRIO, BPDPKS telah menganalisa sebagai berikut:

B. External Analysis (Opportunitiest and THREADS)

Based on the external STEP analysis, there are opportunities and threats as follows:

a. Integration of technology in every BPDPKS
b. service.
Development of a single database for palm oil
c. plantations.
Implementation of Kemenkeu satu in provinces
d. with palm oil presence.
Execution of business processes with information
e. technology devices.
BPDPKS's integration with Hai DJPb, thus broadening and focusing information service to
f. stakeholders.
g. Implementation of Integrity Zones at BPDPKS.
Strengthening BPDPKS's role in sustainable palm oil tasks from upstream to downstream.

Threads

a. Frequent regulatory changes necessitating business process adjustments at BPDPKS.
b. BPDPKS’s structure not aligning with the real implementation of tasks and functions.
c. Implementation of a non-responsive Flexible Working Space.
d. High funding needs necessitating revision (misalignment between planning and realization).
e. Low commitment from work partners and stakeholders.
f. Lack of information about BPDPKS's tasks and functions.

C. Internal Analysis at BPDPKS

BPDPKS has conducted an internal analysis using the VRIO Framework (Value, Rarity, Imitability, and Organization) to analyze internal resources and capabilities to determine if BPDPKS can be a source of sustainable competitive advantage. In the VRIO analysis, BPDPKS evaluated the following:

Values
Bagian values menjelaskan apakah sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh BPDPKS untuk merespon atas peluang dan ancaman dari lingkungan. Untuk menjadi kekuatan, harus memungkinkan perusahaan mengeksploitasi kesempatan atau meminimalisasi ancaman, demikian sebaliknya untuk kelemahan. Perubahan cita rasa pelanggan (perubahan komunikasi dampak pandemic covid 19), struktur industri kelapa sawit, atau teknologi dapat membuat sumber daya dan kapabilitas BPDPKS menjadi kurang bernilai. Yang perlu dilakukan BPDPKS adalah memanfaatkan kekuatan organisasi serta menerapkan kekuatan di dalam cara baru.

Rarity
Dalam hal framework VRIO dalam pertanyaan rarity, poin sumber daya yang paling unggul adalah pertanyaan ini. Hal ini dikarenakan BPDPKS merupakan satu-satunya Satuan kerja Badan layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh pemerintah yang tugasnnya melakukan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sehingga dalam hal "rarity" BPDPKS tidak mempunyai competitor yang menjadi halangan dalam melaksanakan tugas dan proses bisnisnya.

Imitability
BPDPKS merupakan satu-satunya BLU yang mempunyai tugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit dari hulu sampai dengan hilir yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat secara umum. Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak ada organisasi atau perusahaan yang menjadi pesangin. BPDPKS dalam menjalankan tugas dan fungsinnya masih memerlukan dana yang cukup besar akan tetapi dalam sosial masyarakat belum mengetahui keunggulan kompetitif BPDPKS dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat kelapa sawit.

Organization
Struktur organisasi pada BPDPKS sesuai dengan PMK nomor 113/PMK.01/2015 saat ini sangat tidak susai dengan tugas dan fungsi secara real, hal ini karenakan selama hamper 8 tahun dari munculnya PMK terkait SOTK BPDPKS mengalamu dinamika perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPDPKS. Hal ini mengakibatkan tidak imbangnya antara divisi dalam melaksanakantan tugas dan fungsi yang baru. Sudah usangnya struktur organisasi membuat sistem control manajemen dan struktur pelaporan formal pada BPDPKS sangat mempengaruhi dalam menjalankan keunggulan kompetitif pelayanan kepada stakeholder.

Value
Determines whether the resources and capabilities BPDPKS possesses respond to opportunities and threats from the environment. To be a strength, it must allow the company to exploit opportunities or minimize threats. Changes in customer preferences (communication changes due to the COVID-19 pandemic), the structure of the palm oil industry, or technology may make BPDPKS's resources and capabilities less valuable. BPDPKS needs to utilize organizational strengths and apply them in new ways.

Rarity
In terms of the VRIO framework, the key question of resource rarity is crucial. BPDPKS is the only Public Service Agency (BLU) formed by the government to manage palm oil plantation funds, which in terms of "rarity" means BPDPKS has no competitors that hinder its operations and business processes.

Imitability
BPDPKS is the only BLU tasked with managing palm oil plantation funds from upstream to downstream with the goal of generally enhancing community welfare. No organization or company competes in the execution of these tasks and functions. Although BPDPKS still requires significant funding, the community is not yet aware of BPDPKS's competitive advantages in performing its tasks and service functions.

Organization
The organizational structure at BPDPKS, as per PMK number 113/PMK.01/2015, is currently not well-aligned with the actual tasks and functions, mainly due to the nearly 8 years of policy changes affecting BPDPKS's operations. This results in an imbalance among divisions in carrying out new tasks and functions. The outdated organizational structure significantly affects management control systems and formal reporting structures at BPDPKS, influencing its competitive service advantages

Dari kerangka analisa VRIO tersebut maka terdapat kekuatan (Strengthen) dan Kelemahan (weakness) pada BPDPKS, antara lain:

HR Competence Analysis for BPDPKS based on the VRIO framework outlined :

No	Implikasi kompetitif Competitive Implications	Sumberdaya Resources	S/W
1	Values	mempunyai value sawit BAIK (Bersih, Akuntabel, Integritas dan kesempurnaan) yang sangat sejalan dengan nilai -nilain Kementerian keuangan. *Palm Oil Values (BAIK - Clean, Accountable, Integrity, and Perfection): These values are highly aligned with the principles of the Ministry of Finance.*	Strengthen
		Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berupa ASN (PNS dan non PNS (tenaga professional) yang sangat dapat di handalkan *Reliable Human Resources (HR) comprising of ASN (both civil servants and non -civil servants, professional staff) who are highly dependable.*	Strengthen
		Memiliki teknologi yang baik dan terintegrasi *Advanced and Integrated Technology posses good and integrated technological resources*	Strengthen
		Kondisi sosial di masyarakat kelapa sawit yang sangat sering berubah (dinamis) dan BPDPKS kurang mengnali stakeholder yang dilayani *Dynamic Social Conditions in the Palm Oil Community with BPDPKS having limited recognition of the stakeholders it serves.*	weakness
		Tidak adanya aturan internal pada BPDPKS yang mengatur disiplin pegawai *Lack of Internal Regulations at BPDPKS governing employee discipline.*	weakness
2	*Rarity*	Organisasi pengelola dana kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah sehingga mendapat dukungan penuh pemerintah Indoensia *Unique Position as the Palm Oil Fund Management Organization in Indonesia formed by the government, thus receiving full support from the Indonesian government.*	Strengthen
		Kurang terinfonnya tugas dan fungsi BPDPKS kepada Masyarakat *BPDPKS's roles and functions are not well communicated to the public.*	weakness
3	*Imitability*	BPDPKS yang berberbrntuk Badan Layanan Umum yang sangat fleksibel dalam mengelola keuangan *Flexible financial management by BPDPKS*	Strengthen
		Memiliki Dana yang besar untuk selalu memberikan perbaikan dalam pelayaanan kepada *satke holder* *Significant funds for service improvement continually improve services to stakeholders.*	Strengthen
4	Organization	Struktur organisasi yang belum sempurna karena adanya dinamika tambahan tugas pada BPDPKS. *Imperfect organizational structure due to the dynamics of additional tasks at BPDPKS.*	weakness
		Masih adanya rangkat Jabatan di BPDPKS *Problematic double position in BPDPKS*	weakness
		Banyak jabatan yang kosong sehingga pejabat yang ada menjalankan tusi yang sangat banyak dan tidak focus *Many vacant positions leads to existing officials handling multiple duties, which dilutes focus*	weakness
		IT yang terintegrasi dan data single database kelapa sawit *Integrated IT and Single Database for Palm Oil: Possesses integrated IT capabilities and a unified database for palm oil, which is a strength.*	Strengthen
		Belum adanya pembobotan tanggung jawab Kinerja sesuai dengan kompetensi dan Pendidikan *Lack of performance responsibilities according to competence and education.*	weakness
		Belum adanya kepastian status kepegawaian pada BPDPKS yang terkait dengan implementasi PP 49 tahun 2018 *Uncertainty of employment status related to the implementation of Government Regulation No. 49 of 2018 at BPDPKS.*	weakness

6.2 Pengelola SDM

Struktur Pengelola SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015, pengelolaan fungsi SDM BPDPKS dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia & Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur Pengelola SDM BPDPKS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

6.2 Human Resource Management (HRM)

HR Management Structure

Based on the Minister of Finance Regulation No. 113/PMK.01/2015, the HR management function in the BPDPKS is carried out by the Human Resource & General Affairs Division, which is directly responsible to the Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management 2024. BPDPKS's HR Management Structure is as follows:



Profil Pegawai BPDPKS

BPDPKS Employees Profile

Jumlah Pegawai BPDPKS
Number of BPDPKS Employees

Keterangan Description	Pertumbuhan YoY (%) Growth YoY (%)	2024	2023	2022	2021
Jumlah Karyawan | Number of Employees	(1)	114	113	106	85

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based on Education Level

Pendidikan | Education	(%) Persentase | Percentage	2024	2023	2022	2021
S3	2,63%	3	1	1	1
S2	22,81%	28	26	25	22
S1	57,02%	65	64	64	49
D4	3,51%	4	4	2	-
D3	8,77%	10	8	8	7
D2	0,88%	1	1	1	1
D1	0,88%	1	1	1	3
SMA	3,51%	4	4	4	2
Total	100,0%	114	113	106	85

*disajikan kembali | restated

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi
Employee Composition Based on Organizational Level

Jabatan | Position	(%) Persentase | Percentage	2024	2023	2022	2021
Direksi | Board of Directors	4,39%	5	4	4	5
Kepala Divisi | Head of Division	12,28%	14	13	12	9
Staf | Staff	83,33%	95	96	90	70
Total	100%	114	113	106	84

*disajikan kembali | restated

BPDPKS berkomitmen untuk menjamin tidak adanya tindak diskriminasi dalam lingkungan kerja, sehingga BPDPKS mampu menciptakan perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dengan demikian BPDPKS telah berusaha melaksanakan proses pengelolaan SDM yang berdasar pada aspek kemampuan (competency) dan kinerja (performance) yang sejalan dengan aspek keadilan (fairness) .

Proses Rekrutmen yang Berkualitas

BPDPKS melaksanakan proses rekrutmen yang bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas dan berkompeten yang sejalan dengan Rencana Bisnis Anggaran BPDPKS. BPDPKS senantiasa berupaya menempatkan setiap orang di tempat dan fungsi yang tepat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan terus berkembang secara berkelanjutan. Kebijakan BPDPKS mengenai proses rekrutmen telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur Nomor SOP-28/DPKS.1.2/2019 bulan September 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Pegawai.

Proses Rekrutmen yang dilaksanakan BPDPKS bersifat terbuka serta menjunjung tinggi asas profesionalisme yang dilakukan dengan berdasar kepada analisa kebutuhan pegawai. BPDPKS membuka kesempatan yang sama bagi seluruh kandidat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun gender selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Adapun proses rekrutmen sebagai berikut:
1. Penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja
2. Pembentukan panitia seleksi
3. Penunjukan / bekerja sama dengan pihak ketiga penyelenggara rekrutmen
4. Pengumuman di surat kabar nasional dan website kantor
5. Verifikasi / seleksi administrasi
6. Tes Tertulis assessment
7. Tes wawancara oleh Direksi
8. Pengumuman kelulusan
9. Penetapan

BPDPKS is committed to ensuring that there are no acts of discrimination in the work environment, so that BPDPKS is able to create fair and honest treatment in encouraging employees according to their respective potential, abilities, experience, and skills to achieve maximum performance. Thus, BPDPKS has tried to implement a human resource management process based on aspects of competence and performance that are in line with aspects of fairness.

Qualified Recruitment Process

BPDPKS carries out a recruitment process that aims to obtain qualified and competent employees in line with the BPDPKS Budget Business Plan. BPDPKS always strives to place everyone in the right place and function, so as to create quality human resources and continue to develop in a sustainable manner. The BPDPKS policy regarding the recruitment process has been regulated in Standard Operating Procedure No. SOP-28/DPKS.1.2/2019 in September 2019 regarding Standard Operating Procedures for Recruitment, Selection, and Placement of Employees.

BPDPKS recruitment process is open and upholds the principle of professionalism which is carried out based on an analysis of employee needs. BPDPKS opens equal opportunities for all candidates regardless of ethnicity, religion, race or gender as long as they meet the requirements that have been set.

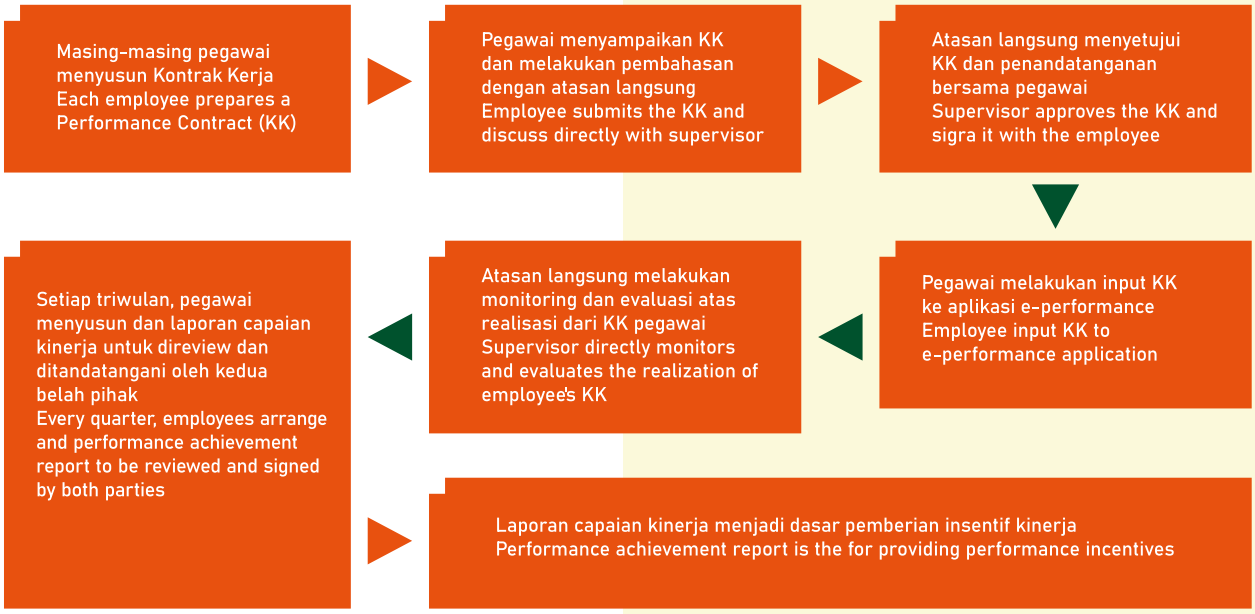
As for the recruitment process are as follows:
1. Preparation of employee needs based on workload analysis
2. Formation of the selection committee
3. Appointment/collaboration with third party recruitment organizers
4. Announcements in national newspapers and office websites
5. Administration verification/selection
6. Assessment Written Test
7. Interview test by the Board of Directors
8. Admission Announcement
9. Stipulation

Sistem Manajemen Kinerja BPDPKS

Dalam rangka melakukan evaluasi produktivitas kinerja pegawai, BPDPKS melakukan penilaian atas pencapaian kinerja pegawai. Sebagai pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja pegawai dalam rangka mencapai tujuan BPDPKS secara efektif dan efisien, BPDPKS telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja berbasis digital dengan menggunakan aplikasi E-Performance. Pengukurankinerjadi BPDPKSdilaksanakanberdasarkan prinsip obyektivitas dan keadilan. Sistem penilaian yang dibentuk melalui aplikasi E-Performance ini akan dapat diketahui pegawai dengan kinerja yang tinggi dengan pegawai dengan kinerja yang rendah. Penilaian kinerja mengukur pencapaian pegawai terhadap target individu yang merupakan turunan dari sasaran/target BPDPKS. Target individu pegawai ditetapkan atasan langsung di awal tahun, sebagai turunan dari target/sasaran atasannya dan sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) Direktorat. Kebijakan mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-608/DPKS/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Sistem Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tahapan Penilaian Kinerja Pegawai BPDPKS adalah sebagai berikut:

BPDPKS Performance Management System

In order to evaluate employee performance productivity, BPDPKS evaluates employee performance achievements. As a guideline for measuring employee performance achievement in order to attain BPDPKS goals effectively and efficiently, BPDPKS has established a digital-based Performance Management System using the E-Performance application. Performance measurement in BPDPKS is carried out based on the principles of objectivity and fairness. TThe assessment system formed through the E-Performance application will be able to identify employees with high performance and employees with low performance. Performance appraisal measures the achievement of workers against individual targets which are derivatives of BPDPKS targets. Individual employee targets are set with superiors at the beginning of the year, as a derivative of the targets of their superiors, and in accordance with the Directorate's Key Performance Indicators (KPI). The policy regarding Employee Performance Assessment is stipulated in the President Director's Decree No. KEP-608/DPKS/2019 dated December 31, 2019 regarding the Performance Management System within Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit environment. The stages of BPDPKS Employee Performance Assessment are as follows:



Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan pimpinan pemberian reward dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian punishment seperti surat peringatan, penundaan kenaikan grading, demosi, penurunan grading sampai pemutusan hubungan kerja.

The results of the assessment become the basis for deliberation for giving rewards and employee career development such as promotions, rotations, increasing remuneration and so on, as well as being the basis for giving punishments such as warning letters, postponement of promotions, demotions, transfers, to termination of employment.

Program Pengembangan Kompetensi

Program Pengembangan Kompetensi Program pengembangan kompetensi BPDPKS telah disusun dengan menerapkan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) sangat terencana, sistematis dan terfokus yang sejalan dengan upaya perkembangan bisnis BPDPKS. Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan salah satu program pengembangan kompetensi utama yang telah dilaksanakan oleh BPDPKS secara konsisten guna mendukung proses pemeliharaan dan peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai BPDPKS diharuskan untuk memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang baik serta sesuai dengan kebutuhan posisi jabatannya. Sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja, BPDPKS memberikan kesempatan kepada setiap pejabat dan pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang berupa pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), seminar dan sejenisnya sesuai dengan tupoksi yang ada pada masing-masing unit (Direktorat dan Divisi). Selama tahun 2024, BPDPKS telah melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai, sebagai berikut:

Competency Development Program

Competency Development Program of BPDPKS has been prepared by applying Learning Needs Analysis (AKP) well, systematically, and focused on BPDPKS business development efforts. Education and training program (Diklat) is one of the main competency development programs carried out by BPDPKS consistently in order to support HR nurturing and improvement. Every employee of BPDPKS is required to have good ability, expertise, and competency as well as fitting to his/her position needs. As an effort to improve work ability and skill, BPDPKS provides an opportunity to every official and employee who have met the requirements to participate in an education/training in the form of education and training (diklat), technical guidance (bimtek), seminars and so on according to the tasks and functions of each unit (Directorate and Division). Throughout 2024, BPDPKS has carried out competency training and development as follows:

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta
1	FGD Agent Hai Call Center	9 - 11 Januari 2024	Bandung	Hai DJPB	26 Orang
2	Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	28 Februari - 1 Maret 2024	Jakarta	BPDPKS	3 Orang
3	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Level Dasar	18 Maret - 1 April 2024	Jakarta	YPIA	3 Orang
4	Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	19 - 22 Maret 2024	Jakarta	Kanaka	6 Orang
5	Kegiatan Induksi dan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Interbal Job Vacancy Ditjen Perbendaharaan Tahun 2024	14 - 21 Februari 2024	Jakarta	DJPB	1 Orang
6	Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1 Angkatan III Tahun 2024	22 - 25 April 2024	Bogor	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan	10 Orang
7	FGD Penyusunan Strategi Komunikasi dan Finalisasi Annual Report Tahun 2024	27 - 30 Mei 2024	Medan	BPDPKS	24 Orang
8	Pelatihan DTS GTA Online dengan tema Data Science Fundamental	13 - 17 Mei 2024	Jakarta	Kominfo	1 Orang
9	Pelatihan Sertifikasi Qualified Management Officer (QRMO)	20 - 22 Mei 2024	Jakarta	PPM Manajemen	2 Orang
10	Kegiatan In-House Training : How to be a Professional Secretary bagi Sekretaris Pimpinan di Lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun 2024	17 - 19 Mei 2024	Jakarta	Sekretaris Ditjen Perbendaharaan	2 Orang

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta
11	Pelatihan Corporate Governance (SPI) BLU	30 Juni - 5 Juli 2024	Bogor	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	2 Orang
12	Pelatihan Profesional Public Speaking	11 - 13 Juli 2024	Jakarta	BPDPKS	9 Orang
13	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	7 - 11 Juli 2024	Bogor	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	10 Orang
14	Basic Financial Accounting Online Course	31 Agustus - 23 November 2024	Online	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	2 Orang
15	Pelatihan Audit Kecurangan (*Fraud Audit*)	22 - 29 Agustus 2024	Online	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan	1 Orang
16	Tahap Presentasi dan Ujian Sertifikasi dalam rangka keikutsertaan HAI DJPB dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024	19 - 21 Agustus 2024	Jakarta	DJPB	1 Orang
17	Business Leadership Session-Building High Performance Teams : Ambidextrous Leadership in Action	16 Agustus 2024	Online	BPDPKS	20 Orang
18	Workshop Fotografi dan Videografi BPDLH	15 Agustus 2024	Jakarta	BPDLH	2 Orang
19	Pelatihan Perhitungan Gas Rumah Kaca dan Karbon Trading	2 - 4 September 2024	Kalarta	BPDPKS	7 Orang
20	Treasury Human Resources Summit 2024	11 - 13 September 2024	Jakarta	DJPB	1 Orang
21	Pelatihan dan Sertifikasi Digital Arsip level BNSP	22 - 25 Oktober 2024	Bogor	BPDPKS	20 Orang
22	Pelatihan dan Sertifikasi Legal Drafting dan Sertifikasi Ahli Perancangan Kontrak	3 - 12 Desember 2024	Jakarta	BPDPKS	3 Orang
23	Pelatihan Jarak Jauh Manajemen Keberlangsungan Bisnis di BDK Makassar	21 Oktober - 8 November 2024	Online	BPPK Kemenkeu	1 Orang
24	Pelatihan Penulisan Press Release	18 November 2024	Jakarta	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	2 Orang
25	Pelatihan Coffe Talk Session "Seeing the Unseen Enemies : Crucial Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Cyber Fraud"	22 November 2024	Online	BPDPKS	1 Orang
26	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM melalui Penguatan Skill Public Speaking (Advance)	25 - 26 November 2024	Jakarta	BLU SMI Kemenkeu	2 Orang
27	Pelatihan "Leaders Lead - Unlocking the Secrets of Enterpreneurial Marketing"	28 November 2024	Online	BPDPKS	3 Orang

Program Kesejahteraan Pegawai

BPDPKS berupaya untuk memenuhi kesejahteraan pegawai melalui beberapa aspek antara lain :

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Bonus
4. Jaminan kesehatan

Employee Welfare Program

BPDPKS strives to fulfill employee welfare through several aspects, including:

1. Salary
2. Allowance
3. Bonus
4. Health insurance

Tingkat Perpindahan Pegawai

Tingkat perpindahan pegawai yang keluar dari BPDPKS dengan berbagai sebab antara lain pengunduran diri secara sukarela, kinerja di bawah target, pelanggaran disiplin, dan pensiun serta mutasi/pindah tugas. Berikut adalah tabel turnover BPDPKS selama tahun 2024:

Employee Rate

The rate of employee turnover who depart BPDPKS for various reasons, including voluntary resignation, below-target performance, indiciplinary, retirement, and job transfers. The following are the BPDPKS employee turnover table for 2024:

Tingkat Perpindahan Pegawai
Employee Turnover Rate

Jumlah Perputaran Pegawai | Total Employee Turnover	2024	2023	2022	2021
Atas permintaan sendiri | At their own request	1	1	-	-
Kinerja di bawah target | Performance below target	-	-	-	-
Pindah tugas / mutase | Moving assignment/transfer	2	6	3	14
Pelanggaran disiplin | Indiciplinary	-	-	-	-
Pensiun | Retiring	2	3	1	2
Sebab lain | Other Causes	-	-	-	-



6.3 Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement of Goodsand Services

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, BPDPKS senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip good governance senantiasa diimplementasikan dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa, guna menjamin proses pengadaan barang dan jasa yang sehat, fleksibel, cepat, efektif dan efisien agar mampu memaksimalkan segala momentum dan peluang bisnis yang ada.

In carrying out all its activities, BPDPKS always strives to implement Good Governance, including in the process of procuring goods and services. The principle of good governance is always implemented in the entire process of procurement, in order to ensure a healthy, fexible, fast, effective, and efficient procurement process in order to be able to maximize all existing business momentum and opportunities.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

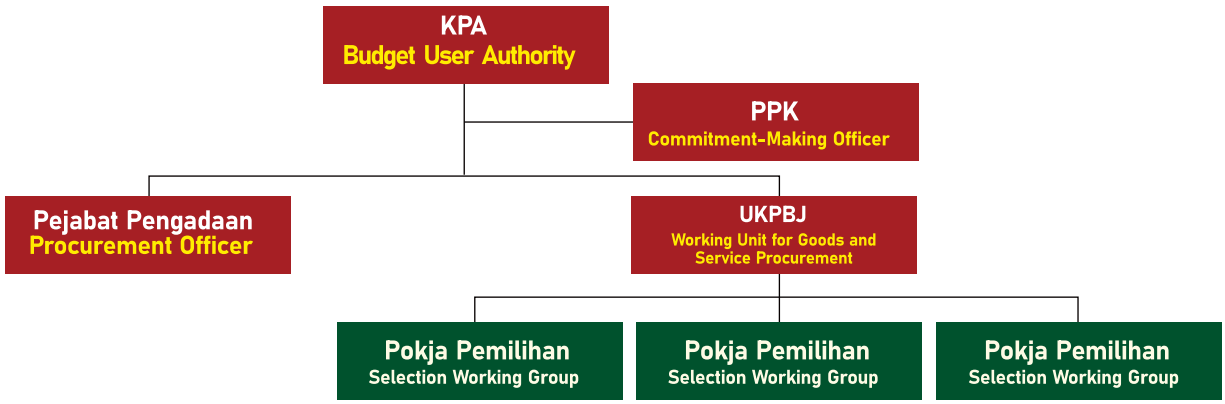
Kebijakan internal terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa, BPDPKS mengacu pada Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 06/DPKS/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan dan tata cara Pengadaan Barang / Jasa di lingkup BPDP Kelapa Sawit.

Policy on the Procurement of Goods/Services

Internal policies related to the Procurement of Goods and/or Services of BPDPKS refer to the Regulation of the President Director of BPDPKS No. 06/DPKS/2018 regarding Guidelines for the Procurement of Goods/ Services at the Public Service Agency of Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. This regulation regulates the provisions and procedures for the Procurement of Goods/Services within the scope of BPDPKS.

Struktur Perangkat Pengadaan Barang/Jasa

Structure of Goods/Services Procurement Equipment



Tugas dan Kewenangan UKPBJ BPDPKS

- Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai :
  - jasa konsultansi dan/atau konstruksi yang bernilai diatas 50 juta s.d. paling tinggi 300 juta rupiah;
  - barang dan/atau jasa lainnya yang bernilai diatas 50 juta s.d. paling tinggi 500 juta rupiah;
- Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Penujukan Langsung untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas 50 juta rupiah;
- Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Tender untuk paket pekerjaan barang dan/ atau jasa lainnya dengan nilai diatas 500 juta rupiah
- Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Tender untuk paket pekerjaan Kontruksi dengan nilai diatas 300 juta rupiah
- Melaksanakan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Seleksi untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas 300 juta
- Menetapkan Penyedia untuk metode pemilihan :
  - Tender/Seleksi/Penujukan Langsung/Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan Barang/Jasa Lainnya/Konstruksi/jasa konsultansi dengan nilai diatas 50 juta s.d. 10miliar rupiah.

Prinsip PengadaanBarang/Jasa BPDPKS

Pengadaan Barang dan Jasa di BPDPKS dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- Efisien dan Efektif
- Transparan dan Terbuka
- Bersaing, Adil dan Akuntabel

Mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa BPDPKS

1. Pemilihan Penyedia :
   - Metode Pengadaan Langsung
   - Metode Penunjukan Langsung
   - Metode Tender/Seleksi
   - Metode Epurchasing
2. Swakelola :
   - Swakelola Type I
   - Metode Type II
   - Metode Type III
   - Metode Type IV

Duties and Authorities of UKPBJ BPDPKS

- Implement provider selection mechanism through Direct Procurement method for work packages with values:
  - Consultation and/or construction services valued above 50 million up to a maximum of 300 million Rupiah;
  - Other goods and/or services valued above 50 million up to a maximum of 500 million Rupiah;
- Implement provider selection mechanism through Direct Procurement method for work packages with values above 50 million Rupiah;
- Implement provider selection mechanism through the Tender method for work packages of goods and/or other services with values above 500 million Rupiah;
- Implement provider selection mechanism through the Tender method for work packages of Construction with values above 300 million Rupiah;
- Implement provider selection mechanism through the Tender method for work packages of Consultation with values above 300 million Rupiah;
- Establish Provider for the selection method of:
  - Tender/Selection/Direct Appointment/Direct Procurement for work packages of Goods/Other Services/Construction/Consultation services with values above 50 million up to 10 billion Rupiah.

Principles of Procurement of Goods/ Services BPDPKS

The principles of goods and services procurement at BPDPKS are as follows:

- Efecient and Effective
- Transparent and Open
- Competitive, Fair, and Accountable

BPDPKS Goods/Services Procurement Mechanism

The mechanism for the procurement of BPDPKS goods/ services consists of:

1. Selection of Providers:
   - Direct Procurement Method
   - Direct Appointment Method
   - Tender/Selection Method
   - E-purchasing Method
2. Self-management:
   - Self-management Type I
   - Type II Method
   - Type III Method
   - Type IV Method

6.4 Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System

Sebagai upaya dalam menjamin kesesuaian mutu dan kualitas dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan para stakeholder, BPDPKS menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPDPKS strives to maintain the quality of its business processes through the fulfillment of quality conformity as well as the quality of processes and products to the needs of stakeholders. The implementation of BPDPKS quality management system refers to the Financial Management Pattern of the Public Service Agency using the Minimum Service Standards (SPM) in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 80/PMK.05/2016 regarding Minimum Service Standards for Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BPDPKS

Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan Pengadaan
2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
3. Pelaksanaan Kontrak
4. Serah Terima Hasil Pekerjaan
5. Penyelesaian Pembayaran Pekerjaan

BPDPKS Goods/Services Procurement Activities

The process of procurement of goods/services is carried out through the following stages:
1. Procurement Preparation
2. Selecting Provider
3. Contract Execution
4. Handover of Work Results
5. Work Payment Completion

Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Selama tahun 2024, Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang dan jasa yang sudah terselesaikan dalam memenuhi kebutuhan operasi BPDPKS adalah sebagai berikut:

Goods and Services Procurement Activities

During 2024, the total number of packages for procurement of goods and services that have been completed in meeting the operational needs of BPDPKS are as follows:

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa
Number of packages for procurement of goods and services

Metode Pelelangan Auction Method	Jumlah Amount
Pengadaan Langsung Direct Procurement	221
Penunjukan Langsung Direct Appointment	212
Tender / Seleksi Tender / Selection	6
E-Purchasing	58
Pembelian Langsung Direct Buying	44

SPM merupakan pedoman BPDPKS dalam memberikan layanan masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan dana dan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilakukan BPDPKS. Dalam pelaksanaan SPM Dewan Pengawas melakukan monitoring terhadap pengelolaan BPDPKS yang dilakukan oleh Direksi.

Kebijakan terkait Sistem Pelayanan Minimum BPDPKS, meliputi:
- Pengelolaan Dana;
- Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;
- Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya;
- Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;
- Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan
- Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtanggaan.

Tujuan Sistem Pelayanan Minimum BPDPKS, antara lain:
- Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan; dan
- Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan serta pengembangan BPDPKS telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pemantauan yang digunakan BPDPKS mencakup kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima layanan. Pelaksanaan pemantauan meliputi:
- Membandingkan layanan yang diberikan dengan indikator SPM yang ditetapkan;
- BLU BPDPKS yang berkoordinasi dengan unit/lembaga terkait;
- Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala.

Selanjutnya untuk melihat pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPDPKS, maka dilakukan evaluasi meliputi secara berkala dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan BPDPKS.

SPM is BPDPKS guideline in providing community services for the implementation of fund management and sustainable palm oil development. In implementing SPM, the Supervisory Board monitors the management of BPDPKS carried out by the Board of Directors.

Policies related to BPDPKS Minimum Service System, include:
- Fund Management;
- Human Resources Development Funds Disbursement;
- Research and Development Fund Disbursement s;
- Palm Oil Promotion Funds and Its Derivatives Disbursement;
- Plantation Rejuvenation Funds Disbursement;
- Plantation Facilities and Infrastructure Funds Disbursement;
- Biodiesel Financing Funds Disbursement; and
- Implementation of General Affairs and Household Affairs.

The objectives of BPDPKS Minimum Service System include:
- Ensuring the procedures for the implementation of BPDPKS management funds in a transparent and accountable manner in accordance with the provisions of the legislation;
- Ensuring the fulfillment of service quality in the implementation of sustainable palm oil development fund management; and
- Ensuring the consistency of planning, implementation, monitoring, and evaluation of the implementation of sustainable palm oil development fund management.

Monitoring and Evaluation

In order to ensure that the implementation of services and development of BPDPKS are in accordance with the established standards, monitoring is carried out. The monitoring method includes field visits, documentation studies, and meetings with service providers and recipients. The monitoring includes:
- Comparing the services provided with the established MSS indicators;
- BLU BPDPKS in coordination with related units/ institutions;
- Monitoring is carried out periodically.

Afterward, periodic evaluations are conducted to see the achievements and impacts of the programs carried out based on the results of monitoring in order to improve the performance of BPDPKS. The evaluation was conducted by means of field visits, interviews, observations, and documentation studies. The results of this evaluation are used as input in order to improve the performance of BPDPKS services.

6.5 Teknologi Informasi
Information Technology

Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional dan keamanan pengolahan data dan informasi. Selain itu, pengelolaan Teknologi Informasi yang baik dan benar juga mampu menciptakan proses bisnis yang efektif dan efisien. Hal ini mendorong BPDPKS untuk senantiasa memanfaatkan Teknologi Informasi guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi dimasa yang akan datang.

Information Technology (IT) is another important aspect that supports operational activities and security of data and information processing. IT reliability also influences the effectiveness and efficiency of business management and decision making at BPDPKS. This encourages BPDPKS to always use Information Technology to provide the best service and minimize business operational risks faced in the future.

BPDPKS terus berupaya melaksanakan pengelolaan teknologi informasi secara optimal melalui penyusunan dan penerapan Roadmap IT yang telah didesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya.

BPDPKS continues to strive to optimally manage information technology through the preparation and implementation of an IT Roadmap that has been designed up to the level of data and security systems.

Pengelolaan Informasi

Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi BPDPKS dikelola oleh Divisi Umum dan SDM yang dipimpin oleh Bapak Adi Sucipto dengan dibantu oleh 5 (Lima) orang pegawai.

Information Management

The Information Technology Management function of BPDPKS is managed by the General Affair and HR Division led by Mr. Adi Sucipto, assisted by 5 (Five) employees.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Sistem Informasi

- Mengkoordinir, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan transaksi elektronik yang terintegrasi dan mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
- BPDPKS;
  Mengkoordinir penyiapan data/informasi yang dibutuhkan baik untuk kepentingan pencatatan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh BPDP Sawit maupun untuk menunjang kebutuhan
- laporan kepentingan internal maupun eksternal;
  Menyiapkan dan operasional terhadap perangkat keras / cloud server terhadap aplikasi-aplikasi dan sistem untuk dapat diakses oleh publik, dan
- para stakeholder
  Membuat dan menganalisa atas permintaan kebutuhan teknologi informasi pada setiap unit
- BPDPKS
  Membuat dan supporting terdadap penyiapan Hybrid Video Conference, dan desain media
- marcom (marketing communication);
  Pengembangan SDM IT di Deputi Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan & Manajemen Risiko.

System Management Duties and Responsibilities

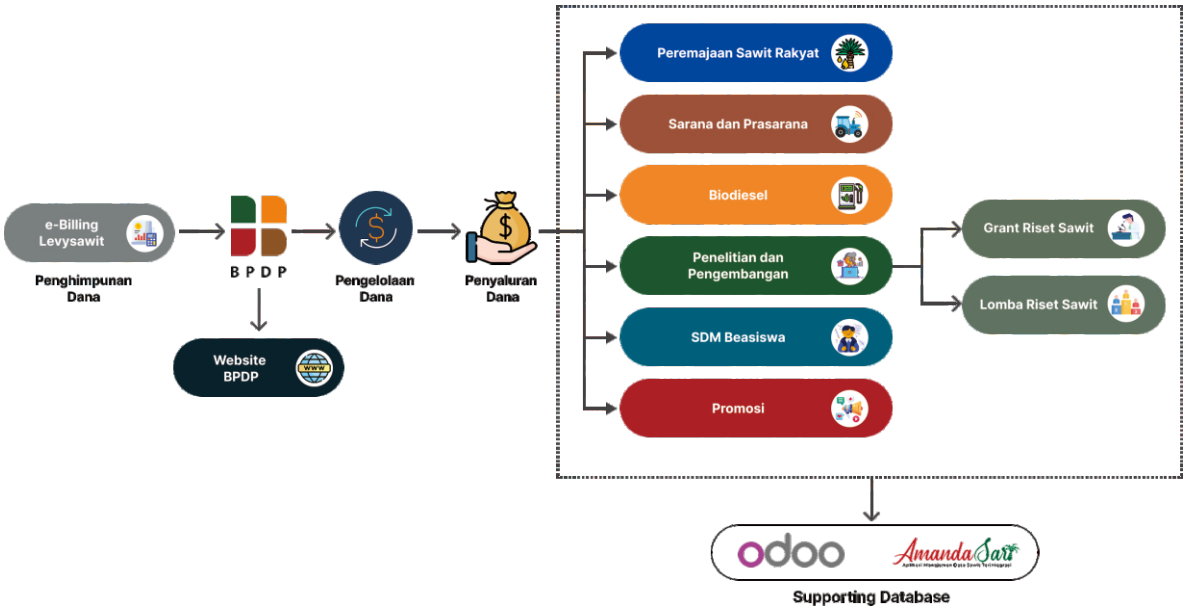
- Coordinating, establishing, and developing information system and electronic transaction which is integrated and covers all activities performed by BPDPKS;
- Coordinating the preparation of data/information required either for the purpose of registration of any transaction performed by BPDPKS or for supporting internal or external reporting
- requirements;
  Preparing the operation of hardware/cloud server for the applications and systems so as to
- make available for public and stakeholders;
  Providing and analyzing request of information
- technology requirement for each unit of BPDPKS;
  Providing and supporting the preparation of Hybrid Video Conference and design of
- marketing communication media;
  IT HR development in the Deputy Director of Finance, General Affairs, Compliance & Risk Management.

Roadmap Teknologi Informasi

Salah satu target utama yang ingin dicapai oleh BPDPKS dari penerapan Teknologi Informasi untuk tahun 2024 adalah peningkatan kualitas layanan TI, pemeliharaan sistem informasi/ infrastruktur TI, dan pengembangan beberapa sistem informasi yang terintegrasi. Teknologi Informasi BPDPKS akan selalu melakukan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam implementasinya dengan melihat perkembangan teknologi yang up-to-date terutama dalam aspek keamanan sistem Informasi.Gambar Model Sistem Pelayanan dari Divisi Pengelolaan Sistem informasi BPDPKS Tahun 2016-2024 adalah sebagai berikut:

Information Technology Roadmap

One of the main targets BPDPKS aims to achieve through the implementation of Information Technology in 2024 is the improvement of IT service quality, maintenance of information systems/IT infrastructure, and the development of several integrated information systems. BPDPKS Information Technology will continuously develop and evaluate its implementation by keeping up with up-to-date technological advancements, especially in aspects of information system security.The Service System Model from the BPDPKS Information Systems Management Division for the years 2016-2024 is as follows:



Penerimaan BLU

Sistem e-Billing Levysawit adalah sistem penerimaan BLU dari Levy sawit yang telah terintegrasi dengan Sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan juga untuk proses pembayarannya telah terkoneksi secara host-to-host dengan Bank Mitra (Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI).

Sistem Penyaluran Produk Hulu

a. Program Peremajaan Sawit Rakyat
b. Program Sarana dan PrasaranaProgram
c. Pengembangan SDM

Sistem Penyaluran Produk Hilir

a. Program Biodiesel
b. Program Penelitian dan Pengembangan (Riset)
c. Program Kemitraan / Promosi

Pencapaian Pengembangan Sistem Informasi BPDPKS Tahun 2024:

a. Telah mengimplementasikan Enterprise Resource Planning (ERP) ODOO di lingkungan kerja BPDPKS. Adapun modul yang telah digunakan adalah HRIS, Accounting, Inventory, Deposito, Arsip, Program Kerja dsb dengan menggunakan sistem ERP ini diharapkan agar dapat data-data dapat saling terintegrasi.
b. Telah melakukan upgrade dan mengimplementasikan sistem aplikasi e-Billing Levysawit versi 3.
c Telah melakukan upgrade sistem PSR dengan mengintegrasikan sistem aplikasi dengan Dukcapil dalam pengecekan nomor KTP/ NIK dan model penyaluran dengan Kemitraan.
d. Telah melakukan upgrade sistem aplikasi Program Riset BPDPKS.
e. Telah melakukan upgrade sistem Amandasari (Aplikasi Manajemen Data Sawit terintegrasi) dengan mengintegrasikan data-data modul Program Kerja ERP ODOO.
f. Telah melakukan upgrade service middleware dalam integrasi antar sistem dalam pengambilan data-data program.
g. Telah melakukan upgrade Infrastruktur dan Jaringan di kantor BPDPKS.

BLU Earnings

The e-Billing Levysawit system is a BLU receipt system from the palm levy integrated with the System at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Ministry of Finance and also connected host-to-host with Partner Banks (Bank Mandiri, Bank BRI, and Bank BNI) for the payment process.

Upstream Product Distribution System

a. Public Palm Rejuvenation Program
b. Facilities and Infrastructure Program
c. Human Resource Development Program

Downstream Product Distribution System

a. Biodiesel Program
b. Research and Development (R&D) Program
c. Partnership / Promotion Program

Achievements of Information System and Information Technology Development at BPDPKS in 2024

a. Implemented Enterprise Resource Planning (ERP) ODOO in the BPDPKS work environment. The modules used include HRIS, Accounting, Inventory, Deposits, Archives, Work Programs, etc. With this ERP system, it is expected that data can be integrated.
b. Upgraded and implemented the e-Billing Levysawit application version 3.
c Upgraded the PSR system by integrating the application system with Dukcapil for checking KTP/NIK numbers and the distribution model with Partnerships.
d. Upgraded the BPDPKS Research Program application system.
e. Upgraded the Amandasari system (Integrated Palm Data Management Application) by integrating data from the ERP ODOO Work Program modules.
f. Upgraded middleware services in system integration for data retrieval programs.
g. Upgraded Infrastructure and Network at the BPDPKS office.

Pencapaian support center bersama dengan Hai-DJPb

Pada tahun 2022 BPDPKS telah bergabung dengan call center hal ini sebagai tindak lanjut nota dinas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-1264/SJ.6/2022 serta dalam rangka pembahasan lebih lanjut terkait penggabungan pengelolaan contact center pada BLU lingkup DJPb denganlayanan contact center HAI-DJPb.

Kategori pengguna call center pada BPDPKS adalah stakeholder BPDPKS antara lain:

a. Penyedia barang dan jasa dan masyarakat umum untuk layanan Direktorat KUKMR;
b. Perbankan untuk layanan Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;
c. Eksportir, Ditjen Perkebunan dan Koperasi/ Kelompok penerima dana PSR untuk layanan Direktorat Penghimpunan Dana;
d. Kementerian ESDM, Periset Kelapa Sawit, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), Pertamina, Penerima Bea siswa untuk layanan Direktorat Penyaluran Dana;
e. Media, Lembaga perhimpunan kelapa sawit dan Usaha kecil dan Koperasi (UKM) Penerima Layanan Direktorat Kemitraan.

Kategori Layanan pada BPDPKS adalah

a. Layanan Umum pada BPDPKS

1. Layanan pengadaan barang dan jasa pada
2. BPDPKS
   Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di
3. BPDPKS
4. Layanan legal drafting perjanjian pada BPDPKS
5. Kebijakan SAP laporan BPDPKS
6. Konfirmasi pencairan dana di BPDPKS
   Pelaksanaan Auditor pada BPDPKS

b. Layanan Pengelolaan Dana pada BPDPKS

1. Layanan Rencana bisnis tahunan BPDPKS
2. Layanan Investasi di BPDPKS
3. Layanan amandasari

c. Layanan Kekurangan atau Kelebihan Bayar

1. Konfirmasi restitusi kelebihan bayar eksportir
2. Layanan aplikasi ebilling levi

Pencapaian support center bersama dengan Hai-DJPb

In 2022, BPDPKS joined call center as a follow-up of office memo of the Head of Communication and Information Service Bureau. Secretariat General of the Ministry of Finance number ND- 1264/SJ.6/2022 and for further discussion regarding incorporation of contact center management of DJPb Public Service Agency (BLU) to contact center service of HAI-DJPb.

Users category of call center of BPDPKS includes BPDKPKS stakeholders among others:

a. Supplier of goods and services as well as public society for the service of Directorate of Finance, General Affairs, Compliance, and Risk Management (KUKMR);
b. Banking for the service of Directorate of Fund Planning and Management;
c. Exporter, Directorate General of Plantation and Cooperative/PSR fund recipient group for the service of Directorate General of Fund Collection;
d. The Ministry of Energy and Mineral Resources, Oil Palm Researchers, Biofuel Business Entities (BUBBNs), Pertamina, Scholarship Awardee of the service of Directorate of Fund Disbursement;
e. Media, Association of oil palm and Small and Medium Enterprise (SMEs) and Cooperatives of Service Recipients of Directorate of Partnership.

Category of BPDPKS services are as follows:

a. Public services of BPDPKS

1. Service of goods and service procurement of BPDPKS
2. Policy of human resources management of BPDPKS
3. Legal agreement drafting service of BPDPKS
4. SAP policy of BPDPKS report
5. Confirm the disbursement of funds at the
6. BPDPKS
   Performance of Auditor of BPDPKS

b. Service for Fund Management of BPDKPS

1. Annual business plan services of BPDPKS
2. Investment Services of BPDPKS
3. Service of amandasari

c. Underpayment or Overpayment Services

1. Restitution confirmation of exporter's
2. overpayment
   E-billing levy application service

d. Layanan Penerima Dana PSR

1. Konfirmasi penyelesaian rekomtek PSR
2. Konfirmasi penyelesaian rekomtek Sarpras
3. Layanan PSR on line

e. Layanan Penerima Dana Riset

1. Konfirmasi penyelesaian proposal riset
2. Layanan kebijakan Riset padsa BPDPKS

f. Layanan Penerima Dana Bea Siswa

1. Layanan kebijakan Bea siswa
2. Layanan pembayaran mahasiswa penerima bea siswa

g. Layanan Penerima Dana Bio Diesel

1. Konfirmasi tagihan pembayaran selisih bayar biodiesel
2. Kebijakan pembayaran selisih bayar biodiesel

h. Layanan Media dan Kemitraan

1. Konfirmasi penyelesaian pengajuan proposal

Pola Proses Bisnis untuk call center BPDPKS adalah sebagai berikut:

d. Service for PSR Fund Recipient

1. Confirmation of technical recommendation completion of PSR (palm oil replanting) program
2. Confirmation of the completion of technical recommendation of facilities and infrastructure
3. Online PSR service

e. Service for Research Fund Recipient

1. Confirmation of research proposal completion
2. Service of Research policy of BPDPKS

f. Service for Scholarship Awardee

1. Scholarship policy services
2. Payment service for scholarship awardee

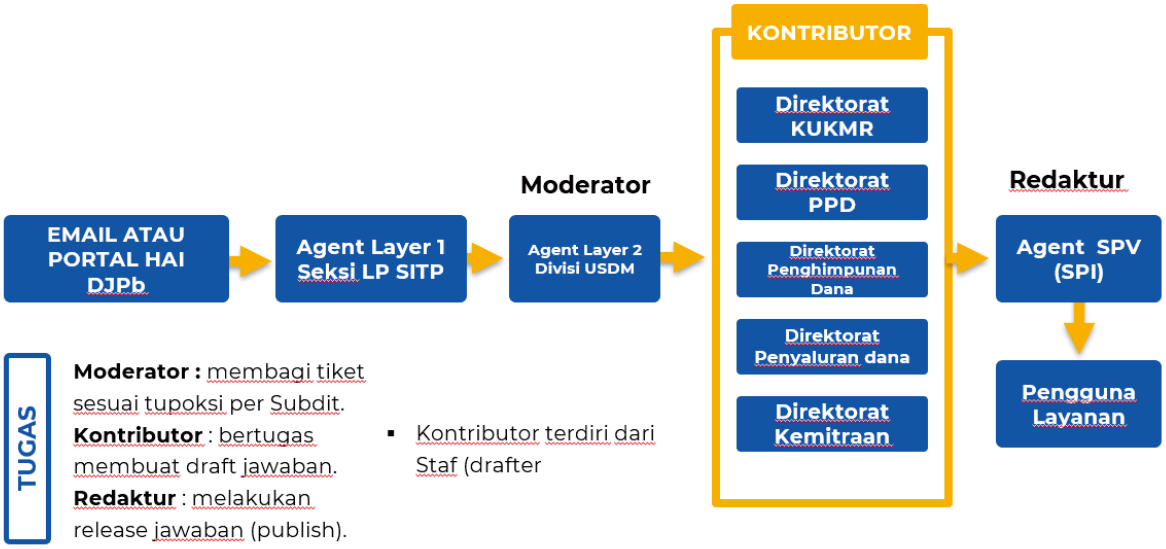
g. Service of Biodiesel Fund Recipient

1. Confirmation of biodiesel difference payment
2. Policy of biodiesel difference payment

h. Media and Partnership Service

1. Confirmation of proposal submission

Pattern of Business Process for call center of BPDPKS is in the following:



sarana konsultasi online melalui HAI DJPBN yang dapat di akses oleh Satker melalui sarana Internet, Smartphone dan E-mail . Anda dapat terhubung langsung dengan Agen kami di line 14090 pada jam kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

online consultation facilities by HAI DJPBN accessible for Work Unit (Satker) via internet, Smartphone, and E-mail. You may communicate directly with our Agent via line 14090 during working hours from 08:00AM to 04:00PM Western Indonesia Time (WIB)





Laporan Keuangan

Laporan Keuangan



7.1 Laporan Realisasi Anggaran

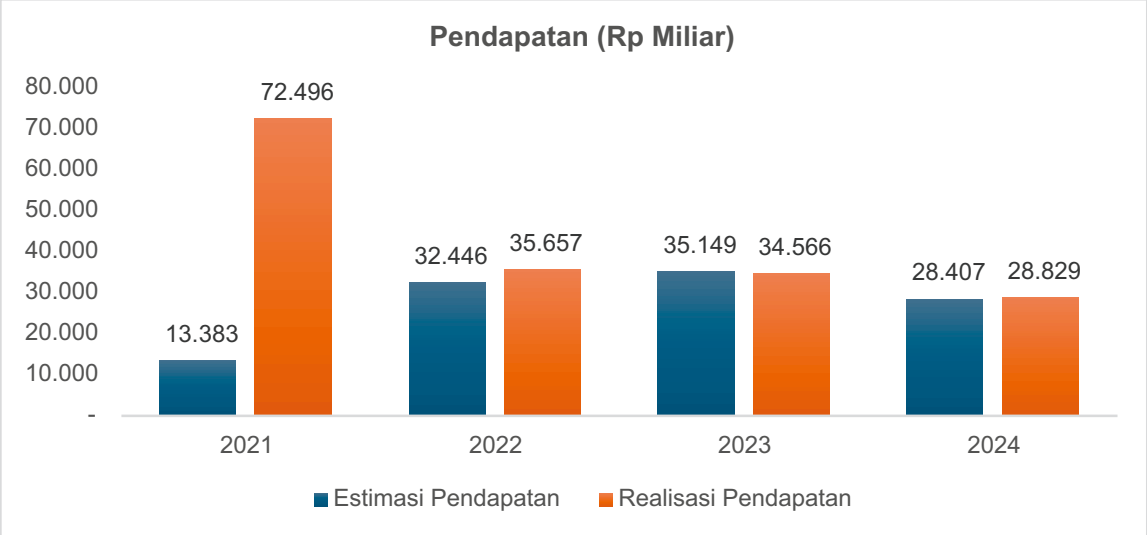
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp28.829.598.792.918,00 atau mencapai 101,49 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp28.407.197.000.000,00. Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp31.498.035.081.533,00 atau mencapai 99,46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.668.122.888.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp31.486.430.173.645,00 atau 99,66 persen dari anggarannya dan Belanja Modal sebesar Rp11.604.907.888,00 atau 15,7 persen dari anggarannya.

7.1 Budget Realization Report

The Budget Realization Report illustrates the comparison between the budget and its realization, covering the components of Revenue - LRA and Expenditure during the period from January 1 to December 31, 2024.The realization of State Revenue consists of Non-Tax State Revenue amounting to IDR 28,829,598,792,918.00, which is 101.49 percent of the estimated LRA Revenue of IDR 28,407,197,000,000.00. The realization of State Expenditure is IDR 31,498,035,081,533.00, which is 99.46 percent of the allocated budget of IDR 31,668,122,888,000.00. This total expenditure realization includes Goods Expenditure of IDR 31,486,430,173,645.00, or 99.66 percent of its budget, and Capital Expenditure of IDR 11,604,907,888.00, or 15.7 percent of its budget.

Revenue (Rp billion)



Estimated Revenue Actual Revenue

7.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2024. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal pada 1 Januari 2024 sebesar Rp37.586.966.198.378,00 dan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp2.668.436.288.615,00. Sedangkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp0. Tidak terdapat Penyesuaian SILPA/ SIKPA sehingga SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian sebesar Rp0.

Terdapat Koreksi Lain-lain berupa perubahan pada SUN kategori HTM menjadi AFS dan SUN HTM yang telah jatuh tempo sebesar Rp1.209.400.000.000,00 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp36,127,929,909,763,00.

7.2 Report on Changes in Excess Budget Balance

The Report on Changes in the Budget Surplus Balance presents information on the increase or decrease in the Budget Surplus Balance for the Fiscal Year 2024.The initial Budget Surplus Balance (SAL) on January 1, 2024, was IDR 37,586,966,198,378.00, with the usage of the Budget Surplus Balance amounting to IDR 2,668,436,288,615.00. The Remaining Surplus/Deficit in Budget Financing (SiLPA/SiKPA) was IDR 0. There were no adjustments to SiLPA/SiKPA, so the SiLPA/SiKPA after adjustment remains at IDR 0.There was another correction related to the change in SUN (Government Securities) category from HTM (Held-to-Maturity) to AFS (Available-for-Sale), along with the maturity of HTM SUN, amounting to IDR 1,209,400,000,000.00. As a result, the final Budget Surplus Balance on December 31, 2024, amounted to IDR 36,127,929,909,763.00.

Excess Budget Balance (Rp billion)



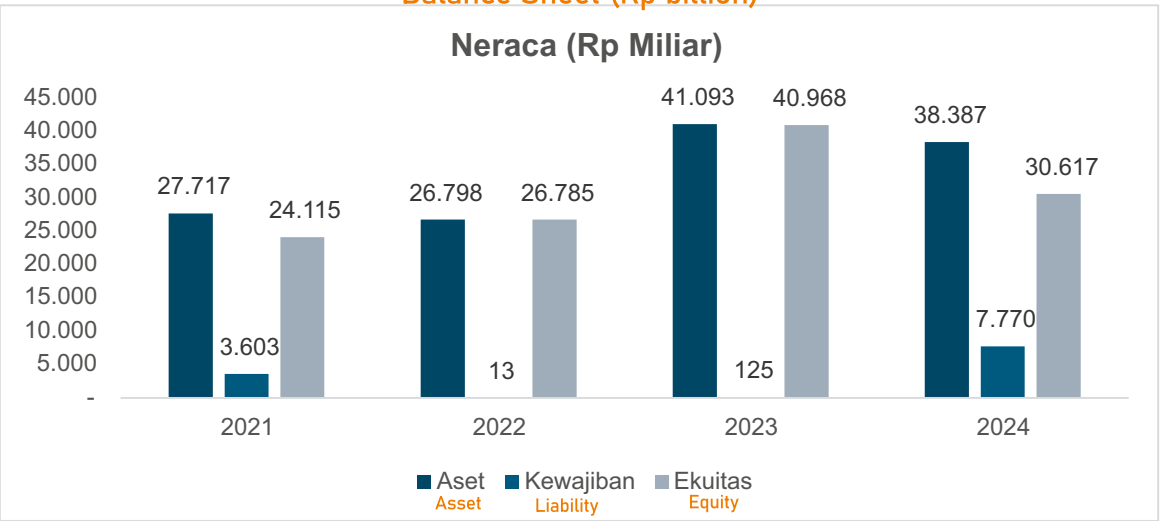
7.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp38.387.274.174.679,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp38.369.242.693.371,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp17.000.245.643,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.031.235.665,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.770.074.955.217,00 dan Rp30.617.199.219.462,00.

7.3 Balance Sheet

The Balance Sheet illustrates the financial position of the entity regarding assets, liabilities, and equity as of December 31, 2024. The value of assets as of December 31, 2024, is recorded and presented at IDR 38,387,274,174,679.00, which consists of: Current Assets amounting to IDR 38,369,242,693,371.00; Fixed Assets (net) amounting to IDR 17,000,245,643.00; and Other Assets (net) amounting to IDR 1,031,235,665.00. The values of Liabilities and Equity are IDR 7,770,074,955,217.00 and IDR 30,617,199,219,462.00, respectively.

Balance Sheet (Rp billion)



7.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31Desember 2024 adalah sebesar Rp28.680.143.906.641,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp39.116.710.776.306,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp10.436.566.869.665,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp112.826.660.843,00 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp10.323.740.208.822,00.

7.4 Operational Report

The Operational Report (LO) presents various components including LO revenue, expenses, surplus/deficit from operations, surplus/deficit from non-operational activities, surplus/deficit before extraordinary items, extraordinary items, and the final LO surplus/deficit, all of which are necessary for fair presentation.The LO revenue for the period up to December 31, 2024, amounts to IDR 28,680,143,906,641.00, while the total operational expenses are IDR 39,116,710,776,306.00, resulting in an Operational Deficit of IDR 10,436,566,869,665.00. The Surplus from Non-Operational Activities and Extraordinary Items are IDR 112,826,660,843.00 and IDR 0, respectively, leading to a final LO Deficit of IDR 10,323,740,208,822.00.

Operational (Rp billion)



7.5 Laporan Arus Kas

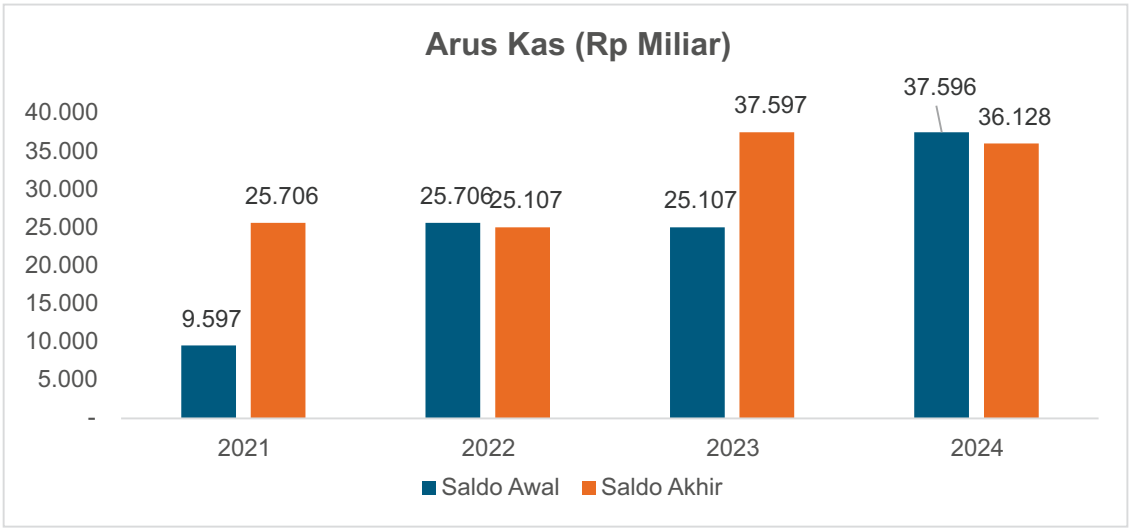
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2024. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar (Rp2.656.831.380.727,00); Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.197.795.092.112,00; Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(8.710.016.760,00). Saldo Awal Kas sebesar Rp37.596.511.576.651,00 terdapat Koreksi Saldo Kas sebesar Rp0 sehingga saldo Akhir Kas menjadi sebesar Rp36.128.765.271.276,00, terjadi Penurunan Kas sebesar Rp(1.467.746.305.375,00).

7.5 Cash Flow Statement

The Cash Flow Statement provides information about the sources, uses, and changes in cash and cash equivalents during the period from January 1 to December 31, 2024, as well as the cash and cash equivalents balance as of December 31, 2024. Cash inflows and outflows are classified based on operating, investing, financing, and transitional activities.The Net Cash Flow from Operating Activities is (IDR 2,656,831,380,727.00); the Net Cash Flow from Investing Activities is IDR 1,197,795,092,112.00; the Net Cash Flow from Financing Activities is IDR 0; and the Net Cash Flow from Transitional Activities is (IDR 8,710,016,760.00). The Beginning Cash Balance is IDR 37,596,511,576,651.00, with no Cash Balance Adjustment, resulting in an Ending Cash Balance of IDR 36,128,765,271,276.00, reflecting a Decrease in Cash of (IDR 1,467,746,305,375.00).

Cash Flow (Rp billion)



Initial Balance Final Balance

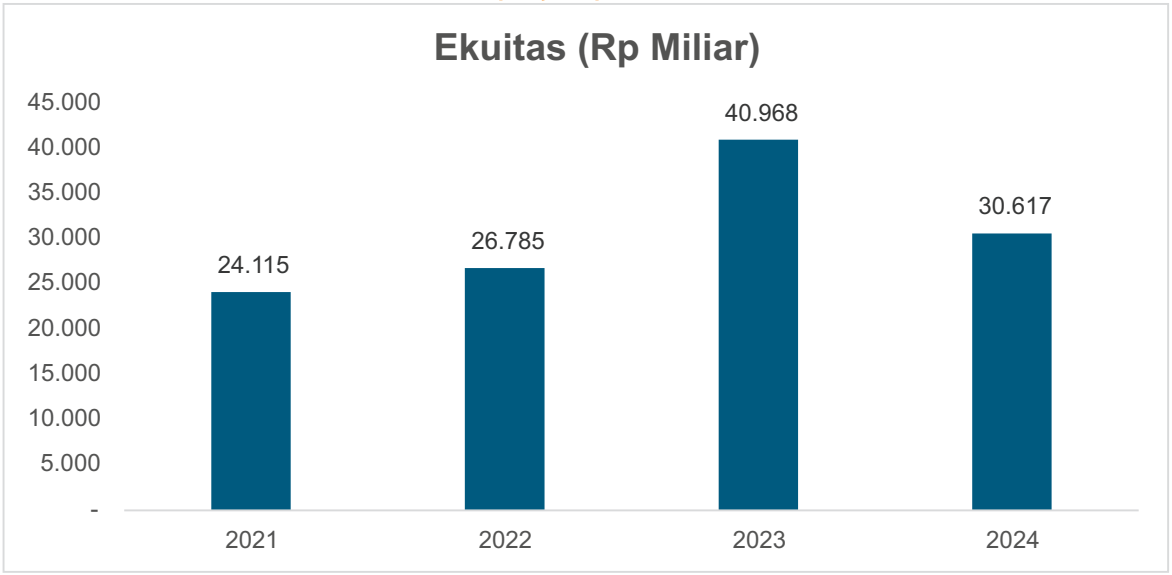
7.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp40.967.681.746.999,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp10.323.740.208.822,00. Terdapat Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar (Rp28.015.933.908,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.273.615.193,00. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp10.350.482.527.537,00 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp30.617.199.219.462,00.

7.6 Report on Changes in Equity

The Statement of Changes in Equity (LPE) presents information on the increase or decrease in equity for the reporting year compared to the previous year.The equity as of January 1, 2024, was IDR 40,967,681,746,999.00, reduced by the LO Deficit of IDR 10,323,740,208,822.00. There was a correction that either increased or decreased equity by (IDR 28,015,933,908.00), and inter-entity transactions amounted to IDR 1,273,615,193.00. As a result, equity decreased by IDR 10,350,482,527,537.00, bringing the ending equity balance on December 31, 2024, to IDR 30,617,199,219,462.00.

Equity (Rp billion)



7.7 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Perubahan Ekuitas periode Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

7.7 Notes to the Financial Statements

The Notes to the Financial Statements (CaLK) provide detailed explanations or analyses of the values of items presented in the Budget Realization Report, the Report on Changes in the Budget Surplus Balance, the Balance Sheet, the Operational Report, the Cash Flow Statement, and the Statement of Changes in Equity.The CaLK also includes the presentation of information required and recommended by Government Accounting Standards, as well as other disclosures necessary for a fair presentation of the financial statements.In the presentation of the Budget Realization Report and the Cash Flow Statement for the period ending on December 31, 2024, they are prepared and presented on a cash basis. Meanwhile, the Balance Sheet, Operational Report, Report on Changes in the Budget Surplus Balance, and Statement of Changes in Equity for the year 2024 are prepared and presented on an accrual basis.

Uraian Kegiatan	2021	2022	2023	2024
Biodiesel	51.951.617.007.640	34.735.911.799.651	18.501.217.993.134	29.382.827.271.376
Penelitian & Pengembangan	55.772.500.942	118.230.320.911	122.066.211.676	114.970.281.798
Promosi & Kemitraan Sawit	83.496.874.043	120.778.281.350	187.938.927.434	143.443.077.219
Peremajaan Sawit	1.341.787.655.325	1.053.640.756.406	1.715.643.219.297	1.295.525.985.288
Pengembangan SDM Sawit	64.559.840.897	96.372.252.516	149.750.436.022	314.355.314.454
Sarana dan Prasarana Sawit	8.982.839.634	34.962.716.375	67.990.676.497	126.230.771.909
Jumlah	**53.506.216.718.481**	**36.159.896.127.209**	**20.744.607.464.060**	**31.377.352.702.044**

Team Redaksi

Pengarah	:	**Eddy Abdurrachman**
Penanggung Jawab	:	**Zaid Burhan Ibrahim**
Ketua		**Adi Sucipto**
Wakil Ketua		**Achmad Maulizal**
Koordinator	:	**Decta Pitron Lugastoro**
Anggota	:	**Fiqih Yogantara**
	:	**Annisa Kartika Garini**
	:	**Gulfi Oktariani**
		Hero Dwi Afrisal
		Moch Annas KM
		Adi Prasetia
		Bryan Muhammad Tulloh Chaerand
		Rangga Pradipta
		Muhammad Rizki
		Muhamad Rahmat
		Mina Hidayah
		Deny Alvar
		Riyo Pramato
		Diete Patik



